



KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI



RPJMD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 - 2024



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2019 – 2024**

RPJMD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

**KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2019 – 2024**

**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2021**



QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disajikan kedalam sistem informasi (SIPD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
- Meningatkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

or f

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2034. (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2014)

✓ 1

Nomor 3);

26. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
27. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019-2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah WaliKota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
28. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
43. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
44. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
46. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
47. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

7

48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
51. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
52. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

- (1). RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Aceh serta memperhatikan RPJMD Kabupaten tetangga.
- (3). RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1). Sistematika RPJMD meliputi:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Subulussalam

BAB III	: Gambaran Keuangan Kota Subulussalam
BAB IV	: Permasalahan Dan Isu Strategis Kota Subulussalam
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Kota Subulussalam
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kota Subulussalam
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam
BAB IX	: Penutup

- (2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 4

- (1). Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2). Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3). Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
- (4). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1). Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2). Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2029 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Agustus 2021 M
24 Dzulhijjah 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Agustus 2021 M
24 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 – 2024

I. UMUM

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPK untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9).

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPK, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kota Subulussalam, serta memuat prioritas pembangunan Kota Subulussalam, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kota Subulussalam memiliki kurun waktu selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPK Tahun 2020;
- b. RKPK Tahun 2021;
- c. RPKK Tahun 2022;
- d. RKPK Tahun 2023; dan
- e. RKPK Tahun 2024.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota

4

Subulussalam, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di Kota Subulussalam. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Kota Subulussalam, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPK dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya, yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBK melalui mekanisme perubahan APBK (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kota Subulussalam dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Subulussalam dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

- a. penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Subulussalam yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan yang berbatasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 105

4 ↑



LAMPIRAN

QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 – 2024

RPJMD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

KOTA SUBULUSSALAM

TAHUN 2019 – 2024

**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	-----	i
DAFTAR TABEL	-----	v
DAFTAR GAMBAR	-----	xi
BAB	I	PENDAHULUAN-----
		I - 1
	1.1.	Latar Belakang-----
		I - 1
	1.2.	Dasar Hukum Penyusunan-----
		I - 3
	1.3.	Hubungan Antar Dokumen-----
		I - 6
	1.4.	Maksud dan Tujuan-----
		I - 12
	1.5.	Sistematika Penulisan-----
		I - 13
BAB	II	GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM-----
		II - 1
	2.1.	Aspek Geografi dan Demografi-----
		II - 4
	2.1.1.	Aspek Geografi-----
		II - 5
	2.1.1.1.	Luas dan Batas Wilayah Administrasi-----
		II - 5
	2.1.1.2.	Topografi-----
		II - 7
	2.1.1.3.	Klimatologi-----
		II - 9
	2.1.1.4.	Geologi dan Jenis Tanah-----
		II - 11
	2.1.1.5.	Hidrologi-----
		II - 14
	2.1.1.6.	Penggunaan lahan-----
		II - 17
	2.1.2.	Potensi Pengembangan wilayah-----
		II - 24
	2.1.3.	Wilayah Rawan Bencana-----
		II - 26
	2.1.4.	Demografi-----
		II - 29
	2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat-----
		II - 31
	2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi-----
		II - 32
	2.2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi-----
		II - 32
	2.2.1.2.	Laju Inflasi-----
		II - 38
	2.2.1.3.	Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan-----
		II - 40
	2.2.1.4.	Kemiskinan-----
		II - 40
	2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial-----
		II - 42
	2.2.2.1.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)-----
		II - 44
	2.2.2.2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah-----
		II - 45
	2.2.2.3.	Angka Harapan Hidup (AHH)-----
		II - 46
	2.2.2.4.	Angka Kematian Ibu (AKI)-----
		II - 48
	2.2.2.5.	Angka Kematian Bayi (AKB)-----
		II - 49
	2.2.2.6.	Angka Kematian Balita (AKBA)-----
		II - 50
	2.2.2.7.	Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)-----
		II - 51
	2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga-----
		II - 52
	2.2.3.1.	Seni Budaya-----
		II - 52
	2.2.3.2.	Cagar Budaya-----
		II - 53
	2.2.3.3.	Olahraga-----
		II - 53
	2.3.	Aspek Pelayanan Umum-----
		II - 53
	2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh-----
		II - 55
	2.3.3.1.	Pelaksanaan Syariat Islam-----
		II - 55
	2.3.3.2.	Pengembangan Syiar Islam-----
		II - 59
	2.3.3.3.	Sarana Dan Prasarana Peribadatan-----
		II - 60
	2.3.3.4.	Baitul Mal-----
		II - 62
	2.3.3.5.	Peranan Majelis Adat Daerah-----
		II - 67
	2.3.3.6.	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)-----
		II - 70
	2.3.3.7.	Pendidikan Dayah-----
		II - 74
	2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar-----
		II - 76

	2.3.2.1.	Urusan Pendidikan -----	II - 76
	2.3.2.2.	Urusan Kesehatan -----	II - 84
	2.3.2.3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-----	II - 99
	2.3.2.4.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat-----	II - 106
	2.3.2.5.	Urusan Sosial -----	II - 109
2.3.3.	Layanan	Urusan Wajib Non Dasar -----	II - 111
	2.3.3.1.	Urusan Tenaga Kerja-----	II - 111
	2.3.3.2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak -----	II - 114
	2.3.3.3.	Urusan Pangan-----	II - 116
	2.3.3.4.	Urusan Pertanahan-----	II - 117
	2.3.3.5.	Urusan Lingkungan Hidup-----	II - 119
	2.3.3.6.	Urusan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil -----	II - 121
	2.3.3.7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-----	II - 124
	2.3.3.8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana -----	II - 126
	2.3.3.9.	Urusan Perhubungan -----	II - 129
	2.3.3.10.	Urusan Komunikasi dan Informatika -----	II - 131
	2.3.3.11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah -----	II - 132
	2.3.3.12.	Urusan Penanaman Modal -----	II - 134
	2.3.3.13.	Urusan Kepemudaan dan Olah raga -----	II - 135
	2.3.3.14.	Urusan Kebudayaan -----	II - 136
	2.3.3.15.	Urusan Perpustakaan-----	II - 137
2.3.4.	Fokus layanan	Urusan Pilihan-----	II - 140
	2.3.4.1.	Urusan Pariwisata -----	II - 140
	2.3.4.2.	Urusan Pertanian -----	II - 141
	2.3.4.3.	Urusan Kehutanan -----	II - 147
	2.3.4.4.	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral -----	II - 148
	2.3.4.5.	Urusan Pertambangan dan Penggalian -----	II - 148
	2.3.4.6.	Urusan Perdagangan-----	II - 149
	2.3.4.7.	Urusan Perindustrian -----	II - 151
	2.3.4.8.	Urusan Transmigrasi-----	II - 152
2.3.5.	Penunjang	Urusan -----	II - 152
	2.3.5.1.	Urusan Perencanaan Pembangunan -----	II - 152
	2.3.5.2.	Urusan Keuangan -----	II - 154
	2.3.5.3.	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan -----	II - 154
	2.3.5.4.	Urusan Pengawasan-----	II - 156
	2.3.5.5.	Urusan Sekretariat Dewan -----	II - 156
2.4.	Aspek	Daya Saing-----	II - 156
	2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah-----	II - 157
	2.4.1.1.	Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Perkapita-----	II - 157
	2.4.1.2.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank -----	II - 158
	2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur -----	II - 159
	2.4.2.1.	Ketersediaan Daya Listrik -----	II - 159
	2.4.2.2.	Rasio ketergantungan-----	II - 161
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM -----	III - 1
	3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu Masa Lalu Periode Tahun 2015-2019 -----	III - 3

		3.1.1. kinerja Pelaksanaan APBK -----	III - 4
		3.1.1.1. Analisa Realisasi Pendapatan Daerah -----	III - 4
		3.1.1.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah -----	III - 11
		3.1.1.3. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2015-2019 -----	III - 12
		3.1.1.4. Pembiayaan Daerah -----	III - 18
		3.1.1.5. Neraca Daerah. -----	III - 20
	3.1.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. -----	III - 25
	3.1.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran -----	III - 26
	3.1.2.2.	Analisis Pembiayaan -----	III - 30
	3.2.	Kerangka Pendanaan -----	III - 34
	3.2.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja -----	III - 34
	3.2.1.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah -----	III - 35
	3.2.1.2.	Proyeksi Belanja Daerah -----	III - 43
	3.2.1.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah -----	III - 49
	3.2.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan -----	III - 54
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM -----	IV - 1
	4.1.	Permasalahan Pembangunan -----	IV - 1
	4.1.1.	Bidang Pemerintahan Umum -----	IV - 1
	4.1.2.	Bidang Sosial dan Budaya -----	IV - 4
	4.1.3.	Bidang Infrastruktur -----	IV - 5
	4.1.4.	Bidang Ekonomi -----	IV - 6
	4.1.5.	Bidang Keistimewaan Aceh -----	IV - 7
	4.2.	Lingkungan Strategis -----	IV - 7
	4.2.1.	Analisis Lingkungan Internal -----	IV - 7
	4.2.2.	Analisis Lingkungan Eksternal -----	IV - 8
	4.3.	Isu Strategis Pembangunan -----	IV - 28
	4.3.1.	Peningkatan kualitas, Pelayanan Pendidikan dan Sumber daya Manusia -----	IV - 32
	4.3.2.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan -----	IV - 34
	4.3.3.	Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan -----	IV - 35
	4.3.4.	Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal -----	IV - 38
	4.3.5.	Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik -----	IV - 49
	4.3.6.	Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami -----	IV - 55
	4.3.7.	Peningkatan kesejahteraan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) -----	IV - 56
	4.4.	Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	IV - 57
BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA SUBULUSSALAM -----	V - 1
	5.1.	Visi -----	V - 2
	5.2.	Misi -----	V - 2
	5.3.	Tujuan dan Sasaran -----	V - 7
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM -----	VI - 1
	6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan -----	VI - 1

BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM-----	VII – 1
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM -----	VIII - 1
BAB	IX	PENUTUP -----	IX - 1
	9.1.	Pedoman Transisi-----	IX - 1
	9.2.	Kaidah Pelaksanaan-----	IX - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2019-----	II - 7
Tabel 2.2.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2019 (Bulanan) -----	II - 10
Tabel 2.3.	Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2019-----	II - 18
Tabel 2.4.	Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2019-----	II - 30
Tabel 2.5.	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2019-----	II - 31
Tabel 2.6.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Laju Pertumbuhannya Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019 -----	II - 34
Tabel 2.7.	Presentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019 -----	II - 36
Tabel 2.8.	Laju Inflasi di Aceh Tahun 2010 – 2019 -----	II - 39
Tabel 2.9.	Indeks Gini Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 40
Tabel 2.10.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018 dan 2019 -----	II - 41
Tabel 2.11.	IPM Kota Subulussalam Menurut Komponen Tahun 2017-2019 -----	II - 43
Tabel 2.12.	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Subulussalam dan Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2019 -----	II - 47
Tabel 2.13.	Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 48
Tabel 2.14.	Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019 -----	II - 49
Tabel 2.15.	Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 51
Tabel 2.16.	Perkembangan Masalah Status Gizi Balita Kota Subulussalam (PSG 2015-2019) -----	II - 52
Tabel 2.17.	Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Syari'at Islam -----	II - 58

Tabel 2.18.	Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam Tahun 2014-2018 -----	II – 59
Tabel 2.19.	Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam Periode Tahun 2015-2017 -----	II – 61
Tabel 2.20.	Jumlah Masjid Dan Meunasah Dalam Kota Subulussalam Tahun 2014 s.d 2018 -----	II – 62
Tabel 2.21.	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2018 -----	II – 64
Tabel 2.22.	Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Kota Subulussalam Tahun 2016 - 2018 -----	II – 65
Tabel 2.23.	Kegiatan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam Periode Tahun 2014 - 2018 -----	II – 72
Tabel 2.24.	Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kota Subulussalam Tahun 2014-2019 -----	II – 75
Tabel 2.25.	Jumlah Balai Pengajian, Guru dan Santri di Kota Subulussalam Tahun 2018 dan 2019 -----	II – 75
Tabel 2.26.	Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019-----	II - 77
Tabel 2.18.	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 77
Tabel 2.19.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KotaSubulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 78
Tabel 2.20.	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015- 2019-----	II - 79
Tabel 2.21.	Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid/SiswaTahun 2015 – 2019 -----	II - 82
Tabel 2.22.	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 - 2019 -----	II - 83
Tabel 2.23.	Angka Kematian Ibu di Kota Subulussalam Tahun 2015- 2019 -----	II - 85
Tabel 2.24.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 86
Tabel 2.25.	Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 87
Tabel 2.26.	Rasio posyandu per satuan balita tahun 2015-2019 Kota Subulussalam -----	II - 88
Tabel 2.27.	Rasio puskesmas, klinik, poskesdes dan Rumah sakit per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 89
Tabel 2.28.	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 91

Tabel 2.29.	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 94
Tabel 2.30.	Cakupan Balita Gizi Buruk Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam -----	II - 95
Tabel 2.31.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam -----	II - 97
Tabel 2.32.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam-----	II - 98
Tabel 2.33.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam -----	II - 99
Tabel 2.34.	Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2019 -----	II - 100
Tabel 2.35.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota SubulussalamTahun 2016 – 2019 -----	II - 101
Tabel 2.36.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019-----	II - 104
Tabel 2.37.	Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 105
Tabel 2.38.	Persentase Rumah Tinggal Tidak Layak Huni Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019-----	II - 106
Tabel 2.39.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 108
Tabel 2.40.	cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>) BPBD Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019 -----	II - 109
Tabel 2.41.	Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019-----	II - 110
Tabel 2.42.	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019-----	II - 113
Tabel 2.43.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 115
Tabel 2.44.	Ketersediaan Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 117
Tabel 2.45.	Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019-----	II - 118
Tabel 2.46.	Data Kualitas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2019 ----	II - 121
Tabel 2.47.	Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 122
Tabel 2.48.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019 -----	II - 123

Tabel 2.49.	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019-----	II - 124
Tabel 2.50.	Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 125
Tabel 2.51.	Jumlah Posyandu Aktif di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 126
Tabel 2.52.	Rasio Akseptor KB dan Jumlah pasangan usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 128
Tabel 2.53.	Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan MenikaUsia 15 – 49 di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 128
Tabel 2.54.	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019-----	II - 130
Tabel 2.55.	Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2015– 2017 -----	II - 132
Tabel 2.56.	Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 -----	II - 133
Tabel 2.57.	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2015 - 2019 Kota Subulussalam -----	II - 134
Tabel 2.58.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019-----	II - 137
Tabel 2.59.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 140
Tabel 2.60.	Nama dan Lokasi Objek Wisata Yang ada di Kota Subulussalam Tahun 2019-----	II - 140
Tabel 2.61.	Jumlah luas Panen, luas tanam, produksi dan Pruktivitas Tanaman PanganUtama di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 ----	II - 142
Tabel 2.62.	Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Unggulan Perkebunan di Kota Subulussalam tahun 2015-2019-----	II - 144
Tabel 2.63.	Populasi Ternak di Kota Subulussalam Pada Tahun 2015-2019 -----	II - 145
Tabel 2.64.	Produksi Ikan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 146
Tabel 2.65.	Luas Kawasan Hutan di Kota Subulussalam -----	II - 147
Tabel 2.66.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Subulussalam -----	II - 148
Tabel 2.67.	Perusahaan Pertambangan di Kota Subulussalam Tahun 2019 -----	II – 149
Tabel 2.68.	Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2019-----	II - 150
Tabel 2.69.	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019 -----	II - 150

Tabel 2.70.	Banyaknya Industri Menurut Jenisnya Diperinci Per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017 -----	II - 151
Tabel 2.71.	Beberapa Dokumen Perencanaan Daerah Kota Subulussalam -----	II - 153
Tabel 2.72.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum di Kota Subulussalam Tahun 2017-2019 (Rp, 000) -----	II - 169
Tabel 2.73.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 160
Tabel 2.74.	Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 162
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam -----	III - 6
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam -----	III - 13
Tabel 3.3.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 19
Tabel 3.4.	Neraca Pemerintah Kota Subulussalam per 31 Desember Tahun 2015 s/d 2019 -----	III - 21
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kota Subulussalam Tahun 2016 s/d 2019 -----	III - 24
Tabel 3.6.	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 28
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam -----	III - 29
Tabel 3.8.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam -----	III - 30
Tabel 3.9.	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 31
Tabel 3.10.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam -----	III - 31
Tabel 3.11.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 33
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2020 s/d Tahun 2024 -----	III - 42
Tabel 3.13.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (dalam rupiah) -----	III - 48
Tabel 3.14.	Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 -----	III - 50
Tabel 3.15.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020 - 2024 -----	III - 51
Tabel 3.16.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Subulussalam -----	III - 56

Tabel 3.17.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Subulussalam-----	III - 58
Tabel 4.1.	Rumusan Permasalahan: Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan -----	VI - 18
Tabel 4.2.	Rumusan Permasalahan: Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan Penataan Ruang -----	VI - 20
Tabel 4.3.	Rumusan Permasalahan: Inovasi Dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan-----	VI - 22
Tabel 4.4.	Rumusan Permasalahan: Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) masih belum sesuai harapan -----	VI - 24
Tabel 4.5.	Rumusan Permasalahan: Penerapan Syari'at Islam dalam sistem sosial kehidupan masyarakat masih perlu di tingkatkan-----	VI - 27
Tabel 4.6.	Identifikasi Isu-Isu Strategis -----	VI - 29
Tabel 5.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 Berdasarkan Misi -----	V - 17
Tabel 6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2019-2024 -----	VI - 5
Tabel 6.2.	Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam, 2019-2024 -----	VI - 11
Tabel 6.2a.	10 Program Unggulan Subulussalam BISA -----	VI - 12
Tabel 6.2b.	Strategi Pencapaian 10 Unggulan Subulussalam Bisa -----	VI - 13
Tabel 6.3.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2020 -----	VI - 14
Tabel 6.3a.	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2024 -----	VI - 26
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	VII - 2
Tabel 7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020-2024-----	VII - 4
Tabel 7.2a.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020-2024-----	VII - 22
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	VIII - 2
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan -----	VIII - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan -----	I - 10
Gambar 1.2.	Peran dan Fungsi DPRK Dalam Penyusunan RPJMD-----	I - 11
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Subulussalam-----	II - 6
Gambar 2.2.	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Dalam Wilayah Kota Subulussalam -----	II - 6
Gambar 2.3.	Peta Geologi di Kota Subulussalam -----	II - 12
Gambar 2.4.	Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam -----	II - 13
Gambar 2.5.	Peta Hidrologi di Kota Subulussalam -----	II - 16
Gambar 2.6.	Peta CAT di Kota Subulussalam -----	II - 17
Gambar 2.7.	Peta Tutupan Lahan di Kota Subulussalam -----	II - 19
Gambar 2.8.	Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam -----	II - 29
Gambar 2.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Subulussalam Tahun 2016-2019 -----	II - 33
Gambar 2.10.	PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran (Juta Rp) Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	II - 38
Gambar 2.11.	Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun, 2015-2019 -----	II - 41
Gambar 2.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Subulussalam, 2015-2019. -----	II - 42
Gambar 2.13.	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2016-2019.-----	II - 44
Gambar 2.14.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2016-2019. -----	II - 46
Gambar 2.15.	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota SubulussalamTahun 2015-2019.-----	II - 50
Gambar 2.16.	Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Menurut JenisKelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2019. -----	II - 114
Gambar 2.17.	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam, 2019.-----	II - 155
Gambar 2.18.	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun (Juta Rp) Kota Subulussalam Tahun 2015-2019.-----	II - 157

Gambar 2.19.	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun (%), 2015-2019. -----	II - 158
Gambar 3.1.	Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)-----	III - 5
Gambar 3.2.	Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (%)-----	III - 5
Gambar 3.3.	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019-----	III - 8
Gambar 3.4.	Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 9
Gambar 3.5.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019-----	III - 9
Gambar 3.6.	Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019-----	III - 10
Gambar 3.7.	Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019 -----	III - 14
Gambar 3.8.	Persentase Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2019 -----	III - 15
Gambar 3.9.	Proporsi Komponen Belanja Langsung Terhadap total Belanja Langsung Tahun 2015-2019 -----	III - 15
Gambar 3.10.	Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015-2019 -----	III - 16
Gambar 3.11.	Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019-----	III - 17
Gambar 3.12.	Persentase Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	III - 17
Gambar 3.13.	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah -----	III - 27
Gambar 4.1.	Gambaran Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Subulussalam-----	IV - 15
Gambar 4.2.	PDRB Per Kapita Kota Subulussalam ADHB dan ADHK dalam juta rupiah Tahun 2019 – 2019 -----	IV - 39
Gambar 4.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 -----	IV - 41
Gambar 4.4.	Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	IV - 57
Gambar 5.1.	Misi Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam -----	V - 2
Gambar 5.2.	Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	V - 8

Gambar 5.3.	Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	V - 10
Gambar 5.4.	Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	V - 11
Gambar 5.5.	Penjabaran Misi 4, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	V - 13
Gambar 5.6.	Penjabaran Misi 5, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 -----	V - 14
Gambar 5.7.	Mewujudkan penerapan syariat Islam melalui pengaturan Sistem Sosial yang Berbasis Islam dalam Kehidupan-----	V - 15
Gambar 6.1.	Agenda/Tema RPJMD Kota Subulussalam 2019-2024-----	VI - 3



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran secara rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya Kota Subulussalam untuk masa lima tahun yang akan datang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan, agar masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerahnya untuk masa lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Proses pemilihan kepala daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 yang telah menghasilkan kepala daerah terpilih dan telah dilantik tanggal 14 Mei 2019, maka Kepala Daerah terpilih harus menyusun RPJM Kota Subulussalam Periode 2019 - 2024. RPJM Kota Subulussalam ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2019 - 2024 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035, hasil evaluasi RPJM Kota Subulussalam periode 2014-2019 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam didasarkan pada aspirasi dan keinginan masyarakat daerah yang dijangkau melalui beberapa kali lokakarya di daerah dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif, ilmuwan serta tokoh agama, dunia usaha dan pemuka masyarakat. Proses penyusunan RPJMD Kota Subulussalam dilakukan melalui 4 tahapan yaitu : (a) Penjangkauan aspirasi masyarakat tentang visi dan misi daerah, (b) Penyusunan Rancangan RPJMD



Kota Subulussalam, (c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan (d) Penetapan RPJMD Kota Subulussalam 2019 – 2024 oleh DPR Kota Subulussalam.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 dilandasi oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2034. (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);
26. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
27. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Kota Subulussalam sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Selanjutnya, RPJM Kota Subulussalam dijabarkan menjadi Renstra Perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan RKPK dan Rencana Kerja Perangkat Kota Subulussalam.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD. Lebih

lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 260 mengamanatkan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adapun teknis pembuatan dan pelaksanaan KLHS sudah diintegrasikan dalam RPJM Kota Subulussalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada Permendagri ini mengamanatkan bahwa KLHS RPJM Kota Subulussalam dikerjakan bersama dengan penyusunan RPJM Kota Subulussalam, dikerjakan bersama dengan dokumen perencanaan disusun untuk memperkaya dokumen perencanaan, dan bertujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJP, RTRW, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

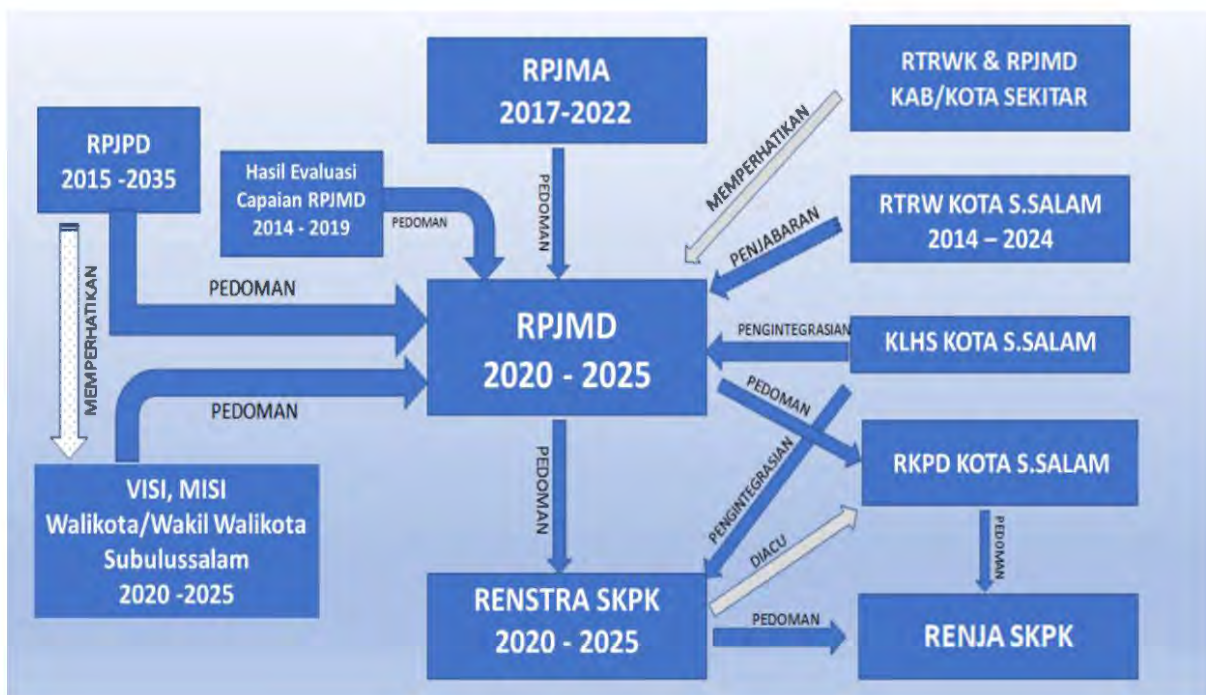
1. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019); Visi dan Misi dalam RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 selaras dengan Visi, Misi, dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini.
2. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RPJM Aceh; Visi dan Misi dalam RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 selaras dengan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJM Aceh yang berlaku saat ini.
3. Hubungan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 dengan RPJP Kota Subulussalam (Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035); RPJM Kota Subulussalam berpedoman pada RPJP Kota Subulussalam. RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 menjabarkan

prioritas pembangunan Tahap II pada RPJP Kota Subulussalam (Tahun 2020-2024).

4. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RTRW Kota Subulussalam (Qanun Nomor 3 Tahun 14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2024); Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2024.
5. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RKPK; RPJM Kota Subulussalam dijabarkan ke dalam RKPK sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPK sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJM Kota Subulussalam pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBK, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBK untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RKPK yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJM Kota Subulussalam.
6. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Rencana Strategis SKPK (Renstra-SKPK); RPJM Kota Subulussalam menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPK dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-

SKPK merupakan penjabaran teknis RPJM Kota Subulussalam yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPK di bawah koordinasi Bappeda.

7. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Rencana Pembangunan Sektoral; Penyusunan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRK untuk RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 serta Rekomendasi Musrenbang RPJM Kota Subulussalam Tahun 2020-2024. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Aceh antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).
8. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) di RPJM Kota Subulussalam “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, diperlukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Dalam hal ini, KLHS juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

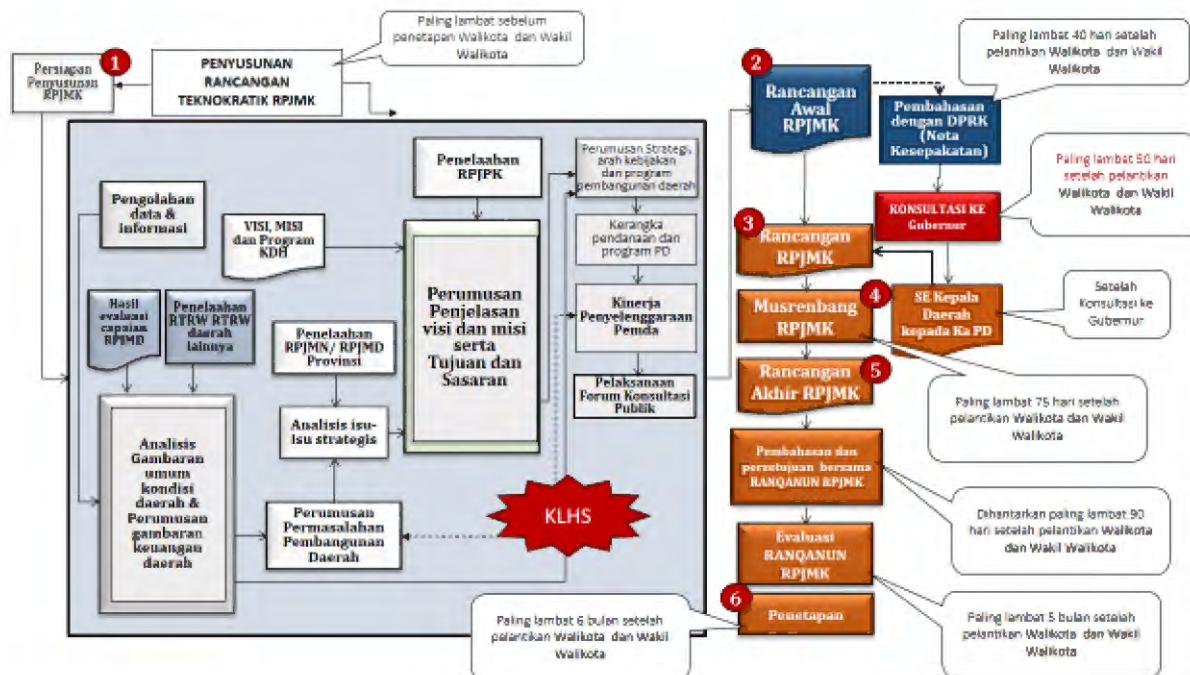


Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Hubungan antara RPJMD Kota Subulussalam dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan kerangka dasar bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menelaah dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam.
2. Dokumen RPJMD dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Subulussalam yang dilakukan setiap tahun dan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Selanjutnya kita melihat peran dan fungsi yang dimiliki DPRK Subulussalam sebagaimana ditunjukkan gambar berikut :



Sumber : Permendagri 86, 2017

Gambar 1.2. Peran dan Fungsi DPRK Dalam Penyusunan RPJMD

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa sebelum disahkan menjadi Qanun Kota Subulussalam tentang RPJMD, maka terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan DPRK. Pembahasan tersebut akan merumuskan kebijakan umum dan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan, kemudian ditentukan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pagu perprogram setiap SKPK selama 5 (lima) tahun dan hasilnya akan menetapkan indikator kinerja daerah selama periode 2020–2025.

RPJMK Kota Subulussalam sebagai terjemahan dari visi dan misi Walikota periode 2019 - 2024, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMA Tahun 2017-2022, dimana Visi Pembangunan Pemerintah Aceh pada periode tahun 2017-2022 adalah *“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”*. Selanjutnya RPJM Kota Subulussalam 2019 - 2024 berpedoman pada RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035. Adapun penekanan pada RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah: (1) Mewujudkan Pendidikan Yang

Berkualitas; (2) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas; (3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat; (4) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomi dan Prospek Pasar Yang Baik; (5) Mewujudkan Pemerintahan Baru, Profesional dan Transparan; (6) Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Penguatan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat. RPJMK Kota Subulussalam selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2020 – 2024 ikut memperhatikan keterkaitan RPJM Kabupaten tetangga. Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Singkil yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan Kota Subulussalam. Visi RPJMK Aceh Selatan 2018-2023 adalah *“Terwujudnya Aceh Selatan Yang Berkeadilan Secara Sosial Dan Ekonomi”*. Berdasarkan pada visi tersebut dapat di tarik beberapa keyword utama, yaitu ‘Berkeadilan’, dan “Sosial serta Ekonomi”. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2019 -2024 juga mempedomani dokumen RTRWK Kota Subulussalam dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM Kota Subulussalam 2019-2024 adalah:

1. Untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Kemudian menjadi pedoman jangka menengah bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (SKPK) dalam lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.

Tujuan penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RPJM Kota Subulussalam 2019-2024 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat yang Islami dan tangguh;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Kota Subulussalam, dan perencanaan serta penganggaran;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM

Dalam bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah sebagai dasar utama penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM



BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI KOTA SUBULUSSALAM

Kisah Kota Subulussalam bermula sejak periode penamaan tatkala pemberian nama “Subulussalam” pada tanggal 14 September 1962. Nama Subulussalam diberikan oleh ulama kharismatik yang sekaligus Gubernur Aceh pada waktu itu yaitu Alm. Prof. Ali Hasyimi pada saat berkunjung ke daerah Subulussalam. Nama subulussalam diambil dari bahasa arab yang berarti jalan menuju kedamaian/kesejahteraan. Pada waktu itu Subulussalam menjadi Ibukota Kecamatan Simpang Kiri yang tergabung dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Selatan.

Pemberian nama Subulussalam mengandung makna ibadah, yang tujuan pemberian nama itu dicita-citakan bahwasanya Subulussalam akan menjadi Kota Ibadah. Pemberian nama seperti Subulussalam ini juga dilakukan oleh Gubernur Aceh Alm. Prof. Ali Hasyimi pada daerah-daerah perbatasan lainnya di Daerah Istimewa Aceh pada waktu itu yaitu Babussalam di Kabupaten Aceh Tenggara, Nurrussalam di Kabupaten Aceh Timur (Sekarang Aceh Tamiang).

Kita pantas bertanya apakah makna Gubernur Aceh Alm. Prof. Ali Hasyimi memberikan nama Subulussalam, Babussalam dan Nurussalam pada waktu itu? Jawabannya tidak lain adalah bahwa di daerah-daerah perbatasan Daerah Istimewa Aceh akan dijadikan sebagai kota ibadah yang berlandaskan Syari’at Islam. Dengan simbol nama-nama tersebut kota-kota kecil yang diberikan nama ke Islaman itu akan tumbuh berkembang syari’at Islam yang sinarnya akan sampai ke Darussalam di Banda Aceh. Ini menjadi semacam hubungan batin yang erat dalam konteks ke-Aceh-an.

Memetik rangkaian kisah tersebut sejak tahun 1962 sampai dengan 1999, maka pada kurun waktu tersebut kita harus mengakui bahwasanya sejak NAMA SUBULUSSALAM diberikan dan ditabalkan maka Subulussalam menunjukkan kemajuan dan perkembangannya melebihi perkembangan kota-kota lainnya

yang berada Kabupaten Aceh Selatan. Penamaan itu juga melecut semangat dan menjadi simbol untuk proses perkembangan Subulussalam berikutnya menjadi daerah otonom.

Kisah Kota Subulussalam periode pembentukan sebagai daerah otonom, bermula sejak tanggal 27 April 1999 dimana saat itu terjadi pemekaran Kabupaten Aceh Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan. Pada saat itu terjadi perebutan ibukota antara masyarakat Kecamatan Singkil dengan masyarakat Kecamatan Simpang kiri dimana kedua kelompok masyarakat tersebut menginginkan ibukota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil dan di Subulussalam. Dalam perebutan ibukota ini diwarnai gelombang unjuk rasa ribuan orang masyarakat Kecamatan Simpang Kiri yang tidur dijalanan untuk menghalangi rombongan Gubernur Aceh pada waktu itu (Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud) yang menuju ke Singkil untuk meresmikan Kabupaten Aceh Singkil dengan ibukotanya di Singkil.

Dengan dilandasi musyawarah dan mufakat akhirnya aksi unjuk rasa tersebut dapat diredam dengan baik oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat dan ulama-ulama pada waktu itu. Salah satu mufakat pada waktu itu adalah bahwa Subulussalam nantinya akan dijadikan juga sebagai daerah otonom seperti Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam proses menuju ke arah terbentuk sebuah daerah otonom diperlukan persyaratan secara fisik yaitu wilayah yang akan dijadikan sebagai daerah otonom tersebut minimal terdiri dari 4 Kecamatan. Dengan dilandasi semangat kebersamaan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka proses tersebut dimulai dengan baik dan sempurna dimana semula Subulussalam menjadi ibukota dari Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Simpang Kiri merupakan salah satu Kecamatan dari 4 Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Aceh Singkil maka demi menuju cita-cita untuk menjadi sebuah daerah otonom wilayah Kecamatan Simpang Kiri dimekarkan menjadi 7 Kecamatan.

Kronologis pembentukan Kecamatan-Kecamatan Eks. Simpang Kiri dimulai pada tahun 2000 dimana Kecamatan Simpang Kiri dimekarkan dengan Pembentukan Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri



terpecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Simpang Kiri. Kemudian pada Tahun 2001 terjadi lagi pemekaran dari kecamatan Simpang Kiri sebanyak 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Penanggalan, Kota Baharu dan Kecamatan Sultan Daulat sehingga wilayah Simpang Kiri terpecah menjadi menjadi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Sultan Daulat. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2002 terjadi lagi pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu pembentukan Kecamatan Singkohor sebagai pemekaran dari Kecamatan Kota Baharu sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Singkohor. Dan terakhir pada awal tahun 2005 terjadi pemekaran Kecamatan yang berasal dari wilayah Kecamatan Simpang Kiri sebanyak 1 Kecamatan yaitu dengan pembentukan Kecamatan Longkib sebagai pemekaran dari Kecamatan Rundeng sehingga wilayah Kecamatan Simpang Kiri terpecah menjadi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Rundeng, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Longkib.

Dengan demikian dalam pemekaran Kecamatan Simpang Kiri yang terjadi pada kurun waktu 1999-2005 terpecah menjadi 7 Kecamatan dan dengan terjadinya pemekaran Kecamatan-Kecamatan tersebut secara fisik wilayah Subulussalam telah memenuhi persyaratan untuk membentuk daerah otonom Kabupaten atau Kota sehingga pada akhir tahun 2002 memunculkan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat untuk membentuk Kota Subulussalam sebagai Pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Sejak saat itu proses pembentukan Kota Subulussalam dimulai, ditandai dengan dibentuknya Panitia Persiapan Pembentukan Kota Subulussalam yang dipimpin oleh H. Asmauddin, SE. Kemudian panitia tersebut melalui spirit kebersamaan dengan berbagai komponen masyarakat mengumpulkan dukungan-dukungan kemauan politik masyarakat untuk membentuk Kota Subulussalam dengan bentuk dukungan dengan membuat pernyataan tertulis

yang ditandatangani oleh berbagai komponen dari seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kota Subulussalam baik dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, partai politik, organisasi kepemudaan serta organisasi keagamaan.

Langkah berikutnya dengan semangat kebersamaan pula, maka tuntutan masyarakat untuk membentuk Kota Subulussalam juga direspons secara positif oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (dibawah kepemimpinan Alm. H. Makmursyah Putra, SH) dan DPRD Aceh Singkil (dibawah kepemimpinan Alm. H. Usman Arifin, SH), dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah memberikan dukungan melalui Surat Bupati Aceh Singkil Nomor : 146.1/2520/2002 Tentang Dukungan Pembentukan Kota Subulussalam, sementara pihak DPRD Aceh Singkil juga memberikan dukungan melalui Keputusan Ketua DPRD Aceh Singkil Nomor : 13/KPTS/DPRD/2002 Tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kota Subulussalam Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.

Setelah melalui berbagai perjuangan yang sangat panjang dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan yang tinggi, sikap saling menghargai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya maka pada tanggal 2 januari 2007 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 atau ± 5 Tahun sejak muncul tuntutan pemekaran akhirnya lahirlah ke Bumi Pertiwi **KOTA SUBULUSSALAM**. Dan pada tanggal 15 Juni 2007 Kota Subulussalam diresmikan pemerintahannya oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Bapak Widodo AS di Banda Aceh sekaligus pelantikan Penjabat Walikota yang pertama yaitu H. Asmauddin, SE.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Subulussalam merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang masih relatif muda juga mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional menghubungkan kota-kota di pantai Barat Provinsi Aceh dan merupakan pintu masuk ke Aceh dari sebelah selatan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Karakteristik Kota Subulussalam ditinjau dari aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

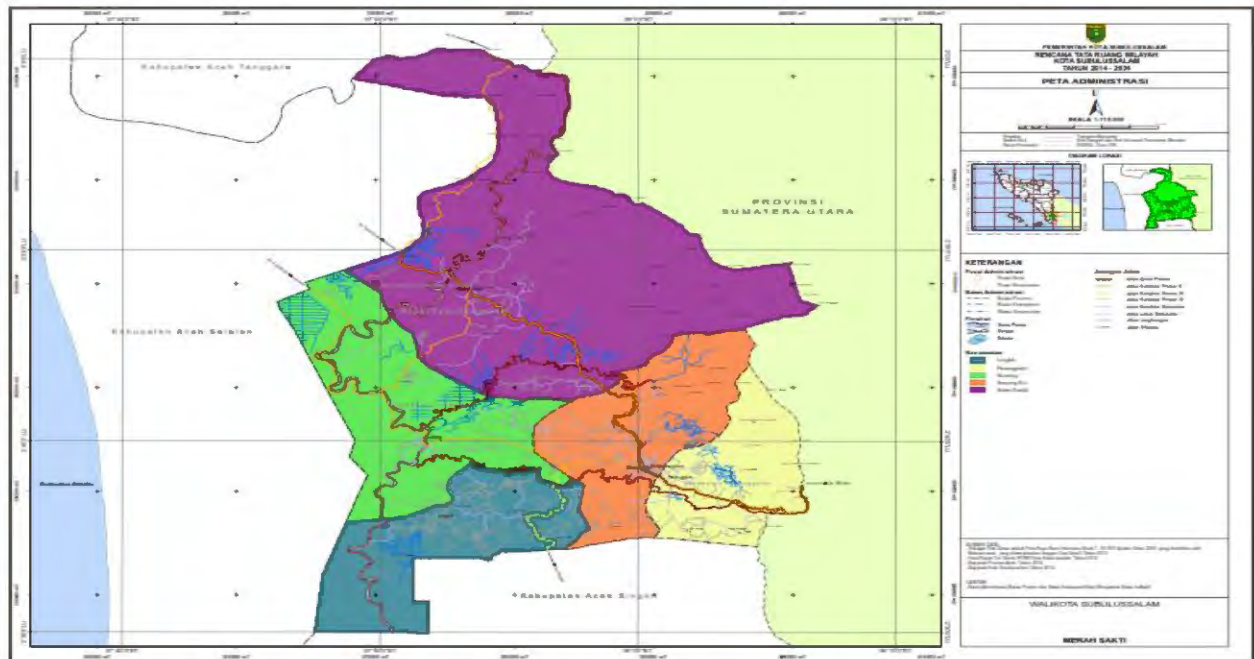
Secara geografis, wilayah Kota Subulussalam memiliki beberapa karakteristik. Pertama, secara umum kondisi tanah Kota Subulussalam tergolong subur sehingga dimungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Namun, masing-masing Kecamatan memiliki potensi alam yang berbeda karena wilayah Kota Subulussalam memiliki bentang alam yang terdiri dari pegunungan/perbukitan, dataran rendah, dan wilayah aliran sungai.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kota Subulussalam terletak diantara 2° 27' 30" - 3° 00' 00" LU dan 97° 45' 00' - 98° 10' 00" BT dengan luas wilayah 118.404,48 Ha (RTRW Kota Subulussalam 2014-2034). sedangkan secara geografis Kota Subulussalam berada di bagian Paling selatan Provinsi Aceh Secara administratif, wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada dibagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

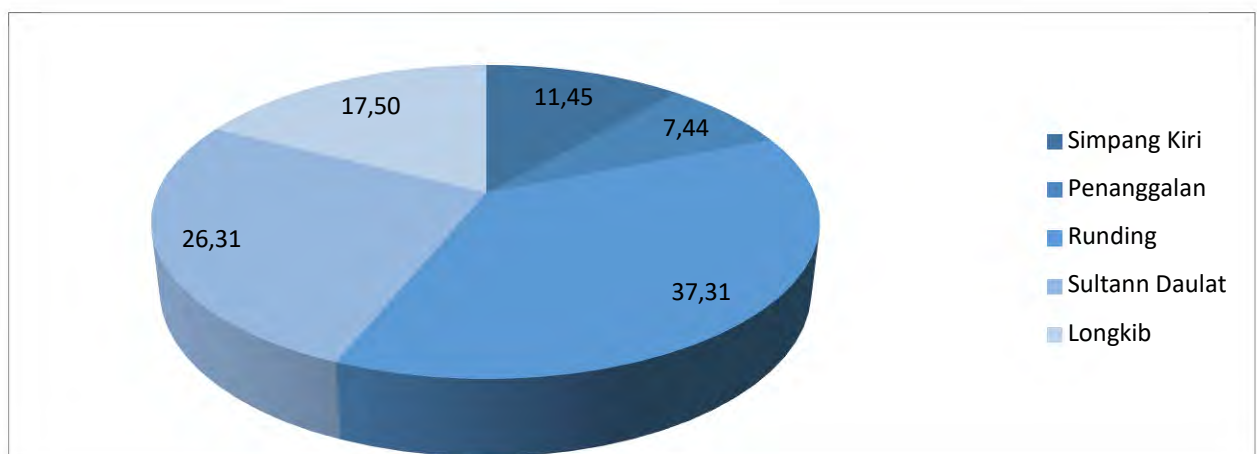


Sumber: RTRWKota Subulussalam 2014 - 2034

Gambar 2.1.

Peta Administrasi Kota Subulussalam

Luas wilayah Kota Subulussalam adalah 1.391 Km² yang terbagi kedalam 5 (lima) Kecamatan, yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Sultan Daulat dan Longkib. dan merupakan Kota dengan luas terbesar di Provinsi Aceh. Apabila ditinjau menurut kecamatan, wilayah di Kota Subulussalam yang terluas adalah Kecamatan Runding, yaitu meliputi 37,31% dari luas Kota Subulussalam sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Penanggalan, yaitu sebesar 7,44%.



Sumber: RTRWKota Subulussalam 2014 - 2034

Gambar 2.2.

Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Dalam Wilayah Kota Subulussalam

Secara administrasi pada Tahun 2019 Kampung (Desa) di Kota Subulussalam seluruhnya berjumlah 82 kampung, yang terdiri dari 17 Kampung di Kecamatan Simpang Kiri, 13 Kampung di Kecamatan Penanggalan, 23 Kampung di Kecamatan Runding, 19 Kampung di Kecamatan Sultan Daulat, 10 Kampung di Kecamatan Longkib. Berikut disajikan peta administrasi Kota Subulussalam dan rincian luas wilayah kecamatan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.

**Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kota Subulussalam
Tahun 2019**

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Kampung
1	Simpang Kiri	70,56	17
2	Penanggalan	45,82	13
3	Runding	229,88	23
4	Sultann Daulat	162,11	19
5	Longkib	107,84	10

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.1.2. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (*amplitude*) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (*landform*). Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian, yaitu:

1. Dataran Rendah yang menjadi dominasi karakteristik bentang alam Kota Subulussalam, dengan kemiringan 00 – 20 dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 45%;
2. Daerah/dataran Landai dengan kemiringan 20 – 50 dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 10,80%; dan
3. Dataran tinggi dengan kemiringan 50 – 150 dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 26,45%.

4. Dataran perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 150 – 1000, yaitu:
 - a. Daerah perbukitan dengan kemiringan 150 – 400 dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 17%; dan
 - b. Daerah pegunungan terjal dengan kemiringan melebihi 400 dengan prosentase luas terhadap luas kota adalah 1,12%.

Adapun Kondisi topografi dan jarak kampung/desa pada masing – masing kecamatan dapat dijelaskan berikut:

1. Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri

Keadaan topografi di kecamatan Simpang Kiri pada umumnya datar, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sekelondang dan Desa Subulussalam Barat. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri (Desa Subulussalam) adalah Desa Makmur Jaya sejauh 11,40 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Subulussalam Timur sejauh 0,17 km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk dijangkau dengan semua jenis kendaraan.

2. Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan

Pada umumnya berbukit-bukit, hanya lima desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Lae Motong, Desa Cepu, Desa Penanggalan, Desa Dasan Raja dan Desa Penanggalan Timur. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan Penanggalan (Desa Penanggalan) adalah Desa Lae Ikan sejauh 8,06 Km. Desa Lae Ikan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak-Pak Barat (Provinsi Sumatera Utara). Desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan adalah Desa Dasan Raja dan Penanggalan Barat sejauh 0,5 Km. Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Aceh wilayah barat.

3. Keadaan topografi Kecamatan Rundeng

Pada umumnya datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 mdpl dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggiran sungai. Geruguh merupakan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan (Desa Pasar Rundeng) yang berjarak 29,04 km. Transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap desa di Kecamatan Rundeng umumnya menggunakan transportasi air berupa sampan, kapal boat atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum baik atau sebahagian besar badan jalan belum beraspal (jalan tanah).

4. Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat

Pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 23,10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Gunung Bakti yaitu sejauh 1,16 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak di pinggiran sungai.

5. Keadaan topografi Kecamatan Longkib

Pada umumnya berbukit, hanya tiga desa yang topografinya datar yaitu Desa Longkib, Panji dan Sepang. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 16,97 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Lae Saga sejauh 5,30 Km dari Darul Aman (Ibukota Kecamatan).

2.1.1.3. Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumberdaya alam maupun dalam potensi kebencanaan alam. Kota Subulussalam terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh dua jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya (Muson Barat) dan angin musim timur laut (Muson Timur).

Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau.

Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Kota Subulussalam juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Parameter iklim, seperti curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan arah angin, sangat berpengaruh pada potensi pengembangan sumberdaya alam, baik dilihat sebagai potensi cadangan alamiah maupun potensi alam berkesinambungan. Pada tahun 2019, Kota Sibulussalam tercatat memiliki: a). rata-rata suhu udara minimum 20°C dan maksimum 33,3°C; b). rata-rata curah hujan perbulan maksimum 277,41 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan maksimum 17 kali; c). kelembaban udara minimum 48% dan maksimum 97%; d). tekanan udara antara 991,6 mb – 1018,5 mb; e). arah angin terbanyak adalah Angin Selatan dengan kecepatan angin rata-rata 0,1 – 5,4m/s.

Tabel 2.2.

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2019 (Bulanan)

Kecamatan		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
Januari	Jumlah Curah Hujan (mm)	340	427	398	231	186	316,4
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	20	21	19	19	16	19
Februari	Jumlah Curah Hujan (mm)	426	383	325	142	148	284,8
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	20	15	17	13	12	15,4
Maret	Jumlah Curah Hujan (mm)	473	566	231	173	151	318,8
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	21	16	16	14	15	16,4
April	Jumlah Curah Hujan (mm)	293	192	121	222	83	182,2
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	21	12	12	13	10	13,6
Mei	Jumlah Curah Hujan (mm)	459	291	207	173	149	255,8
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	19	19	13	13	11	15
Juni	Jumlah Curah Hujan (mm)	122	71	166	49	97	101

	Jumlah Hari Hujan (Hari)	12	12	7	7	5	8,6
Juli	Jumlah Curah Hujan (mm)	121	151	67	74	67	96
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	7	13	7	8	7	8,4
Agustus	Jumlah Curah Hujan (mm)	230	85	166	171	189	168,2
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	20	18	13	15	11	15,4
September	Jumlah Curah Hujan (mm)	470	134	138	173	142	211,4
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	16	19	8	13	10	13,2
Oktober	Jumlah Curah Hujan (mm)	694	376	486	687	505	549,6
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	27	22	23	30	26	25,6
November	Jumlah Curah Hujan (mm)	662	475	236	336	309	403,6
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	22	26	20	27	19	22,8
Desember	Jumlah Curah Hujan (mm)	596	425	608	271. 50	289	437,9
	Jumlah Hari Hujan (Hari)	26	22	22	24	20	22,8

(Sumber: <https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-cuaca.bmkg?Kota=Subulussalam&AreaID=501606&Prov=1>).

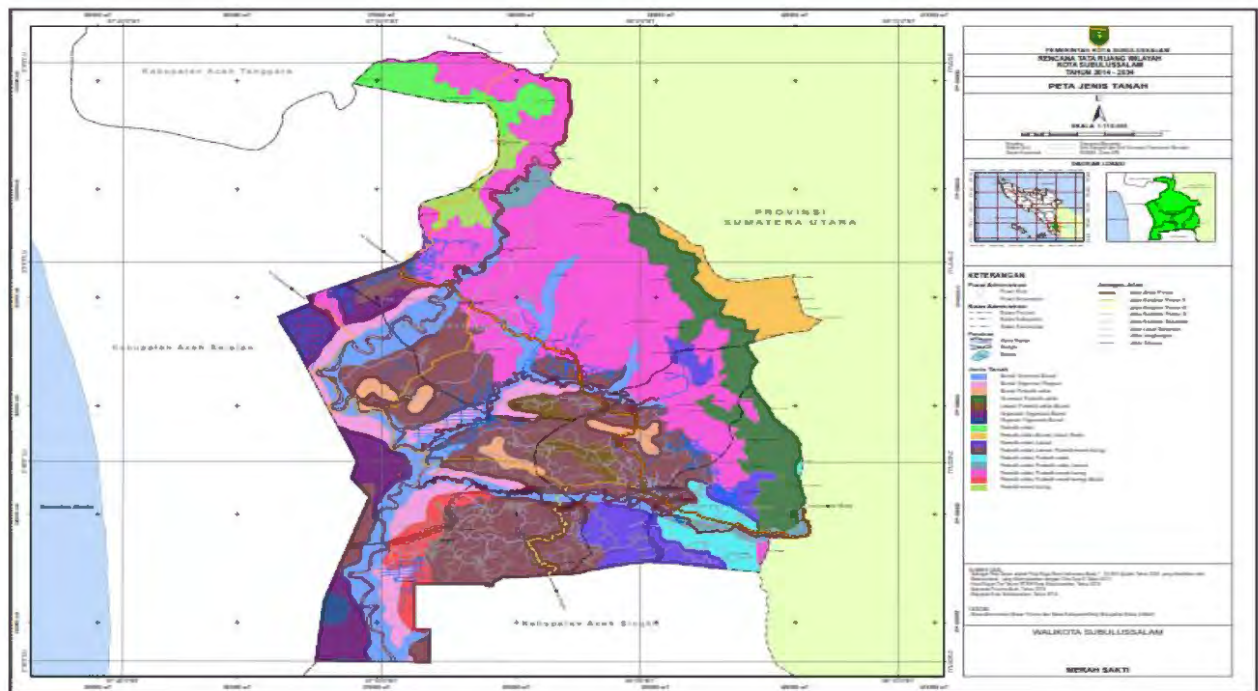
2.1.1.4. Geologi dan Jenis Tanah

Ditinjau dari struktur geologis, Kota Subulussalam memiliki struktur geologi yang terdiri atas arenite sandstone, boulder-sandstone, conglomerate, sandstone, tuff, volcanic rock. Dari beragamnya struktur geologis tersebut, Kota Subulussalam didominasi oleh struktur geologi conglomerate. Sedangkan struktur geologi yang memiliki komposisi terkecil adalah tuff.

Struktur arenite sandstone mendominasi di wilayah perbukitan di bagian timur Kota Subulussalam beserta dengan struktur sandstone, yaitu di Kecamatan Penanggalan. Struktur conglomerate yang mendominasi struktur geologi Kota Subulussalam tersebar di seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi tuff dan volcanic rock mendominasi di bagian utara pada areal hutan yakni di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi boulder-sandstone mendominasi areal di samping sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu – batu. Selanjutnya peta geologi Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Kota Subulussalam memiliki berbagai jenis tanah yang didominasi oleh kompleks podsolik coklat dan podsolik Merah Kuning (PMK) seluas 31.572,39 Ha (26,66 %) dari luas total wilayah Kota Subulussalam (118.404,48 Ha). Selanjutnya wilayah ini didominasi oleh kompleks podsolik coklat, latosol dan PMK seluas 28.390,72 Ha (23,97 %) dan kompleks aluvial, grumosol dan aluvial seluas 13.462,84 Ha (11,37 %). Distribusi jenis tanah di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.4. Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam

Jenis tanah PMK mendominasi pada wilayah utara dan timur Kota Subulussalam, sementara jenis tanah Organosol dan Glei Humus mendominasi jenis tanah di wilayah selatan dan barat Kota Subulussalam. Adapun karakteristik khas jenis tanah di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

- Podsolik Merah Kuning (PMK) memiliki karakteristik tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut. Kandungan bahan organik dan unsur hara pada jenis tanah ini umumnya rendah. Permeabilitas tanah sedang hingga agak lambat, serta memiliki daya menahan air yang kurang baik serta peka terhadap erosi.
- Organosol tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dengan bahan organik. Ketebalan minimum 40 cm dan paling sedikit mengandung 30% bahan organik atau lebih 20% bila berpasir. Warna tanah gelap, pH rendah, drainase terhambat sampai sangat terhambat. Bila hendak digunakan untuk pertanian memerlukan drainase/irigasi.
- Latosol merupakan tanah yang miskin akan zat hara terutama zat Pospat, Kalium dan Nitrogen dan rendah kadar humusnya, struktur tanah teguh

dan mantap, tidak plastis (lembut) serta tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

2.1.1.5. Hidrologi

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum (sanitasi), transportasi, maupun untuk kepentingan lainnya. Kota Subulussalam memiliki potensi terkait dengan hal ini. Sumberdaya air di Kota Subulussalam meliputi air permukaan yaitu air sungai dan rawa, serta air tanah yang bersumber dari mata air. Salah satu potensi sumberdaya air adalah Sungai Besar Lae Soraya yang memil Selain Lae Soraya, terdapat beberapa sungai lainnya dengan kapasitas yang lebih kecil serta anak anak sungai yang tersebar di Kota Subulussalam. Secara umum, karakteristik sungai Subulussalam berkelok pendek sehingga sering menimbulkan bencana genangan/luapan sungai, namun dengan lebar sungai yang sangat memadai seperti Lae Soraya, beroptensi untuk dijadikan sebagai media transportasi sungai. Sungai sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya bencana genangan akibat luapan sungai.

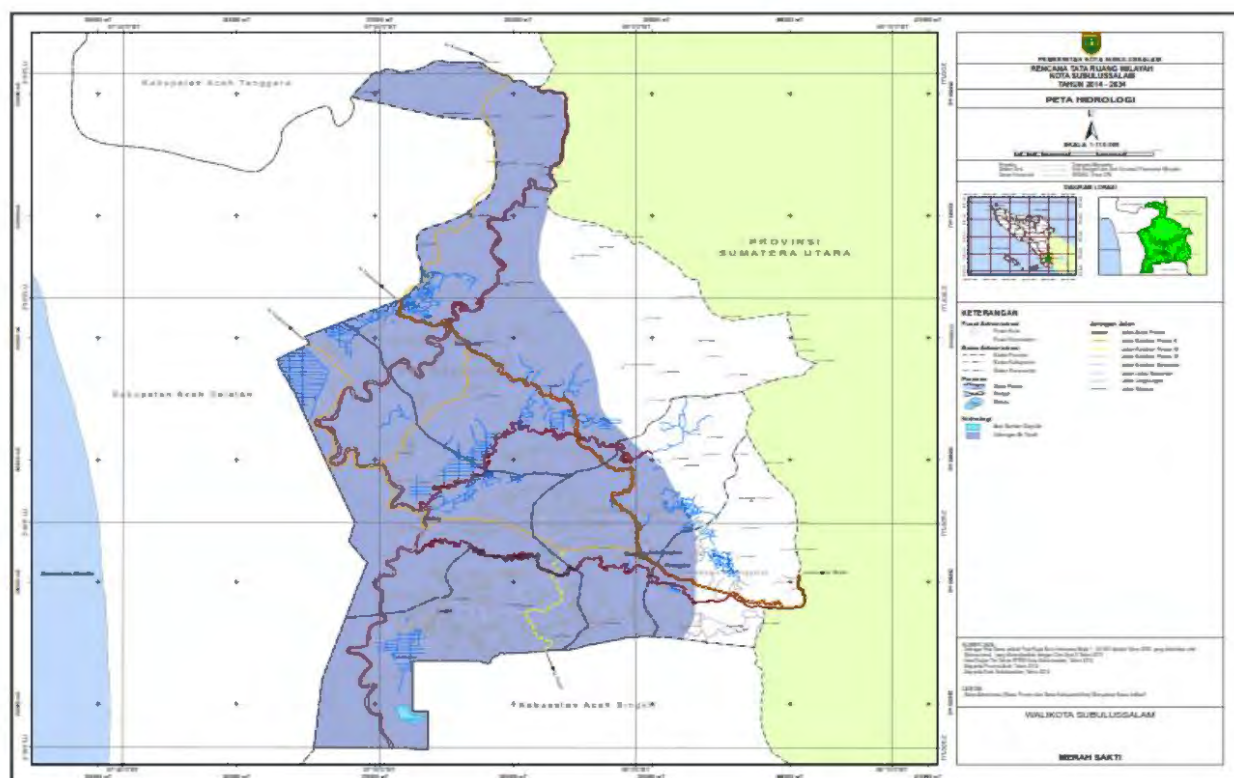
Dalam hal pengelolaan Wilayah Sungai (WS), Kota Subulussalam termasuk ke dalam WS Alas-Singkil sebagai WS lintas provinsi karena menjadi sumber air bagi Provinsi Aceh dan Provi Sumatera Utara. Oleh karenanya, pengelolaan WS yang melintasi Kota Subulussalam ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, yang didasarkan pada Permen PU No.11A/PRT/M/2006.

Terdapat 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkait dengan Kota Subulussala Lawe Alas, DAS Trumor, DAS Simpang Kanan, dan DAS Simpang Kiri. Aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Subulussalam adalah:

1. Sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga Kabupaten Aceh Singkil. Hulu sungai Lae Soraya di Kabupaten Aceh Tenggara dan bermuara di Kabupaten Aceh Singkil.



2. Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng.
3. Sungai Lae Batu - batu mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, memiliki hulu di Kecamatan Sultan Daulat dan bermuara di Lae Belegen menuju Lae Soraya.
4. Sungai Lae Biski yang merupakan hulu dari sungai Lae Batu - batu di Kecamatan Sultan Daulat.
5. Sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di Sungai Lae Soraya.
6. Sungai Lae Sarkea yang merupakan daerah hulu, mengalir dari Kecamatan Penanggalan menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
7. Sungai Lae Sireprep yang merupakan daerah hulu di Kecamatan Penanggalan, mengalir menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
8. Sungai Lae Penuntungan di Kecamatan Penanggalan, bermuara di Sungai Lae Sireprep.

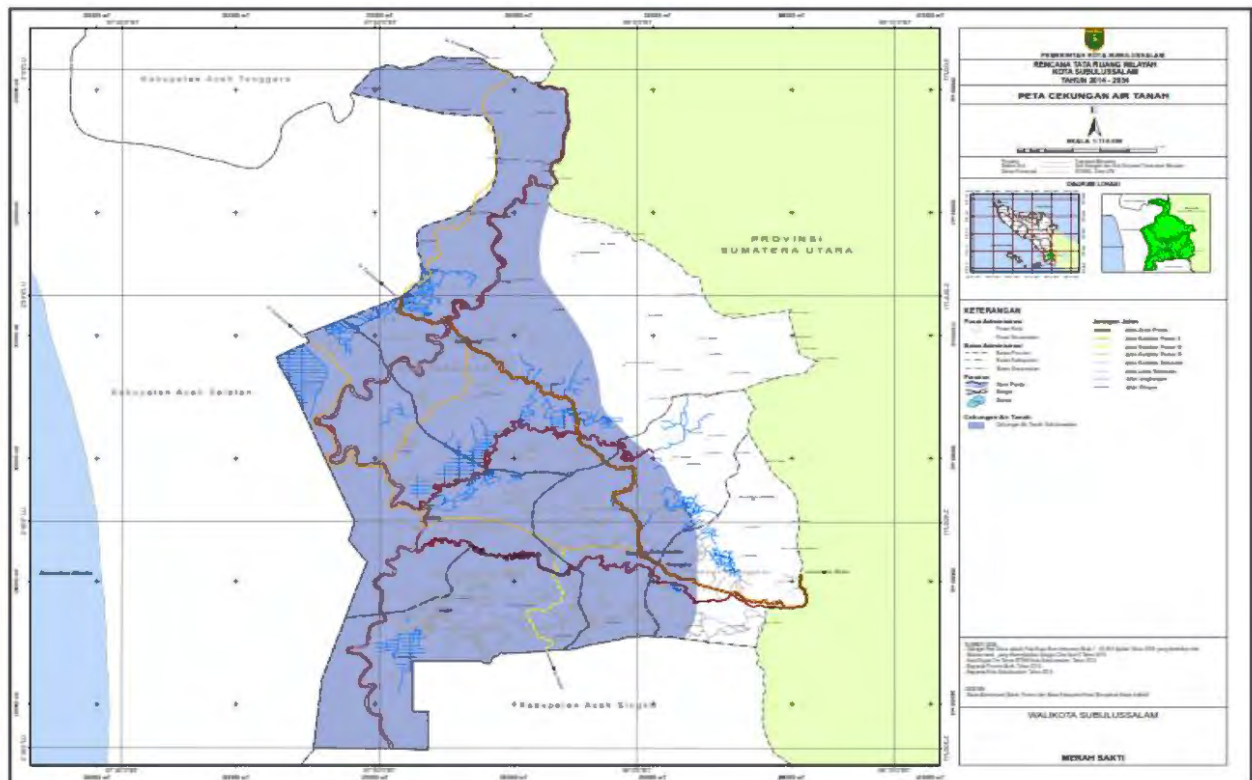


Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.5. Peta Hidrologi di Kota Subulussalam

Gambar 2.5, merupakan Peta Hidrologi Kota Subulussalam yang secara umum karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal ini mengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggung juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di sisi lain, keberadaan sungai - sungai di Kota Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air minum dan perhubungan (transportasi sungai).

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Selanjutnya peta CAT dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.6. Peta CAT di Kota Subulussalam

RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 memberikan informasi CAT di Kota Subulussalam seluas 86.079,88 Ha meliputi kecamatan rundeng seluas 22.011,25 Ha, Kecamatan Penanggalan seluas 2.473,83 Ha, Kecamatan Longkib seluas 12.815,29 Ha, Kecamatan Sultan Daulat seluas 34.629,66 Ha, Kecamatan Simpang Kiri seluas 11.149, 85 Ha.

2.1.1.6. Penggunaan lahan

Berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034, luas kawasan lindung ditetapkan seluas 25.926,93 Ha (21,90%) dan Kawasan Budidaya seluas 92.477,50 Ha (78,10%).

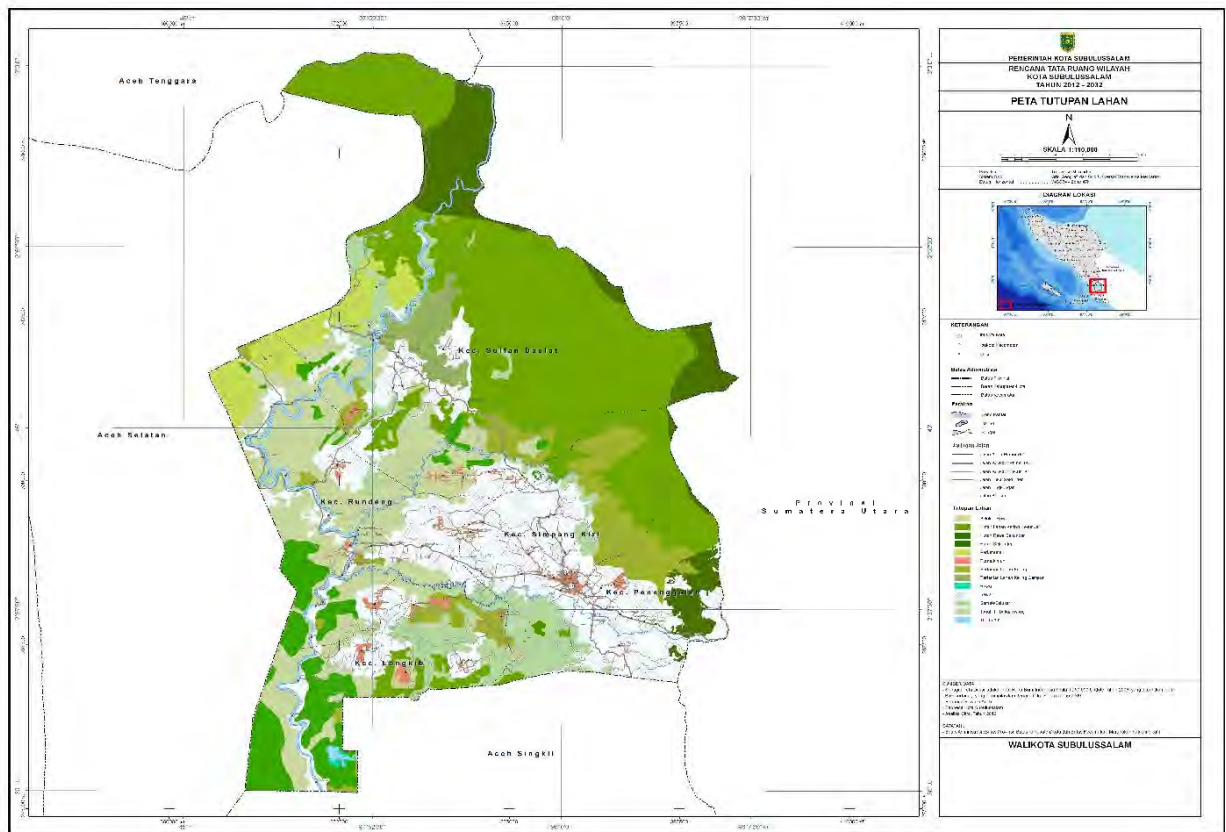
Dari data jenis penggunaan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam untuk hutan lindung seluas 19.275 Ha berada di kecamatan Sultan Daulat dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.713,21 Ha. Tahura Plasma Nutfah Kapur ini direncanakan menjadi pusat penelitian plasma nutfah pohon kapur di provinsi Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 32.252,47 Ha, perkebunan besar (HGU) seluas 19.690,45 Ha dan perkebunan rakyat seluas 13.539,76 Ha. Secara lebih rinci penggunaan lahan di Kota Subulussalam disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

**Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam
Tahun 2019**

Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)					Jumlah
	Longkib	Penanggalan	Rundeng	Simpang Kiri	Sultan Daulat	Kota Subulussalam
KAWASAN LINDUNG						25.926,93
Hutan Lindung					19.275,00	19.275,00
Suaka Marga Satwa Rawa Singkil	2.447,28		697,60			3.144,88
Tahura Plasma Nutfah Kapur		1.713,21				1.713,21
Danau	123,02					123,02
Tubuh Air	223,95	57,14	700,60	62,96	626,17	1.670,82
KAWASAN BUDIDAYA						92.477,50
Hutan Produksi		4.369,58		1.534,54	3.687,64	9.591,76
Hutan Produksi Konversi		905,11	137,37	1.599,84	537,99	3.180,31
Perkebunan / HGU	1.478,09	376,36	4.556,29	2.300,48	10.979,23	19.690,45
Perkebunan Rakyat	2.298,52	756,39	4.328,32	3.163,17	2.993,36	13.539,76
Pertanian Lahan kering	4.139,50	2.578,51	8.234,51	6.033,16	11.266,79	32.252,47
Industri (PPKS)		53,67	80,34	19,98	23,52	177,51
Pertambangan Galian C	1,04	1,74	0,30	28,59	1,67	33,34
Sawah	8,54	28,53	15,02	72,98	88,19	213,26
Permukiman	93,98	120,42	208,85	474,65	137,03	1.034,93
Transmigrasi	5.001,36	651,54	3.052,03	1.305,65	2.753,13	12.763,71
Total	15.815,28	11.612,20	22.011,23	16.596,00	52.369,72	118.404,43

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan di Kota Subulussalam

Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan. Peruntukan lahan Kota Subulussalam sesuai dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 secara umum terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, disebutkan bahwa pada dasarnya kelompok utama dari kawasan lindung adalah sebagai berikut:

1. Hutan lindung;

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yang meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
3. Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air;
4. Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
6. Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan banjir; dan
7. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagarbiosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

Terkait dengan penggolongan tersebut, maka di Kota Subulussalam terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kawasan dengan fungsi lindung, antara lain:

- (1) Hutan Lindung;
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat;
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- (4) Kawasan Rawan Bencana Alam;
- (5) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;

Kawasan peruntukan perumahan merupakan fungsi ruang kota yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Dalam kaitannya dengan pendistribusian penduduk serta pengembangan karakter ruang kota serta pertimbangan pertimbangan daya dukung dan daya tampung ruang, maka kawasan peruntukan perumahan di Kota Subulussalam diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi, kawasan peruntukan perumahan dengan

tingkat kepadatan sedang dan kawasan peruntukan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah.

1. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi

Fungsi ini ditetapkan di wilayah pusat pelayanan kota, yakni di Simpang Kiri dan Penanggalan. Kawasan ini merupakan kawasan yang diperkirakan dan diarahkan untuk terus berkembang menjadi satu kawasan perkotaan dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Oleh karena itu arahan kepadatan penduduk cenderung tinggi. Terkait dengan pembentukan kepadatan kawasan tersebut maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 60-70%.

Kawasan perumahan kepadatan tinggi seluas 1.651,67 Ha, meliputi :

- a. Kampung Subulussalam, Subulussalam Utara, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Lae Oram, dan Pegayo di Kecamatan Simpang Kiri;
- b. Kampung Penanggalan, Cepu, Kuta Tengah, Penuntungan, dan Lae Mbersih di Kecamatan Penanggalan;
- c. Kampung Sikerabang, Bukit Alim, dan Darul Aman di Kecamatan Longkib;
- d. Kampung Pasar Rundeng, Teladan Baru, Lae Pamualan, dan Harapan Baru di Kecamatan Rundeng;
- e. Kampung Namo Buaya, Singgersing, Jambi Baru, dan Gunung Bakti di Kecamatan Sultan Daulat.

2. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang

Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan peruntukan perumahan yang berada di sekitar sub pusat pelayanan kota, yakni di Jambi Baru-Kutagara, Pasar Rundeng-Teladan Baru dan KTM Longkip. Terkait dengan pembentukan kawasan kepadatan sedang maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 50%.

Kawasan perumahan kepadatan sedang seluas 1,992,17 Ha, meliputi :

- a. Kampung Sikelondang, Tangga Besi, Kuta Cepu, dan Suka Makmur di Kecamatan Simpang Kiri;
- b. Kampung Baru, Sikelang, dan Jontor di Kecamatan Penanggalan;
- c. Kampung Lae Saga, Bangun Sari, dan Darussalam di Kecamatan Longkib;
- d. Kampung Badar, Blukur Makmur, Binanga, Oboh, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, dan Mandilam di Kecamatan Rundeng;
- e. Kampung Bunga Tanjung, Pulo Kedep, Pulo Belen, Suka Maju, Jabi-jabi, dan Lae Langge di Kecamatan Sultan Daulat.

3. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah

Peruntukan ini dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di sekitar pusat pelayanan lingkungan, yakni di Kawasan Suka Makmur-Pasar Panjang (Kecamatan Simpang Kiri), Kawasan Kampung Baru-Jontor (Kecamatan Penanggalan), Kawasan Namo Buaya (Kecamatan Sultan Daulat), Kawasan Cipare-Pare (Kecamatan Sultan Daulat) Kawasan Sepadan-Bunga Tanjung (Kecamatan Rundeng dan Sultan Daulat), Kawasan Kuala Kepeng-Tanah Tumbuh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Singgersing (Kecamatan Sultan Daulat), Kawasan Harapan Baru-Teladan Baru (Kecamatan Rundeng), Kawasan Kuta Beringin-Oboh (Kecamatan Rundeng), Kawasan Sikerabang (Kecamatan Longkip), Kawasan Darussalam-Bukit Alim (Kecamatan Longkip), Kawasan Desa Longkip (Kecamatan Longkip). Untuk menjaga kepadatan kawasan maka pembangunan perumahan dan permukiman pada kawasan ini dibatasi dengan dengan penetapan KDB maksimal sebesar 30%.

Kawasan perumahan kepadatan rendah seluas 1.383,26 Ha, meliputi :

- a. Kampung Mukti Makmur, Makmur Jaya, Pasar Panjang dan Buluh Dori di Kecamatan Simpang Kiri;
- b. Kampung Lae Ikan, dan Lae Motong di Kecamatan Penanggalan;
- c. Kampung Panji, Longkib, dan Sepang di Kecamatan longkib;

- d. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Tualang, Tanah Tumbuh, Lae Mate, Kuala Kepeng, Geruguh, dan Suak Jampak di Kecamatan Rundeng;
- e. Kampung Darul Makmur, Sigrun, Pasir Belo, dan Bawan di Kecamatan Sultan Daulat.

4. Pengembangan kawasan permukiman

Disamping pengembangan kawasan untuk perumahan, juga direncanakan pengembangan kawasan permukiman yang menempati lokasi di seluruh wilayah Kota Subulussalam diluar kawasan peruntukan permukiman. Secara keseluruhan pengembangan kawasan permukiman seluas 3.875,95 Ha, meliputi :

- a. Kecamatan Rundeng dengan luas 733,13 Ha, meliputi Kampung Harapan Baru, Kampung Teladan Baru dan Kampung Sepadan;
- b. Kecamatan Penanggalan dengan luas 485,42 Ha, meliputi Kampung Penuntungan, Kampung Cepu, Kampung Kuta Tengah, Kampung penanggalan dan Kampung Kampung Baru;
- c. Kecamatan Longkib dengan luas 560,5 Ha, meliputi Kampung Sikerabang, Kampung Bangun Sari, Kampung Bukit Alim dan Kampung Darul Aman;
- d. Kecamatan Sultan Daulat dengan luas 1.638,76 Ha, meliputi Kampung Gunung Bakti, Kampung Jambi Baru, Kampung Pulo Belen, Kampung Pulo Belen, Kampung Cipar-pare Timur dan Kampung Namo Buaya; dan
- e. Kecamatan Simpang Kiri dengan luas 458,14 Ha, meliputi Kampung Suka Makmur, Kampung Sikelondang, Kampung Tangga Besi dan Kampung Lae Oram.

Sementara itu, di Kota subululussalam juga terdapat kawasan transmigrasi seluas 9.908,11 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.2. Potensi Pengembangan wilayah

Pengembangan kota subulussalam harus mengadopsi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi demikian juga dengan rencana tata ruang Subulussalam. Karena kota Subulussalam terletak pada lokasi yang sangat strategis dengan berbatasan langsung provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (infrastruktur- infrastruktur yang direncanakan oleh nasional seperti jalan kereta api, pelabuhan laut, terminal barang dan penumpang, merupakan potensi yang harus perhatian pemerintah dalam waktu pendek maupun jangka panjang).

1. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:
 - Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat. Morfologi lahan berpegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.
 - Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
 - Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.
 - Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industry CPO serta daerah yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).
2. Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan

juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan. Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.

3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
- Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam yang terletak pada perbatasan langsung antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.
- Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkip terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

- Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kebencanaan di Kota Subulussalam tidak dapat terlepas dari sistem kebencanaan Indonesia bahkan dunia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunungapi, dan sesar atau patahan. Penunjaman di Indonesia juga banyak terdapat patahan aktif seperti Patahan Semangko di Sumatera, Cimandiri di Jawa dan banyak patahan dan sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kejadian gempa beserta dampak yang ditimbulkannya yang dapat terjadi secara tiba-tiba harus dapat diantisipasi secara dini kejadiannya, misalkan melalui *hazard warning system* dan optimalisasi upaya mitigasi bencana.

Sebagian besar wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan gempa karena dilalui patahan aktif sesar Semangko yang memanjang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Kota Banda Aceh, Padang, termasuk regional Kota Subulussalam merupakan daerah yang dilalui sesar Semangko. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), wilayah-wilayah tersebut tengah terjadi penumpukan energi yang siap dilepaskan kapan saja. Berdasarkan catatan yang ada selama ini, besar gempa bervariasi antara 5 hingga di atas 7 skala Richter (SR).

Rangkaian gempa di Banda Aceh, Mandailing Natal, Padang, Kepulauan Mentawai dan termasuk yang terjadi di Kota Subulussalam dalam beberapa waktu lalu (6-9-2011) dengan besar gempa sekitar 6,7 SR, juga merupakan akibat akumulasi energi yang terjadi di sepanjang patahan Sumatera yang sangat aktif dengan tingkat pergeseran sekitar 1 centimeter setiap tahun.

Ketika terjadi gempa, bangunan-bangunan akan hancur karena ada turunan patahan atau ordo dari patahan Semangko yang besar.

Bencana kegempaan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Barat dan sekitarnya pada hakikatnya dipicu pula oleh adanya patahan-patahan benua yang berdasarkan tinjauan geologi memberikan dorongan kuat di dasar bumi yang menyebabkan gerakan tanah bahkan gempa. Gempa besar punya kecenderungan berulang di jalur patahan Sumatera sebagai hasil pelepasan energi yang menumpuk di patahan.

Kota Subulussalam yang terletak di wilayah barat Sumatera tentunya memiliki resiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi kerentanan terhadap bencana gempa bumi, secara regional Kota Subulussalam berada pada resiko gempa bumi skala I-V MMI atau setara dengan < 5 skala richter. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam kawasan rawan bencana alam terdiri dari: 1) rawan longsor dan gerakan tanah; 2) rawan kebakaran; dan 3) kawasan rawan banjir.

1. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah

Kawasan rawan longsor dan atau gerakan tanah meliputi seluas 107.150,53 ha yang terdiri dari intensitas menengah dan rendah. Kawasan Intensitas menengah terdapat di Kampung Sikelang, Kampung Baru, Kuta Tengah dan Cepu seluas 4.615,60 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kampung Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Pegayo, Suka Makmur, Pasar Panjang dan Mukti Makmur seluas 4.934,09 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kampung Darul Aman seluas 13,45 Ha yang berada di Kecamatan Longkib, Kampung Badar, Harapan Baru dan Teladan Baru seluas 906,37 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng, Kampung Namo Buaya, Singgersing, Darul Makmur Pulo Belen dan Pulo Kedep, Jabi-Jabi, Suka Maju dan Pasir Belo seluas 5.877,48 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawasan dengan intensitas rendah terdapat di Kampung Penanggalan, Lae Mbersih, Penuntungan dan Lae Motong seluas 3.057,81 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan. Kampung Subulussalam Utara, Lae Oram, Tangga Besi, Kuta Cepu, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Sikelondang seluas 11.585,32 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri. Kampung Rantau Panjang, Bukit Alim, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Saga, Darussalam, Panji, Longkib dan

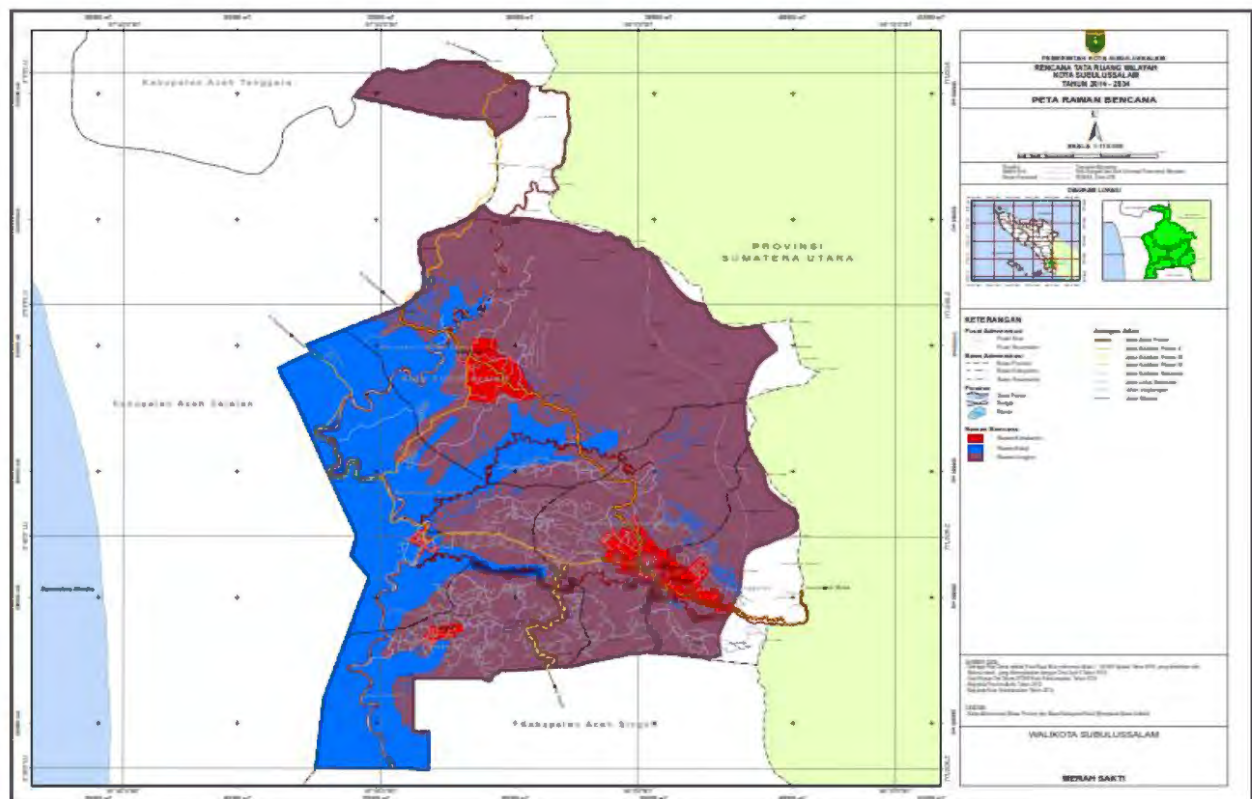
Sepang seluas 15.588,33 Ha yang berada di Kecamatan Longkib. Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, Dah, Lae Mate, Mandilam Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 20.513,46 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng. Kampung cipar-pari Timur, Cipar-pari, Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jambi Baru, Gunung Bakti, Lae Langge dan Bawan seluas 40.058,92 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

2. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran meliputi: 1) Kecamatan Longkib di Kampung Darul Aman, Kecamatan Penanggalan di Kampung Penanggalan, Penuntungan, Lae Mbersih, Cepu, kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor; 2) Kecamatan Rundeng di Kampung Pasar Rundeng, Belukur Makmur; 3) Kecamatan Simpang Kiri di kampung Suka Makmur, Tangga Besi, Subulussalam Selatan, Subulussalam Barat, Subulussalam Utara, Lae Oram, Subulussalam, Pegayo; dan 4) Kecamatan Sultan Daulat di Kampung Gunung Bakti, Jambi Baru, Pulo Belen.

3. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Subulussalam mengenai areal lahan seluas 28.498,49 ha, meliputi: 1) Kecamatan Longkib berada di Kampung Sepang, Longkib, Panji dan Darul Aman seluas 6.555,27 Ha; 2) Kecamatan Rundeng berada di Kampung Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Dah, Lae Mate, Sepadan, Mandilam, Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 15.653,23 Ha ; dan 3) Kecamatan Sultan Daulat berada di Kampung Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jabi-jabi Suka Maju, Sigrun, Pasir Belo, Bawan dan Lae Langge seluas 6.289,99 Ha. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam disajikan pada Gambar 2.6.



Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam

2.1.4. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran masalah suatu wilayah, karena penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah

penduduk Kota Subulussalam yaitu sebanyak 76.534 jiwa kemudian meningkat sebesar 2,13 % menjadi 78.725 jiwa pada tahun 2017. Menurut proyeksi BPS selama kurun waktu 2016-2019, jumlah penduduk Kota Subulussalam mengalami peningkatan menjadi 81.417 jiwa pada tahun 2019 dan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 terhadap tahun 2018 mencapai 1,50 %, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yang mencapai 1,89 %. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

**Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun
2016 – 2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2016	76.534	1,63
2017	78.725	2,13
2018	80.215	1,89
2019	81.417	1,50

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka 2020

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2019, Penduduk Kota Subulussalam berjumlah 81.417 jiwa yang terdiri dari 40.889 jiwa (50,22 persen) laki-laki dan 40.528 jiwa (49,78 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kota Subulussalam terdapat di Kecamatan Simpang Kiri dengan proporsi terbesar yaitu 36.823 jiwa (39,40 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Longkib yaitu 6.860 jiwa (7,34 persen).

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kota Subulussalam lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Tabel 2.5.

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2019

KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK PER KM ²	RASIO JENIS KELAMIN
Simpang Kiri	39,40	173	101
Penanggalan	18,44	185	103
Rundeng	15,70	46	106
Sultan Daultat	19,12	30	104
Longkib	7,34	42	107
Subulussalam	100,00	67	103

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, beberapa aspek pembangunan yang penting diperhatikan adalah aspek ekonomi dan sosial budaya. Pada aspek ekonomi, beberapa indikator yang umum digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan wilayah. Terdapat beberapa catatan kondisi makro Kota Subulussalam yang ditunjukkan oleh indikator-indikator tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam selama 2015-2019 berfluktuasi. Selama kurun waktu tersebut, capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 4,93% tahun 2017 sementara terendah adalah 4,42% pada tahun 2015, 2018, dan 2019. Lebih lanjut, dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Aceh, pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam relatif rendah.

Kedua, ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Indeks Gini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Indeks Gini tahun 2015 yaitu 0,373 cenderung lebih tinggi dengan tahun 2019, yaitu 0,342 dan angka tersebut lebih kecil dibandingkan Indeks Gini Provinsi Aceh dan Nasional.

Sementara itu, ketimpangan wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson menunjukkan trend yang menurun.

Ketiga, tingkat kemiskinan Kota Subulussalam cenderung mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 20,39% turun menjadi 17,95% tahun 2019. Namun, capaian tahun 2019 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh dan nasional.

Sementara itu, kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam dilihat dari aspek sosial dan aspek seni dan budaya tercatat beberapa capaian. Pertama, beberapa capaian indikator pendidikan, seperti Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan. Kedua, capaian indikator kesehatan, seperti Angka Kematian Ibu (AKI) masih perlu mendapat perhatian karena pada tahun 2019 masih terdapat satu kasus kematian ibu. Sementara itu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita meskipun memiliki kecenderungan menurun tetapi jumlahnya masih besar.

Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam subbabsub bab berikut ini.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam selama 2016-2019 cenderung memiliki tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam pada tahun 2016 adalah sebesar 4,69% meningkat menjadi 4,93% pada tahun 2017 kemudian mengalami penurunan dua tahun berturut-turut menjadi 4,42% pada tahun 2018 dan tahun 2019, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Aceh yaitu sebesar 4,15 % dan nasional, yaitu 5,02%.



Sumber: BPS, Statistik Aceh 2019 & Berita Resmi Statistik (BRS) 2019

**Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Subulussalam
Tahun 2016-2019**

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit produksi dalam suatu daerah selama satu periode tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam suatu periode tertentu.

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB-ADHK adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam menilai laju pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan nilai yang terdapat pada PDRB Atas dasar harga Konstan. Berikut akan disajikan nilai PDRB ADHK sejak tahun 2015-2019. Secara rinci jumlah PDRB ADHK Kota

Subulussalam untuk masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha dan Laju Pertumbuhannya Di Kota
Subulussalam, Tahun 2015-2019**

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	268.289	3,25	283.444	5,65	298.516	5,32	303.600	1,70	310.315	2,21
Pertambangan dan Penggalian	80.683	-15,14	60.162	- 25,43	51.714	-14,04	43.447	-15,99	33.637	-22,58
Industri Pengolahan	148.127	6,39	159.267	7,52	172.037	8,02	175.602	2,07	182.215	3,77
Pengadaan Listrik dan Gas	1.266	6,78	1.309	3,45	1.351	3,16	1.376	1,87	1.457	5,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	182	9,69	199	9,45	200	0,32	210	5,12	225	7,14
Konstruksi	153.686	8,23	166.500	8,34	176.213	5,83	186.245	5,69	204.645	9,88
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	189.364	12,73	208.390	10,05	221.573	6,33	242.773	9,57	255.173	5,11
Transportasi dan Pergudangan	58.877	1,17	60.037	1,97	63.682	6,07	69.218	8,69	79.295	14,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.857	12,87	9.869	11,42	10.320	4,57	11.468	11,13	11.973	4,41

Informasi dan Komunikasi	37.859	1,58	38.354	1,31	39.609	3,27	40.357	1,89	41.471	2,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	18.118	19,53	20.453	12,89	22.636	10,67	24.921	10,09	27.050	8,55
Real Estat	37.401	2,74	38.700	3,47	41.098	6,20	44.678	8,71	47.806	7,00
Jasa Perusahaan	3.557	8,50	3.817	7,30	4.127	8,12	4.455	7,96	4.755	6,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	73.774	3,99	79.505	7,77	83.569	5,11	90.136	7,86	92.593	2,73
Jasa Pendidikan	24.665	7,18	26.789	8,61	27.827	3,88	30.211	8,57	32.221	6,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.163	1,63	23.742	2,50	24.167	1,79	24.422	1,05	25.096	2,76
Jasa lainnya	6.511	8,98	7.047	8,23	7.483	6,19	8.060	7,70	8.760	8,69
Produk Domestik Regional Bruto	1.134.379	4,42	1.187.584	4,69	1.246.119	4,93	1.301.178	4,42	1.358.688	4,42

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka 2020

Kinerja perekonomian Kota Subulussalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 1.134.379 milyar, pada tahun 2019 mencapai Rp1.358.688 milyar, terjadi peningkatan sebesar Rp 224.309 milyar (19,77%) selama lima tahun.

Selama periode 2015-2019, struktur perekonomian di Kota Subulussalam didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang masing-masing menyumbang pada PDRB sebesar 22,84% dan 18,78%. Selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian

mengalami penurunan akibat dari tidak stabilnya harga biaya produksi pertanian (*saprotan*) serta menurunnya luas lahan pertanian (*konversi*). Pada tahun 2015, sektor ini berkontribusi dengan menyumbang pada PDRB sebesar 23,65%, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dengan menyumbang pada PDRB sebesar 22,84%.

Sementara itu, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kurun waktu 2015- 2019 cenderung mengalami peningkatan dari 16,69% pada tahun 2015 menjadi 18,78% pada tahun 2019. Hal itu disebabkan pergeseran paradigma pertumbuhan Kota Subulussalam dari wilayah pertanian dan perkebunan secara perlahan bergeser ke perdagangan. Meningkatnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga didukung oleh letak Kota Subulussalam yang merupakan pintu gerbang perdagangan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara melalui gerbang selatan Aceh yang menghubungkan sepanjang pantai barat dan selatan Aceh hingga ke Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh.

Tabel 2.7.

Presentase Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019

Sektor PDRB	2015	2016	2017	2018	2019
	%	%	%	%	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,65	23,87	23,96	23,33	22,84
Pertambangan dan Penggalian	7,11	5,07	4,15	3,34	2,48
Industri Pengolahan	13,06	13,41	13,81	13,50	13,41
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	13,55	14,02	14,14	14,31	15,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,69	17,55	17,78	18,66	18,78
Transportasi dan Pergudangan	5,19	5,06	5,11	5,32	5,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,83	0,83	0,88	0,88
Informasi dan Komunikasi	3,34	3,23	3,18	3,10	3,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	1,72	1,82	1,92	1,99

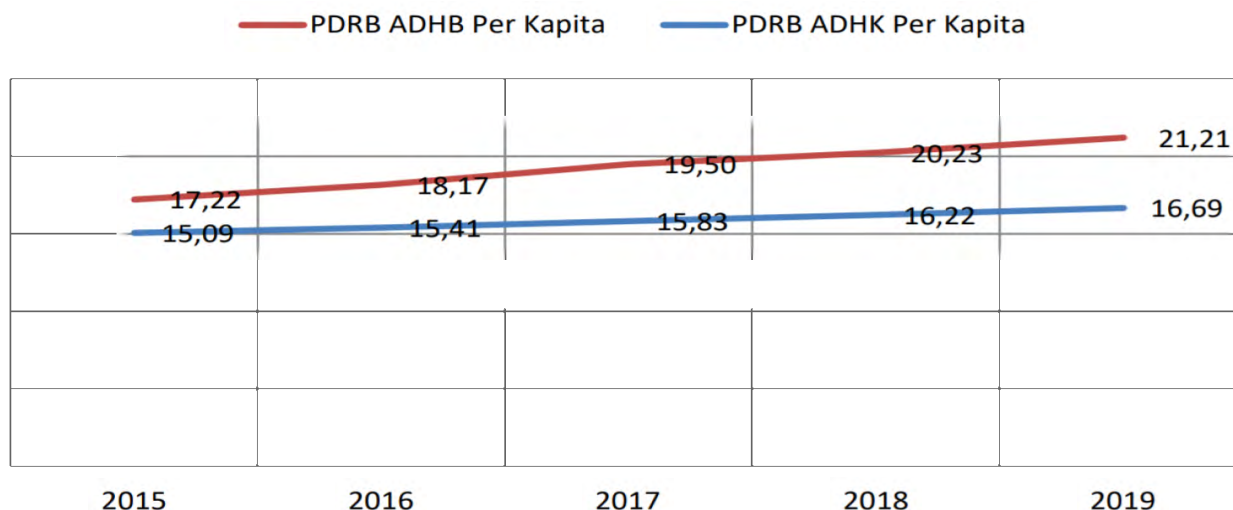
Real Estat	3,30	3,26	3,30	3,43	3,52
Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,50	6,69	6,71	6,93	6,81
Jasa Pendidikan	2,17	2,26	2,23	2,32	2,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,04	2,00	1,94	1,88	1,85
Jasa lainnya	0,57	0,59	0,60	0,62	0,64
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka 2020

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita Subulussalam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Subulussalam rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Pada tahun 2015 nilai PDRB Perkapita sebesar 17,22 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 18,17 juta rupiah pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,48 persen. Laju pertumbuhan tertinggi untuk PDRB Perkapita terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,35 persen dengan nilai PDRB Per Kapita sebesar 19,5 juta rupiah. Pada tahun 2018 laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,73 persen dengan nilai PDRB per kapita adalah 20,23 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 laju pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 4,84 persen dengan nilai PDRB per kapita adalah 21,21 juta rupiah.



Sumber: BPS, PDRB Kota Subulussalam Menurut Pengeluaran, 2015-2019

Gambar 2.10. PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran (Juta Rp) Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus - menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Ada beberapa cara yang dikemukakan untuk menggolongkan jenis - jenis inflasi. Penggolongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Adapun beberapa macam inflasi yaitu:

- Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun)
- Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun)
- Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun.

Sedangkan dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilah dalam tiga kategori :

- Inflasi Sedang (moderate inflation), yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.
- Inflasi ganas (galloping inflation), yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.

- Hyperinflasi (Hyperinflation), yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun, merupakan jenis yang mematikan.

Jenis inflasi dilihat dari faktor - faktor penyebab timbulnya :

- Inflasi tarikan, permintaan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
- Inflasi dorongan, biaya inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.
- Inflasi struktural, inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Untuk Kota Subulussalam, penilaian tingkat inflasi masih mengacu kepada Kota Meulaboh, dikarenakan Meulaboh memiliki jarak yang paling dekat dengan Kota Subulussalam. Acuan penilaian ini berdasarkan kepada data yang di keluarkan oleh BPS Aceh, bahwasanya penilaian inflasi di aceh terdapat pada 3 (tiga) daerah yakni Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh.

Hasil penilaian inflasi yang terjadi di meulaboh menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih dalam kondisi rendah (0,23). Berikut disajikan secara rinci inflasi yang terjadi di aceh sejak tahun 2014-2018.

Tabel 2.8.

Laju Inflasi di Aceh Tahun 2015 – 2019

Daerah Perhitungan Inflasi	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Banda Aceh	1,27	3,13	4,86	1,39	0,93
Lhokseumawe	2,44	5,60	2,87	2,05	1,65
Meulaboh	0,58	3,77	4,76	0,96	4,97
Aceh	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69

Sumber : BPS, Aceh Dalam angka, 2020

2.2.1.3. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Berikut diuraikan indeks gini Kota Subulussalam tahun 2015-2019.

Tabel 2.9.

Indeks Gini Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Gini Rasio				
	2015	2016	2017	2018	2019
Simeulue	0,355	0,268	0,307	0,343	0,340
Aceh Singkil	0,334	0,307	0,321	0,336	0,282
Aceh Selatan	0,311	0,313	0,321	0,312	0,273
Aceh Tenggara	0,302	0,317	0,284	0,295	0,278
Subulussalam	0,373	0,329	0,330	0,291	0,342
Aceh	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319

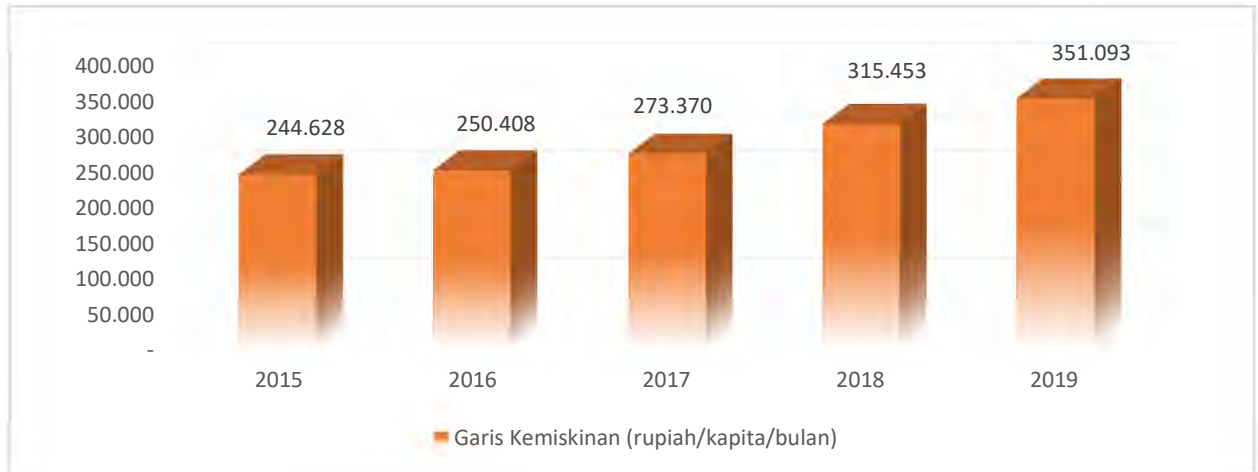
Sumber : BPS, Aceh Dalam Angka, 2020

Indeks Gini Kota Subulussalam tahun 2015-2019 cenderung konstan berkisar antara 0,37 sampai dengan 0,34. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan juga berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Subulussalam relatif merata.

2.2.1.4. Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Dalam kurun waktu 2015-2019, terdapat

peningkatan garis kemiskinan. Kenaikan tersebut disebabkan karena peningkatan harga-harga. Pada 2015, garis kemiskinan di Kota Subulussalam sebesar Rp 244.628 per kapita per bulan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp 351.093 per kapita per bulan.



Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka, 2020

Gambar 2.11. Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Jumlah penduduk miskin Kota Subulussalam mencapai 15,250 ribu orang pada 2015. Angka tersebut mengalami penurunan sejumlah 6,9 ribu orang hingga tahun 2019 menjadi sebanyak 14,56 ribu orang. Tingkat kemiskinan Kota Subulussalam mengalami penurunan sejak 2015, yaitu 20,39% menjadi 17,95% pada tahun 2019. Namun, angka tersebut masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Aceh.

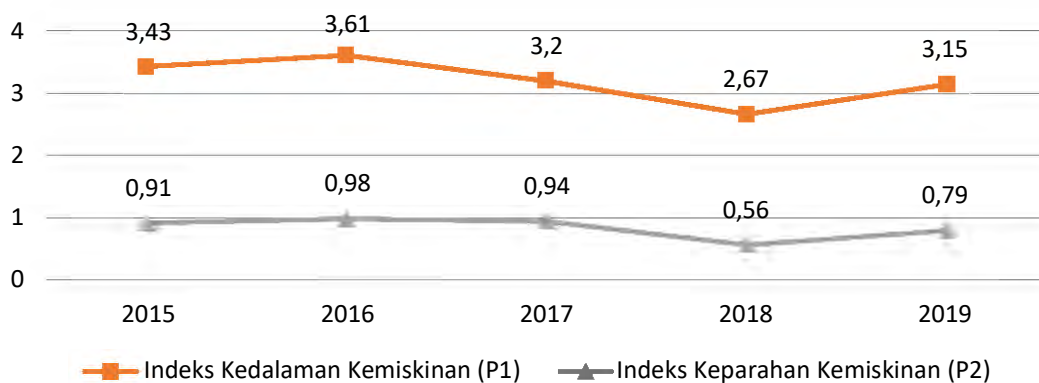
Tabel 2.10.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2018 dan 2019

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Persentase	
	(Rupiah/kapita/bulan)		Miskin (ribu)		Penduduk Miskin	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Simeulue	368.068	404.739	18,22	17,67	19,78	18,99
Aceh Singkil	427.804	450.217	25,74	25,66	21,25	20,78
Aceh Selatan	351.288	369.107	32,82	31,06	14,01	13,09
Aceh Tenggara	340.196	357.015	30,2	28,93	14,29	13,43
Subulussalam	315.453	351.093	14,78	14,56	18,51	17,95

Sumber : BPS, Aceh Dalam Angka, 2020

Kemiskinan dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan disajikan pada gambar di bawah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam tahun 2019 meningkat menjadi 3,15 dari 2,67 pada tahun 2018. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Proverty Severity*) merupakan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks kedalaman tahun 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 0,79 dibandingkan tahun tahun 2018 sebesar 0,56.



Sumber: BPS, *Subulussalam Dalam Angka*, 2020

Gambar 2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kota Subulussalam, 2015-2019

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Kota Subulussalam terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Angka IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk Kota Subulussalam yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup Kota Subulussalam cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Subulussalam

semakin baik. Pendapatan per kapita tahun 2019 menunjukkan capaian yang relatif tinggi, yakni sebesar Rp 21,21 juta per kapita. Kenaikan capaian Angka Melek Huruf di Kota Subulussalam dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kemampuan baca dan tulis yang baik. Sedangkan semakin tinggi RLS di suatu daerah menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Tabel 2.11.

IPM Kota Subulussalam Menurut Komponen Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per-Kapita (Ribuan)	IPM
2015	63,27	13,73	6,78	6.504,00	61,32
2016	63,42	14,18	6,88	6.669,00	62,18
2017	63,56	14,19	7,12	6.887,00	62,88
2018	63,69	14,20	7,39	7.093,00	63,48
2019	63,95	14,21	7,46	7.463,00	64,46

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka, 2020

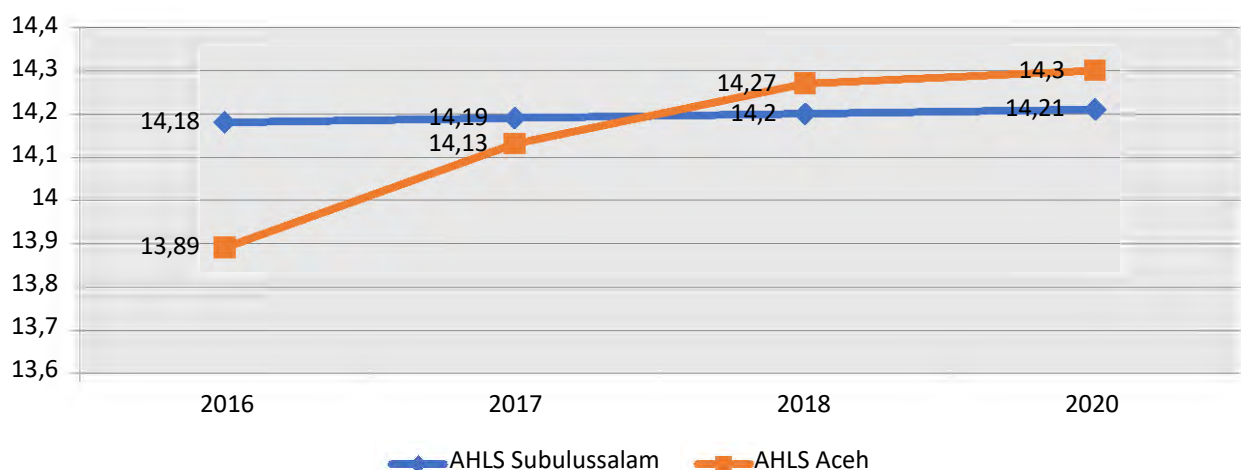
Dalam hal pembangunan pendidikan, keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan diantaranya: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Sementara itu, keberhasilan pembangunan kesehatan dinilai dari capaian indikator yang meliputi: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Status Gizi Bayi/Balita.

2.2.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Mulai tahun 2014, BPS melakukan penyempurnaan beberapa indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk metodologi penghitungannya. Sebagai salah satu komponen penyusunan IPM, Angka Melek Huruf dianggap tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini dikarenakan angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Indikator baru yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Capaian AHLS Kota Subulussalam tahun 2019 adalah sebesar 14,21 tahun, meningkat 0,01 poin dari 14,20 pada tahun 2018.



Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka, 2020

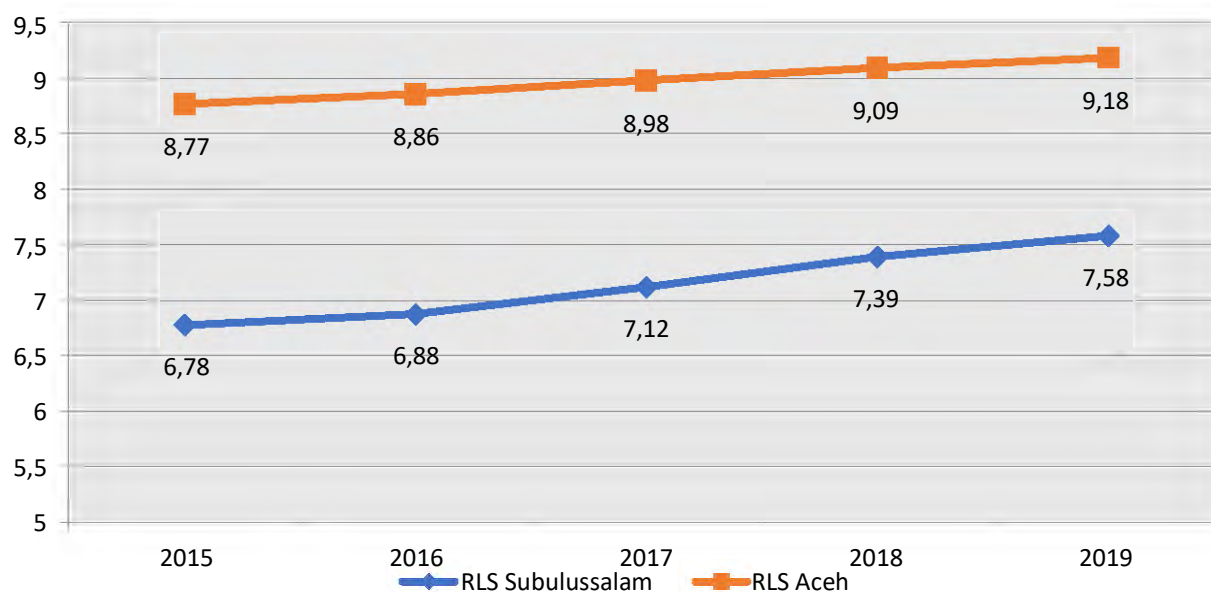
Gambar 2.13. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2016-2019

Dari gambar tersebut terlihat bahwa AHLS di Kota Subulussalam berada di bawah AHLS Provinsi Aceh, ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS di Kota Subulussalam meskipun ada peningkatan dalam kurun waktu empat tahun tetapi peningkatannya kurang signifikan.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian angka rata-rata lama sekolah mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Angka rata-rata lama sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri.

Untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama 2015-2019 terjadi tren peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam yaitu dari 6,78 di tahun 2015 menjadi 7,58 di tahun 2019. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam dan provinsi Aceh tahun 2015-2019.



Sumber: BPS, *Subulussalam Dalam Angka*, 2020

Gambar 2.14. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Dilihat data di atas, capaian rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam tahun 2015-2019 tertinggi adalah sebesar 7,58 tahun sedangkan capaian terendah adalah sebesar 6,78 tahun, dengan kata lain rata-rata penduduk Kota Subulussalam menyelesaikan jenjang pendidikan dasar namun tidak menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar Kota Subulussalam dengan Provinsi Aceh merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Subulussalam dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

2.2.2.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. *World Health Organization (WHO)* menyebutkan bahwa angka harapan hidup saat lahir mencerminkan tingkat kematian keseluruhan populasi. Angka harapan hidup saat lahir merangkum pola mortalitas yang berlaku di semua kelompok umur pada tahun tertentu (anak dan remaja, dewasa, dan orang tua).

Perkembangan AHH di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan peningkatan. Dari 63,27 di tahun 2015 meningkat menjadi 64,46 di tahun 2019.

Tabel 2.12.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Subulussalam dan Beberapa Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SUBULUSSALAM	63,27	63,42	63,56	63,69	64,46
ACEH SINGKIL	66,97	67,02	67,07	67,16	67,36
ACEH SELATAN	63,61	63,75	63,89	64,02	64,27
BANDA ACEH	70,89	70,92	70,96	71,1	71,36

Sumber: BPS, Subulussalam Dalam Angka, 2020

AHH dipengaruhi dari beberapa faktor seperti kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Peran sektor kesehatan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di Kota Subulussalam dipengaruhi oleh banyak faktor. Kesehatan menjadi salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam peningkatan tersebut. Peran pengaruh kesehatan dalam meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat.

Dari capaian peningkatan AHH Kota Subulussalam diprediksi akan berpengaruh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Sehingga diperlukan intervensi pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.

2.2.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga masih fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kependudukan (SDKI) Tahun 2017, AKI di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Di Kota Subulussalam sendiri perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kota Subulussalam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meskipun fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan dengan kisaran 1 – 4 kasus kematian ibu. Tahun 2015 kasus kematian ibu sebanyak 3 kasus, meningkat di tahun 2016 menjadi sebanyak 4 kasus dan kembali menurun di tahun 2017 menjadi 3 kasus dan 0 kasus di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah kematian ibu sebanyak 1 kasus.

Tabel 2.13.

**Perkembangan Jumlah Kematian Ibu di Kota Subulussalam
Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Ibu melahirkan (org)	3	4	3	0	1
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 LH	153	211	152	0	64

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

Tanggungjawab bersama untuk menjamin semua ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari saat hamil, persalinan sampai dengan perawatan pasca perkawinan serta akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Intervensi mulai dilakukan pada saat remaja melalui edukasi tentang kesehatan reproduksi dalam penurunan AKI.

2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam yang dikumpulkan dari seluruh bidan desa se-Kota Subulussalam, AKB di Kota Subulussalam tahun 2019 adalah 11 per 1000 kelahiran hidup, atau sebanyak 21 kasus.

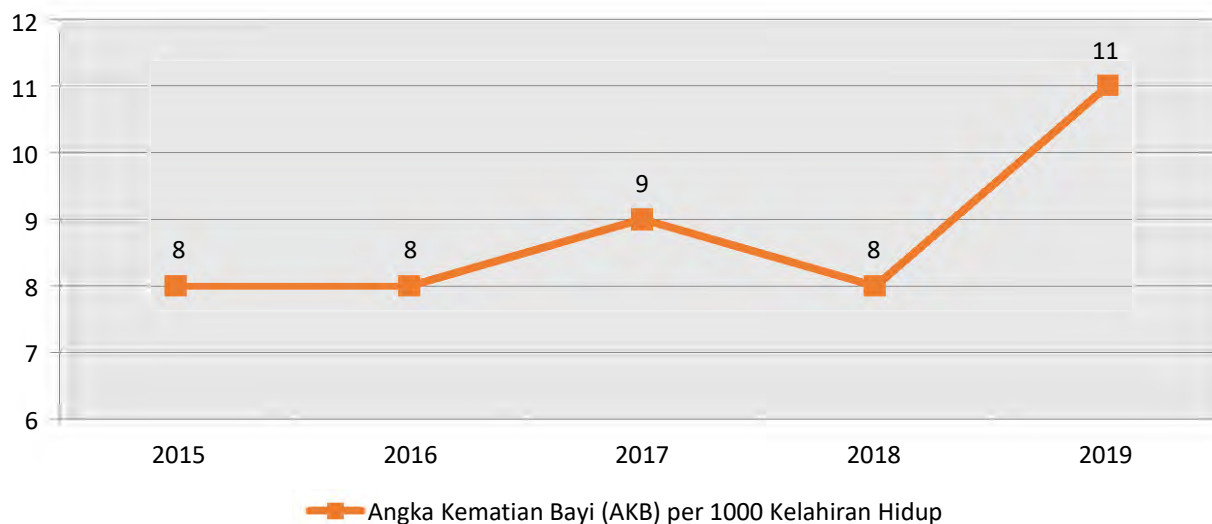
Tabel 2.14.

**Perkembangan Jumlah Kematian Bayi di Kota Subulussalam,
Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	7	8	9	16	21
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	8	8	9	8	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

Perkembangan AKB di Kota Subulussalam dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian Bayi. Dari data kurun waktu 2015-2019 diperoleh informasi perkembangan Jumlah kematian Bayi di Kota Subulussalam sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2020

Gambar 2.15. Perkembangan Angka Kematian Bayi Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami trend peningkatan. Di tahun 2015 AKB sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017 Perkembangan Angka Kematian bayi (AKB) mengalami Peningkatan menjadi sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2018 kembali menurun menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup. sampai dengan tahun 2019 AKB di Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab umum kematian bayi di Kota Subulussalam adalah berat bayi lahir rendah (BBLR) dan sepsis. Penyebab lain kematian bayi di Kota Subulussalam antara lain asfiksi pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Kebijakan kesehatan bayi difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi bayi.

2.2.2.6. Angka Kematian Balita (AKBA)

Perkembangan usia anak balita merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum.

Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan kesehatan balita adalah Angka Kematian Balita (AKBA). AKBA adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Target SDGs global untuk indikator Angka Kematian Balita (AKBA) adalah menurunkan Angka Kematian Balita 25 per 1.000. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam menunjukkan bahwa AKBA Kota Subulussalam tahun 2019 sebesar 2 per 1.000 kelahiran hidup yang berarti telah memenuhi target pemerintah. Dilihat dari jumlah kasus kematian balita di Kota Subulussalam, Kasus kematian Balita juga fluktuatif dari tahun 2015-2019 sebagai mana dapat dilihat pada (Tabel 2.15) berikut.

Tabel 2.15.

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Balita (Kasus)	5	47	17	16	21
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	0,7	5,9	2,1	1,5	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

2.2.2.7. Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang berdasarkan indikator status gizi. Untuk masalah balita kurus

(BB/TB) terjadi penurunan prevalensi secara bertahap dari tahun 2015 – 2019, namun jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh prevalensi balita kurus Kota Subulussalam 1,40% lebih dari dua kali dibawah prevalensi Aceh 6,0%, Untuk masalah underweight BB/U (buruk dan kurang) terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan hanya tersisa 6,30% di tahun 2019. Untuk masalah stunting (pendek) terjadi peningkatan kasus yang sebesar 7,2 % di tahun 2019 dan berada jauh di atas rerata provinsi Aceh. Sedangkan untuk masalah obesitas Kota Subulussalam berada dalam kategori tidak bermasalah dan masalah ringan.

Tabel 2.16.

**Perkembangan Masalah Status Gizi Balita Kota Subulussalam
(PSG 2015-2019)**

Tahun	Kurus/ Wasting	Bukur/ Underweight	Pendek/ Stunting	Obese/ Obesitas
	BB/TB	BB/U	TB/U	BB/TB
2015	16,70	22,70	31,70	4,00
2016	15,40	23,40	32,90	5,70
2017	15,00	29,10	47,30	3,30
2018	0,90	7,00	12,00	0,00
2019	1,40	6,30	20,80	0,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat sehingga menghasilkan seni budaya yang beragam juga. Beberapa seni budaya yang

terdapat di Kota Subulussalam diantaranya seperti Tari Dampeng, Tari Piring, Tari Lambe-lambe, Tari Srindayung, Tari siwah, Tari Adok, Tari Sikambang, Tari Ambai-ambai ken, Tari rapai sedok, Tari Mendatar Inai, Tari Biyahat sampai dengan saat ini masih digunakan.

2.2.3.2. Cagar Budaya

Keragaman budaya di Kota Subulussalam juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya yang bersejarah seperti Makam, Tugu, Rumah Tradisional, Monumen dan Benteng.

2.2.3.3. Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Disdikbudpora melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini ada 10 club olahraga yang mendapatkan pembinaan pemerintah yaitu club sepak bola dan bola voli yang berada di setiap kecamatan. Namun club olah raga lainnya seperti; bulu tangkis, tenis meja, futsal, renang, sepeda, tinju, dan panjat tebing belum terdata dengan baik.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Di era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang aparat pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan yaitu masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan apabila merujuk pada Undang-undang 23 tahun 2014 dikategorikan dalam dua hal, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk memastikan penyelenggaraan Pelayanan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara berjalan optimal maka diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk melihat sejauh mana capaian penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah bias dilihat pada indikator kinerja dari masing-masing sektor. Di bidang pelayanan pendidikan meskipun capaian Kota Subulussalam masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi Aceh, hal ini perlu upaya serius mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam bidang kesehatan masih diperlukan akselerasi pemenuhan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Di samping itu kondisi lingkungan juga akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi di Kota Subulussalam masih jauh dari 100%. Ini perlu percepatan dalam penyediaan air minum agar seluruh warga di Kota Subulussalam mendapatkan air minum. Pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.803 unit (tahun 2019) menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan mutu RTLH masih menjadi agenda prioritas. Kondisi lingkungan yang terkait dengan kesehatan masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian, seperti pencemaran sungai dan kualitas air tanah yang tidak memenuhi baku mutu karena tercemar bakteri.

Pemenuhan hak kependudukan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak di Kota Subulussalam sebesar 16,58%. Perhatian terhadap pelayanan terhadap anak juga harus dioptimalkan mengingat masih terjadinya kekerasan terhadap anak, anak terlantar, perkawinan di bawah umur.

Pemenuhan layanan Keluarga berencana dalam perspektif pengendalian penduduk diperlukan agar penduduk tumbuh seimbang dengan target *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,1 sehingga *dependency ratio* kecil sehingga banyak

penduduk produktif yang bekerja yang kemudian mendorong pada peningkatan ekonomi. Di sisi lain perlu juga memperbaiki pelayanan terhadap lansia karena diproyeksikan semakin besar jumlahnya.

Isu kesetaraan gender juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kegiatan, karena isu gender masih cukup mengemuka seperti seperti aktivitas perempuan dalam ekonomi masih tertinggal dengan laki-laki, demikian halnya dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih kecil dibanding laki-laki. Di sektor domestik perempuan masih memikul beban ganda, yaitu mengurus kebutuhan domestik dan masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu kekerasan dalam rumah tangga dimana lebih banyak perempuan sebagai korban.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

2.3.1.1 Pelaksanaan Syariat Islam

Aceh memiliki tempat istimewa dalam kontalasi perjalanan sejarah Indonesia. Bukan karena sumbangannya yang tidak ternilai dalam perjuangan Nasional, tetapi juga karena karakteristik budaya dan masyarakatnya yang tergolong unik dan menarik perhatian banyak kalangan. Disamping itu, Aceh telah diberikan hak Otonomi Khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan pelaksanaan Syari'at Islam. Kewenangan memberlakukan Syari'at Islam di Aceh berawal dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam.

Untuk menindaklanjuti kedua Undang-Undang di atas, dibentuklah peraturan-peraturan daerah atau Qanun di Aceh khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di lapangan yakni Qanun No.11 tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Dalam perkembangan selanjutnya perlakuan Syari'at Islam tersebut diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan

Pemerintah Aceh. Melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, diterbitkan payung hukum yang terbaru terhadap pelanggaran Syari'at Islam dalam bentuk Qanun, yaitu: Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syari'at Islam dan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Gelegar pemberlakuan Syari'at Islam di Kota Subulussalam di mulai sejak terbentuknya Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam sebagai unit kerja Pemerintah Daerah dan instansi otonom pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan pemerintah Kota Subulussalam. Namun saat ini telah terbit Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam, dimana Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas umum Pemerintah Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Syari'at Islam merupakan urusan keistimewaan Pemerintah Kota Subulussalam yang berfungsi pelayanan umum dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UU-PA) Pasal 125 dan Pasal 127.

Pasal 125 UU-PA mengamanatkan:

- 1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak
- 2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Selanjutnya, Pasal 127 UU-PA mengamanatkan :

- 1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari'at Islam.
- 2) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- 3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syari'at Islam.
- 4) Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan qanun yang memperhatikan peraturan perundang- undangan

Pemahaman dan pengamalan Syari'at Islam sebagai prioritas pembangunan daerah, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syari'at Islam adalah dengan penerapan aturan Islam untuk membentuk dan membudayakan perilaku islami dengan harapan membentuk kepribadian islami bagi masyarakat Kota Subulussalam. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai aturan Islam dalam kehidupan beragama secara kesinambungan dan mensosialisasikan aturan islam tersebut pada kehidupan masyarakat khususnya di Kota Subulussalam ke depan.

Upaya untuk mendukung terwujudnya kota yang Islami, Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah menjadikan peningkatan dan pemahaman dan pengamalan Syari'at Islam sebagai prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dalam bingkai Syari'at Islam. Sepanjang 2014 s/d saat ini, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam tetap melaksanakan

pengajian rutin mingguan bagi masyarakat. Pengajian rutin mingguan ini dihadiri oleh unsur pemerintah dan masyarakat luas dengan menghadirkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan keagamaan. Hal ini, dikarenakan para tokoh agama merupakan pembimbing serta penuntun masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai agama yang mereka yakini. Selain itu, Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah juga melakukan pengajian, yaitu membaca Al-Quran berupa surat yasin pada ba'da shalat magrib yang diiringi dengan tausiah dengan mengunjungi masjid - masjid dan meunasah/mushalla terutama Masjid Agung di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Hal ini, dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang Syari'at Islam yang nantinya diharapkan akan timbul kekebalan dalam masyarakat terhadap hal-hal yang negative (yang dilarang) oleh Syari'at Islam. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih tahu dan faham tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Materi- materi yang disampaikan berhubungan dengan tauhid, fiqih, tasawuf dan materi-materi lainnya dalam rangka untuk meningkatkan kepribadian islami masyarakat Kota Subulussalam secara menyeluruh. Kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan di Kota Subulussalam selama kurun waktu 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.

**Pengajian Rutin Peningkatan Pemahaman Syari'at Islam
Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	Jumlah Pertemuan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pengajian Rutin Mingguan	40 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	44 Kali
2.	Pengajian Rutin Bulanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		40 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	44 Kali

Sumber: Dinas Syari'at Islam Kota Subulussalam Tahun 2019

Tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun syariat belum semuanya dipatuhi. Hal ini, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah temuan kasus pelanggaran Syari'at Islam. Jumlah kasus pelanggaran yang menempati urutan terbanyak dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah pelanggaran terhadap implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam serta Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Perkembangan jumlah penemuan kasus pelanggaran yang ditemukan pada tahun 2014-2018 sebagaimana tertera pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.

**Kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Subulussalam
Tahun 2014-2018**

No.	Pelanggaran	Tahun (kasus)					Penyelesaian Kasus
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Busana Muslim	57	44	60	63	51	
2.	Khamar	3	17	21	8	8	
3.	Maisir	6	5	6	9	15	
4.	Khalwat	4	4	8	5	8	
Jumlah Kasus		70	70	95	85	82	

Sumber: Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam Tahun, 2019

Dari data di atas terlihat dari tahun ke tahun jumlah kasus meningkat, namun bukan itu yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan Syari'at Islam di satu daerah. Namun yang harus diperhatikan adalah tingkat pemahaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, artinya pemerintah tidak berhenti dengan sedikitnya kasus pelanggaran syariat yang terjadi, pemerintah harus terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka membina masyarakat untuk memahami Syari'at Islam.

2.3.1.2. Pengembangan Syiar Islam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam tidak hanya ibadah dan hukum, tetapi juga meliputi aspek ibadah, *ahwal al-syahshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam juga. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah telah melakukan penguatan syiar Islam di Kota Subulussalam seperti Penyuluhan Qanun, pelatihan manasik haji, perlombaan Festival anak shaleh, perlombaan zikir maulid, safari ramadahan, Perlombaan MTQ, perlombaan kegiatan Perayaan 1 Muharram yang bekerjasama dengan bagian kessos setdako Kota Subulussalam.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Kota Subulussalam akan berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran dan SDM ulama melalui program pengkaderan dan pemberdayaan ulama, hasilnya diharapkan akan lahir para ulama muda dan da'i yang mumpuni dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas yang tersebar di seluruh wilayah sehingga dapat berkontribusi nyata dalam masyarakat. Dengan hadirnya ulama dan da'i yang mempunyai wawasan ke-islaman yang mumpuni, mempunyai kompetensi intelektual dan integritas moral yang terpuji akan mampu merespon berbagai gejala dan fenomena sosial sehingga dapat berperan maksimal di tengah-tengah kehidupan umat serta diharapkan nantinya dapat mengurai dan memberikan solusi yang tepat atas berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, untuk itu Pemerintah Kota Subulussalam akan bekerja sama dengan MPU Provinsi yang sudah menetapkan satu program Pendidikan Kader Ulama (PKU) sesuai dengan amanah Qanun nomor 2 Tahun 2009 merupakan tugas pokok Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Disamping itu, Pemerintah Kota Subulussalam juga turut mendukung usaha peningkatan peran ulama dalam mencari berbagai solusi permasalahan

keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sehingga mendapat kejelasan hukum/fatwa syari'at baik yang berupa fatwa, taushiyah maupun himbauan/saran kepada masyarakat serta kepada instansi pemerintah berupa pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, disamping itu, MPU Kota Subulussalam juga ikut serta melaksanakan sosialisasi fatwa MPU Aceh kepada para ulama, unsur pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur wanita dan jajaran pemerintah kab/kota dan instansi terkait lainnya. Sosialisasi ini telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir di sebagian besar kab/kota yang ada di Aceh. Selama periode 2015-2017 MPU Kota Subulussalam telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam antara lain tersebut di dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.

**Kegiatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam
Periode Tahun 2015-2017**

No.	Tahun	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	2015 & 2016	Hari-Hari Besar Islam	Menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram
2.	2015 & 2016	Safari Ramadhan	Kunjungan MPU ke Mesjid atau Mushola ke 5 (lima) kecamatan
3.	2015	Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Syari'ah	50 (lima puluh) peserta
4.	2015 & 2016	Sosialisasi Fatwa MPU Aceh	-
5.	2015 & 2016	Pendidikan Kader dan Muzakarah Ulama	40 (empat puluh) kader ulama
6.	2017	Musyawahar Besar Ulama Tingkat Kota Subulussalam	Pemilihan pengurus MPU Kota Subulussalam Masa Khidmat 2017-2022
7.	2017	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Menyambut bulan Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Muharram
8.	2017	Sosialisasi Tata Cara Penjualan Hewan Halal	20 (dua puluh) pengusaha ternak potong di Subulussalam mendapatkan sertifikasi

Sumber: Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Subulussalam, 2019

2.3.1.3. Sarana Dan Prasarana Peribadatan

Dalam hal pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat keberadaan rumah ibadah terutama mesjid dan meunasah, telah lazim digunakan sebagai sarana menghidupkan syiar-syiar Islam seperti pembacaan dalail khairat, pengkajian ilmu-ilmu agama dan kegiatan syiar-syiar lainnya. Rumah ibadah di Kota Subulussalam pada Tahun 2018 berjumlah 97 Masjid dan 80 Meunasah/Mushalla yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagaimana terlihat Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Jumlah Masjid Dan Meunasah Dalam Kota Subulussalam
Tahun 2014 s.d 2018

No.	Kecamatan	Masjid					Meunasah/Mushalla				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Simpang Kiri	23	23	23	24	25	17	17	17	17	17
2	Penanggalan	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16
3	Rundeng	23	23	23	23	24	14	14	14	14	14
4	Sultan Dulat	19	19	19	19	19	24	24	24	24	24
5	Rundeng	15	15	15	15	15	9	9	9	9	9
Jumlah		94	94	94	95	97	80	80	80	80	80

Sumber: Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam Tahun, 2019

Selain Masjid dan Meunasah/Mushalla keberadaan Majelis Taklim dan juga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan khas Islam yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Melalui Majelis Taklim, masyarakat yang terlibat di dalamnya dapat merasakan betapa keberadaan lembaga ini menjadi sarana pembinaan moral spiritual serta menambah pengetahuan keislaman guna meningkatkan kualitas sumber daya muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Begitu juga halnya Taman Pendidikan Al-Quran sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan dasar bagi santri yang nantinya diharapkan menjadi anak yang saleh dan salihah serta fungsinya sebagai wahana pendidikan dan kesejahteraan santri.

Dinas Syari'at Islam untuk melakukan berbagai kebijakan dalam penerapan Syari'at Islam secara optimal (*kaffah*) di Kota Subulussalam yang seratus persen penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini pelaksanaan Syari'at Islam bukan sebatas pelaksanaan hukum cambuk bagi yang melanggarnya, akan tetapi pelaksanaannya lebih ditekankan bagaimana warga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dengan berlakunya Syari'at Islam tersebut. Sebagai indikator untuk memenuhi pencapaian target tentang fasilitas keagamaan tempat peribadatan berupa Masjid, Meunasah/Mushalla, dan Taman Pengajian Al-Quran (TPA) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di Kota Subulussalam.

2.3.1.4. Baitul Mal

Pengelolaan Harta Agama juga menjadi elemen penting dalam penerapan nilai Dinul Islam dalam masyarakat. Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dalam merealisasikan Syari'at Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrumen harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Sejak zaman Rasulullah sampai dengan sekarang pengelolaan harta agama yang dilakukan dengan manajemen yang baik mampu menciptakan kemandirian dan produktifitas masyarakat.

Penelitian potensi zakat di Aceh yang dilakukan pada tahun 2014 kerjasama Baitul Mal Aceh dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan (LP2M) UIN Ar-Raniry menyajikan angka yang cukup fantastis, yaitu 1,3 triliun potensi zakat seluruh Aceh pertahun, sedangkan rata-rata potensi zakat Kabupaten/Kota berkisar 58 miliar pertahun. Sumber-sumber zakat mal terdapat pada beberapa sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, perusahaan, perhotelan, kuliner/restoran, jasa/pelayanan, komunikasi dan transportasi, sektor bisnis riil, industri rumah tangga dan sektor lembaga keuangan. Dengan potensi sebesar ini seharusnya pemerintah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesenjangan sosial dan kemiskinan di Aceh. Demikian juga

regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 192 belum dapat dilaksanakan. Ini terjadi akibat belum sinkron UU Pajak Penghasilan dengan UUPA. Untuk ini diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat terlaksana dan muzakki tidak merasakan pembayaran ganda zakat dan pajak.

Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam selama tiga tahun terakhir adalah sebesar Rp. 8.795.588.510. Penerimaan Zakat dan Infaq tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.21 sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Kota Subulussalam
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Jumlah (Rp)			Persentase		
Sumber	Zakat	Infaq	Shadaqah	Zakat	Infaq	Shadaqah
2016	3.437.424.853	0.00	0.00	92%	0.00	0.00
2017	2.870.414.821	0.00	0.00	95 %	0.00	0.00
2018	2.487.748.836	0.00	0.00	83 %	0.00	0.00
Total	8.795.588.510	0.00	0.00	90 %	0.00	0.00

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam Tahun 2019

Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Subulussalam melalui Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan jenis penyaluran antara lain bantuan rumah layak huni kepada Fakir Miskin dan Muallaf, bantuan kepada Balai Pengajian. Disamping itu, Baitul Mal Kota Subulussalam juga memberikan bantuan beasiswa kepada Tahfidz MUQ dalam pengembangan Insan Qurani.

Sumber-sumber Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam saat ini merujuk kepada Qanun No. 10 tahun 2018, Peraturan Walikota No 14 Tahun 2015 dan Intruksi Walikota No. 451.12/078/Tahun 2020, telah memberikan kewenangan untuk mengumpulkan zakat, baik terhadap Lembaga Institusi Negara, baik instansi pusat, daerah, BUMN,



BUMD, Perusahaan swasta (*private*), dan juga zakat pendapatan dari PNS, Pegawai BUMN, POLRI, TNI, Anggota Dewan, dan lain- lain.

Sistem Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan pembagian Senif yang didata dan diverifikasi oleh Baitul Mal Kampong (BMK) yang terdiri dari Kepala Kampong dan Imuem Kampong. Pembagian kuota penyaluran berdasarkan Jumlah penduduk Kampong dalam Kecamatan yang kemudian di persentasekan. Selanjutnya Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Kota Subulussalam Tahun 2016 - 2018 di sajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Jumlah Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf di Kota Subulussalam
Tahun 2016 - 2018

No.	Uraian	Jumlahn Penerima	Satuan	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
Tahun 2016					
1.	Senif Fakir				
	Santunan Fakir	1.184	Orang	296,000,000	296,000,000
2.	Senif Miskin				
	Santunan Miskin	133	Orang	200,000,000	200,000,000
3.	Amil				
	Santunan Kepada UPZ (Bendahara SKPK)	143	Unit	57,350,000	57,350,000
4.	Senif Muallaf				
	Bantuan Muallaf	100	Orang	50,000,000	50,000,000
5.	Senif Gharim				
	Bantuan Balai Pengajian	100	Orang	50,000,000	50,000,000
6.	Fisabilillah				
	Santunan Kepada Guru TPA dan Diniyah	662	Orang	150,000,000	150,000,000
7.	Ibnu Sabil				
	Santunan Kepada Siswa Pesantren Luar Daerah	140	Orang	140,000,000	140,000,000
Jumlah Tahun 2016					943.350.000
Tahun 2017					
1.	Senif Fakir	2.680	Orang		
	Santunan Fakir Uzur		Orang	357,000,000,-	357,000,000
	Santunan fakir		Orang	753,000,000,-	753,000,000



No.	Uraian	Jumlahn Penerima	Satuan	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
2.	Senif Miskin	219	Orang		
	Santunan Miskin		Orang	328,500,000,-	328,500,000
	Bantuan Rehab Perumahan		Unit	600.000.000	600.000.000
3.	Amil				
	Santunan Kepada UPZ (Bendahara SKPK)	94	Unit	237,034,992	237,034,992
4.	Senif Muallaf				
	Santunan Muallaf	193	Orang	67,550,000,-	67,550,000
5.	Senif Gharim				
	Santunan biaya Berobat	160	Orang	80,000,000	80,000,000
6.	Fisabilillah				
	Santunan Kepada Guru TPA dan Diniyah	1.250	Orang	312,500,000	312,500,000
7.	Ibnu Sabil				
	Santunan Kepada Siswa Pesantren Luar Daerah	1.012	Orang	253,000,000,-	253,000,000
8.	Bantuan Rehab Musolla				
	Bantuan Rehab Musolla	40	Unit	70,000,000,-	70,000,000
9.	TAHFIZ-ALQUR'AN				
	Santunan Kepada Tahfiz Alqur'an	17	Orang	102,000,000.-	102,000,000
Jumlah Tahun 2017					3,160,584,992
Tahun 2018					
1.	Senif Fakir				
	Santunan Fakir	840	Orang	252,000,000	252,000,000
	Santunan Fakir Uzur		Orang	320,000,000	320,000,000
2.	Senif Miskin		Orang		
	Santuna Modal Usaha Miskin	84	Orang	126,000,000	126.000.000
	Bantuan Rehab Perumahan	30	Unit	450,000,000	450.000.000
3.	Amil				

No.	Uraian	Jumlahn Penerima	Satuan	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
	Santunan kepada UPZ (Bendahara SKPK)	73	Unit	76,000,000	76,000,000
4.	Senif Muallaf				
	Santunan Kepada Muallaf	65	Orang	26,000,000	26,000,000
5.	Senif Gharim				
	Biaya berobat	-	-	-	-
6.	Fisabilillah				
	Santunan Kepada Guru TPA dan Diniah	400	Orang	120,000,000	120,000,000
7.	Ibnu Sabil				
	Santunan Kepada Siswa Pesantren Luar Daerah	300	Orang	75.000.000	75.000.000
Jumlah Tahun 2018					1,445.000,000

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kota Subulussalam, 2019

2.3.1.5. Peranan Majelis Adat Daerah

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat-istiadat dalam pengembangannya secara umum diarahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adat-istiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Hubungan adat dengan syariat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana petuah narit maja “*Hukom ngon Adat lagei dzat ngon sifeut*”. Hubungan adat dengan syariat dimaksud, tidak dapat dipisahkan, dimana sisi syariat sebagai penyaring nilai-nilai adat dan pada sisi adat sebagai pilar pendukung terlaksananya syariat seperti petuah narit maja “*Hukom meunyoe hana meu adat tabeu, Adat meunyoe hana hukom bateu*”. Artinya: *Hukom* (syari’at) tanpa adat hambar, adat tanpa syariat batal (tidak sah).

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM.

Selanjutnya, norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, *adat meulaot* (adat laut), *adat meulampoh* (adat berkebun), *adat meugoe* (adat bersawah), *adat mawah* (adat bagi hasil), *adat treun u blang* (adat turun ke sawah), adat ternak, dan *adat uroe peukan* (adat hari pekan). Namun, pada saat ini penerapan norma-norma tersebut sudah mengalami kemunduran. Hal ini jelas terlihat di kehidupan sehari-hari, di dalam masyarakat.

Penyebab utama kemunduran tersebut adalah kurangnya kegiatan pembinaan pada pemuka adat, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu memberikan dampak pada minimnya tingkat pemahaman masyarakat dalam menerapkan adat dan adat-istiadat. Di samping itu, pengaruh globalisasi yang bernilai negatif melunturkan nilai-nilai adat di masyarakat. Selain itu tidak cukup kuatnya upaya perlindungan terhadap keberadaan khazanah adat Aceh (*Heritage*) menyebabkan banyak khazanah adat dan peninggalan sejarah/peradaban Aceh telah hilang dan dilupakan. Selain itu masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan prosesi adat di kalangan generasi muda, wanita, pelajar, mahasiswa dan aparatur pemerintah sehingga telah menyebabkan kehidupan adat semakin terpuruk. Di sisi lain, kurang

optimalnya peran lembaga-lembaga adat, seperti *Panglima Laot*, *Keujruen blang*, *peutua seuneubok*, *pawang glee*, *haria peukan*, *syahbanda*, fungsi keuchik, *imuem mukim* (*kepala Mukim*), *tuha peut gampong*, *tuha peut mukim*, *imuem meunasah* (imam kampung) dan sekretaris kampong/mukim. Terutama dalam menegakkan kehidupan adat dalam bidang sosial, pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat.

Sampai saat ini, jumlah pimpinan adat yang sudah dilatih dalam bidang lembaga adat, mencapai 15 orang, dalam bidang *seumapa/narit maja* dan dalam bidang peradilan adat 100 orang. Padahal, jumlah pimpinan adat di seluruh Aceh diperkirakan mencapai 58.920 orang. Terdiri dari 3.044 orang pada tingkat mukim dan 55.876 orang pada tingkat kampong. Itupun jumlah anggota *tuha peut* di tingkat mukim dan di tingkat kampong diperkirakan minimal lima orang per mukim/kampong. Dengan demikian, masih sangat banyak sekali tokoh adat yang perlu mendapatkan pelatihan dalam bidang adat, adat istiadat dan peradilan adat.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adat maka perlu dilakukan sosialisasi adat/adat istiadat dan pendampingan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi penguatan adat dan adat-istiadat di daerah diarahkan kepada:

- a. Upaya pelestarian, penguatan dan pengembangan nilai-nilai adat dan adat-istiadat perlu memberikan apresiasi kepada yang berjasa dan konsisten melestarikan adat dan adat-istiadat serta khazanah adat. Selain itu, penguatan lembaga adat, pembinaan prosesi adat-istiadat, pengkajian, sosialisasi nilai-nilai adat perlu menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah.
- b. Melindungi hak-hak adat masyarakat semukim, termasuk melindungi dan mempertahankan hak ulayat mukim atas sumber daya alam setempat.
- c. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan pemenuhan hak masyarakat adat atas sumber daya alam, termasuk upaya pembinaan dan perlindungan hak ulayat mukim dan kampong.

Berdasarkan kerangka kebijakan di atas, maka Pemerintah Kota Subulussalam berencana akan memprioritaskan program/kegiatan pembinaan adat sebagai berikut :

- a. Penguatan kapasitas pimpinan adat, khususnya imuem mukim, kepala kampung, imuem chik, imuem kampung, *tuha peut* dan tokoh masyarakat lainnya.
- b. Peningkatan kapasitas dan kuantitas seniman di Kota Subulussalam dalam pelaksanaan acara *seumapa*, *narit maja* dan seni budaya lainnya yang ada di daerah.
- c. Penguatan pemahaman adat di kalangan birokrasi Kota Subulussalam, generasi muda dan tokoh masyarakat
- d. Pemberian perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat termasuk adat setempat.

2.3.1.6. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Pemerintah Kota Subulussalam telah membentuk wadah yang memberikan masukan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan, yaitu Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dengan Visinya “Terwujudnya pelayanan pendidikan yang religius, profesional, berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, menguasai IPTEK, berdaya saing, berwawasan kebangsaan dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Subulussalam.

Untuk terwujudnya visi tersebut MPD mempunyai misi, yaitu:

- 1). Mendorong peran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan kompetitif;
- 2). Menumbuhkan kembangkan ide/gagasan yang aspiratif dari masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan komite sekolah/madrasah;
- 3). Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif, ikut serta mencegah pengaruh negative melalui ide/gagasan/saran kreatif dan inovatif;
- 4). Mendorong terciptanya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta dijiwai oleh semangat kebangsaan;
- 5). Memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota

Subulussalam guna mewujudkan tujuan pendidikan Nasional;

- 6). Mendorong pengembangan dan pelestarian budaya sebagai basis pendidikan;
- 7). Memantapkan dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dan industri (DUDI) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan kompetitif secara berkelanjutan;
- 8). Mendorong kinerja Pemerintah Kota Subulussalam dan masyarakat dalam pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- 9). Mendorong dan memantapkan kondisi dan citra Kota Subulussalam sebagai Kota Pendidikan yang Religius, berkualitas dan kompetitif.

Majelis pendidikan daerah (MPD) Kota Subulussalam merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya, dengan tujuan:

- 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di Kota Subulussalam;
- 2). Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kota Subulussalam dalam penyelenggaraan pendidikan;
- 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di Kota Subulussalam.

Adapun peran yang dijalankan MPD Kota Subulussalam adalah: 1). Sebagai lembaga pemikir mengenai pembangunan pendidikan. 2). Pemberi pertimbangan (*advisor agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Subulussalam; 3). Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Subulussalam; 4). Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan keluaran pendidikan; 5). *Mediator* antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat Kota Subulussalam. Selama periode 2014-2018 MPD Kota Subulussalam telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan kota subulussalam antara lain sebagaimana pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Kegiatan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam
Periode Tahun 2014 - 2018

No.	Tahun	Jenis Kegiatan
1.	2014	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca
2.	2014	Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang Pendidikan
3.	2014 s.d 2018	Fasilitasi Rapar Kerja MPD dengan Instansi Pemerintah terkait dan para stakeholder
4.	2015	Evaluasi keberadaan Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam
5.	2015 s.d 2018	Evaluasi dan diskusi tentang peran dan fungsi pengawas pendidikan
6.	2015 s.d 2018	Evaluasi dan dengar pendapat dengan komite sekolah
7.	2015 & 2016	Kajian Ilmiah berdirinya Perguruan Tinggi di Kota Subulussalam
8.	2015 & 2017	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Beasiswa Pendidikan Kota Subulussalam
9.	2015	Monev Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di semua tingkat sekolah
10.	2015	Pelatihan peningkatan kapasitas personil pengurus MPD
11.	2015	Kajian dan evaluasi efektifitas dan dampak kebijakan anggaran pendidikan terhadap peningkatan akses pendidikan
12.	2015	Kajian kualitas pendidikan di Kota Subulussalam
13.	2015 s.d 2017	Public hearing (Jejak pendapat/dialog dengan masyarakat) terkait mutu pendidikan
14.	2016	Pelatihan Peningkatan kinerja Kepala Sekolah
15.	2016	Sosialisasi pendidikan berkarakter Islami
16.	2016	Seminar peningkatan prestasi O2Sn,FLS2N
17.	2016	Pembentukan Komisi Beasiswa
18.	2016	Publikasi Informasi layanan pendidikan
19.	2016	Monitoring Ujian Nasional
20.	2016 s.d 2018	Monitoring pelaksanaan Tahun Ajaran Baru

21.	2016	Penelitian Kebutuhan jurusan pada pendidikan diluar domisili
22.	2016	Seminar kebutuhan jurusan pada pendidikan diluar domisili
23.	2016	Penyusunan proposal pendirian pendidikan diluar domisili
24.	2016	Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
25.	2017	Monev pelaksanaan Proses Beajar Mengajar (PBM) pendidikan Dayah
26.	2017	Pengelolaan Beasiswa Kota Subulussalam
27.	2017 & 2018	Tindak lanjut pendirian perguruan tinggi
28.	2017 & 2018	Evaluasi dan diskusi pendidikan dayah
29.	2017 & 2018	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan Kota Subulussalam
30.	2017	Evaluasi dan diskusi peningkatan mutu pendidikan
31.	2018	Fasilitasi siswa lulusan SLTA/ sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi
32.	2018	Rapat koordinasi dengan tenaga pendidik dan stakeholder pendidikan

Sumber: Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Subulussalam, 2019

Untuk menjalankan perannya MPD memiliki fungsi untuk: 1) mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Subulussalam; 2) melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, Pemerintah dan DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3) menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; 4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPRK Kota Subulussalam mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan; b) kriteria kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan; c) kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d) kriteria fasilitas pendidikan; dan e) hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2.3.1.7. Pendidikan Dayah

Sebagai sebuah daerah yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan Syari'at Islam dapat mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam di bidang pendidikan dengan peningkatan kualitas umat dan kualitas penyelenggaraan Syari'at Islam di Kota Subulussalam, maka lembaga pendidikan dayah terus berkembang menjadi sistem pendidikan alternatif bagi generasi muda. Banyak lembaga pendidikan dayah yang terus berbenah dalam rangka menjamin mutu lulusannya di hampir semua kecamatan. Ada beberapa lembaga pendidikan dayah sudah eksis sebelum adanya pemekaran Kota Subulussalam dengan mutu berkualitas seperti Dayah DMT Subulussalam Jontor di Kecamatan Penanggalan dan Mardhatillah di Kecamatan Simpang Kiri dan Hidayatullah di Kecamatan Simpang Kiri dan Jannatul Firdaus di Kecamatan Simpang Kiri dan Umumnya lembaga pendidikan dayah di Kota Subulussalam menganut model pembelajaran Salafiyah sesuai dengan kearifan masyarakat Aceh.

Seiring dengan penyelenggaraan Syari'at Islam di Kota Subulussalam dan di Aceh pada umumnya, maka Lembaga Pendidikan Dayah terus berkembang dalam mengemban tugas untuk mendidik generasi muda yang Islami. Ada beberapa lembaga Pendidikan Dayah yang sudah ada sebelum adanya pemekaran Kota Subulussalam dengan mutu Pendidikan Dayah yang berkualitas seperti Dayah DMT. Subulussalam Jontor di Kecamatan Penanggalan dan Al-Mansuriyah di Kecamatan Penanggalan dan Mardhatillah di Kecamatan Simpang Kiri dan Hidayatullah di Kecamatan Simpang Kiri dan Jannatul Firdaus di Kecamatan Simpang Kiri dll. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah terus meningkat dari tahun ke tahun dan diikuti dengan penyediaan dan perbaikan mutu sarana dan prasarannya. Tahun 2014 Dayah di Kota Subulussalam terdapat 12 Unit, dayah terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2018 menjadi 18 unit. Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kota Subulussalam Tahun 2014-2019 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.

Jumlah Dayah, Guru, dan Santri di Kota Subulussalam Tahun 2014-2019

No	Kecamatan	Dayah (unit)						Guru (orang)						Santri (orang)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Simpang Kiri	4	4	4	4	4	5	112	112	60	58	146	198	1.171	1.171	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Penanggalan	4	4	4	4	5	5	58	58	59	46	53	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Rundeng	1	2	2	2	4	4	39	39	15	15	18	61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Sultan Daulat	2	2	2	2	2	3	12	12	12	12	23	81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Longkib	1	1	1	1	3	4	7	7	7	7	12	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		12	13	13	13	18	21	228	228	153	138	252	444	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2019

Peningkatan jumlah dayah seiring dengan bertambahnya jumlah santri yang dari tahun ke tahun di Kota Subulussalam. Jumlah santri terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2019 di Kota Subulussalam. Disamping terdapat pendidikan dayah, terdapat juga Balai Pengajian yang tersebar di setiap Kecamatan dengan jumlah 63 Balai Pengajian dengan jumlah santri 4.181 orang pada tahun 2019. secara rinci di sajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.

**Jumlah Balai Pengajian, Guru dan Santri di Kota Subulussalam
Tahun 2018 dan 2019**

No	Kecamatan	Balai Pengajian (Unit)		Guru (Orang)		Santri (orang)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Simpang Kiri	20	23	39	46	1.177	1.421
2	Penanggalan	7	8	32	34	560	560
3	Rundeng	8	10	21	26	600	653
4	Sultan Daulat	12	18	30	54	900	1.300
5	Longkib	4	4	8	8	398	247
Jumlah		51	63	130	148	3.635	4.181

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Subulussalam, 2019

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.2.1. Pendidikan

Filosofi yang mendasari pemerintah Kota Subulussalam dalam melindungi, memelihara, serta membina kesejahteraan masyarakat terangkum dalam **“SADA KATA”**. Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Kota Subulussalam yang berkelanjutan berbasiskan nilai budaya yang islami. Salah satu hal utama yg perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Subulussalam yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang islam yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’, yang berasaskan ‘*rasa Hablum Minallah dan rasa Hablum Minannas*’. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat Keislaman di Kota Subulussalam.

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Banyak Faktor yang menyebabkan siswa tidak bersekolah lagi, selain dari beberapa anak usia tersebut banyak bersekolah keluarah daerah dan lainnya berkaitan dengan tuntutan ekonomi, lingkungan sosial, sarana dan prasarana, aksesibilitas, motivasi yang lemah dan komitmen dari keluarga.

Tabel 2.26 di bawah menunjukkan bahwa capaian APM Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 khusus untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun terus meningkat. Tingkat pendidikan SD/MI sederajat sejak tahun 2015 sebesar 97,99% meningkat menjadi sebesar 99,53 % pada tahun 2019. Begitu juga dengan tingkat SMP/MTs sederajat mengalami peningkatan jumlah usia 13-15 tahun dari 85,55% di tahun 2015 meningkat menjadi 95,20% di tahun 2019. Pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sederajat merupakan penduduk

usia 16-19 tahun juga menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 62,82 % pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 78,65% pada tahun 2019.

Tabel 2.26.

Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI Sederajat	97,99	98,53	99,29	100	99,53
SMP/MTs Sederajat	85,55	92,28	90,53	93,2	95,2
SMA/SMK/MA Sederajat	62,82	79,84	79,42	77,24	78,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2019

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS di Kota Subulussalam selama periode 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
7 Tahun s/d 12 Tahun	100	98,84	99,26	100	100
13 Tahun s/d 15 Tahun	98,51	99,29	98,93	99,6	98,54
16 Tahun s/d 18 Tahun	79,87	89,37	83,82	89,64	90,57
19 Tahun s/d 24 Tahun	n/a	31,13	30,4	35,36	35,75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2019

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa, Angka Partisipasi Sekolah ditingkat SD/MI (usia 7 - 12 tahun) telah mencapai angka 100 persen pada tahun 2019. Sedangkan APS di tingkat SMP/MTs (13-15 Tahun) berfluktuasi dan begitu juga dengan APS di tingkat SMA/MA/SMK juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28.

**Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019**

Tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI Sederajat	120,77	110,19	115,32	118,72	120,03
SMP/MTs Sederajat	90,55	101,79	93,88	94,55	96,62
SMA/SMK/MA Sederajat	84,76	89,52	98,71	98,94	99,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa APK tingkat SD/MI sederajat, APK tingkat SMP/MTs Sederajat dan APK tingkat SMA/SMK/MA Sederajat kondisinya berfluktuasi artinya persentasenya naik turun di empat tahun terakhir. APK tingkat SD/MI sederajat pada tahun 2019 sebesar 120,03 persen. Artinya mengalami peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya. APK tingkat SMP/MTs Sederajat pada tahun 2019 sebesar 96,62 persen. Artinya mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya APK tingkat SMA/SMK/MA Sederajat pada tahun 2019 sebesar 99,35 persen mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan APK 98,94 persen. Artinya ada sekitar 0,41 persen mengalami kenaikan. Masih adanya usia sekolah pada tingkatan SLTP/sederajat yang tidak berpartisipasi kemungkinan besar disebabkan oleh adanya siswa yang sekolah pada suatu tingkatan pendidikan tertentu yang tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studinya. Oleh karena itu, program perbaikan mutu guru dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kualitas manajemen pendidikan pada semua jenjang pendidikan sangat diperlukan.

D. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dihitung dengan cara membandingkan jumlah ketersediaan sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan menengah dikali 10.000. mengetahui rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengindikasikan ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia penduduk setiap jenjang pendidikan.

Tabel 2.29.

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2015- 2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10.000	81,69	85,64	86,02	86,99	73,79
Rasio ideal per 10.000	52				
Total Sekolah pendidikan dasar (unit)	114	121	124	125	125
Jumlah sekolah (SD) Unit	79	83	83	83	83

Jumlah sekolah (SMP) Unit	19	22	25	26	26
Jumlah sekolah (MI) Unit	5	5	5	5	5
Jumlah sekolah (MTs) Unit	11	11	11	11	11
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn + (13 sd 15) orang	13.956	14.129	14.415	14.369	16.939
Jumlah penduduk usia (7 sd 12) thn	10.136	10.098	10.317	10.441	8.837
Jumlah penduduk usia (13 sd 15) thn	3.820	4.031	4.098	3.928	8.102
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidik menengah X 10.000	32,26	37,99	39,46	42,06	32,99
Total unit	19	24	25	26	27
Jumlah sekolah (SMA) unit	8	12	12	13	13
Jumlah sekolah (SMK) unit	4	4	5	5	5
Jumlah sekolah (MA) unit	7	8	8	8	8
Jumlah penduduk usia (16 sd 19) Tahun (orang)	5.890	6.317	6.335	6.181	8.182

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2019

Rasio ketersediaan sekolah dasar pendidikan dasar terhadap penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2019 di Kota Subulussalam adalah sebesar 73,79/10.000 penduduk usia pendidikan dasar. Hal ini bermakna tersedia 73 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Jumlah sekolah pendidikan dasar yang tersedia saat ini adalah 125 unit yang melayani 16.939 penduduk usia pendidikan dasar. Jumlah sekolah pendidikan dasar sudah memadai karena jumlah standar sekolah setiap 10.000 penduduk terdapat 52 unit sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2019 di Kota Subulussalam adalah sebesar 32/10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Hal ini bermakna tersedia 32 sekolah dapat melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA yang tersedia saat ini adalah 27 unit yang melayani 8.182 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah sudah memadai karena berdasarkan rasio di atas 17-18 sekolah dapat melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Namun fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana olah raga masih belum memadai.

E. Rasio Guru terhadap Murid/Siswa

Rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. PP Nomor 74 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rasio guru murid adalah 1 : 20 untuk sekolah umum dan 1 : 15 untuk madrasah. Dengan kata lain bahwa setiap satu orang guru minimal mengasuh/mengajar sebanyak 15-20 orang murid. Rasio ketersediaan guru terhadap murid/siswa disajikan pada Tabel 2.17.

Rasio ketersediaan guru SD/MI terhadap Murid SD/MI pada tahun 2019 di Kota Subulussalam adalah sebesar 1.104/10.000 artinya bahwa 1 guru dapat melayani 10-11. Rasio ideal 1 orang guru pendidikan dasar berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh kementerian adalah 1 orang guru minimal melayani 20 murid. Dapat disimpulkan bahwa secara umum ketersediaan guru untuk jenjang pendidikan SD/MI relatif memadai bahkan cenderung kelebihan guru. Begitu juga yang terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dimana ketersediaan guru pada tahun 2019 sudah memadai dimana rasio guru sebesar 1 : 13.

Permasalahan yang sering muncul dalam ketersediaan guru di Kota Subulussalam adalah penyebaran guru yang tidak merata, banyak guru berada atau mengajar pada sekolah-sekolah yang tidak jauh dari ibu kota, sehingga sekolah-sekolah yang jauh dari ibu kota bahkan ibu kota kecamatan kurang guru. Beberapa kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir adalah melakukan perekrutan guru kontrak, sehingga ketersediaan guru menjadi diminimalisir. Kondisi ini harus segera diselesaikan dengan cara melakukan penerimaan guru tetap yakni adanya penerimaan pegawai ASN yang baru atau mengangkat guru kontrak yang tersedia menjadi guru tetap.

Tabel 2.30.
Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid/Siswa
Tahun 2015 - 2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio guru terhadap murid SD/MI X 10.000	2.147	1.237	1.104	949	1.104
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs X 10.000	716	807	737	809	737
Rasio ideal	500				
Total guru Pendidikan Dasar	1.582	1.529	1.375	1.195	1.375
Total Guru SD/MI	1.130	1.052	940	867	940
Jumlah Guru SD	1.083	1.004	890	867	890
Jumlah Guru MI	47	48	50	N/A	50
Total Guru SMP/MTs	452	477	435	328	435
Jumlah Guru SMP	291	349	319	328	319
Jumlah Guru MTs	161	128	116	N/A	116
Total Murid Pendidikan Dasar	13.680	18.270	18.358	16.645	18.358
Total Murid SD/MI	7.370	12.356	12.456	12.591	12.456
Jumlah Murid SD	6.466	11.468	11.502	11.637	11.502
Jumlah Murid MI	904	888	954	954	954
Total Murid SMP/MTs	6.310	5.914	5.902	4.054	5.902
Jumlah Murid SMP	4.607	4.277	4.309	4.054	4.309
Jumlah Murid MTs	1.703	1.637	1.593	N/A	1.593
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah X 10.000	1616,9	830,8	823,57	839,97	823,57
Total Guru SLTA	574	437	436	390	436
Jumlah Guru SMA	423	234	234	256	234
Jumlah Guru SMK	59	111	115	134	115
Jumlah Guru MA	92	92	87	N/A	87
Total Murid SLTA	3550	5260	5294	4643	5294
Jumlah Murid SMA	1244	3162	3170	3249	3170
Jumlah Murid SMK	1751	1385	1445	1394	1445
Jumlah Murid MA	555	713	679	N/A	679

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam 2019

Rasio ketersediaan guru jenjang SMA/MA pada tahun 2019 juga sudah memadai, dimana rasio sebesar 1 : 11 siswa dan ini sesuai dengan rasio ideal guru terhadap murid yakni 1 guru dapat melayani 20 siswa. Saat ini khusus jenjang pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam, namun dalam hal perkembangannya koordinasi dengan Pemerintah Aceh tetap harus terjalin dengan baik.

F. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesarjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.31.

Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 - 2019

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU (ORANG)	KUALIFIKASI S1/D-IV (ORANG)	PERSENTASE
2015	SD	873	487	55,7
	SMP	332	328	98,7
	SMA	337	337	100
2016	SD	869	476	54,77
	SMP	332	330	99,39
	SMA	337	337	100
2017	SD	867	543	62,62

	SMP	328	325	99,08
	SMA	345	345	100
2018	SD	867	634	73,12
	SMP	328	325	99,08
	SMA	345	345	100
2019	SD	836	674	80,6
	SMP	298	282	94,63
	SMA	356	356	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam 2019

Dari tabel 2.31 menunjukkan bahwa jumlah guru yang memiliki kualifikasi pada tahun 2019 sudah mencapai 80,61 Persen untuk guru SD, 94,63 Persen untuk guru SMP dan 100,00 Persen untuk guru SMA/SMK. Jumlah persentase guru yang memiliki kualifikasi jika di bandingkan dengan jumlah guru sudah cukup baik bahkan sudah mencapai 100,00 % untuk jenjang SMA/SMK dari total jumlah guru. Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu ditingkatkan, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

2.3.2.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kota Subulussalam tahun 2015 - 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32.

Angka Kematian Ibu di Kota Subulussalam Tahun 2015- 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Ibu melahirkan (org)	3	4	3	0	1
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 LH	153	211	152	0	64

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2019

Selama periode 2015-2019 angka kematian ibu di Kota Subulussalam cenderung fluktuatif, akan tetapi bisa dikatakan hampir setiap tahun terjadi kematian ibu saat melahirkan. Bila dirata-ratakan kematian ibu melahirkan selama periode tersebut sebanyak 3 orang setiap tahun. Pada akhir tahun 2019 angka kematian ibu sebesar 64 per seratus ribu kelahiran hidup atau rata-rata 1 orang.

Beberapa penyebab terjadinya kematian ibu melahirkan secara umum adalah pendarahan pada saat akan melahirkan, hipertensi atau naiknya tekanan darah si ibu yang disebabkan oleh rasa ketakutan pada kelahiran pertama dan pada saat proses partus terlalu lama sehingga menyebabkan si ibu kelelahan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi dihitung berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB) dibawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kejadian AKB di Kota Subulussalam sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dimana pada tahun 2015 terjadi penurunan 8 per

1000 kelahiran hidup dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup. Kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 8 per 1000 kelahiran hidup dan kembali meningkat menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh pada tahun 2019 sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup, dimana angka ini jauh lebih baik dari angka nasional. Jumlah AKB di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Bayi (Kasus)	7	8	9	16	21
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	8	8	9	8	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Angka kematian bayi di Kota Subulussalam masih relatif banyak terjadi di daerah pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami hambatan financial atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Jumlah AKABA di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.

**Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam
Tahun 2015 – 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Balita (Kasus)	5	47	17	16	21
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	0,7	5,9	2,1	1,5	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Dari tabel 2.25 di atas menunjukkan bahwa tingkat kematian balita di Kota Subulussalam sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 fluktuatif. Pada tahun 2016 AKABA terjadi 5,9 dari 1000 kelahiran hidup menurun signifikan pada tahun 2017 dan 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 yakni sebesar 2,0 AKABA dari 1000 kelahiran hidup, bermakna bahwa diantara 1000 kelahiran hidup ada 2 balita yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun pada tahun 2019. AKABA di Kota subulussalam masih rendah jika di bandingkan dengan tingkat AKABA Nasional dan tingkat Aceh, namun AKABA tersebut tetap menjadi permasalahan dalam peningkatan generasi yang sehat dan berdaya saing sesuai dengan capaian SDGs.

D. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada

masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Tabel 2.35.
Rasio posyandu per satuan balita tahun 2015-2019
Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio posyandu per satuan balita x 1000	14,5	13,4	13,5	11	10,6
Jumlah posyandu	107	107	111	118	115
Jumlah balita	7.369	8.012	8.248	10.683	10.849

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Hasil perhitungan rasi posyandu terhadap persatuan balita di Kota Subulussalam seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.35 di atas bermakna bahwa setiap 1 unit Posyandu telah melayani 100 balita pada Tahun 2019. Jika melihat perkembangan pada tahun sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 perkembangan ketersediaan posyandu tidaklah meningkat secara signifikan. Rasio idel untuk 1 posyandu adalah 1 : 50 balita, jika demikian keberadaan jumlah posyandu di Kota subulussalam masih belum memadai.

Kedepan program posyandu harus terus digalakkan dengan menambah unit posyandi di setiap desa sehingga mencapai rasio ideal yang di tentukan, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

E. Rasio Puskesmas, Klinik, Poskesdes dan Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan salah satunya harus didukung dengan sarana yang memadai, sehingga penanganan terhadap suatu kejadian semakin cepat dan tanggap. Kota Subulussalam pada saat ini semakin meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, namun pemanfaatan sarana tersebut masih belum optimal karena belum adanya komitmen yang kuat dari tenaga kesehatan untuk memanfaatkan sarana tersebut sehingga banyak yang tidak terpakai dengan baik. Maka oleh sebab itu, antara sarana dan tenaga kesehatan harus sejalan, karena keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rasio tersebut dapat kita lihat pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.36.

**Rasio puskesmas, klinik, poskesdes dan Rumah sakit
per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk x 1000	0,07	0,06	0,06	0,09	0,09
Rasio Rumah sakit persatuan penduduk x 1000	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk	92	109	107	105	103
Puskesmas	5	5	5	7	7
Klinik	2	2	2	2	2
Poskesdes	67	82	82	82	82
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	75.188	77.084	74.725	80.215	81.735

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Dilihat pada sajian table 2.36. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk adalah 1 : 103

penduduk. Jika dibandingkan dengan standart Kementerian Kesehatan RI yaitu 1(satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Rasio ini memberikan arti bahwa ketersediaan pusat kesehatan masyarakat tersedia merata setiap kecamatan. Kedepan pemerintah Kota Subulussalam ketersediaan sarana kesehatan ini harus di jaga dan didukung agar bangunan yang ada terjaga dengan baik.

Rasio rumah sakit terhadap per satuan penduduk di kota Subulussalam seperti yang tertera dalam tabel 2.27 menunjukkan bahwa 1 unit Rumah Sakit telah menampung lebih kuran 1000 pasien setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rasio idealnya adalah 1 ; 100000 penduduk, artinya bahwa keberadaan Rumah sakit di Kota Subulussalam masih dapat menampung pasien.

F. Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis
- tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis
- tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat
- tenaga kebidanan ialah bidan
- tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
- tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.

- tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- tenaga kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang membindangi urusan kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, tenaga kesehatan di Kota Subulussalam terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, taknisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Berikut disajikan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Kota Subulussalam pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Rasio Tenaga Kesehatan
per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1000	3,9	5,13	3,49	11,36	7,35
Jumlah Keseluruhan Tenaga Kesehatan	348	475	303	911	601
RASIO TENAGA DOKTER PER 1000 PENDUDUK	0,28	0,37	0,41	0,40	0,61
Jumlah Dokter disetiap kecamatan	8	10	14	11	17
- Dokter Umum	6	8	9	8	11
- Kecamatan Penanggalan	1	2	3	2	4
- Kecamatan Simpang Kiri	3	2	4	2	2
- Kecamatan Rundeng	1	1	0	1	1
- Kecamatan Longkip	1	1	2	1	1
- Kecamatan Sultan Daulat	0	2	0	2	3

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Dokter Gigi	2	2	5	3	6
- Kecamatan Penanggalan	1	1	2	1	2
- Kecamatan Simpang Kiri	1	1	2	2	2
- Kecamatan Rundeng	0	0	1	0	0
- Kecamatan Longkip	0	0	0	0	1
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	0	1
TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT	176	221	226	595	273
JUMLAH DOKTER DIRUMAH SAKIT	17	24	22	21	33
- Dokter Umum	9	16	15	14	20
- Dokter Spesialis	5	5	5	5	11
- Dokter Gigi	3	3	2	2	2
- Perawat	69	63	132	206	115
- Bidan	69	71	72	332	90
- Farmasi	11	21	21	17	20
- Ahli Gizi	3	7	6	7	5
- Teknisi Medis	2	25	0	0	0
- sanitasi	3	2	2	2	3
- Kesehatan Masyarakat	2	8	11	10	7
Jumlah Penduduk	75.188	77.084	78.725	80.215	81.735
Jumlah tenaga KESEHATAN selain Dokter	164	244	267	305	311
- Perawat	76	63	77	97	59
- Kecamatan Penanggalan	23	24	23	29	9
- Kecamatan Simpang Kiri	24	14	17	29	19
- Kecamatan Rundeng	9	8	15	21	8
- Kecamatan Longkip	12	8	12	9	12
- Kecamatan Sultan Daulat	8	9	10	9	11
- Bidan	77	157	147	175	209
- Kecamatan Penanggalan	19	33	47	48	54
- Kecamatan Simpang Kiri	27	41	53	37	52
- Kecamatan Rundeng	14	34	14	38	34
- Kecamatan Longkip	7	20	10	20	25
- Kecamatan Sultan Daulat	10	29	23	32	44
- Farmasi	0	5	8	15	17
- Kecamatan Penanggalan	0	3	3	8	7
- Kecamatan Simpang Kiri	0	1	4	3	4
- Kecamatan Rundeng	0	0	0	0	1
- Kecamatan Longkip	0	1	0	0	0

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	1	4	5
- Ahli Gizi	2	4	4		
- Kecamatan Penanggalan	2	0	1	0	1
- Kecamatan Simpang Kiri	0	2	2	2	4
- Kecamatan Rundeng	0	0	0	0	0
- Kecamatan Longkip	0	2	1	0	0
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	0	0
- Teknisi Medis	0	4	14	0	0
- Kecamatan Penanggalan	0	2	5	0	0
- Kecamatan Simpang Kiri	0	2	2	0	0
- Kecamatan Rundeng	0	0	3	0	0
- Kecamatan Longkip	0	0	0	0	0
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	4	0	0
- sanitasi	3	4	5	4	1
- Kecamatan Penanggalan	1	1	1	1	0
- Kecamatan Simpang Kiri	1	1	3	1	0
- Kecamatan Rundeng	1	1	0	1	0
- Kecamatan Longkip	0	1	1	0	0
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	1	1
- Kesehatan Masyarakat	6	7	12	12	20
- Kecamatan Penanggalan	1	4	4	6	5
- Kecamatan Simpang Kiri	4	1	4	3	6
- Kecamatan Rundeng	1	1	2	3	4
- Kecamatan Longkip	0	1	0	0	1
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	2	0	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Dari tabel 2.37 di atas menunjukkan bahwa rasio tenaga dokter persatuan penduduk sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 rasio dokter terhadap 1000 penduduk Kota Subulussalam adalah 0,61 ini bermakna bahwa setiap 1 dokter dapat melayani 4.808 penduduk. Angka rasio ini telah mencapai rasio ideal jika dikaitkan dengan standar rasio idela dimana 1 dokter minimal dapat melayani 2.500 penduduk setempat.

Dari tabel di atas menunjukkan juga bahwa jumlah dokter paling banyak berada di kecamatan simpang Penanggalan sebanyak 6 orang, simpang kiri sebanyak 4 orang dan longkip 2 orang, namun sampai pada tahun 2019 di

kecamatan rundeng hanya terdapat 1 orang dokter. Kedepan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan khususnya dalam hal pemerataan ketersediaan dokter di setiap kecamatan. Begitu juga dengan tenaga kesehatan selain dari dokter seperti perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, teknisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat masih banyak terdapat di kecamatan simpang kiri dan penanggalan. Oleh karena itu pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan di setiap pusat kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

G. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Desa Universal Child Immunization (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Dilihat pada Tabel 2.38, dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan bahwa pencapaian Desa UCI tidak mencapai 80 persen bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar. Berbeda halnya dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam lima tahun terakhir sudah pernah mencapai angka 90 persen dari total bayi yang mendapatkan imunisasi dasar. Berikut disajikan dalam bentuk tabel capaian Desa Universal Child Immunization di Kota Subulussalam dan perbandingannya dengan Kabupaten tetangga.

Tabel 2.38.

Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Subulussalam	52,44	68,29	65,38	45	54,1
Aceh Singkil	87,5	93,97	79,17		
Aceh Selatan	82,31	92,31	90,77		

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

H. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah balita gizi buruk yang terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2015 berjumlah 10 orang, kasus ini menurun menjadi 6 kasus di tahun 2017. Pada tahun 2019 kejadian gizi buruk terdapat di rundeng 2 orang, Simpang Kiri 2 orang, penanggalan, Longkib dan Sultan Daulat masing-masing 1 orang. Kasus gizi buruk memang harus menjadi perhatian penting pemerintah, dikarenakan setiap tahun di Kota Subulussalam selalu terjadi kasus gizi buruk. Secara umum kasus gizi buruk berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan keluarga, dimana kemampuan secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan makanan. Berikut disajikan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Subulussalam pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.

Cakupan Balita Gizi Buruk Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	10	5	6	6	7
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	10	5	6	6	7
- Kecamatan Penanggalan	0	3	0	1	1
- Kecamatan Simpang Kiri	2	1	1	0	2
- Kecamatan Rundeng	2	0	3	2	2
- Kecamatan Longkip	5	2	2	2	1
- Kecamatan Sultan Daulat	1	0	0	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Beberapa upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti peningkatan program Posyandu setiap desa lebih diaktifkan lagi, mengingat dengan program ini dapat secara langsung memberikan penanganan asupan gizi kepada balita beserta keluarga.

I. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Terdapat beberapa spesies *Mycobacterium*, antara lain: *M. tuberculosis*, *M. africanum*, *M. bovis*, *M. Lepraedsb.* Yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Kelompok bakteri *Mycobacterium* selain *Mycobacterium tuberculosis* yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOTT (*Mycobacterium Other Than Tuberculosis*) yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC.

Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TBC yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih.

Tingkat prevalensi tuberkulosis menunjukkan bahwa adanya jumlah penderita TBC yang terdapat pada populasi penduduk tertentu. TBC merupakan salah satu dari beberapa penyakit menular yang menjadi sasaran nasional dalam penanganannya. Dalam Permenkes Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menetapkan target program penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi Tahun 2035 dan Indonesia bebas TBC Tahun 2050. Berikut disajikan secara rinci tingkat prevalensi TBC di Kota Subulussalam sejak tahun 2015-2019.

Dari Tabel 2.40 di bawah menunjukkan bahwa tingkat prevalensi TBC di Kota subulussalam terus berfluktuatif, artinya bahwa sejak tahun 2015 sampai pada tahun 2017 telah terjadi penurunan jumlah penduduk penderita TBC di Kota Subulussalam namun kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019. Kondisi pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa adanya 12-13 orang penderita TBC terdapat pada 10.000 penduduk di Kota Subulussala, namun pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 21-22 penderita TBC pada 10.000 penduduk di Kota Subulussalam. Jika melihat dari jumlah penderita

pada tabel di atas, pemerintah Kota Subulussalam diperkirakan akan sulit untuk mencapai target nasional.

Tabel 2.40.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2015 – 2019
di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10.000 penduduk)	19,42	23,87	12,7	17,95	21,53
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (org)	146	184	100	144	176
Jumlah penduduk	75.188	77.084	78.725	80.215	81.735

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Berdasarkan pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, menyebutkan bahwa penderita TBC banyak ditemukan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Menjadi tanggungjawab besar bagi Pemerintah Kota Subulussalam mengingat bahwa tingkat dan jumlah penderita TBC masih tinggi. Penanganan dan pencegahan perlu dilakukan diantaranya adalah; 1) pencegahan dini dengan diagnosa dini kepada seluruh masyarakat, 2) melakukan pengobatan kepada penderita TBC, 3) membudayakan perilaku hidup sehat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan 4) peningkatan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rutin berolahraga.

J. Angka Kejadian Demam Berdarah

Angka Kejadian Demam Berdarah terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Puncaknya adalah pada tahun 2017 ditemukan kasus demam berdarah sebanyak 36 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2016, namun demikian untuk tahun 2018 dan 2019 turun drastis menjadi 0 kasus. Angka kejadian demam berdarah di Kota Subulussalam tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2015 – 2019 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita DBD yang ditemukan (orang)	8	7	36	0	0
Jumlah penderita DBD yang Mendapatkan Perawatan (orang)	8	7	36	0	0
Cakupan penderita DBD yang Mendapatkan Perawatan (%)	100	100	100	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

DBD masih menjadi masalah di Kota Subulussalam. Salah satu penyebabnya adalah tingginya mobilitas penduduk ke daerah - daerah dengan tingkat endemisitas tinggi. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kasus, pengendalian vektor dan upaya pemutusan rantai penularan harus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, yakni dengan cara melakukan sosialisasi kebersihan lingkungan dan tempat tinggal serta upaya pencegahan baik melalui fogging dan 3M (menguras, menutup, mengubur).

K. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Pada program kesehatan ibu terdapat beberapa capaian indikator antara lain cakupan K4 dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Indikator tersebut juga menggambarkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K4 juga memberikan gambaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar dan paling sedikit empat kali kunjungan. Tingkat kunjungan ibu hamil sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Jumlah tertinggi kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan yakni pada tahun 2015 mencapai

92,60%, jumlah ini menurun sampai 76,9,22% pada tahun 2019. Penurunan ini menunjukkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan belum juga optimal Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Subulussalam tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2015 – 2019
di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92,6	86,48	85,22	97	76,9
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	2.202	2.072	2.047	2.111	1.831
Jumlah sasaran ibu hamil	2.378	2.396	2.402	2.382	2.382

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, 2019

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, salah satunya dengan meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Upaya ini dilakukan antara lain dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes dan Posyandu.

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan Data Base Jalan Tahun 2019 Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa provonsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Subulussalam pada tahun 2015 - 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 110,04 km meningkat menjadi sepanjang 191,005 km

pada tahun 2019. Perkembangan proporsi panjang jaringan jalan di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43.
Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2019

Kondisi Jalan	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Baik	110,04	135,83	162,5	191,005
Sedang	111,64	108,86	87,78	18,405
Rusak	76,74	76,63	91,51	162,59
Rusak Berat	175,25	152,36	131,88	101,68
Total Panjang Jalan	473,68	473,68	473,68	473,68
Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	23,23	28,68	34,31	40,32

Sumber: Dinas PUPR Kota Subulussalam, 2019

Rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi baik ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu dari faktor mutu jalan dimana jalan yang baru dibangun kurang dari 1 tahun sudah kembali rusak atau berlubang. Faktor selanjutnya adalah beban kendaraan yang melewati jalan tersebut melebihi batas beban/tonase dari kelas/mutu jalan sehingga jalan menjadi rusak kemudian faktor kebijakan dan perencanaan jalan yang masih bersifat parsial dan faktor terakhir dikarenakan terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan jalan.

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor- faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Adapun Ruang lingkup sanitasi ini antara lain yaitu Air Limbah, Persampahan, Drainase lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah

rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kota Subulussalam pada tahun 2019 memiliki rumah tinggal bersanitasi sebanyak 13.678 unit atau 78,50 persen dari jumlah seluruh rumah tinggal 17.425 unit (Data rumah tinggal diasumsikan sama dengan data rumah tanggapengguna listrik). Hal ini menggambarkan capaian rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam masih rendah. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.

**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Subulussalam
Tahun 2016 – 2019**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (unit)	13.061	13.367	13.398	13.678
Jumlah rumah Tinggal (unit)	16.450	16.752	17.025	17.425
Persentase (%)	79,40	79,79	78,70	78,50

Sumber: Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019 dan Kotaku Kota Subulussalam

Masih rendahnya persentase rumah tinggal yang belum bersanitasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki jamban sendiri; 2) masyarakat pada umumnya masih menggunakan jamban cubluk; 3) perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai/pekarangan/selokan masih menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya rumah tinggal bersanitasi, menyediakan MCK/MCK++, membangun IPAL Komunal dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) peduli sanitasi, penyuluhan dan Kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) serta mengawal dan melaksanakan Program Kotaku yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat di daerah.

C. Persentase Persentase Sampah Yang Ditangani

Pemerintah Kota Subulussalam dalam menangani persampahan diperlukan penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan antara lain alat angkut sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara), system transfer depo, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Wilayah yang memiliki aktivitas kegiatan yang relatif tinggi seperti Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Runding, Kecamatan Longkib dan Kecamatan Sultan Daulat terutama khususnya untuk Kecamatan Simpang Kiri dan kecamatan Penanggalan. Wilayah tersebut potensial dalam memproduksi sampah, sehingga wilayah ini merupakan prioritas pelayanan prasarana pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian rencana jaringan sistem persampahan di Kota Subulussalam terdiri atas:

- a) Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kota;
- b) Pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
- c) Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi: pasar; permukiman; perkantoran; dan fasilitas sosial lainnya.
- d) Optimalisasi TPS di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri seluas 66,963 M².
- e) Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
- f) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

Pola Penanganan system pengelolaan persampahan dibagi atas 2 pendekatan, yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan berbasis institusi. Pendekatan berbasis masyarakat berskala lingkungan/kawasan dalam bentuk TPS 3R. Sedangkan pendekatan berbasis institusi berskala kota (TPA, TPST, FPSA, SPA) dan regional (TPA Regional).

Dalam usaha mencapai target dan sasaran 75,01 persen, persentase sampah yang ditangani dengan baik dibutuhkan pengelolaan di sumber, yaitu

dengan meningkatkan layanan penampungan dan pengangkutan serta pengelolaan akhir, yaitu dengan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari Sistem Open Dumping menjadi Sanitary Landfill.

Adapun upaya pengelolaan persampahan dilakukan dalam 2 program, yaitu program fisik dan non fisik dengan rincian sebagai berikut: a). Pengelolaan di Sumber (Fisik) berupa; 1). Pengadaan sarana layanan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPPS); 2). Pengadaan armada angkutan berupa Truck Pengangkutan Sampah, Armroll, Gerobak Sampah dan tong sampah; b). Pengelolaan Akhir (Fisik), yaitu; 1). Peningkatan Pelayanan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); a). Program Non Fisik, yaitu; b). Kampanye edukasi dan promosi; c). Advokasi pemda (eksekutif dan legislative); d). Bantuan teknis kelembagaan; e). Peningkatan kapasitas SDM; f). Sinkronisasi lintas sektor (implementasi/pendanaan). *Pemerintah Kota Subulussalam telah mengesahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan* sebagai landasan hukum pengelolaan persampahan di lingkup Kota Subulussalam.

D. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Menurut Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air minum di Kota Subulussalam tahun 2015–2019 disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penduduk berakses air minum	9,21	8,04	8,41	8,54	8,70
Penduduk berakses air minum (KKx4)	2.052	1.613	1.687	1.713	1.772
Jumlah penduduk (org)	77.892	78.142	78.725	80.215	81.417

Sumber: Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

Tabel 2.45 memberikan informasi persentase penduduk berakses air minum masih sangat rendah. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk berakses air minum menurun dari 9,21persen di tahun 2015 menjadi 8,04 persen di tahun 2016, kemudian meningkat kebalikan hingga menjadi 8,70 persen di tahun 2019. Rendahnya persentase akses pengguna air minum disebabkan antara lain:

- 1) sistem Pelayanan air Minum yang belum memadai;
- 2) belum lengkap dan terbaharukan perangkat regulasi yang mendukung penyediaan air minum;
- 3) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum;
- 4) masih terbatasnya penyedia air minum oleh perusahaan daerah air minum yang sehat (kredibel dan profesional);
- 5) belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum; dan
- 6) terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan di atas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada:

- 1) penyediaan perangkat peraturan di daerah untuk mendukung pelayanan air minum;
- 2) memastikan ketersediaan air baku air minum;
- 3) meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana air minum;
- 4) meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum;

- 5) meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISSPAM);
- 6) meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan
- 7) pengembangan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum.

E. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat keputusan Walikota Subulussalam, luas kawasan kumuh di Kota Subulussalam seluas 61,77 Ha. Penanganan kawasan kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan berkolaborasi program Kotaku pemerintah pusat. Dari tahun 2015 luasan kumuh di Kota Subulussalam terus menurun dari 61,77 Ha menjadi 2,54 Ha di tahun 2019. Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.

**Persentase Areal Kawasan Kumuh
di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase areal kawasan kumuh	1,11	1,49	0,69	0,62	0,18
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	61,77	61,77	61,77	10,85	2,54
Luas Wilayah (Km2)	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391

Sumber: Program Kotaku Subulussalam

Penanganan kawasan kumuh serta pembangunan rumah layak huni termasuk didalamnya merupakan program prioritas pembangunan pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi sampai ke daerah.

F. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pencapaian suatu lingkungan perumahan yang baik adalah suatu rumah tersebut memiliki jaringan air bersih, listrik dan sanitasi, dan juga seberapa besar proporsi lingkungan kumuh perkotaan. Berikut akan dijelaskan kondisi perumahan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan di bidang perumahan dalam RPJM Kota Subulussalam 2020-2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kota Subulussalam bahwa sampai pada tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1.803 unit yang tersebar di setiap desa. Jika dipersentasekan jumlah rumah tidak layak huni seluruh Kota Subulussalam adalah sebesar 10,35 persen dari total rumah tinggal 17.425 unit. Sesuai dengan program prioritas nasional dan gubernur aceh, pembangunan rumah layak huni ini akan terus ditingkatkan terutama yang diperuntukkan bagi keluarga miskin melalui data rumah tangga miskin (basis data terpadu) yang bisa didanai dari dana otsus dan dana-dana lain yang mendukung pencapaian rumah layak huni semaksimal mungkin.

Tabel 2.47.

**Persentase Rumah Tinggal Tidak Layak Huni
Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Tinggal (Unit)	16.020	16.450	16.752	17.025	17.425
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2.854	2.654	2.454	2.254	1.803
Persentase Rumah Tidak Layak Huni	17,82	16,13	14,65	13,24	10,35

Sumber: Program Kotaku Subulussalam

2.3.2.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha.

Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Kota Subulussalam. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas Kota Subulussalam yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan Kota Subulussalam dalam rangka mewujudkan Kota Subulussalam Sejahtera Dan Islami. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

A. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan di Kota Subulussalam direfleksikan dari data tentang sarana keamanan, angka kriminalitas, serta upaya dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.48.

**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Kota Subulussalam Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	0	0	6,00	5,90
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	70,00	75,00	78,00	77,00	81,00
Prosentase Penegakan Perda	100	100	50	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kota Subulussalam, 2019

B. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana kebakaran menitikberatkan terhadap 2 (dua) aspek pelayanan yaitu; cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran, yakni 15 menit dari Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Cakupan pelayanan kebakaran diharapkan mencapai 75 persen dari jumlah luas wilayah.

Kondisi pada saat ini menggambarkan bahwa Wilayah Manajemen Kebakaran di Kota Subulussalam hanya memiliki 3 (tiga) Pos WMK yang terdiri dari WMK Kecamatan Simpang Kiri, WMK Kecamatan sultan Daulat dan WMK kecamatan Rundeng. Khusus untuk Kecamatan Penanggalan tidak memiliki WMK dikarenakan secara *respon time* masih dalam wilayah WMK kecamatan Simpang Kiri.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran antara lain: 1) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (Mitigasi); 2) penyuluhan dan penyebaran informasi tentang pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran; 3) simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha; 4) pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran; dan

5) pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi dan operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam dengan tidak melupakan tingkat kesejahteraannya.

Tabel 2.49.

**Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap
(*respon time*) BPBD Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	76,8	76,8	76,8	79	76,8
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK)	60	50	40	30	20

Sumber: BPBD Kota Subulussalam, 2019

2.3.2.5. Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan advokasi dan sinergi.

A. Persentase PMKS yang Tertangani

Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) turut meningkat secara kuantitas maupun kompleksitasnya termasuk bentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Semakin meningkatnya kondisi kemajuan masyarakat terutama PMKS ini tercermin pada indikator sosial, antara lain meningkatnya jangkauan pelayanan sosial, menurunnya jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta semakin tumbuh berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Berikut akan disajikan jumlah PMKS di Kota Subulussalam yang tertangani.

Data PMKS di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun secara jumlah terbesar adalah Fakir Miskin, lanjut usia/Jompo, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi dan Korban Narkotika. Pemberian jaminan sosial rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS lainnya. Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50.

Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Anak Terlantar	4	3	4	10	13
Lanjut Usia/Jompo	1.843	1.813	1.829	1.874	1.854
Anak Nakal	0	0	0	1	1
Korban Narkotika	40	37	39	38	38
Penyandang Cacat	366	376	380	378	387
Gelandangan dan Pengemis	8	8	8	8	8

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tuna Susila	0	0	0	0	0
Fakir Miskin	11.015	11.015	11.015	11.015	11.015
Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan	2	3	4	5	5
Orang dengan HIV/AIDS	1	0	0	0	0
Bekas Narapidana	19	20	26	27	30
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	719	716	714	742	768
Keluarga berumah Tidak Layak Huni	1.019	970	985	977	1.017
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4	5	6	7	10
Anak Balita Terlantar	0	0	0	0	0
Anak Jalanan	5	4	5	6	7
TOTAL	15.045	14.970	15.015	15.088	15.153

Sumber: BPS, Kota Subulussalam, 2019

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upaya-upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Kota Subulussalam adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS

2.3.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.3.1. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik

daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

A. Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (International Labor Organization) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Subulussalam selama periode 2015–2019, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK Kota Subulussalam pada tahun 2015 adalah sebesar 44.886 orang dan pada akhir tahun (Agustus 2019) diperkirakan mencapai 49.353 orang.

Data Sakernas pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 64 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90% merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30% dari penduduk usia kerja. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang

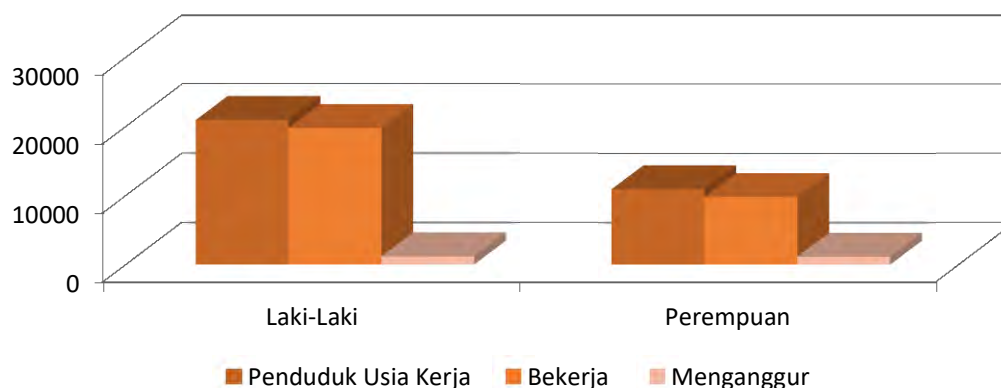
memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas).

Tabel 2.51.
Perkembangan Penduduk Usia Kerja di Kota Subulussalam
Tahun 2015 - 2019

Jenis Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	29.580	N.A	29.207	28.741	31.708
- Bekerja	27.143	N.A	27.774	26.876	29.410
- Penganggur	2.437	N.A	1.433	1.865	2.298
Bukan Angkatan (Sekolah, Mengurus rumah tangga, Lainnya) Kerja	15.306	N.A	18.013	20.172	17.645
Penduduk Usia Kerja	44.886	N.A	47.220	48.913	49.353
TPAK (Persen)	69,29	65,9	61.85	58.76	64,25
TPT (Persen)	3,24	8,24	4,92	6,49	7,25

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

Pengamatan terhadap sejumlah data Penduduk Usia Kerja di Kota subulussalam menurut jenis kelamin untuk 5 tahun terakhir Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di Kota Subulussalam pada Agustus 2019 diperkirakan mencapai 49.353juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja laki-laki tercatat sebanyak 20.815 orang atau 34,35 persen lebih tinggi dari PUK perempuan yaitu 10.893 orang atau 65,65 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja.



Gambar 2.16. Penduduk Usia Kerja Kota Subulussalam Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan, Bulan Februari 2019

Upaya-upaya terus dilakukan selama satu dekade pemerintahan Kota Subulussalam, melalui instansi terkait setiap tahun dilakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja baik yang terdaftar maupun untuk usia angkatan kerja lain.

2.3.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

A. Persentase Partipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi struktural dan fungsional. Secara jelas tercantum pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	12,49	14,71	12,72	12,72
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1.224	1.216	1.216	1.217	1.217
Jumlah pekerja perempuan	N/A	9.737	8.267	9.564	9.564

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

B. Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Berikut proporsi jumlah kursi di DPRD yang diduduki perempuan di Kota Subulussalam.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua permasalahan. *Pertama*, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. *Kedua*, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.

Sebuah tantangan yang berat bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya instansi yang membidangi tugas dan fungsi dalam hal pemberdayaan perempuan. Kedepan selain daripada program dan kegiatan yang sifatnya mendorong keberdayaan perempuan aktif dan berpartisipasi dalam politik, juga beberapa anggota legislator perempuan yang ada harus mampu memberikan dan menunjukkan kerja keras dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

2.3.3.3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar seperti gandum, jagung, beras, kentang, kedelai, dan sebagainya. Menurut kelompok produknya, bahan pangan utama ini termasuk dalam kelompok serelia. Secara umum ketersediaan pangan utama bagi masyarakat Kota Subulussalam adalah beras, dan pada tahun 2019 produksi padi di Kota Subulussalam sebanyak 4.474 ton (padi sawah dan padi ladang). Produksi padi tersebut masih dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) dan jika di proses dalam bentuk beras volumenya akan menurun karna sudah mengalami proses pengeringan, proses angkut dan penggilingan.

Ketersediaan pangan perkapita Kota Subulussalam mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,5 persen dalam periode 2015 hingga 2019. Peningkatan ketersediaan pangan perkapita ini disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang staknan, sementara

produksi bahan pangan sempat mengalami peningkatan akibat perluasan luas tanam melalui cetak sawah baru.

Tabel 2.53.

Ketersediaan Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Pangan Utama Lokal (Ton)	5.929	5.796	2.807	7.500	4.474
Tingkat Konsumsi Pangan Utama Lokal (Orang/Kg/Hari)	60	65	70	73	76
Ketersediaan Pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	80	85	90	90	95

Sumber: Dinas Pangan Kota Subulussalam, 2019

Dengan asumsi bahwa tingkat konsumsi beras perorang itu 0,54 Kg/hari, maka kebutuhan beras bagi penduduk Kota Subulussalam tahun 2019 adalah sebanyak 18.365 ton/tahun. Tentunya kebutuhan akan pangan utama khususnya beras sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil produksi beras sebanyak 4.474 ton yang ada di Kota subulussalam.

Ketersediaan pangan utama khususnya beras tidak hanya bergantung kepada prduksi lokal saja, penyediaan beras dari aspek lain juga memiliki pengaruh yang besar seperti ketersediaan beras di Bulog dan lancarnya arus distribusi pangan dari daerah-daerah yang memproduksi beras ke Kota Subulussalam. Sehingga ketersediaan beras di Kota Subulussalam selama ini dapat terpenuhi.

2.3.3.4. Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Subulussalam melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kekhususan Aceh, Pemerintah Kota Subulussalam juga berkedudukan sebagai daerah Otonomi Khusus dimana

Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan kekhusan.

Secara umum permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam, tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah sebagaimana terjadi di wilayah-wilayah lain dan adanya Kekhususan urusan pertanahan. Berkenaan dengan hal tersebut permasalahan sektor pertanahan di Kota Subulussalam berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, objeknya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yakni: (1) permasalahan pertanahan secara umum berhubungan dengan masyarakat; dan (2) permasalahan pertanahan terkait dengan tanah asset pemerintah kota subulussalam.

A. Luas Tanah Yang Bersertifikat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kota Subulussalam sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut jenis hak atas tanah di Kota Subulussalam tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.

Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarakan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hak Milik	955	750	1.363	4.938	5.926
Hak Guna Bangunan	0	0	0	3	4
Hak Guna Usaha	0	0	0	0	0
Hak Pakai	0	0	4	21	22
Tanah Wakaf	N.A	N.A	3	3	4

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Subulussalam tahun 2019

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Subulussalam antara lain tingkat pemahaman masyarakat yang rendah, banyaknya status kepemilikan tanah yang tumpang tindih.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan menyediakan fasilitas dan SDM Kota Subulussalam di Bidang Pertanahan, menyediakan fasilitas bebas biaya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin dengan proda dan prona, melakukan indentifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dari lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU diwilayah Kota Subulussalam.

2.3.3.5. Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Kota Subulussalam

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sangat penting, sebagaimana amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Renacana jangka panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (pasal 10, ayat 5). diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2019 – 2024, sampai saat ini dokumen RPPLH belum tersedia.

B. Tersedianya Dokumen KLHS Kota Subulussalam

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sebagaimana amanah UU No. 32 tahun 2009 (pasal 15, ayat 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Sampai saat ini dokumen KLHS sudah disusun pada tahun 2013 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam, namun isi dari program dan

kegiatan yang ada didalam dokumen tersebut belum terintegrasi ke berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam. Maka dari itu mulai tahun 2019 ini dokumen KLHS sudah mulai disusun sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RPJM Kota Subulussalam tahun 2019-2024.

C. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia, dimana IKLH provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. IKLH merupakan hasil penggabungan analisis dari tiga indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sumber-sumber air yang tersedia di Kota Subulussalam tentunya wajib dijaga kualitasnya, termasuk juga kualitas air sungai dan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai-sungai tersebut. Pembangunan yang semakin pesat di berbagai daerah mendorong banyaknya penggunaan lahan disepanjang sungai. Hal ini bisa dilihat lahan disepanjang sungai, terutama sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan, yang berubah fungsi terutama menjadi pemukiman dan kegiatan industri baik skala kecil maupun besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya kualitas air sungai yang mengalir sepanjang sungai tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh tahun 2019 untuk Kota Subulussalam sampai saat ini belum memiliki nilai indeks kualitas air dan kualitas udara. Penilaian ini sangat perlu bagi daerah Kota Subulussalam mengingat bahwa tingkat laju pertumbuhan penduduk, perlembangan permukiman penduduk dan perkembangan industri yang pesat.

Nilai indeks tutupan lahan/hutan di Kota Subulussalam adalah 40,15 atau berada dalam kondisi kurang baik. Adapun indkes kualitas tutupan lahan di Kota Subulussalam dan perbandingannya dengan kabupaten tetangga.

Tabel 2.55.

Data Kualitas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2019

Kabupaten/Kota	IKLH	Index Udara	IKA	IKTL
Kota Subulussalam	82,29	0,42	0	51,2
Kabupaten Aceh Singkil	93,06	0,22	0	52,09
Kabupaten Aceh Selatan	93,89	0,21	81,46	88,28
Kabupaten Aceh Tenggara	89.32	0,18	0	85,64
Indeks Tutupan Lahan Aceh	90,66	0,27	80,73	65,74

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh Tahun 2019

2.3.3.6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Kota Subulussalam adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Kabupaten/kota dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

A. Persentase Penduduk Ber E KTP

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan dan salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Gambaran rinci jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.

**Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam
Tahun 2015 – 2019**

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jlh. Penduduk yang memiliki KTP	35.084	42.187	51.149	67.431	45.579
Jlh. Penduduk yang wajib KTP >17 thn	48.478	53.308	57.858	53.508	54.626
Rasio	0,72	0,79	0,88	1,26	0,83

Sumber: Disdukcapil 2019

Tahun 2019, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 45.579 orang dari total jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 54.626 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP el- sebesar 83,44 persen. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan persentase penduduk yang wajib KTP yaitu: 1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah umum pentingnya kepemilikan KTP; dan 2) memfasilitasi percepatan proses perekaman dan perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa menggunakan system jemput bola (jebol).

B. Rasio bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah bayi yang berakte kelahiran di kota Subulussalam pada tahun 2019 mencapai 0,17 yaitu 103 bayi yang telah memiliki akte kelahiran dari 621 bayi yang lahir di tahun 2019. Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Subulussalam tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jlh. Bayi lahir berakte kelahiran (org)	2.182	5.852	95	116	103
Jlh. Keseluruhan Bayi yang Lahir Hidup (org)	4.790	1.308	708	900	621
Rasio	0,45	4,47	0,13	0,13	0,17

Sumber: Disdukcapil Kota Subulussalam, 2019

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2019 adalah 0,17 yang mengindikasikan jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan sangat sedikit hanya mencapai 17 persen keseluruhan bayi yang lahir. Namun menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya dinas yang terkait untuk dapat melakukan dan tindakan agar akta kelahiran dengan mudah diperoleh. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya dinas catatan sipil dan kependudukan dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit, bidan, klinik bersalin agar setiap anak yang lahir pihak keluarga bayi dapat secara langsung mendapatkan akta kelahiran.

C. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah. Tabel 2.58 memberikan informasi rasio pasangan berakte nikah di Kota Subulussalam tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yaitu 0,22 di tahun 2015 menjadi 0,36 di tahun 2019. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pasangan nikah di Kota Subulussalam masih

banyak yang belum memiliki akte nikah. Jumlah persentase pasangan berakte nikah tersebut masih tergolong sangat rendah, masih terdapat jumlah pasangan sebesar 65,00 persen yang belum memiliki akte nikah. Hal ini dapat disebabkan seperti : 1) kurangnya pemahaman pasangan menikah terhadap pentingnya tertib administrasi nikah; 2) banyaknya pasangan nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 3) rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan administrasi nikah.

Tabel 2.58.

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jlh. Pasangan yang telah Berakte Nikah	8.031	8.480	10.128	10.911	13.647
Jumlah Keseluruhan pasangan Nikah	35.876	90.145	35.419	35.265	37.499
Rasio	0,22	0,09	0,29	0,31	0,36

Sumber: Disdukcapil Kota Subulussalam, 2019

2.3.3.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

A. Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya perkantoran pemerintahan desa di setiap desa. Berikut disajikan cakupan kantor pemerintahan desa di Kota Subulussalam pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59.

**Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam
Tahun 2015-2019**

Uraian	Tahun					Total
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jlh. Kantor Desa	11	5	19	5	7	47
Jlh. Seluruh Pemerintahan Desa	82	82	82	82	82	82
Persentase (%)	13,41	6,10	23,17	6,10	8,54	57,32

Sumber: DPMK Kota Subulussalam 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung memberikan informasi bahwa hingga tahun 2019 Sudah 47 kampung yang memiliki kantor Desa tetap, jumlah ini masih jauh dari harapan dikarenakan jumlah kampung di Kota Subulussalam mencapai 82 kampung atau sekitar 50 persen dari total kampung yang memiliki kantor, selebihnya masih dalam status penyewaan.

Pemerintah Kota Subulussalam mengupayakan pembangunan kantor pemerintahan kampung secara bertahap sehingga seluruh desa/kampung memiliki kantor pemerintahan yang tetap.

B. Persentase Posyandu Aktif

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan, perkembangan indikator kesehatan tersebut sangat erat kaitannya dengan pos pelayanan terpadu (posyandu). Persentase posyandu aktif di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Jumlah Posyandu Aktif di Kota Subulussalam
Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jlh. Posyandu Aktif	56	35	7	68	68
Total Posyandu	107	107	40	118	115
Persentase (%)	52,34	33,00	33,00	57,63	59,13

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Subulussalam 2019

Dari Tabel 2.60 di atas menunjukkan bahwa jumlah posyandu aktif terus meningkat dari 33 persen ditahun 2016 dan meningkat menjadi 59,13 persen ditahun 2019, namun jumlah psoyandu berfluktuatif jumlahnya dari 107 unit di tahun 2015, 2016 dan menurun jumlahnya menjadi 40 unit di tahun 2017 kemudian meningkat kembali pada tahun 2018 menjadi 118 unit, kemudian menurun kembali menjadi 115 unit pada tahun 2019. Menjadi perhatian khusus dalam hal meningkatkan keaktifan posyandu, dikarenakan dengan adanya program ini dapat membantu dan mencegah dari pada beberapa permasalahan dasar kesehatan keluarga.

2.3.3.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan menciptakan jendela peluang (windows of opportunity) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam

rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa Kota Subulussalam pada kondisi demographic trap yang akan menghasilkahn persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di Kota Subulussalam perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan unmet need.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 rata-rata laju pertumbuhan penduduk berkisar 4-5% pertahun. Jumlah persentase tersebut merupakan kategori tinggi dalam klasifikasi pertumbuhan penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sangat berhubungan dengan letak strategis Kota Subulussalam sebagai jalur lintas Aceh-Sumatera Utara dan memiliki tingkat aktifitas perekonomian yang beragam dan cepat. Daerah ini mejadi daya tarik beberapa investor yang bergerak dibidang perkebunan, industri tambang, perumahan, perbankan, insdutri makanan dan minimarket/retail waralaba, sehingga banyak penduduk di Kota Subulussalam datang dari luar dan menetap di Kota Subulussalam.

B. Ratio Akseptor KB

Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.61.

Tabel 2.61.

Rasio Akseptor KB dan Jumlah pasangan usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ratio Akseptor KB	12,4	21,91	15,88	71,62	72,71
Jumlah Akseptor KB	1708	3020	2274	10501	14341
Jumlah pasangan usia subur	13779	13784	14322	14661	19721

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

Dari data pada Tabel 2.61 di atas menunjukkan bahwa adanya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan akseptor KB sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadinya fluktuasi jumlah pengguna akseptor KB. Semakin tinggi penggunaan akseptor KB semakin tinggi juga penanganan jumlah penduduk yang meningkat.

C. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun

Tabel 2.62.

Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	62,36	66,56	66,05	71,62	72,71
Jumlah peserta KB aktif	8.593	9.174	9.459	10.501	14.341
Jumlah pasangan usia subur	13.779	13.784	14.322	14.661	19.721

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

Dari tabel 2.62 di atas menunjukkan bahwa jumlah pemakai kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang menikah sampai pada tahun tahun 2019 mencapai 72,71 persen. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 62,36 persen. Kedepan Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih aktif dan berkelanjutan.

2.3.3.9. Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Hal ini dikarenakan ketersediaan prasarana jalan sebagai jaringan aksesibilitas antar wilayah di Kota Subulussalam, sudah sangat mencukupi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah Kota Subulussalam, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kota Subulussalam tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kota Subulussalam, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya.

A. Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini Kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

B. Jumlah Terminal Bis

Kota Subulussalam hanya memiliki 1 terminal Bis tipe B yang sudah tidak berfungsi optimal untuk melayani armada angkutan penumpang. Kondisi

saat ini terminal tersebut beralih fungsi sebagai pusat pasar. Hal ini disebabkan kurang tepatnya lokasi terminal yang berada ditengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

C. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Subulussalam pada tahun 2019 mencapai 0,98 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 9-10 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya, dimana rasio ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan terus meningkat. Selanjutnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Subulussalam tahun 2015 – 2019 disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor
di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sedan	8	8	12	25	40
Jeep	5	6	19	55	75
Mini Bus	52	55	75	82	102
Pick Up	43	45	95	103	121

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Truck	437	445	532	543	555
Alat Besar/Berat	5	7	15	21	35
Sepeda Motor	15.353	16.888	18.577	20.435	22.478
Jumlah	15.903	17.454	19.325	21.264	23.406
Panjang jalan (Km)	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Subulussalam tahun 2019

2.3.3.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kota Subulussalam terdiri dari: akses internet, hotspot, jaringan telepon seluler, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2019, jumlah SKPK yang telah memiliki akses internet di Kota Subulussalam sebanyak 100 persen, jumlah titik hotspot sebanyak 95 titik, serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 3 unit. Sarana/prasarana jaringan telepon seluler sudah mencapai keseluruhan kecamatan di Kota Subulussalam, seperti provider telkomsel, indosat dan excelindo dan sudah tersedia layanan 4G. Keberadaan PT. Telkom juga sangat mempengaruhi perkembangan arus informasi digital di

Kota Subulussalam, adanya layanan televisi digital, jaringan internet kabel kerumah-rumah, instansi swasta dan usaha bisnis lainnya.

2.3.3.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Jumlah Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kota Subulussalam sejak tahun 2015-2017 disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.

Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2015– 2017

Kecamatan	Jenis Koperasi (Tahun)								
	2015			2016			2017		
	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN
Simpang Kiri	2	2	54	2	2	57	2	1	31
Penanggalan	0	1	23	0	1	25	-	-	19
Rundeng	0	0	8	0	0	9	-	-	6
Sultan Daulat	1	0	10	1	0	9	-	-	7
Longkib	1	0	3	1	0	3	-	-	2
Jumlah	4	3	98	4	3	103	2	1	65

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Ket : KUD (Koperasi Unit Desa)

KPN (Koperasi Pegawai Negeri)

KNPN (Koperasi Non Pegawai Negeri)

B. Jumlah Usaha Kecil Menengah

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Kriteria

usaha kecil dan menengah menurut UU. No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Usaha menengah memiliki asset 500 juta – 10 Milyar dan penjualan 2,5 Milyar – 50 Milyar/ tahun
- Usaha Kecil memiliki asset 50 juta-500 juta dan penjualan 300 juta-2,5 Milyar pertahun
- Usaha Mikro memiliki asset dibawah 50 juta dan penjualan dibawah 300 juta/tahun.

Jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Subulussalam dikelompokkan kedalam usaha yang bergerak di agro industri dan industri pengolahan. Berikut akan disajikan jumlah usaha agroindustri dan pengolahan dalam skala usaha kecil menengah sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.65.

Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Agro Industri	27	N/A	727		
Industri pengolahan	72	N/A	790		
Jumlah	99	0	1517		

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2019

Dari Tabel 2.65 di atas menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menengah di Kota Subulussalam terus meningkat. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh usaha ini bergerak di usaha makanan, pakaian jadi, furnitur, komputer, logam, perbengkelan dan reparasi elektronik.

Walaupun adanya peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, pemerintah harus terus memberikan dukungan dan akses informasi kepada pengusaha terutama terhadap permodalan, jaminan berusaha dan peningkatan hasil dan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Permodalan dapat ditempuh dengan membangun keaktifan koperasi dan perbankan.

Sedangkan jaminan berusaha serta peningkatan mutu hasil produksi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang baik dan pemerintah dapat melakukan pelatihan bagi pengusaha demi pengembangan usaha ke level yang lebih baik lagi.

2.3.3.12. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi yang ada di Kota Subulussalam secara keseluruhan merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Subulussalam masih sangat sedikit jumlahnya. Sampai pada tahun 2019 jumlah investasi sebanyak 28 investor, yang terdiri dari 23 investor bergerak dibidang indistri perkebunan kelapa sawit dan 5 investor bergerak dibidang pertambangan biji besi.

Tabel 2.66.

Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2015 - 2019 Kota Subulussalam

Tahun	Jumlah Investor	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Total (Rp)
2015	27	19.580.000.000	Rp -	19.580.000.000
2016	25	26.250.000.000	Rp -	26.250.000.000
2017	31	123.391.410.000	Rp -	123.391.410.000
2018	17	24.980.000.000	Rp -	24.980.000.000
2019	28	90.530.000.000	Rp -	90.530.000.000

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Subulussalam tahun 2019

Investasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kehadiran investasi dari pihak dalam dan luar negeri sangat diperlukan, dan menjadi salah satu tugas berat Pemerintah Kota Subulussalam kedepan mengingat ketersediaan Sumberdaya Alam yang melimpah, namun memiliki keterbatasan dana dalam pengelolaannya.

2.3.3.13. Urusan Kepemudaan dan Olah raga

A. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Subulussalam Tahun 2019 ada 18 organisasi pemuda yang semuanya terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

B. Jumlah Organisasi Olah Raga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Berdasarkan data dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota Subulussalam terdapat 10 club olahraga yang mendapatkan sentuhan tangan pemerintah yaitu klub sepak bola dan klub bola voli yang berada di setiap kecamatan dalam Kota Subulussalam. Jika dilihat lebih jauh, banyak klub olahraga lainnya dalam berbagai cabang yang berada di Kota Subulussalam seperti: bulu tangkis, tenis meja, futsal, karate, taekwondo, tarung derajat, pencak silat, sepeda, panahan, catur, balap motor, perbakin dan lain-lain.

C. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan kreatifitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi mereka sebagai bekal untuk menjadi masyarakat yang berfikir positif, inovatif dan produktif, serta untuk melatih sikap mandiri, bekerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Subulussalam, Mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baru satu kegiatan kepemudaan yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Subulussalam yaitu kegiatan Pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan generasi Muda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk itu pemerintah kedepan perlu mengupayakan penambahan kegiatan kepemudaan.

2.3.3.14. Urusan Kebudayaan

Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, Dari 3 Situs Budaya yang ada di Subulussalam baru satu yang memiliki juru pelihara dan sudah di lakukan pemugaran oleh pemerintah yaitu Kompleks makam Syekh Hamzah Fansyuri di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

Namun juga terdapat dua cagar budaya lainnya yaitu :

- 1) Makam Sultan Daulat Sambo yang terletak di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, dan
- 2) Benteng Kerajaan Batu-batu yang terletak di desa Batu Napal kecamatan Sultan Daulat.

Tabel 2.67.

**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2	2	1	1	1
Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	12	13	16	19	19
Persentase	83,4	84,6	93,75	94,74	94,74

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Aceh

Hingga saat ini belum memiliki juru pelihara dan belum mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kota Subulussalam kedepan perlu melakukan kebijakan-kebijakan seperti; menempatkan masing-masing satu orang juru pelihara pada setiap situs budaya tersebut dan memugar situs budaya tersebut, namun dengan tetap mempertahankan kondisi aslinya sebagai warisan budaya.

2.3.3.15. Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun

keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat berbagai jenis dan kelompok bahan pustaka yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Kota Subulussalam hanya memiliki 2 (dua) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun jumlah perpustakaan lain seperti perpustakaan kampung pada tahun 2019 sebanyak 21 unit, yang kesemuanya belum memiliki gedung perpustakaan sendiri.

B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Arsip dan perpustakaan Kota Subulussalam, Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Kota Subulussalam tahun 2019 hanya 3.119 orang dengan rata-rata pengunjung 9 orang perharinya. Ini menunjukkan minat baca masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah kota Subulussalam kedepan perlu meningkatkan sosialisasi minat baca bagi masyarakat baik melalui media iklan, Poster, baliho, ataupun dengan menggunakan media lainnya yang efektif dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

C. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan

kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Fasilitas yang memadai belum terlihat di Perpustakaan Umum Kota Subulussalam dengan persediaan buku di rak-rak perpustakaan yang tidak banyak serta buku yang disediakan kebanyakan buku-buku tahun tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung ke Perpustakaan Kota Subulussalam.

Sejauh ini buku yang disediakan di perpustakaan Kota Subulussalam sebanyak 13.125 eksemplar. Buku – buku ini dikumpulkan dari sejak kota Subulussalam berdiri hingga saat ini. Buku di perpustakaan Kota Subulussalam berdasarkan bantuan perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional dan pihak ketiga. koleksi buku yang sebanyak 13.125 eksemplar tersebut sangat jauh dari standar kesediaan buku. Oleh karena itu pemerintah kedepan perlu melengkapi buku-buku koleksi perpustakaan Kota Subulussalam.

D. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2015-2019 di Kota Subulussalam masih sangat rendah, hingga tahun 2019 belum ada 1 (Satu) SKPD pun yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan kelemahan SDM aparatur pengelola arsip pada SKPD Kota Subulussalam, SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam masih sedang berbenah dalam segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk tata pengelolaan arsip yang baik dan benar. Disamping itu masih banyak SKPD dalam lingkup Pemerintah kota Subulussalam yang belum memiliki gedung kantor dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku.

2.3.4. Fokus layanan Urusan Pilihan

2.3.4.1. Urusan Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan di Kota Subulussalam selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Berikut disajikan dalam tabel perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun 2015-2019.

Tabel 2.68.

Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kunjungan Wisata	35.113	41.570	43.081	44.146	44.213
Wisatawan Mancanegara	5	3	11	15	9
Wisatawan Nusantara	35.108	41.567	43.070	44.131	44.204

Sumber : ppid.acehprov.go.id

B. Tempat Wisata dan Cagar Budaya

Kota Subulussalam memiliki keragaman objek wisata baik itu wisata alam maupun wisata religi. Beberapa objek wisata di Kota subulussalam diantaranya adalah:

Tabel 2.69.

**Nama dan Lokasi Objek Wisata Yang ada di
Kota Subulussalam Tahun 2019**

No	Nama Objek Wisata	A l a m a t
1.	Tahura Lae Kombih	Desa Jontor
2.	Arung jeram lae Kombih	Desa Sikelang
3.	Wisata Alam Penuntungan	Desa penuntungan
4.	Air Terjun SKPC	Desa penuntungan

No	Nama Objek Wisata	A l a m a t
5.	Air Terjun Kedabuhan	Desa lae Ikan
6.	Irigasi Bahorok	Desa Namo Buaya
7.	Air Terjun Silangit-langit	Desa Singgersing
8.	Pemandian Nantampak Mas	Desa lae Mbersih
9.	Air Terjun Batu Napal	Desa lae Raso
10.	Makan Syech Hamzah fansuri	Desa Oboh

Sumber : Disparpora Kota Subulussalam tahun 2019

Dari beberapa objek wisata seperti yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Subulussalam memiliki jumlah wisata alam yang banyak dan masing-masing lokasi wisata alam tersebut memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Namun sampai pada saat ini lokasi objek wisata tersebut masih belum menjadi perhatian pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta promosi destinasinya.

Peuang dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, mengingat bahwa Kota Subulussalam berada di jalur lintas dua kabupaten yang sudah memiliki pengembangan wisata yang sudah lebih baik. Kabupaten Aceh singkil memiliki pulau banyak, dimana rata-rata wisatawan yang datang pasti singgah atau menginap dahulu di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wisata pesisir pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan lokal. Jadi pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait membaca peluang pengembangan objek wisata yang ada.

2.3.4.2. Pertanian

Sektor pertanian menjadi tiga besar penyumbang PDRB di Kota Subulussalam, sebesar 21,54 persen pada tahun 2019. Namun kontribusi sektor pertanian Kota Subulussalam cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2015-2019, ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya. Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah.

Sehingga alih fungsi lahan menjadi isu strategis Kota Subulussalam agar laju alih fungsi lahan tidak semakin besar.

A. Tanaman Pangan

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Namun yang menjadi core utama pertanian adalah tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70.

Jumlah luas Panen, luas tanam, produksi dan Pruktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Komiditi Pangan Utama	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	871	1133	537	514	807
	Luas Tanam (Ha)	870	1133	546	514	543
	Produksi (Ton)	3.658	4.341	2.351	2.329,8	3.109,5
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,2	3,83	4,38	4,53	3,85
Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	668	373	105	108	400
	Luas Tanam (Ha)	668	373	195	108	400
	Produksi (Ton)	2271	1454,7	456	375,5	1364
	Produktivitas (Ton/Ha)	3,4	3,9	4,34	3,48	3,4
Jagung	Luas Panen (Ha)	870	1.620	1.093	1.455	2.466
	Luas Tanam (Ha)	904	1.985	1.445	1.461	2.504
	Produksi (Ton)	4002	9007,2	7398,8	8960	14695
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,6	5,56	6,77	6,2	5,09
Kedelai	Luas Panen (Ha)	42	8	11	300	9
	Luas Tanam (Ha)	42	7	61	348	9
	Produksi (Ton)	42	1,2	10	300	12
	Produktivitas (Ton/Ha)	1	0,15	0,91	1	1,3

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Tabel 2.70 menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2015 sebesar 3.658 ton meningkat menjadi 4.341 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 produksi padi sawah menurun menjadi 2.351 ton. Penurunan produksi ini dikarenakan oleh menurunnya jumlah luasan panen sejak tahun 2016 sebesar 1.133 Ha menjadi 807 Ha di Tahun 2019. Produktivitas padi sawah perhektar rata-rata berkisar 4 ton/Ha. Untuk komoditi padi ladang stagnan dengan produktivitas 4,34 Ton/Ha hingga tahun 2019.

Sedangkan komoditi jagung mengalami peningkatan luasan tanam dan panen, sehingga mempengaruhi jumlah produksi tiap tahunnya. Produktivitas jagung terus meningkat dari 4,6 Ton/Ha di tahun 2015 menjadi 5,09 ton/Ha di tahun 2019. Sehingga dapat dikatakan bahwa komoditi jagung di Kota Subulussalam sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Selanjutnya komoditi kedelai yang merupakan komoditi yang sangat diperlukan sebagai bahan makanan dan industri rumah tangga, dari data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami penurunan luasan tanam, panen sampai dengan produktivitasnya. Kedepan komoditi kedelai ini harus dikembangkan secara maksimal mengingat bahwa komoditi ini defisit produksi secara nasional.

Dari penjelasan secara ringkas mengenai keadaan komoditi tanaman pangan utama di atas dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat maka Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan antara lain: 1) penerapan anjuran teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul; 2) pengendalian hama dan penyakit tanaman padi; 3) Peningkatan fungsi penyuluh pertanian; 4) peningkatan sarana produksi pertanian; dan 5) peningkatan luas tanam khusus untuk tanaman padi ladang, kedelai dan jagung.

B. Perkebunan

Potensi perkebunan di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, khususnya komoditi kelapa sawit, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah luasan kebun kelapa sawit rakyat dan minat masyarakat dalam berbudidaya sawit. Ketersediaan permintaan akan buah kelapa sawit

oleh beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit di Kota Subulussalam menjadikan komoditi ini menjadi komoditi unggulan daripada komoditi perkebunan lainnya. Seperti kakao, karet, kelapa dalam, gambir dan lada. Berikut disajikan dalam tabel luas dan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan Kota Subulussalam.

Tabel 2.71.

Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Unggulan Perkebunan di Kota Subulussalam tahun 2015-2019

Komoditi Perkebunan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	17.257	11.145	18.377	19.072	18.993
	Produksi (Ton)	31.490	31.684	31.648	17.311	11.878
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,89	2,84	1,72	1,17	1,5
Karet	Luas Panen (Ha)	4.061	2.777	3.856	3.856	3.808
	Produksi (Ton)	2.100	1.856	1.628	4.119	2.862
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,74	0,59	0,42	1,21	0,75
Kakao	Luas Panen (Ha)	822	380	755	755	726
	Produksi (Ton)	202	211	211	211	388
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,58	0,56	0,27	0,27	0,3

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2019 jumlah luas perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan mencapai 18.993 Ha dengan produksi panen sebesar 11.878 ton. Semua Kecamatan di Kota Subulussalam memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu perkebunan karet mengalami perluasan luas panen, pada tahun 2019 mencapai 3.808 Ha dengan produksi 2.862 ton.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit, karet dan kakao antara lain: 1) kurangnya pemeliharaan; 2) berkurangnya Tanaman Menghasilkan (TM); 3) bertambahnya jumlah Tanaman Rusak (TR). Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao antara lain: 1) peningkatan pemeliharaan dan melaksanakan replanting (menanam kembali) untuk semua

komoditi perkebunan;2) peningkatan penerapan anjuran teknologi budidaya yang baik; 3) perluasan areal penanaman; dan 4) peningkatan penyuluhan kepada petani.

C. Peternakan

Populasi ternak besar terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Pada tahun 2019, populasi ternak besar yang terdapat di Kota Subulussalam hanya sapi potong dan kerbau dengan populasi sebesar 1.327 ekor dan 144 ekor. Populasi ternak sapi sebagian besar berada di kecamatan Simpang Kiri, dan kecamatan Rundeng. Populasi ternak (besar dan kecil) secara umum menunjukkan peningkatan, pada periode tahun 2015-2019. Secara rinci populasi ternak di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.

Populasi Ternak di Kota Subulussalam Pada Tahun 2015-2019

NO	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sapi Potong	2.491	2.707	2.622	2.671	1.327
2	Kambing	7.784	8.003	8.003	5.847	5.953
3	Kerbau	253	275	280	259	144
4	Domba	1.709	1.877	1.290	718	1.273
5	Ayam Kampung	68.423	78.800	78.904	40.668	35.968
6	Ayam Pedaging	71.100	81.294	82.614	76.396	84.794
7	Ayam Petelur	2.000	3.500	4500	3550	2000
8	Itik	7.603	7.885	9131	4516	4369

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Populasi ternak kecil terdiri dari kambing dan domba. Pada tahun 2019. Total populasi berturut-turut adalah 5.953 ekor kambing, 1.273 ekor domba, Populasi ternak kambing sebagian besar berada di kecamatan Rundeng, dan kecamatan Simpang Kiri sedangkan Populasi ternak domba terbesar berada di kecamatan rundeng dan kecamatan Longkib.

Populasi unggas terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/itik manila. Pada tahun 2019, populasi unggas di Kota Subulussalam terdiri dari ayam kampung 35.968 ekor, ayam petelur 2.000 ekor, ayam pedaging 84.794 ekor dan itik 4.369 ekor. Populasi ayam kampung terbesar

berada di kecamatan Simpang Kiri, Populasi ayam pedaging tertinggi berada di kecamatan Sultan Daulat, kecamatan Simpang Kiri, dan kecamatan Rundeng.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak (kecil dan besar) antara lain: 1) peningkatan populasi ternak; dan 2) pengembangan kawasan peternakan terpadu.

D. Perikanan

Potensi sumberdaya ikan di Kota Subulussalam cukup besar, mengingat Kota Subulussalam mempunyai jumlah panjang sungai sekitar 16,72 Km. Lahan budidaya perikanan dapat memanfaatkan lahan daratan basah(sawah), kolam, tambak dan rawa. Ketersediaan ikan per kapita Kota Subulussalam mengalami kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di Kota Subulissalam yang terus tumbuh terutama pada budidaya perikanan. Walaupun demikian, ketersediaan ikan di Kota Subulussalam masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil Secara rinci produksi ikan di Kota Subulussalam tersaji pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.

Produksi Ikan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun (Ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	298,67	299,17	126,5	126,5	131,2
Perikanan Budidaya	0	0	57,4	57,4	32,52
- Budidaya Kolam	0	0	53,7	53,7	32,52
- Budidaya Tambak dan keramba	0	0	3,7	3,7	0
Jumlah	298,67	299,17	183,9	183,9	163,72

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Kedepan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengoptimalan pembangunan perikanan terutama dalam sektor budidaya ikan untuk peningkatan produksi, memanfaatkan penerapan dan implementasi

teknologi dan informasi perikanan dan mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih ikan unggul.

2.3.4.3. Kehutanan

Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014-2034 menetapkan luas kawasan hutan di Kota Subulussalam pada tahun 2014 seperti disajikan Tabel 2.59. Hutan di kawasan lindung seluas 23.781,65 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung 19.046,08 Ha, Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 3.249,62 Ha dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.485,95 Ha. Selanjutnya hutan di kawasan budidaya seluas 12.573,54 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 10.548,47 Ha dan hutan produksi konversi seluas 2.025,07 Ha.

Tabel 2.74.

Luas Kawasan Hutan di Kota Subulussalam

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
I	Hutan di Kawasan Lindung	23.757,24
	Hutan Lindung	18.817,61
	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	3.249,61
	Tahura Plasma Nutfah Kapur	1.690,02
II	Hutan di Kawasan Budidaya	12.573,3
	Hutan Produksi	10.548,23
	Hutan Produksi Konversi	2.025,07

Sumber: Qanun RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Berdasarkan kewangan pengelolaannya, pemerintah Kota Subulussalam hanya diberikan tanggungjawab mengelola kawasan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.690,02 Hektar, kawasan hutan seain hutan plasma nutfah kapur menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Sampai pada saat ini pengelolaan kawasan Tahura masih belum maksimal, masih banyak terdapat permasalahan dilapangan seperti masih banyaknya masyarakat setempat membuka lahan perkebunan dan penebangan pohon secara ilegal. Kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam sudah

mempersiapkan perencanaan bahwa kawasan Tahura tersebut akan dijadikan sebagai kawasan hutan penelitian, pendidikan dan wisata.

2.3.4.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kebutuhan listrik di Kota Subulussalam dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sampai dengan tahun 2019, semua wilayah di Kota Subulussalam telah tersambung dalam jaringan PLN. secara rinci persentase rumah berlistrik di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tangga pengguna listrik	127,61	129,54	134,34	140,32	142,31
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	20.542	21.379	22.645	24.100	24.808
Jumlah Rumah Tangga	16.098	16.504	16.856	17.175	17.432

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

2.3.4.5. Pertambangan dan Penggalian

Kota Subulussalam ternyata tidak hanya memiliki potensi di sektor Perkebunan namun juga memiliki potensi sektor pertambangan. Saat ini tercatat 5 (Lima) perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kota Subulussalam, walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah melakukan izin produksi, sedangkan perusahaan lainnya masih izin eksplorasi.

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kota Subulussalam masih mengeksplorasi jenis galian Bijih Besi DMP, Batubara dan Galian DMP yang tersebar di Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Sultan Daulat. Eksplorasi Batu Bara dilakukan oleh PT. Olaga Prima dengan lokasi eksplorasi di Kecamatan Longkib. Sedangkan PT. Densuko Naniko melakukan eksplorasi Galena DMP yang berlokasi di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara itu eksplorasi Bijih Besi DMP dilakukan sebanyak 6 (enam) perusahaan yang

semua ijin operasi di Kecamatan Penanggalan. Pada saat ini PT. Estamo Mandiri sudah melakukan ijin produksi Bijih Besi DMP yang berlokasi Kecamatan Penanggalan dengan luas Areal produksi 600 Hektar. Berikut disajikan dalam Tabel 2.76 jumlah perusahaan tambang yang ada di Kota Subulussalam.

Tabel 2.76.

Perusahaan Pertambangan di Kota Subulussalam Tahun 2019

Nama Perusahaan	Jenis Galian	Lokasi	Ijin Konsesi (ha)	Status ijin Konsesi
PT. Atjeh Inti	Bijih Besi DMP	Sultan Daulat / Penanggalan	457,8	Explorasi
PT. Tuah Ranup Lampuan	Bijih Besi DMP	Penanggalan	467	Explorasi
PT. Organik Semesta Subur	Bijih Besi DMP	Sultan Daulat	990	Explorasi
PT. Pilar Emas Indah	Bijih Besi DMP	Penanggalan	153	Explorasi
PT. Estamo Mandiri	Bijih Besi DMP	Penanggalan	600	Produksi

Sumber : DP3UKM Kota Subulussalam 2019

2.3.4.6. Perdagangan

A. Jumlah Pedagang

Peran pedagang dalam upaya mempercepat ekonomi sangat penting dikarenakan pedagang adalah sebagai pelaku utama dalam pembangunan perdagangan disuatu daerah. Semakin banyak dan beragamnya aktifitas perdagangan pada suatu daerah semakin membuka peluang penciptaan lapangan usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut disajikan dalam tabel jumlah pedagang besar, menengah dan kecil disetiap Kecamatan di Kota Subulussalam. Jumlah pedagang di Kota Subulussalam didominasi oleh pedagang kecil yakni sebesar 62,27% dari keseluruhan pedagang di Kota Subulussalam dan secara sebarannya berpusat di ibukota Subulussalam.

Tabel 2.77.
Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan
Tahun 2019

Kecamatan	Pedagang Besar (org)	Pedagang Menengah (org)	Pedagang Kecil (org)	Jumlah
Simpang Kiri	60	100	300	460
Penanggalan	40	60	100	200
Rundeng	20	40	80	140
Sultan daulat	20	50	120	190
Longkip	2	20	80	102
Jumlah	142	270	680	1092
Persentase (%)	13,00	24,73	62,27	100

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

B. Jumlah Sarana Perdagangan

Perdagangan di Kota Subulussalam di dukung dengan sarana prasarana seperti pasar umum, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2019

Jenis Sarana Pedagangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pasar Umum	0	1	2	2	2
Pasar Desa	1	5	6	6	6
Toko	165	170	220	236	241
Kios	388	388	500	514	568
Warung	280	300	400	473	513
Rumah Makan/Restoran	53	60	80	86	73

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Dari Tabel 2.78 di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah sarana perdagangan di Kota Subulussalam sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi di Kota

Subulussalam khususnya disektor perdagangan sangat baik perkembangannya, dan ini akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menajnjikan.

2.3.4.7. Perindustrian

Potensi industri di Kota Subulussalam secara keseluruhan di tahun 2017 berjumlah 494 unit usaha, yang terdiri dari industri dalam skala kecil sampai besar. Kehadiran industri secara langsung juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan konstribusi dalam peningkatan ekonomi daerah. Berikut ditampilkan beberapa jenis industri di Kota Subulussalam. Jumlah jenis industri di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.

**Banyaknya Industri Menurut Jenisnya Diperinci Per Kecamatan
di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017**

Kecamatan	Industri	Inustri Logam	Industri Makanan	Industri Pakaian	Industri Lainnya	Jumlah
Simpang Kiri	84	12	97	33	96	226
Penanggalan	27	3	33	4	30	67
Rundeng	19	13	58	1	57	116
Sultan daulat	36	1	4	1	20	25
Longkip	38	-	9	-	51	60
2017	204	29	201	39	254	494
2016	333	22	172	38	367	577
2015	123	9	81	11	219	448

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Pertumbuhan sektor industri di Kota Subulussalam sangat cepat. Tabel 2.79 menunjukkan bahwa jumlah industri yang beroperasi di Kota Subulussalam terus bertambah bahkan mencapai dua kali lipat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pertumbuhan ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan sektor industri melalui pembinaan para pelaku usaha industri (hulu dan hilir) khususnya industri kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk kelompok – kelompok industri binaan pemerintah.

2.3.4.8. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Jumlah transmigrasi lokal di Kota Subulussalam sampai pada tahun 2019 berjumlah dua lokasi yakni transmigrasi suak jampak dan transmigrasi Bukit alim.

2.3.5. Penunjang Urusan

2.3.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Subulussalam memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Subulussalam yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Tabel 2.80.

Beberapa Dokumen Perencanaan Daerah Kota Subulussalam

Dokumen Perencanaan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
Dokumen RPJP	√		Qanun Kota Subulussalam nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kota subulussalam tahun 2015-2035
Dokumen RPJMD		√	Sedang proses penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) kota subulusslam tahun 2019-2024
Dokumen Renstra SKPD	√		Peraturan Walikota Subulussalam Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah Kota Subulussalam tahun 2014-2019
Dokumen RKPD	√		Disusun setiap tahun Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam beserta perubahannya
Dokumen Renja SKPD	√		Disusun Setiap tahun sebelum pengesahan RKPD di tetapkan
Dokumen RTRW	√		Qanun kota subulussalam nomor 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah kota subulussalam tahun 2014-2034

Sumber : Bappeda Kota Subulussalam

Mulai 2017 pemerintah menggunakan pendekatan *money follow function* menjadi *money follow program* adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran *money follow program* ini mendukung pendekatan perencanaan yang *holistik tematik* yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, terintegrasi yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan. Berikut akan disajikan dalam tabel beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Subulussalam.

2.3.5.2. Urusan Keuangan

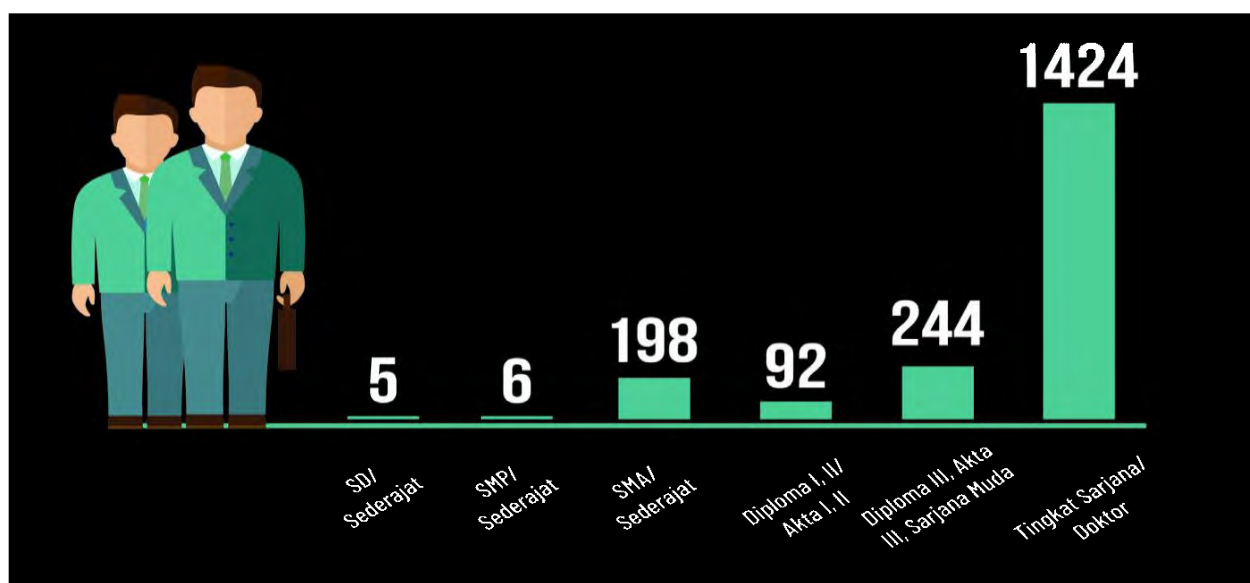
Gambaran umum pengelolaan keuangan dan aset Kota Subulussalam sudah berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan di Kota Subulussalam yang pada masuk kedalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dan tahun 2017.

2.3.5.3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN,

program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Kota Subulussalam yang memiliki belum banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*). Kondisi aparatur sipil negara di pemerintahan kota subulussalam dapat digambarkan pada tabel 2.72 dibawah ini.



Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Gambar 2.17. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam, 2019

Secara kuantitas dapat dilakukan dengan menambah jumlah aparatur sipil negara jika memang dibutuhkan demi mencapai kondisi ideal, dan secara kualitas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara. Secara umum ada dua hal pokok yang merupakan pelaksanaan dari fungsi Manajemen ASN yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK meliputi penyusunan dan penetapan

formasi/kebutuhan PNS, pengadaan, pemberian kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, pengembangan karier, penetapan sistim pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan terhadap pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

2.3.5.4. Urusan Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegwai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

2.3.5.5. Urusan Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan qanun, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Qanun dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRK.

2.4. Aspek Daya Saing

Aspek Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek

daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.

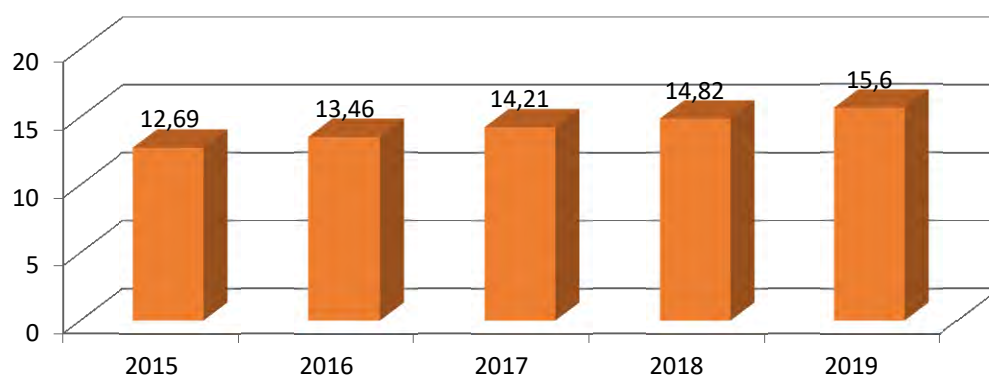
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi non pangan dan Jumlah rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank.

2.4.1.1. Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Kegunaan dari konsumsi rumah tangga perkapita adalah untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, sehingga dinilai perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga perkapita dihitung dengan cara nilai PDRB Menurut Pengeluaran komponen konsumsi rumah tangga dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per tahun kota Subulussalam mencapai 15,60 juta rupiah, naik dari sebelumnya sebesar 14,82 juta rupiah pada tahun 2018.



Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

**Gambar 2.18. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun
(Juta Rp) Kota Subulussalam Tahun 2015-2019**

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per rumah tangga di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2015-2019 terus meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga perkapita terbesar terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,06 persen.



Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Gambar 2.19. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Tahun (%), 2015-2019

2.4.1.2. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank atau yang lebih dikenal dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang

diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK, dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank Return of Asset (ROA) akan semakin meningkat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, nilai FDR di kota Subulussalam cenderung mengalami penurunan dari 3,3 persen pada tahun 2017 menjadi 1,58 persen pada tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan penurunan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus kredit untuk investasi dari pada menabung. Berikut disajikan dalam tabel rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank umum.

Tabel 2.81.

**Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum
di Kota Subulussalam Tahun 2017-2019 (Rp, 000)**

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	3,36	5,71	1,58
Jumlah pinjaman di bank umum	80.097.295	135.453.128	64.815.755
Dana pihak ketiga di bank umum	12.993.376	98.856.057	294.544.377

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Beberapa Bank yang ada di Kota Subulussalam diantaranya adalah Bank BRI, Bank BPD Aceh Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah, Bank BTPN, Bank Mandiri dan Bank BNI.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketersediaan Daya Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah memadai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah

terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Subulussalam selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Listrik (KWH)	30.222.840	33.369.520	34.993.394	36.181.280	39.799.972
Konsumsi Listrik (KWH)	27.404.347	30.637.252	32.441.145	33.932.606	36.740.982
Rasio	1,1	1,09	1,08	1,07	1,08

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah kebutuhan energi listrik Kota Subulussalam pada Tahun 2015 sebesar 127.404.347 KWH menjadi 36.740.982 KWH di tahun 2019. Penyebab bertambahnya kebutuhan energi listrik ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pelayanan sosial, bisnis, industri, kantor pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Bila mencermati ketersediaan daya listrik yang ada, maka di perkirakan pada tahun-tahun mendatang produksi listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi listrik seluruh Kota Subulussalam, dengan asumsi bahwa semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya tumbuh usaha-usaha industri terbaru yang sangat membutuhkan energi listrik, jadi ini merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah Kota Subulussalam Kedepan.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi krisis daya listrik antara lain: 1) mencari alternatif lain dalam hal pemenuhan ketersediaan daya listrik daerah; 2) koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Subulussalam; 3) mencari investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam pada sektor kelistrikan.

2.4.2.2. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kota Subulussalam 2015-2019 pada Tabel 2.83.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.83.
Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif
di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	28.303	29.096	29.720	32.193	32.530
Jumlah Penduduk Usia > 64	1.398	1.392	1.452	1.788	1.869
Jumlah Usia Tidak Produktif <15 tahun + > 64 tahun	29.701	30.488	31.172	33.981	34.399
Jumlah Penduduk 15 – 64	39.289	40.219	41.242	46.234	47.018
Rasio Ketergantungan Total	75,60	75,80	75,58	73,50	73,16
Rasi Ketergantungan Muda	72,04	72,34	72,06	69,63	69,19
Rasio ketergantungan Tua	3,56	3,46	3,52	3,87	3,98

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2019

Tabel 2.83 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 76 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 72,58 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 72,06 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 3,52 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019 penduduk usia kerja di Kota Subulussalam masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB III

GAMBARAN KONDISI KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Keuangan Negara diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara khusus pengelolaan keuangan pemerintah Kota Subulussalam diatur dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam. APBK merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBK Kota Subulussalam terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai/mencukupi dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, tersedianya sumber daya manusia yang handal

sebagai pelaksana pembangunan, adanya regulasi yang mengatur, situasi dan kondisi yang kondusif di lapangan agar proses pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar. Hal penting lainnya adalah mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada serta mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat yang tepat.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi Belanja baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta capaian pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atas sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yang cukup. Pemerintah Daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi-potensi penerimaan daerah sehingga sumber penerimaan yang menjadi modal untuk pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (*money follow program, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran, tidak lagi harus berdasarkan pada tugas dan fungsi yang utama*).

Tujuan dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam adalah untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam rangka mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponen APBK dan laporan keuangan daerah untuk menilai realisasi kinerja keuangan Kota Subulussalam selama tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Analisis pendanaan Pemerintah Kota Subulussalam dilakukan terhadap komponen-komponen laporan keuangan. Analisis dilakukan atas jenis pendapatan, belanja dan

pembiayaan sesuai dengan susunan/struktur APBK Kota Subulussalam, Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neraca daerah, yakni Aset, hutang daerah, dan Ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah yaitu penerimaan dari pembiayaan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Masa Lalu Periode Tahun 2015-2019

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Subulussalam periode 2015-2019 yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung, dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, dan 2018, 2019* memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pembiayaan daerah selama ini difokuskan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Aceh dan menutupi defisit belanja.

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBK. Kinerja pelaksanaan APBK diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

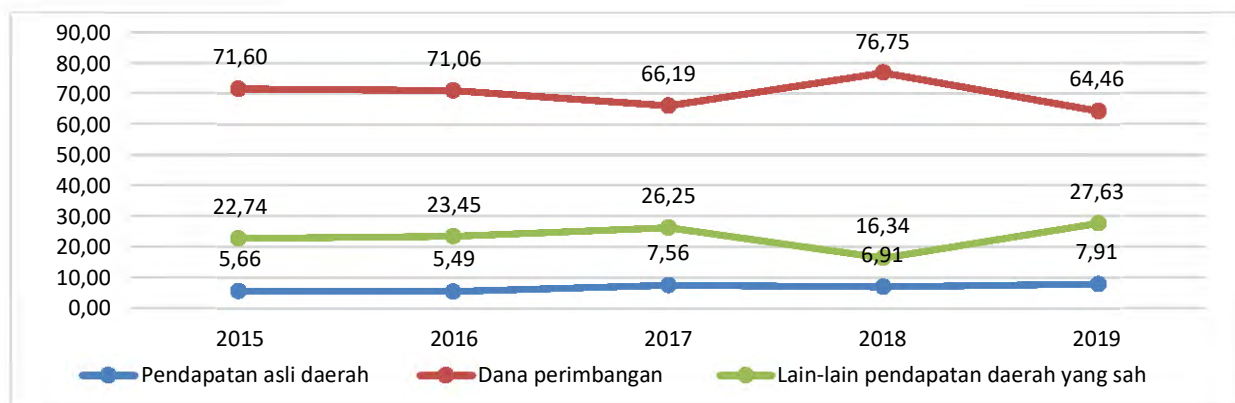
3.1.1. kinerja Pelaksanaan APBK

3.1.1.1. Analisa Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBK. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup: 1) **Pajak Daerah**, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) **Dana Perimbangan** yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) **Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

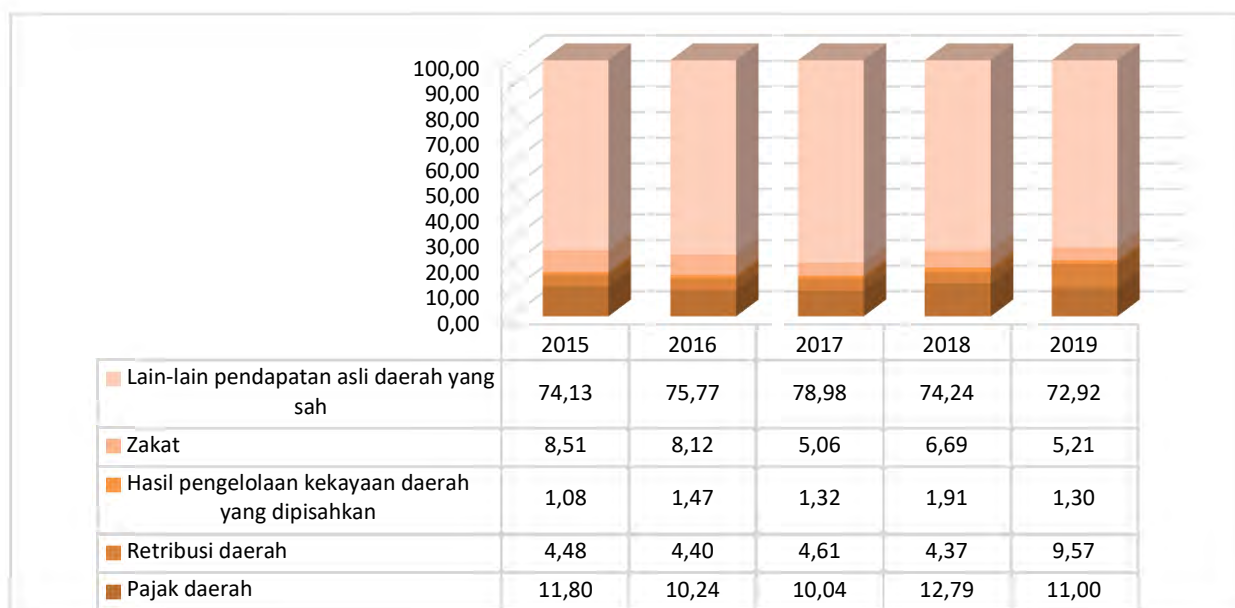
Berikut ini disajikan proporsi PAD Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2015-2019



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.1. Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah menjadi sumber yang dominan dengan rata-rata kontribusi 75,21 %. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.2. Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (%)

Kinerja pelaksanaan APBK meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah tahun 2015-2019. Jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	634.479.221.203,25	771.345.794.684,80	747.574.253.473,08	563.661.786.542,45	727.219.608.547,52	2,80
1.1	Pendapatan asli daerah	35.905.412.862,83	42.314.514.319,00	56.519.514.115,17	38.955.598.635,44	57.544.722.713,52	5,61
1.1.1	Pajak daerah	4.235.756.538,83	4.332.002.552,76	5.674.972.218,00	4.982.608.784,28	6.330.000.000,00	2,27%
1.1.2	Retribusi daerah	1.608.635.927,00	1.862.694.256,00	2.603.084.216,00	1.700.629.348,00	5.505.700.000,00	11,28%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	389.133.931,00	620.795.994,00	744.312.268,97	745.620.424,00	745.620.424,00	19,90%
1.1.4	Zakat	3.056.434.104,00	3.435.664.274,00	2.859.914.821,00	2.606.879.174,00	3.000.000.000,00	0,47%
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	26.615.452.362,00	32.063.357.242,24	44.637.230.591,20	28.919.860.905,16	41.963.402.289,52	17,39%
1.2	Dana perimbangan	454.292.012.035,00	548.122.264.173,00	494.792.096.493,00	432.614.060.638,00	468.762.363.000,00	1,68
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	15.861.221.035,00	12.477.315.997,00	14.816.952.238,00	12.796.167.077,00	15.091.963.000,00	0,43%
1.2.2	Dana alokasi umum	292.296.821.000,00	346.538.214.000,00	343.605.010.000,00	345.246.781.638,00	353.735.077.000,00	5,16%
1.2.3	Dana alokasi khusus	146.133.970.000,00	189.106.734.176,00	136.370.134.255,00	74.571.111.923,00	99.935.323.000,00	-2,45%
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	144.281.796.305,42	180.909.016.192,80	196.262.642.864,91	92.092.127.269,01	200.912.522.834,00	24,74
1.3.1	Pendapatan Hibah			248.730.000,00	-	2.200.000.000,00	0
1.3.2	Dana Darurat				-	-	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.404.937.314,42	16.716.298.272,80	14.885.879.159,91	15.806.124.569,01	17.911.789.766,00	8,13
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				12.346.520.000,00	14.077.458.366,00	14,02
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	-	0
1.3.6	Pendapatan Transfer DD dari APBN	16.712.583.000,00	43.478.732.000,00	64.724.470.000,00	63.939.482.700,00	69.331.821.000,00	18,70
1.3.7	Transfer Alokasi Dana Insentif Daerah				-	-	0
1.3.8	Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh	104.164.275.991,00	105.713.985.920,00	116.403.563.705,00	-	97.391.453.702,00	5,80

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

PAD selama kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 17,97%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen Zakat yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 34,87% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,60%.

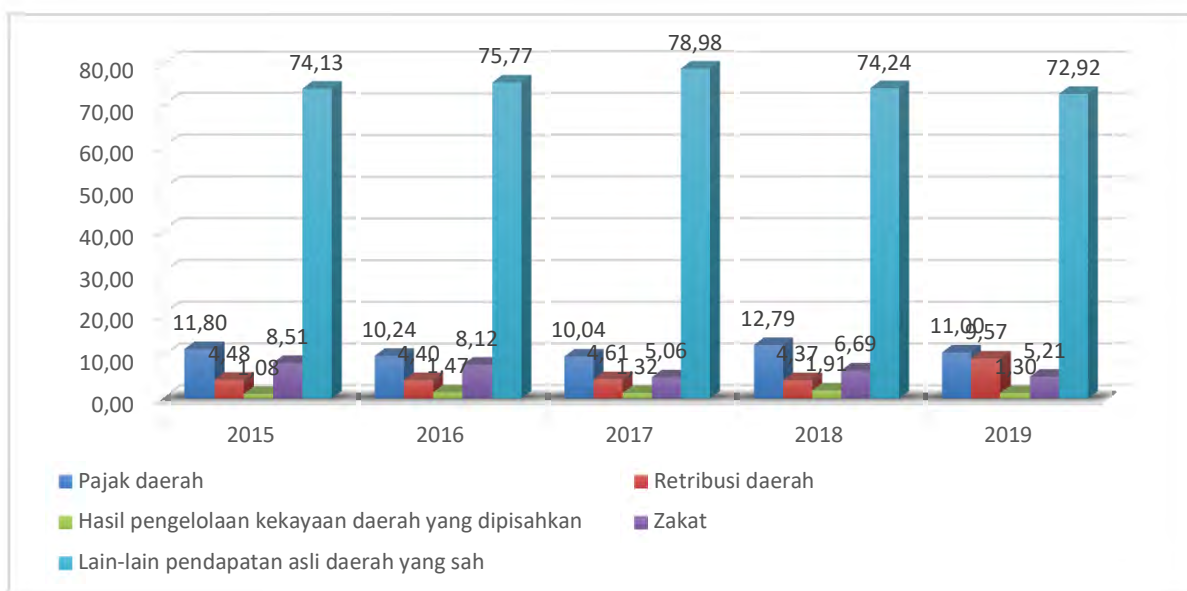
Selain itu Retribusi daerah dan Pajak Daerah juga menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 retribusi daerah dan pajak memberikan kontribusi besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 19,03% dan 13,83% dari Total PAD. Penerimaan Retribusi Daerah Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

1. Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :

- a. lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 72,92% dari total PAD 2019
- b. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 11,00% dari total PAD 2019
- c. retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,57% dari Total PAD 2019

- d. Zakat berada pada urutan keempat dengan kontribusi sebesar 5,21% dari total PAD 2019
- e. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 1,30% dari total PAD 2019.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

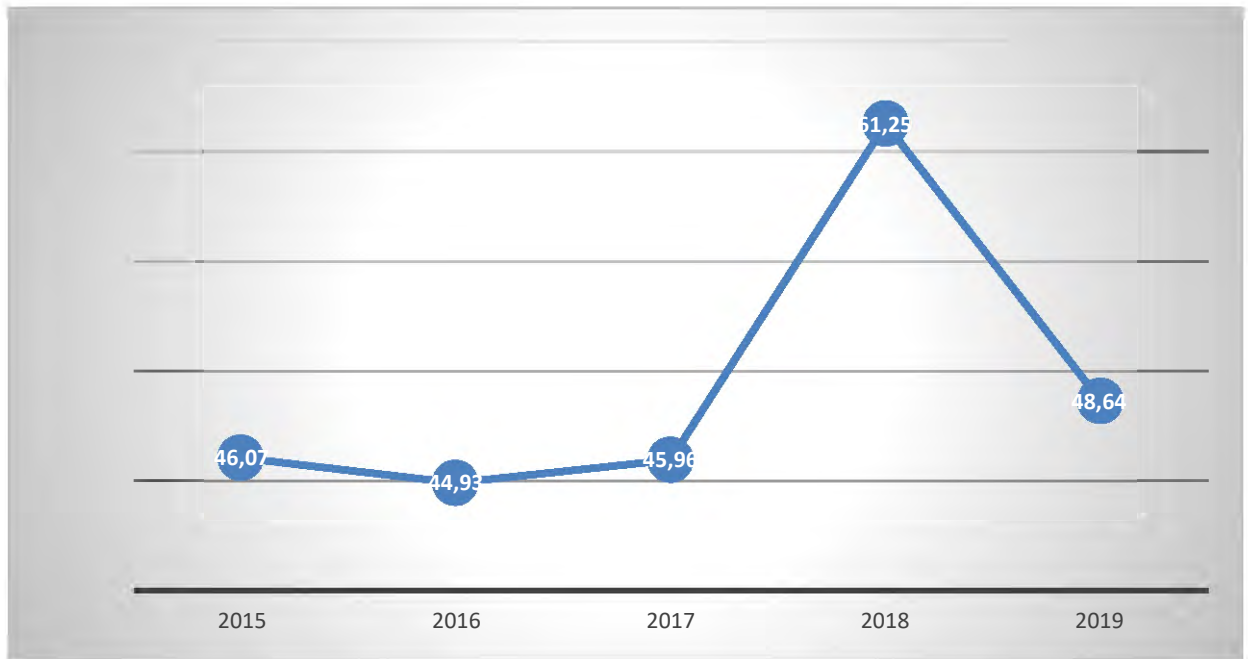
Gambar 3.3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Dari Tabel 3.1, Kota Subulussalam terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBK dan pembangunan di Kota Subulussalam, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2015 - 2019, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBK Kota Subulussalam sebesar 49,37%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi

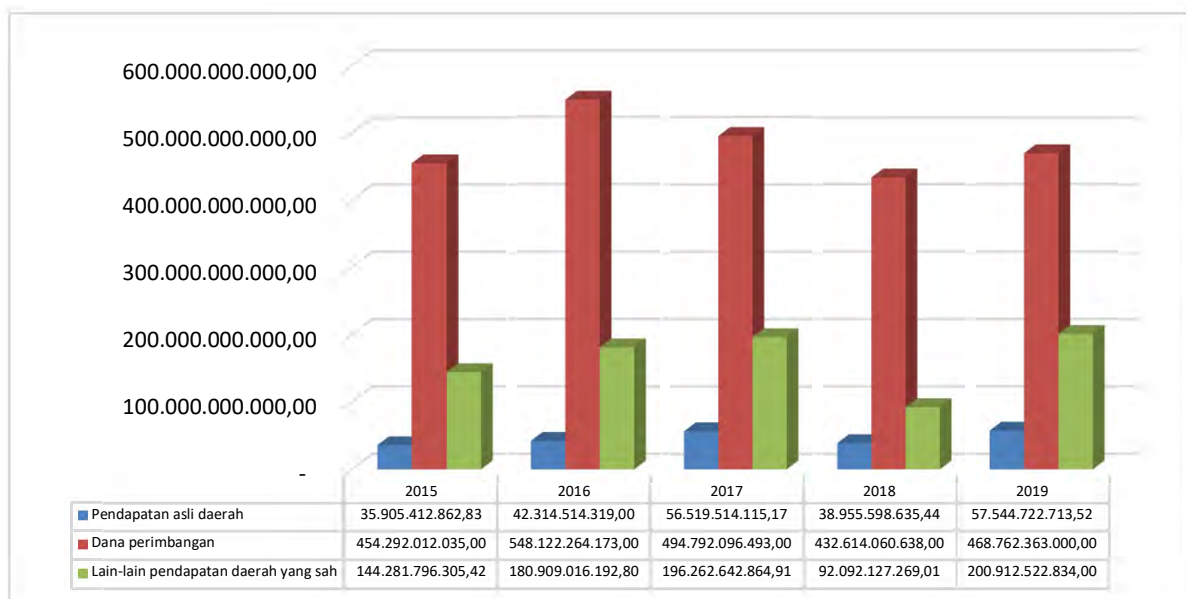
persentase DAU terhadap pendapatan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2019, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan kota Subulussalam berkisar 48,64%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.4. Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

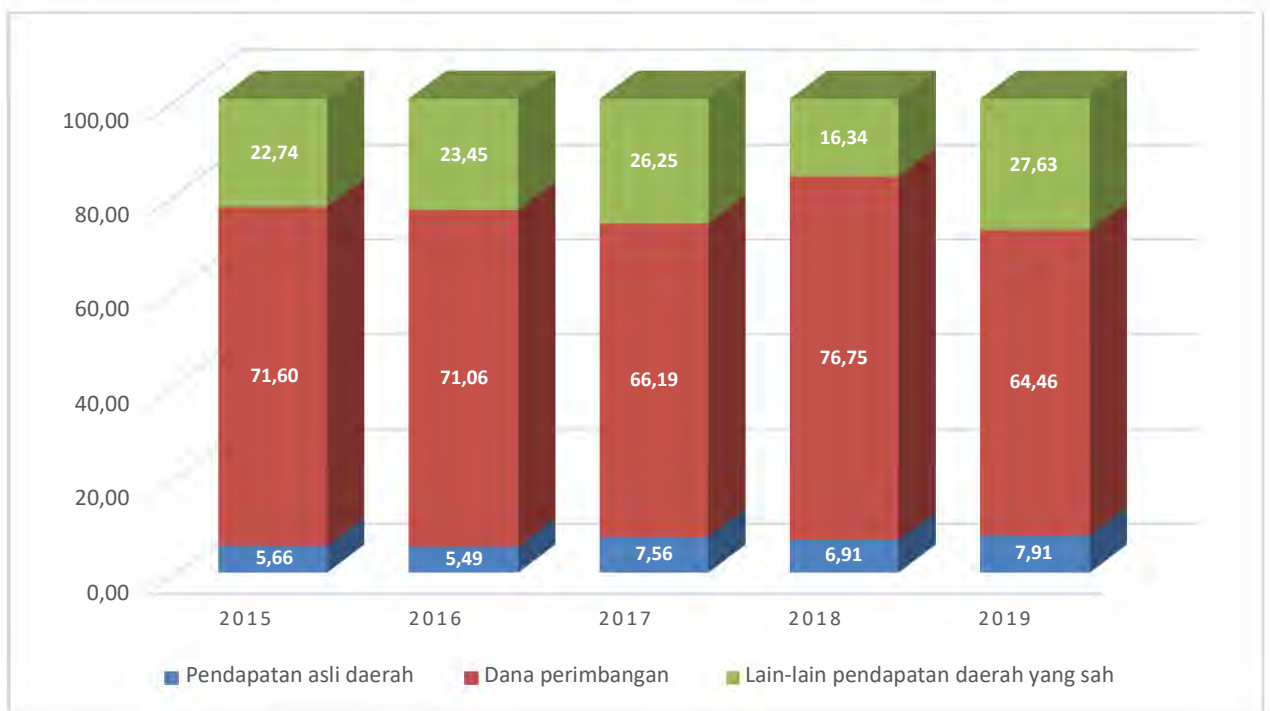
Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2015-2019.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Dari Gambar diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Subulussalam dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah Kota Subulussalam adalah dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sementara Pendapatan Asli Daerah Memberi Kontribusi Paling kecil terhadap pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kontribusi PAD terhadap Total pendapatan Kota Subulussalam masih berkisar 5,66% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mecapai kisaran 7,91%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.6. Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

3.1.1.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Subulussalam masa lalu juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode 5 (lima) tahun 2015-2019. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Struktur Belanja Daerah di Kota Subulussalam masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2015-2019 antara 32,21 persen – 39,28 persen atau rata-rata 38,78 persen.



3.1.1.3. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2015-2019

Total Belanja Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Total Belanja tahun 2015 sebesar Rp 636.461.911.903,27,- meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp729.643.469.313,58. Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp205.001.955.156,87 pada tahun 2015 menjadi Rp 286.603.354.855,58 pada tahun 2019, sedangkan Belanja Langsung meningkat dari sebesar Rp431.459.956.746,40 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp443.040.114.458,00 pada tahun 2019. Proporsi belanja langsung diatas memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan terus meningkat, untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

Realisasi belanja daerah Kota Subulussalam pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

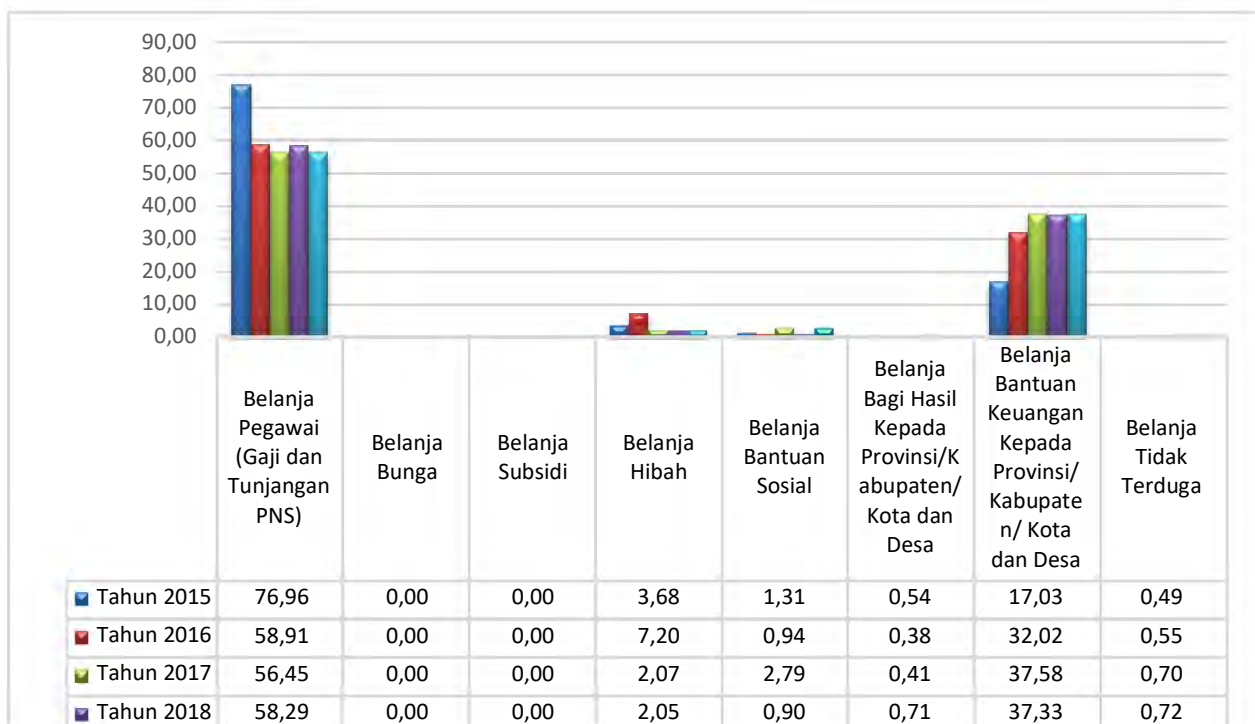


Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam

Uraian	Jumlah					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
Belanja Tidak Langsung	205.001.955.156,87	274.947.438.890,00	286.514.254.855,58	277.708.290.514,00	286.603.354.855,58	7,13
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS)	157.767.219.842,87	161.965.369.482,00	161.736.441.763,58	161.874.895.014,00	161.825.541.763,58	0,49
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	7.546.000.000,00	19.809.430.000,00	5.944.700.000,00	5.680.300.000,00	5.944.700.000,00	(51,14)
Belanja Bantuan Sosial	2.676.000.000,00	2.593.000.000,00	7.980.017.592,00	2.500.000.000,00	7.980.017.592,00	40,53
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa	1.109.260.000,00	1.034.260.001,00	1.183.570.000,00	1.983.570.000,00	1.183.570.000,00	(9,74)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa	34.903.475.314,00	88.045.379.407,00	107.669.525.500,00	103.669.525.500,00	107.669.525.500,00	17,90
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	15,00
Belanja Langsung	431.459.956.746,40	498.908.046.051,40	464.762.619.016,00	292.010.996.362,00	443.040.114.458,00	3,84
Belanja Pegawai	38.102.324.120,00	42.471.589.300,00	65.280.496.425,00	67.557.057.781,00	55.175.473.500,00	2,64
Belanja Barang dan Jasa	132.202.086.876,40	135.234.151.305,83	123.533.374.408,00	127.913.005.088,00	183.787.167.109,00	23,53
Belanja Modal	261.155.545.750,00	321.202.305.445,57	275.948.748.183,00	96.540.933.493,00	204.077.473.849,00	(13,58)
JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 +2.2)	636.461.911.903,27	773.855.484.941,40	751.276.873.871,58	569.719.286.876,00	729.643.469.313,58	5,13

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

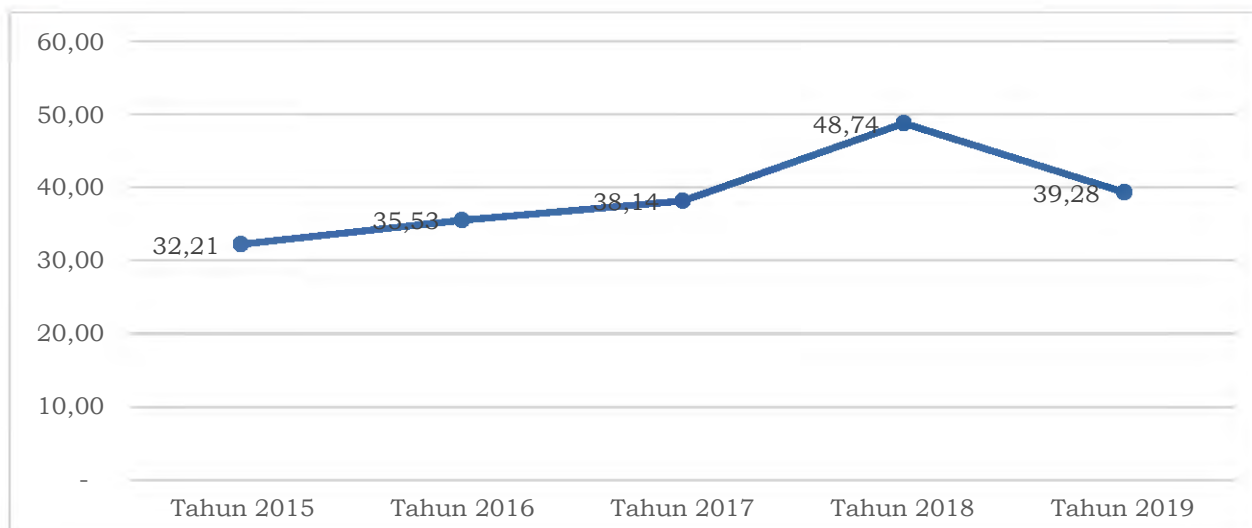
Dari data pada Tabel 3.2 realisasi belanja tidak langsung Tahun 2015-2019 terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Subulussalam dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.7. Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019

Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Tidak Langsung berkisar 61,41%, sementara secara umum rata-rata proporsi total Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 38,78%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Subulussalam untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (*outcome*) bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2015-2019 dapat digambarkan melalui Gambar berikut ini :



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.8. Persentase Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2019

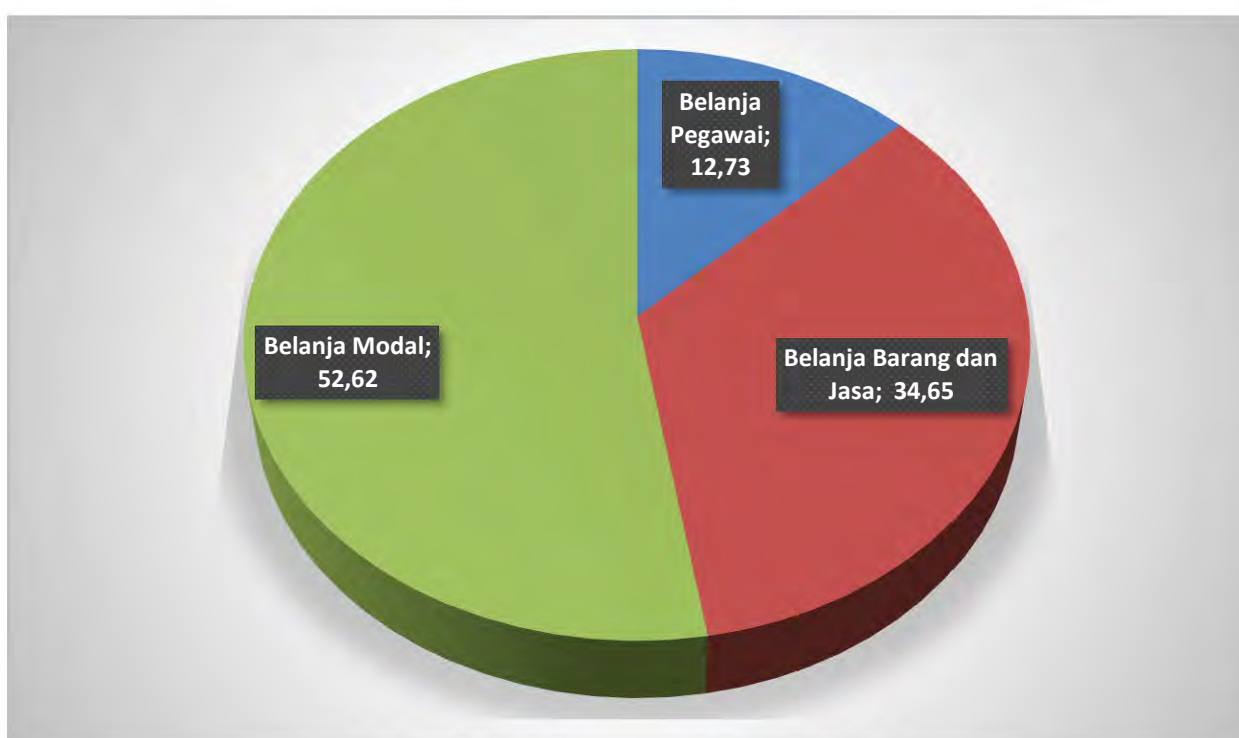
Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.9. Proporsi Komponen Belanja Langsung Terhadap total Belanja Langsung Tahun 2015-2019

Apabila dilihat pada Gambar 3.9. tentang rata-rata pertumbuhan belanja daerah 2015-2019, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 8,83 – 23,14% dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33,06-64,38% dari Belanja langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 27,11-43,80% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2015-2019. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya.

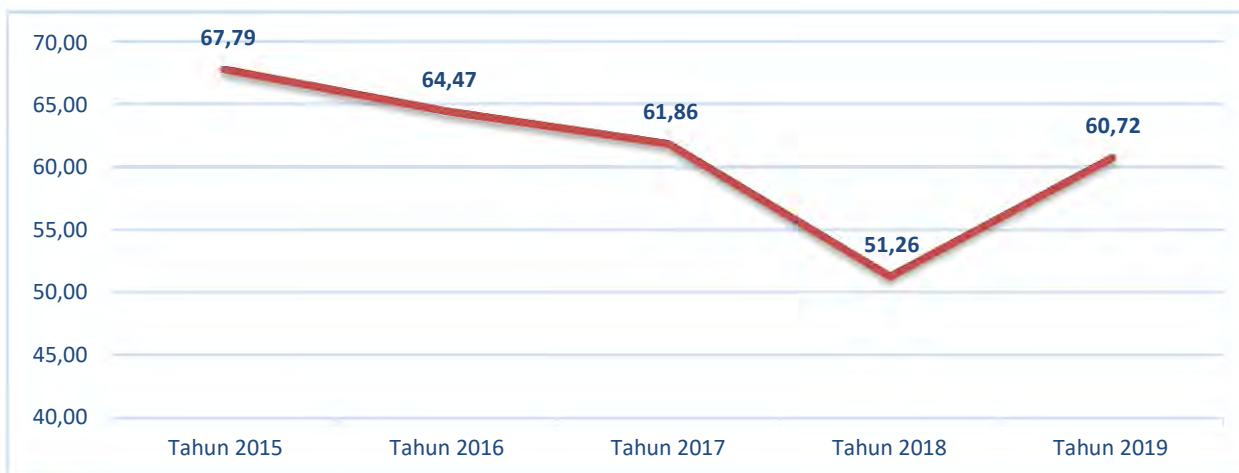


Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.10. Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015-2019

Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2015-2019, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 62,22%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 38,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBK Kota Subulussalam masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan

pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.11. Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.12. Persentase Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Apabila dilihat pada Gambar 3.11 tentang realisasi Belanja Kota Subulussalam tahun 2015-2019, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 38,78% : 61,72%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan



program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Kampong, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Kampong dan belanja tidak terduga.

3.1.1.4. Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Kredit Bergulir (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan dari Pihak Ketiga.

Penerimaan Pembiayaan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 fluktuatif, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 21.695.357.462,47 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Dimana selama kurun waktu dari tahun 2015-2019 Penerimaan Pembiayaan Kota Subulussalam yang terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 36.302.517.483,26 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Kontribusi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) terlihat seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	-207,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	-207,96
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	-207,96
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.195.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	2.423.860.766,06	-252,50

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam



3.1.1.5. Neraca Daerah.

Neraca Daerah.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Subulussalam beberapa perkiraan tahun terakhir terjadi peningkatan, antaranya pos Aset rata-rata peningkatan pertahun sebesar 8,35 %, sementara itu peningkatan jumlah ekuitas dana bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Subulussalam dari tahun 2016 – 2019 sebagaimana tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4.
Neraca Pemerintah Kota Subulussalam per 31 Desember Tahun 2016 s/d 2019

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1.064.650.371.185,99	1.217.437.864.357,42	1.246.829.671.969,04	1.350.168.818.591,34	8,35
1.1	ASET LANCAR	55.130.366.159,94	33.481.231.540,17	48.508.882.758,79	53.849.061.812,00	5,54
1.1.1	Kas di Kas Daerah	7.834.205.356,54	332.401.857,62	1.075.452.395,07	3.461.956.283,25	116,56
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	338.139.000,00	100.174.669,62	0,00	0,00	(45,79)
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000,00	158.825.588,00	35.135.543,00	309.458.219,00	176.673,83
1.1.5	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00	676.881.911,00	3.841.014.188,33	155,82
1.1.7	Kas di FKTP	1.195.724.218,00	1.397.087.435,00	1.540.448.514,00	0,00	(24,30)
1.1.8	Kas di Bendahara BOS	0,00	94.157.030,00	163.972.153,55	2.887.468.947,52	578,37
1.1.9	Kas di Bendahara FKTP	3.597.220,00	0,00	0,00	263.988.329,00	(33,33)
1.1.10	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.674.343,00	0,00
1.1.11	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Piutang Pendapatan	10.079.039.803,00	21.160.751.919,55	31.908.850.924,37	38.433.239.752,00	60,40
1.1.14	Piutang Lainnya	817.473.338,00	710.573.338,00	670.573.338,00	670.573.338,00	(6,24)
1.1.15	Penyisihan Piutang	(4.073.703.189,60)	(5.386.121.454,00)	(7.326.788.124,30)	(8.928.075.202,70)	30,03
1.1.16	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.17	Persediaan	38.935.860.414,00	14.913.381.157,00	17.939.686.445,50	12.890.763.614,60	(23,18)
	Jumlah Aset Lancar	55.130.366.159,94	33.481.231.540,17	48.508.882.758,79	53.849.061.812,00	5,54



1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11,11
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11,11
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11,11
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	11,11
1.2	ASET TETAP	998.852.481.192,45	1.148.752.734.970,75	1.246.829.671.969,04	1.257.814.756.912,84	8,14
1.2.1	Tanah	54.470.875.463,00	67.350.457.348,00	69.534.188.650,00	70.337.944.950,00	9,35
1.2.2	Peralatan dan Mesin	170.523.329.222,45	196.733.283.374,95	205.644.288.059,95	226.792.988.982,95	10,06
1.2.3	Gedung dan Bangunan	395.738.005.593,00	466.093.498.103,00	491.229.877.492,00	533.743.691.966,02	10,61
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	17.370.975.611,00	21.977.148.560,00	24.455.047.580,00	29.671.628.080,00	19,71
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	107.578.043.422,00	55.693.037.043,00	54.190.612.307,00	88.170.973.284,00	3,93
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(264.372.218.132,00)	(324.671.848.810,20)	(409.969.527.827,20)	(497.608.520.367,20)	23,49
	Jumlah Aset Tetap	998.852.481.192,45	1.148.752.734.970,75	1.162.301.941.613,75	1.257.814.756.912,84	8,14
	DANA CADANGAN	0	0	0	0	0,00
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00



1.3	ASET LAINNYA	7.667.523.833,60	32.203.897.846,50	33.018.847.596,50	33.439.861.636,50	107,94
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang	92.691.311,60	0,00	0,00	0,00	(33,33)
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Aset Tidak Berwujud	957.136.000,00	1.083.646.000,00	1.083.646.000,00	1.226.248.270,00	8,79
1.3.5	Aset Lain-Lain	6.617.696.522,00	31.120.251.846,50	31.935.201.596,50	33.278.751.596,50	125,69
	Jumlah Aset Lainnya	7.667.523.833,60	32.203.897.846,50	33.018.847.596,50	34.504.999.866,50	109,01
	JUMLAH ASET DAERAH	1.064.650.371.185,99	1.217.437.864.357,42	1.246.829.671.969,04	1.350.168.818.591,34	8,35
2	KEWAJIBAN	32.036.828.932,32	47.651.759.212,74	51.386.443.386,85	29.620.613.684,40	4,74
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.036.828.932,32	47.651.759.212,74	51.386.443.386,85	29.620.613.684,30	4,74
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	32.036.828.932,32	47.651.759.212,74	51.386.443.386,85	29.620.613.684,40	4,74
3	EKUITAS DANA	1.032.613.541.862,33	1.169.786.105.144,68	1.195.443.228.582,19	1.320.548.204.907,04	8,65
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.032.613.541.862,33	1.169.786.105.144,68	1.195.443.228.582,19	1.320.548.204.907,04	8,65
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.064.650.371.185,99	1.217.437.864.357,42	1.246.829.671.969,04	1.350.168.818.591,34	8,35

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, "Neraca Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2019

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sector publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kota Subulussalam Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
A.	Rasio Likuiditas				
	Aset Lancar	55.130.366.160	42.762.229.984	61.409.588.639	51.814.020.880
	Kas dan Piutang	40.636.654.315	27.848.848.827	43.469.902.193	38.192.172.515
	Persediaan	14.493.711.845	14.913.381.157	17.939.686.446	13.621.848.365
	Kewajiban Jangka Pendek	32.036.828.932	47.651.759.213	18.218.001.791	33.867.578.777
1.	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	1,72	0,90	3,37	1,53
2.	Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	1,27	0,58	2,39	1,13
B.	Rasio Solvabilitas				
	Total Aset	1.064.650.371.186	1.876.062.557.421	2.079.669.433.503	2.607.219.606.152
	Total Kewajiban	64.073.657.865	95.303.518.425	69.604.445.178	85.254.022.164
	Total Ekuitas	36.302.517.483	9.371.695.795	2.082.646.580	3.423.860.766
1.	DAR (Rasio Total Hutang terhadap Total Aset)	0,0602	0,0508	0,0335	0,0327
2.	DER (Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas)	1,7650	10,1693	33,4212	24,9000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Subulussalam cenderung menurun meski masih positif. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk

melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Berdasarkan Tabel 3.5 meskipun terlihat mengalami trend penurunan namun rasio lancar menunjukkan Pemerintah Kota Subulussalam masih sangat sehat karena aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Rasio Cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar yang sudah dikurangi tingkat persediaan dengan kewajiban lancar. Meskipun mengalami penurunan namun secara umum rasio cepat menunjukkan Pemerintah Kota Subulussalam masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Menurunnya kedua rasio likuiditas menunjukkan adanya tekanan keuangan (*financial distress*) yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam walaupun tidak akan mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Analisis *rasio solvabilitas* dilakukan dengan menghitung analisis rasio total hutang terhadap total asset atau *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan Rasio hutang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hasil analisis DAR jauh di bawah 1%. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai asset yang dimiliki. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Subulussalam, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

3.1.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja serta pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta

berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan public terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.1.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 30,77% pada tahun 2015 menjadi sebesar 29,74% pada tahun 2019. Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Di sisi lain rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Subulussalam menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017-2019, dari sebesar 30,75 % pada tahun 2017 menjadi sebesar 27,97 % pada tahun 2019. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Hal ini menjelaskan bahwa jika semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.6.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

NO	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019
2.1	Belanja Tidak Langsung	286.603.354.855,58	296.708.290.514,00	286.603.354.855,58
2.1.1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS)	161.825.541.763,58	170.874.895.014,00	161.825.541.763,58
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	5.944.700.000,00	5.680.300.000,00	5.944.700.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.980.017.592,00	2.500.000.000,00	7.980.017.592,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa	1.183.570.000,00	1.983.570.000,00	1.183.570.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa	107.669.525.500,00	113.669.525.500,00	107.669.525.500,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	454.762.619.016,00	312.010.996.362,00	443.040.114.458,00
2.2.1	Belanja Pegawai	53.280.496.425,00	67.557.057.781,00	55.175.473.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173.533.374.408,00	147.913.005.088,00	183.787.167.109,00
2.2.3	Belanja Modal	227.948.748.183,00	96.540.933.493,00	204.077.473.849,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 +2.2)	741.365.973.871,58	608.719.286.876,00	729.643.469.313,58

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

B. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Pemerintah Kota Subulussalam selama periode tahun 2015–2019 sebagai berikut :



Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	185.864.909.012,00	176.251.486.260,00	187.041.516.808,00	187.126.080.253,58	1,63
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	131.639.059.312,00	141.725.154.259,00	144.902.841.808,00	161.518.725.161,58	10,26
2	Belanja Tambahan Penghasilan	29.965.419.700,00	19.298.532.001,00	7.877.475.000,00	4.155.637.500,00	(268,76)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRK serta Operasional KDH/WKDH	1.258.000.000,00	1.308.000.000,00	1.977.000.000,00	1.942.000.000,00	16,52
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	(12,50)
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
6	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
7	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.402.430.000,00	13.319.800.000,00	32.084.200.000,00	19.109.717.592,00	(13,71)
B	BELANJA LANGSUNG	90.327.394.729,26	101.526.563.370,00	88.292.815.010,00	89.126.762.282,00	(3,58)
1	Belanja Honorarium PNS	15.415.827.508,00	17.713.833.925,00	9.874.910.000,00	12.865.939.500,00	(8,56)
2	Belanja Honorarium Non PNS	28.255.942.900,00	31.936.362.500,00	29.756.570.837,00	25.263.180.000,00	(14,01)
3	Belanja Uang Lembur	283.646.000,00	116.624.000,00	190.612.000,00	149.810.000,00	(23,61)
4	Honorarium Dana Bantuan Operasional (DBO) Sekolah Menengah (Dana Otsus)	740.094.000,00	3.960.200.972,00	3.620.100.000,00	2.927.490.000,00	3,95
5	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	781.600.000,00	3.674.400.000,00	3.076.257.736,00	1.080.550.000,00	(99,27)
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	60.000.000,00	600.000.000,00	40.000.000,00	(343,75)
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.630.217.483,26	3.517.750.925,00	3.517.439.182,00	3.852.954.000,00	5,80
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	500.000,00	-	-	-
9	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	4.863.881.890,00	4.700.204.820,00	3.638.540.829,00	2.652.884.000,00	(49,42)
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	800.613.000,00	970.565.000,00	750.196.000,00	883.190.000,00	3,63
11	Belanja Pakaian Kerja	289.688.000,00	250.868.000,00	146.982.000,00	435.400.000,00	35,52
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.456.297.300,00	1.345.010.640,00	1.073.931.500,00	1.074.915.000,00	(15,13)
13	Belanja Perjalanan Dinas	24.754.207.241,00	24.691.882.588,00	21.825.275.469,00	25.555.439.182,00	5,28
14	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dll)	9.045.379.407,00	8.588.360.000,00	10.221.999.457,00	12.345.010.600,00	18,59
TOTAL		276.192.303.741,26	277.778.049.630,00	275.334.331.818,00	276.252.842.535,58	(0,05)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019 (Data Tahun 2019, merupakan data APBK)

C. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Subulussalam sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.5 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2016 - 2019 dirinci pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun anggaran 2016	276.192.303.741,26	773.855.484.941,40	35,69
2	Tahun anggaran 2017	277.778.049.630,00	751.276.873.871,58	36,97
3	Tahun anggaran 2018	275.334.331.818,00	569.719.286.876,00	48,33
4	Tahun anggaran 2019* (target)	276.252.842.535,58	730.643.469.313,58	37,81

Keterangan : Sumber data pada kolom (a) berasal dari Tabel 3.6 dan kolom (b) berasal dari data realisasi APBD
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kota Subulussalam pada tahun 2016-2019 terus mengalami fluktuatif. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Subulussalam adalah sebesar 39,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Subulussalam lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK.

3.1.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari

dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan bel

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Realisasi Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)
Realisasi Pendapatan	634.479.221.203,25	771.345.794.684,80	747.574.253.473,08	563.661.786.542,45	727.219.608.547,52
Realisasi Belanja	636.461.911.903,27	773.855.484.941,40	751.276.873.871,58	569.719.286.876,00	729.643.469.313,58
Realisasi Pembiayaan	20.195.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	2.423.860.766,06
Surplus/(Defisit) Riil	18.212.666.762,45	33.792.827.226,66	5.669.075.396,04	(3.974.853.753,93)	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

*) Tahun 2019 Angka APBD

Dari Tabel 3.8 diatas tampak bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 Kota Subulussalam mengalami surplus anggaran, dan Surplus anggaran pada tahun tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Namun demikian tahun 2018 terjadi defisit.

Tabel 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam

Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Subulussalam selama periode 2015-2019 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) tampak pada tabel berikut.



Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019*)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	21.695.357.462,47	100,00	36.302.517.483,26	100,00	9.371.695.794,54	100,00	2.082.646.579,62	100,00	3.423.860.766,06	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	9.969.527.827,20	45,95	4.913.381.157,00	13,53	3.343.318.186,73	35,67	2.082.646.579,62	100,00	3.423.860.766,06	100,00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	7.980.017.592,00	36,78	6.302.517.483,26	17,36	4.671.848.810,20	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan lanjutan	3.745.812.043,27	17,27	25.086.618.843,00	69,10	1.356.528.797,61	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

*) Tahun 2019 Angka APBD

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah Kota. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019-2023 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat kota. Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:

- a. Menopang proses pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik Pemerintah Kota Subulussalam.
- b. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Meminimalkan resiko fiskal sehingga keberlanjutan anggaran Kota dapat terjamin

Proyeksi data disusun berdasarkan data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data adalah:

- a. Pendapatan

Proyeksi pendapatan mempertimbangkan perkembangan PDRB, inflasi, pendapatan nasional dan perkembangan sektor-sektor pembangunan yang mempengaruhi penerimaan pajak dan redistribusi.

- b. Belanja

Proyeksi belanja mempertimbangkan kenaikan belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan permasalahan pembangunan dan kewajiban yang mengikat pada belanja langsung.

3.2.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Subulussalam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat termasuk dalam salah satu sumber pendapatan daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

Analisis potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai

sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Sehingga diperlukan pula upaya yang mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya inovasi daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain,

1. Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) sumber daya alam yang baru. Upaya tersebut dapat berupa membuka kawasan-kawasan sentra produksi yang dapat menambah usaha masyarakat dan industri kecil menengah sehingga akan menambah retribusi dan pajak daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah.

Di samping itu dengan langkah *tax effort*, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya *law enforcement* bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah tahun 2011 dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan

profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah senyatanya.

Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah.

Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertanian/perikanan, dan perdagangan.

3. Menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (*meeting, insentive, conference, exhibition*) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya.
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga/swasta. Banyak aset daerah berupa tanah dan bangunan yang dapat dikelola dengan pola kerjasama pemerintah-swasta.
5. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya ini sangat berpengaruh terhadap upaya optimalisasi penerima retribusi dan pajak daerah yang telah ada yang selama ini belum sesuai dengan potensipendapatan daerah

Jika saja PAD itu dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder (perangkat daerah), maka akan

dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro-rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer ke daerah. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. DAU yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.

Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi

dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Aceh guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Selain dana bagi hasil pajak dari Provinsi, sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dari dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Dana Desa, dan dana transfer daerah lainnya seperti Dana Insentif Daerah, Dana Hibah, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lain, Dana Darurat dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan Kota Subulussalam, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
 - a) Perhitungan didasarkan atas potensi dari pertumbuhan bangunan-bangunan bertingkat dan dari bangkitan ekonomi di Kota Subulussalam.
 - b) Perhitungan potensi dari bangunan tinggi didasarkan atas data pendaftaran IMB dan SKRK dari tahun 2015-2019 dan asumsi pertumbuhan dimasa yang akan datang
- 2) Proyeksi BPHTB berdasarkan asumsi potensi dari pertumbuhan aktivitas jual beli properti di Kota Subulussalam
- 3) Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
 - a) Perhitungan proyeksi pajak hotel didasarkan atas rata-rata okupansi dari hotel sebesar 32,68 %
 - b) Dengan menggunakan rata-rata jumlah kamar per hotel per kelas dan rata-rata tarif hotel per hotel per kelas dan asumsi kenaikan okupansi dan tarif kamar 2,36 % per tahun (berdasarkan PDRB Akomodasi)

- 4) Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
 - a) Perhitungan didasarkan atas data wajib pajak restoran
 - b) Disumsikan rata-rata pertumbuhan unit restoran/cafe sebesar 3% per tahun
- 5) Proyeksi Pajak Air Bawah berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Subulussalam berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dari PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat.
- 6) Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Subulussalam melakukan penyesuaian regulasi dengan melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan pendekatan harga kontrak per setiap kali penayangan materi/iklan
- 7) Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
 - a) Peningkatan proyeksi pajak hiburan setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan even yang akan diadakan di Kota Subulussalam.
 - b) Selain dari peningkatan even, diasumsikan terdapat penambahan gedung hiburan
- 8) Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
 - a) Jumlah kapasitas disesuaikan dengan luas rata-rata daya tampung parkir sesuai kriteria objek pajak
 - b) Tingkat *Turn over* disesuaikan dengan kendaraan yang parkir
 - c) Penentuan Turn over yang meningkat dengan mempertimbangkan luas lahan yang tidak bertambah namun tingkat keramaian yang semakin meningkat.
- 9) Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
 - a) Peningkatan proyeksi pajak penerangan setiap tahunnya diasumsikan oleh peningkatan jumlah bangunan
 - b) Diasumsikan adanya kenaikan tarif dasar listrik
- 10) Proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan asumsi :
 - a) asumsi gaji untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil maka untuk Dana Alokasi Umum diproyeksikan terjadi peningkatan.



- b) pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam berbanding lurus dengan penjualan kendaraan bermotor sehingga meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang diberikan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data masa lalu dan asumsi yang dikemukakan diatas, didapat proyeksi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 20,24%. Proyeksi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan seperti tampak pada tabel berikut:



Tabel 3.12.
Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Uraian Akun	Pertumbuhan	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2,80%	728.509.321.002,00	672.102.174.459,00	690.952.623.531,37	706.252.980.868,41	725.052.996.118,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,61%	67.082.889.328,00	64.186.889.328,00	67.789.959.900,84	71.648.255.579,31	75.785.534.536,96
1.1.1	Pajak Daerah	1,17%	4.270.000.000,00	6.330.000.000,00	6.404.061.000,00	6.478.988.513,70	6.554.792.679,31
1.1.2	Retribusi Daerah – LRA	13,14%	4.377.268.904,00	4.377.268.904,00	4.952.442.037,99	5.603.192.921,78	6.339.452.471,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,90%	745.620.424,00	745.620.424,00	894.008.062,86	1.071.926.667,68	1.285.253.264,06
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5,32%	57.690.000.000,00	52.734.000.000,00	55.539.448.800,00	58.494.147.476,16	61.606.036.121,89
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,69%	646.653.986.674,00	594.644.914.448,00	610.646.885.533,87	621.838.631.630,51	636.246.046.049,86
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,32%	467.849.469.926,00	491.965.339.000,00	513.234.772.306,35	535.423.759.811,56	558.572.057.155,22
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-5,13%	178.804.516.748,00	102.679.575.448,00	97.412.113.227,52	86.414.871.818,95	77.673.988.894,63
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,00%	14.772.445.000,00	13.270.370.683,00	12.515.778.096,66	12.766.093.658,59	13.021.415.531,77
1.3.1	Hibah	0,00%	14.772.445.000,00	1.000.000.000,00	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,00%	-	12.270.370.683,00	12.515.778.096,66	12.766.093.658,59	13.021.415.531,77

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan Visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian Visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

- 1) Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan.

- 2) Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.
- 3) Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan.

Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Subulussalam.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan. Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

- 1) Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
- 2) Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.

Dalam upaya mewujudkan “**KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI**”, dengan cara mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam melalui pelayanan dasar yang terpenuhi dan pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkembangkan kegiatan sosial bermasyarakat dengan nuansa Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan

tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan public-private partnership.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Subulussalam diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan

meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

d. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan;



Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. royeksi belanja Kota Subulussalam pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.13.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			BELANJA DAERAH	751.008.987.392	699.236.098.402	693.785.170.014	709.307.815.047	728.343.010.679	2,08
5	1		BELANJA OPERASI	427.537.920.534	441.809.408.987	429.784.224.871	441.764.972.249	444.817.351.854	0,85
5	1	1	Belanja Pegawai	165.595.915.552	172.784.470.237	171.147.693.156	172.511.679.633	173.942.045.736	0,21
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	249.795.204.982	249.800.933.750	240.124.022.755	250.447.529.638	250.771.454.940	0,13
5	1	3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
5	1	4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
5	1	5	Belanja Hibah	8.750.300.000	10.155.500.000	9.263.034.353	9.371.707.364	10.481.531.090	1,06
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	3.396.500.000	9.068.505.000	9.249.474.607	9.434.055.613	9.622.320.088	2,00
5	2		BELANJA MODAL	210.347.517.358	148.221.634.425	154.899.838.297	157.553.773.556	166.465.830.728	0,81
5	2	1	Belanja Modal Tanah	4.400.000.000	260.000.000	3.500.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000	4,09
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.094.567.566	21.964.531.721	22.650.728.878	23.358.363.621	24.088.105.685	3,12
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.099.507.047	26.763.719.634	26.819.170.532	27.916.244.068	30.056.581.666	3,94
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.280.705.512	96.089.951.587	98.899.922.888	99.747.926.374	105.775.460.995	2,18
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.910.737.233	1.738.431.483	1.766.235.589	1.794.484.387	1.823.184.991	1,60
5	2	6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.562.000.000	1.405.000.000	1.263.780.410	1.136.755.106	1.022.497.391	-10,05
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	3.045.000.000	2.146.398.500	2.217.873.570	2.291.728.760	3,33
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.045.000.000	2.146.398.500	2.217.873.570	2.291.728.760	3,33
5	4		BELANJA TRANSFER	111.123.549.500	106.160.054.990	106.954.708.346	107.771.195.672	114.768.099.337	7,19
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	1.183.570.000	1.211.975.680	1.267.484.166	1.325.534.941	1.386.244.441	4,58
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	109.939.979.500	104.948.079.310	105.687.224.180	106.445.660.731	113.381.854.896	2,61

Sumber: Hasil Analisis, 2019



3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2020-2024, pembiayaan netto Kota Subulussalam diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,46%. Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam tahun 2020-2024 tampak pada tabel berikut.



Tabel 3.14.
Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH	3.423.860.766,06	27.133.923.943,00	2.832.546.482,54	3.054.834.178,53	3.290.014.560,88	7,46
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.423.860.766,06	29.133.923.943,00	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88	10,38
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	3.423.860.766,06	0	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88	10,38
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	0	0	0	0	0	0
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	29.133.923.943,00	0	0	0	0
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah	0	0	0	0	0	0
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis, 201



Tabel 3.14.a Proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Pertumbuhan	2020	2021	2022	2023	2024
		(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	2,80%	728.509.321.002,00	672.102.174.459,00	690.952.623.531,37	706.252.980.868,41	725.052.996.118,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,61%	67.082.889.328,00	64.186.889.328,00	67.789.959.900,84	71.648.255.579,31	75.785.534.536,96
1.1.1	Pajak Daerah	1,17%	4.270.000.000,00	6.330.000.000,00	6.404.061.000,00	6.478.988.513,70	6.554.792.679,31
1.1.2	Retribusi Daerah – LRA	13,14%	4.377.268.904,00	4.377.268.904,00	4.952.442.037,99	5.603.192.921,78	6.339.452.471,70
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,90%	745.620.424,00	745.620.424,00	894.008.062,86	1.071.926.667,68	1.285.253.264,06
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5,32%	57.690.000.000,00	52.734.000.000,00	55.539.448.800,00	58.494.147.476,16	61.606.036.121,89
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,69%	646.653.986.674,00	594.644.914.448,00	610.646.885.533,87	621.838.631.630,51	636.246.046.049,86
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4,32%	467.849.469.926,00	491.965.339.000,00	513.234.772.306,35	535.423.759.811,56	558.572.057.155,22
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-5,13%	178.804.516.748,00	102.679.575.448,00	97.412.113.227,52	86.414.871.818,95	77.673.988.894,63
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2,00%	14.772.445.000,00	13.270.370.683,00	12.515.778.096,66	12.766.093.658,59	13.021.415.531,77
1.3.1	Hibah	0,00%	14.772.445.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,00%	0,00	12.270.370.683,00	12.515.778.096,66	12.766.093.658,59	13.021.415.531,77
2	BELANJA DAERAH	2,08%	751.008.987.392	699.236.098.402	693.785.170.014	709.307.815.047	728.343.010.679
2.1	BELANJA OPERASI	0,85%	427.537.920.534	441.809.408.987	429.784.224.871	441.764.972.249	444.817.351.854
2.1.1	Belanja Pegawai	0,21%	165.595.915.552	172.784.470.237	171.147.693.156	172.511.679.633	173.942.045.736
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,13%	249.795.204.982	249.800.933.750	240.124.022.755	250.447.529.638	250.771.454.940
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2.1.4	Belanja Subsidi	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	1,06%	8.750.300.000	10.155.500.000	9.263.034.353	9.371.707.364	10.481.531.090
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,00%	3.396.500.000	9.068.505.000	9.249.474.607	9.434.055.613	9.622.320.088
2.2	BELANJA MODAL	0,81%	210.347.517.358	148.221.634.425	154.899.838.297	157.553.773.556	166.465.830.728
2.2.1	Belanja Modal Tanah	4,09%	4.400.000.000	260.000.000	3.500.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,12%	21.094.567.566	21.964.531.721	22.650.728.878	23.358.363.621	24.088.105.685
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,94%	46.099.507.047	26.763.719.634	26.819.170.532	27.916.244.068	30.056.581.666
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,18%	132.280.705.512	96.089.951.587	98.899.922.888	99.747.926.374	105.775.460.995
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,60%	4.910.737.233	1.738.431.483	1.766.235.589	1.794.484.387	1.823.184.991
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-10,05%	1.562.000.000	1.405.000.000	1.263.780.410	1.136.755.106	1.022.497.391
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,33%	2.000.000.000	3.045.000.000	2.146.398.500	2.217.873.570	2.291.728.760
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,33%	2.000.000.000	3.045.000.000	2.146.398.500	2.217.873.570	2.291.728.760
2.4	BELANJA TRANSFER	7,19%	111.123.549.500	106.160.054.990	106.954.708.346	107.771.195.672	114.768.099.337
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4,58%	1.183.570.000	1.211.975.680	1.267.484.166	1.325.534.941	1.386.244.441
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2,61%	109.939.979.500	104.948.079.310	105.687.224.180	106.445.660.731	113.381.854.896
3	PEMBIAYAAN DAERAH	7,46%	3.423.860.766,06	27.133.923.943,00	2.832.546.482,54	3.054.834.178,53	3.290.014.560,88
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,38%	3.423.860.766,06	29.133.923.943,00	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	10,38%	3.423.860.766,06	0,00	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00	29.133.923.943,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%		0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00%	0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00%		0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00%		0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00%		0	0	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%		0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0,00%		0	0	0	0	0

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2020-2024.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a) Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c) Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- d) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.



Proyeksi penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Subulussalam

Uraian	T A H U N				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46
Pendapatan	728.509.321.002,00	672.102.174.459,00	690.952.623.531,37	706.252.980.868,41	725.052.996.118,58
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.423.860.766,06	-	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	29.133.923.943,00	-	-	-
BELANJA DAERAH					
Total Belanja Prioritas I	647.238.798.265,28	606.655.820.311,65	601.814.989.463,54	616.972.905.408,96	634.636.157.650,99
Total Belanja Prioritas III	70.547.583.502,78	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35
Total Belanja Prioritas II	14.146.800.000,00	22.269.005.000,00	20.658.907.460,01	21.023.636.547,63	22.395.579.938,12
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46

Sumber: Hasil Analisis, 2019



Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.16.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Subulussalam

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	731.933.181.768,06	672.102.174.459,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46
	I.a Pendapatan	728.509.321.002,00	672.102.174.459,00	690.952.623.531,37	706.252.980.868,41	725.052.996.118,58
	I.b Penerimaan Pembiayaan	3.423.860.766,06	0,00	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
II	BELANJA DAERAH	731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46
	II.a Total Belanja Prioritas I	647.238.798.265,28	606.655.820.311,65	601.814.989.463,54	616.972.905.408,96	634.636.157.650,99
	II.a.1 Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	456.490.837.360	466.314.558.020,49	473.425.111.083,23	483.962.093.198,29	501.129.604.302,69
	II.a.2 Belanja Prioritas I	190.747.960.905	138.341.262.291,16	127.389.878.380,31	132.010.812.210,67	132.506.553.348,30
	- Belanja Urusan Pendidikan 20%	55.088.468.882	46.984.308.076,30	44.272.011.786,14	45.269.144.369,73	45.642.681.275,35
	- Belanja Urusan Kesehatan 10%	27.544.234.441	23.492.154.038,15	22.136.005.893,07	22.634.572.184,87	22.821.340.637,68
	- Belanja Program Prioritas Pencapaian Visi Misi	108.115.257.583	67.864.800.176,71	60.981.860.701,11	64.107.095.656,08	64.042.531.435,27
	II.a.3 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	II.b Total Belanja Prioritas II	70.547.583.503	72.311.273.090	72.311.273.090	72.311.273.090	72.311.273.090
	II.b.1 Belanja Program Prioritas SKPK (Urusan Pelayanan)	70.547.583.503	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35
	II.c Total Belanja Prioritas III	14.146.800.000	22.269.005.000	20.658.907.460	21.023.636.548	22.395.579.938
	II.c.1 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.2 Belanja Hibah	8.750.300.000	10.155.500.000,00	9.263.034.353,39	9.371.707.364,38	10.481.531.089,95
	II.c.3 Belanja Bantuan Sosial	3.396.500.000	9.068.505.000,00	9.249.474.606,62	9.434.055.613,20	9.622.320.088,24
	II.c.4 Belanja Bagi Hasi (Diluar Bagihasil Wajib Ke Pemerintah Desa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.5 Belanja Bantuan Keuangan (Diluar Bantuan Keuangan Wajib Ke Pemerintah Desa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.6 Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.045.000.000,00	2.146.398.500,00	2.217.873.570,05	2.291.728.759,93
III	TOTAL BELANJA PRIORITAS (Prioritas I+II+III)	731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas maka jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan pencapaian amanat/kebijakan nasional SDGs yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KOTA SUBULUSSALAM

Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan di masa lalu serta hal-hal yang masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan permasalahan agar dapat disusun perencanaan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi isu strategis yang merupakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan disusun. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pembidangan permasalahan di Kota Subulussalam secara umum mencakup: (i) Bidang Pemerintahan Umum, (ii) Bidang Ekonomi, (iii) Bidang Sosial Budaya, (iv) Bidang Infrastruktur, dan (v) keistimewaan Aceh.

4.1.1 Bidang Pemerintahan Umum

A. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Dasar

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belum terpenuhinya ketersediaan Standar Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan publik; (iii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iv) Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya; dan (v) manajemen kebencanaan kurang optimal.

B. Integrasi Perencanaan dan Pelaporan

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja; (ii) Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi.

C. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Masalah pendataan data dasar (*based data*) objek dan subjek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Kota Subulussalam yang belum optimal. Efektifitas dan efisiensi belanja kota perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat. Publikasi informasi keuangan kota kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Publikasi ini harus dilakukan oleh semua SKPK sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Ketertiban administrasi aset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

D. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah, misalnya proporsi penempatan pegawai SKPK. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan,

delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

E. Penyusunan, Implementasi, dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian qanun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan/tuntutan masyarakat perlu ditingkatkan. Penegakan regulasi pemerintah untuk kasus-kasus sengketa lahan dan peruntukan lahan masih banyak persoalan.

F. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPK menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (public hearing) yang diadakan oleh DPRK dalam pembahasan RAPBK masih perlu ditingkatkan.

G. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

Akuntabilitas dan tata pemerintahan menjadi sangat penting mengingat akuntabilitas menjadi salah satu parameter tata pemerintahan yang baik. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Nilai LAKIP dan LPPD adalah parameter

utama. Dari 3 parameter tersebut, nilai LAKIP Kota Subulussalam masih menjadi masalah, yaitu dengan nilai C.

Kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum optimal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam mereviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

4.1.2 Bidang Sosial dan Budaya

Kualitas pelayanan bidang sosial dan budaya di Kota Subulussalam dinilai masih belum memuaskan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut:

A. Permasalahan Pendidikan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia

- a. Masih Terdapat Usia Anak Sekolah Yang Tidak bersekolah
- b. Minimnya Sarana dan Prasarana jenjang pendidikan dasar
- c. Terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi dan distribusi yang belum merata
- d. Masih rendahnya uji kompetensi guru, masih di bawah rata-rata uji kompetensi guru secara nasional.
- e. Sistem pendidikan yang masih belum berimbang antara orientasi pada kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi dan spritual.
- f. Belum Optimalnya peran Pemuda dalam pembangunan daerah
- g. Minimnya sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Olahraga
- h. Masih Kurangnya Pembinaan Seni Budaya Lokal
- i. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi

B. Permasalahan Kesehatan

Beberapa permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang masih menjadi perhatian di Kota Subulussalam adalah:

- a. Masih Terjadinya Kasus Gizi Buruk
- b. Masih tingginya Balita Stunting
- c. Masih Terjadinya Kasus Penyakit Menular
- d. Masih terjadinya angka kematian ibu dan bayi

- e. Belum Meratanya Tenaga Kesehatan
- f. Terbatasnya sarana dan Prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan belum maksimal

C. Permasalahan Sosial, Kependudukan, Kearsipan, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih Tingginya Jumlah PMKS
- b. Terbatasnya data dan Informasi terhadap sistem administrasi kersipan
- c. Rendahnya Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa
- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
- e. Belum optimalnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
- f. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini;
- g. Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah.
- h. Belum optimalnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya;
- i. Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak.

4.1.3 Bidang Infrastruktur

- a. Masih terdapatnya Perumahan tidak layak huni
- b. Minimnya Ketersediaan Air bersih dan sanitasi layak
- c. Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi baik
- d. Konektifitas jaringan jalan belum optimal
- e. Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas transportasi untuk mendukung daya saing wilayah.
- f. Ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman yang belum memadai
- g. Ketergantungan Ketersediaan Listrik dari Daerah Sumatera Utara
- h. Masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan

- i. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana
- j. Masih adanya pelaku usaha dan masyarakat yang kurang taat terhadap pemanfaatan ruang
- k. Belum adanya dokumen turunan RTRW yang ditetapkan
- l. Belum semua bangunan memiliki IMB
- m. Belum optimalnya layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi dan telekomunikasi yang cepat dan aman;
- n. Belum meratanya akses internet untuk masyarakat.
- o. Belum adanya pelembagaan pengelolaan persampahan kota menuju konsep zero waste.

4.1.4 Bidang Ekonomi

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung stagnan
- b. Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan
- c. Masih tingginya angka Pengangguran
- d. Masih Rendahnya Pengelolaan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah
- e. Belum Optimalnya Produksi Pertanian dan kehutanan
- f. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan
- g. Belum Maksimalnya Pengelolaan destinasi Wisata
- h. Belum maksimalnya pemanfaatan Taman Hutan Rakyat
- i. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah
- j. Belum selesainya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Subulussalam
- k. Sebagai panduan pembangunan pariwisata secara terpadu yang menyangkut aspek sosial dan ekonomi serta bersifat
- l. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar
- m. Sarana dan prasarana BLK belum memadai
- n. Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja;
- o. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

- p. Pengembangan kawasan untuk investor dan status lahan masih menjadi kendala

4.1.5 Bidang Keistimewaan Aceh

- a. Permasalahan terkait pendidikan dayah/pesantren di Kota Subulussalam adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan dayah/pesantren, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas maupun pemberdayaan santri serta kelembagaan.
- b. Materi Syariat Islam yang diselenggarakan di semua jenjang sekolah umum belum berdampak pada pendidikan karakter .
- c. Permasalahan dalam kehidupan adat adalah belum optimalnya upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam
- d. Masih kurangnya kebersamaan ulama dan umara mengakibatkan permasalahan dalam mengoptimalkan peran ulama dalam perumusan dan penetapan serta pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam.
- e. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah
- f. Belum optimalnya pelaksanaan syari'at islam

4.2. Lingkungan Strategis

4.2.1. Analisis Lingkungan Internal

Pembahasan mengenai lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya. Penjelasan selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut.

- 1) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota Subulussalam sebagai daerah pengunungan di Aceh memiliki SDA, dan kesuburan tanah. Dalam Provinsi Aceh, Kota Subulussalam dijadikan kawasan peruntukan pengembangan Agro industri dan sentra produksi.

Implikasi tantangannya: (i) harus menciptakan iklim yang kondusif dan ramah investasi; (ii) mengembangkan kecakapan kota

mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melingkupi aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan Iptek; aspek infrastruktur inovasi; budaya inovasi; dan pengembangan klaster industri secara komprehensif dan kolaboratif; (iii) mensinergikan nilai global dan nilai budaya lokal kota dalam penataan fungsi kota sebagai kota MICE; (iv) menata kota yang berorientasi ekonomi perdagangan yang kompetitif, memberi kenyamanan bagi pelaku usaha atau investor untuk menambah lama tinggal (*length of stay*) di Kota Subulussalam.

2) Kondisi Demografi

Kota Subulussalam termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk rendah di Provinsi Aceh. Tantangan bagi kota: memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat berisiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

3) Lingkungan Sosial Budaya

Kota Subulussalam adalah kota yang memiliki peninggalan sejarah, baik bangunan maupun budaya. Di Kota Subulussalam banyak aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas warga. LSM sebagai modal sosial kota ini dapat dimanfaatkan sebagai forum bagi warga untuk berdiskusi dan bersama-sama pemerintah mengembangkan Kota Subulussalam sebagai Kota sentra produksi.

4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Untuk melengkapi upaya didalam penentuan isu strategis, juga dilakukan analisis lingkungan eksternal dengan menelaah agenda pembangunan Aceh, pembangunan nasional dan kebijakan

internasional, untuk memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kota Subulussalam.

1. Analisis Kebijakan Pembangunan Aceh

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA)

Kebijakan berbasis geospasial, RPJP Aceh Tahun 2012-2032 memperkuat kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam RTRWN dan RTRW Aceh, dimana Kota Subulussalam ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sementara menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Aceh dalam RTRW menetapkan Sabang menjadi salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Banda Aceh-Sabang-Jantho (BASAJAN) dan Kawasan Andalan Aceh (KAA) dalam sektor Pariwisata dan Perikanan. Kebijakan ini berdampak kepada upaya Kota Subulussalam dalam mempersiapkan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang terintegrasi untuk mendukung Subulussalam sebagai kawasan strategis dan unggulan di Aceh dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- (a) mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie Kota Subulussalam dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital.
- (b) Pusat kegiatan primer sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional.

2. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Aceh, meliputi:

Kota Subulussalam memiliki Hutan Lindung seluas 3.400 Ha, TWA seluas 6.525 Ha (daratan 1.250 Ha, Laut 5.275 Ha)

3. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Aceh, yaitu Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center). Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 menempatkan Subulussalam pada posisi yang strategis bagi perkembangan Aceh, Sehingga perlu sinergitas dan kesesuaian pada tataran kebijakan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022

Visi yang ingin di capai dalam pembangunan jangka menengah Aceh 2017-2022 yakni *“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.”*

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) **Aceh yang damai** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) **Aceh yang sejahtera** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) **Pemerintahan yang bersih**, adil dan melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

(1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan; (2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad

Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain; (3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki; (4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum; (5) Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi; (6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan; (7) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi; (8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan; (9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan

2. Analisis Kebijakan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Kota Subulussalam adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel; (v) inovasi daerah.

3. Analisis Kebijakan Internasional

a. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan pencaanangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

Bila pada Millenium Development Goals (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada Sustainable Development Goals (SDG's) ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. 17 sasaran tersebut terdiri dari:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi

semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
18. SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Kota Sabulussalam.

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Tantangan dari pemberlakuan MEA sejak tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kota Subulussalam mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kota Subulussalam menghadapi MEA, yaitu: (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (iii) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah maka diketahui permasalahan utama Kota Subulussalam.

Permasalahan utama ini dijabarkan ke dalam 5 (Lima) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatka;
2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang;

3. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan;
4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) masih belum optimal;
5. Penerapan Syari'at Islam dalam sistem social kehidupan masyarakat masih perlu di tingkatkan.



Gambar 4.1. Gambaran Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah Kota Subulussalam

Permasalahan pembangunan daerah Kota Subulussalam diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data

strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Subulussalam berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan Kota Subulussalam:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan

Sumber Daya Manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Kualitas SDM terkait dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2, berdasarkan indikator pada sektor pendidikan, kondisi di Kota Subulussalam relatif sudah baik. Permasalahan pada kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan adalah yang terkait dengan kelulusan pada pendidikan menengah, yang antara lain diindikasikan pada rata-rata lama sekolah yang hanya 7,58 tahun. Hal lain yang masih memerlukan perhatian dari sector pendidikan adalah yang terkait dengan pendidikan karakter, budi pekerti dan budaya keislaman. Masih adanya kasus yang terkait dengan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta seks bebas menunjukkan perlunya penguatan pendidikan budaya keislaman sejak dini.

Di sisi lain, dari komposisi penduduk Kota Subulussalam selama Lima tahun terakhir (2015-2019) berdasarkan tingkat pendidikan masih didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD (atau yang sederajat), SMP (atau yang sederajat) dan SMA (atau yang sederajat). Sedangkan untuk tingkat pendidikan tamat Akademi D-III dan Universitas memiliki jumlah yang relatif rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Sebagai kota yang terus berkembang, peningkatan jumlah penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan pada tingkat menengah dan Perguruan Tinggi menjadi menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Jika dilihat dari indikator yang tercantum dalam SPM Kesehatan, capaian Kota Subulussalam dalam meningkatkan kualitas kesehatan warganya dapat dilihat angka kelangsungan hidup bayi per 1.000 kelahiran. Pada tahun 2017 terdapat 9 kasus kematian bayi meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2018 pada tahun 2019 kasus kematian bayi kembali meningkat menjadi 21 kasus. Sedangkan Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang berdasarkan indikator status gizi. Untuk masalah balita kurus (BB/TB) terjadi penurunan prevalensi secara bertahap dari tahun 2015 – 2019, namun jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh prevalensi balita kurus Kota Subulussalam 1,40% lebih dari dua kali dibawah prevalensi Aceh 6,0%, Untuk masalah underweight BB/U (buruk dan kurang) terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan hanya tersisa 6,30% di tahun 2019. Untuk masalah stunting (pendek) terjadi peningkatan kasus yang sebesar 7,2 % di tahun 2019 dan berada jauh diatas rerata provinsi Aceh.

Masih cukup tingginya angka pengangguran terbuka serta kualitas dan kompetensi tenaga kerja merupakan hal lain yang menjadi permasalahan untuk meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kesejahteraan, meskipun angka kemiskinan Kota Subulussalam

masih cukup tinggi, upaya penurunan kemiskinan perlu terus dilakukan. Selain hal yang bersifat fisik, kualitas SDM juga ikut dipengaruhi oleh hal yang bersifat non fisik, antara lain melalui kegiatan seni, budaya dan olahraga.

Rumusan permasalahan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, selanjutnya dilakukan analisa untuk melihat akar permasalahan dari pokok masalah yang ada. Hal ini dilakukan untuk menentukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Rumusan dan akar permasalahan pada Sumber Daya Manusia sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Rumusan Permasalahan:

Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan

MASALAH	AKAR MASALAH
1) Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih perlunya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga Kependidikan;2. Masih perlunya pengoptimalan kualitas pelayanan pendidikan;3. Masih perlunya peningkatan pendidikan pembentukan karakter;4. Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitasnya Sarana dan Prasarana Pendidikan
2) Belum seluruh lapisan masyarakat mendapat akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya budaya perilaku hidup sehat pada masyarakat2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas tenaga medis dan non medis sesuai dengan standar kompetensi3. Kurangnya kesiapan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)4. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan5. Belum terpenuhinya seluruh Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan

2. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sector industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur dasar dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rumusan Permasalahan:
Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan
Penataan Ruang

MASALAH	AKAR MASALAH
1) Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun daya dukung lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dan izin mendirikan bangunan belum berjalan maksimal2. Peningkatan kesesuaian pada peruntukan tata ruang masih perlu dioptimalkan3. Fungsi lahan yang belum dioptimalkan.
2) Sarana dan prasarana infrastruktur dasar masih sangat minim dan belum optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Konektifitas jaringan jalan belum optimal2. Jaringan jalan belum terbangun secara menyeluruh3. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan masih perlu dioptimalkan4. Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan yang masih perlu dioptimalkan5. Minimnya Ketersediaan Akses Air bersih, perlu adanya Peningkatan Status Kelembagaan dari UPTD menjadi PDAM dan Penyediaan sanitasi layak6. Masih terdapatnya Perumahan tidak layak huni7. Ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman yang belum memadai
3) Masih terjadinya genangan banjir dan Longsor	<ol style="list-style-type: none">1. Masih ada saluran dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal2. Infrastruktur pengendali Banjir dan penahan tebing belum terbangun secara menyeluruh3. Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh4. Terjadinya longsor tebing dan bantaran sungai yang semakin tinggi khususnya di daerah aliran sungai

4) Kurangnya penanganan Persampahan serta tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pengelolaan persampahan masih perlu ditingkatkan2. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu dioptimalkan3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan masih perlu Penataan4. Pencemaran udara, air dan tanah perlu dikendalikan5. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.
5) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;2. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

3. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sector perekonomian masih perlu ditingkatkan

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian terkait dengan finansial atau kebutuhan. Salah satu problem yang menghambat percepatan kemajuan Kota Subulussalam adalah rendahnya inovasi dan daya saing (*the low of competitiveness*) nilai tambah produksi. Secara teori, variabel daya saing ini menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan Kota Subulussalam menarik investasi dalam kerangka meningkatkan struktur perekonomian. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.

Rumusan Permasalahan:

**Inovasi Dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi
Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan**

MASALAH	AKAR MASALAH
1) Produksi dan kualitas produk pertanian dan peternakan perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan intensifikasi pertanian masih perlu dioptimalkan;2. Pengawasan/pengendalian produksi dan distribusi produk ternak masih perlu dioptimalkan3. Pengembangan pertanian masih perlu dioptimalkan4. Banyaknya lahan tidur yang masih perlu di optimalkan
2) Kontribusi kategorikategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan.	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengendalian pedagang informal di ruang publik;2. Belum optimalnya pengendalian pasar dan ritel modern;3. Pasar rakyat belum sepenuhnya tertata dengan baik;
3) Produk-produk unggulan daerah belum dikembangkan dengan maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengembangan industri hilirisasi produk unggulan daerah;2. Pola kemitraan antara UMKM dengan usaha besar belum optimal.3. Akses permodalan dan pasar Industri Kecil Menengah (IKM) masih terbatas;4. Belum optimalnya hubungan kerjasama usaha antara IKM dengan industri besar;5. Industri kreatif masih perlu dikembangkan.
4) Peningkatan jumlah PMA maupun PMDN masih belum maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan dan regulasi penanaman modal masih perlu ditingkatkan;2. Daya saing daerah dalam menarik investasi masih perlu ditingkatkan;
5) Masih belum tuntasnya pengentasan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih perlu ditingkatkan2. Jumlah bantuan sosial sarpras/ pemenuhan kebutuhan sosial dasar

	(sanitasi, air minum, RTLH) masih perlu ditingkatkan 3. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial masih perlu ditingkatkan
6) Tingginya tingkat pengangguran terbuka	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi seluruh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja masih perlu dioptimalkan 2. Pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja 3. Masih diperlukan peningkatan minat kewirausahaan

4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) masih belum sesuai harapan

Untuk mewujudkan good governance di lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, dan partisipasi. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Subulussalam. Penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam masih menghadapi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang antara lain diindikasikan dengan masih adanya pengaduan dari masyarakat terhadap oknum ASN yang melakukan pungutan liar serta masih adanya oknum ASN yang terlibat kasus hukum. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Kota Subulussalam juga harus didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan sesuai

dengan standar pelayanan yang ada, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan yang baik, dengan jumlah yang mencukupi.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan:
Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance) masih belum sesuai harapan

MASALAH	AKAR MASALAH
1) Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah masih perlu dikembangkan lagi2. Pengelolaan asset masih perlu dioptimalkan lagi3. Pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah masih perlu dioptimalkan4. Sistem pengendalian Internal yang dilakukan secara prosedural masih perlu ditingkatkan lagi5. Tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah masih perlu dioptimalkan lagi
2) Perlu peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Persebaran pegawai di setiap Perangkat Daerah masih belum merata dari segi jumlah maupun kualitas2. Integrasi sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai masih belum dimaksimalkan3. Peningkatan pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional masih perlu dioptimalkan4. Masih adanya SOTK yang tumpang tindih dengan Perangkat Daerah lain

	<ul style="list-style-type: none">5. Kualitas mental dan pola pikir aparaturnya perlu lebih ditingkatkan6. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparaturnya masih perlu peningkatan
3) Masih terdapat sarana prasarana pelayanan publik yang belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">1. Kinerja aparaturnya pelayanan masyarakat masih perlu ditingkatkan2. Peningkatan sarana prasarana pelayanan3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perlu lebih ditingkatkan4. Penerapan SOP pelayanan masih belum berjalan dengan optimal
4) Masih tingginya jumlah pelanggaran Qanun	<ul style="list-style-type: none">1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun perlu ditingkatkan2. Jumlah aparaturnya pengawas dan penindak pelanggaran Qanun masih perlu ditingkatkan
5) Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu.	<ul style="list-style-type: none">1. Kualitas pelayanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan2. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi masih perlu dioptimalkan
6) Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none">1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan2. Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat masih perlu dioptimalkan3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan4. Mitigasi dan adaptasi kebencanaan masih perlu ditingkatkan

5. Penerapan Syari'at Islam dalam sistem sosial kehidupan masyarakat masih perlu di tingkatkan.

Untuk menerapkan Syari'at islam dalam system social masyarakat Kota Subulussalam terdapat beberapa hal yang harus dibenahi mengingat nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami merupakan permasalahan yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan keagamaan, lingkungan masyarakat, ketakwaan, hingga budaya dan adat istiadat masyarakat. Tugas berat Pemerintah Kota subulussalam yang begitu banyak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang ini, mengingat permasalahan ini sangat terkait dengan human ware yang dalam hal ini adalah manusianya serta soft ware yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Berbagai persoalan penerapan penegakan syariat islam saat ini, penurunan akhlak masyarakat Kota Subulussalam dengan semakin banyaknya ditemukan pelanggaran syariat islam terutama jenis pelanggaran khamar, maisir dan khalwat, serta maraknya praktik riba bermunculan. Permasalahan lainnya mengenai kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut.

Peningkatan penerapan syariat islam dalam system social kehidupan masyarakat masih diperlukannya usaha peningkatan peran seluruh stakeholder dalam mengatasi dan menegakkan syari'at islam, dengan pelibatan ulama dan kader dakwah lainnya. Selain itu, juga diperlukannya pembinaan lembaga pendidikan dalam menciptakan SDM yang handal juga berakhlak.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan syariat islam dalam system sosial kehidupan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan:
Penerapan Syari'at Islam dalam sistem sosial kehidupan
masyarakat masih perlu di tingkatkan

MASALAH	AKAR MASALAH
1) Penyakit masyarakat yang masih tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi2. Kurangnya peran keluarga dalam kontrol sosial3. Kurangnya sosialisasi upaya pencegahan penyakit masyarakat4. Kualitas mental dan pola pikir masyarakat perlu lebih ditingkatkan
2) Belum optimalnya pengawasan penerapan syariat islam	<ol style="list-style-type: none">1. Masih sedikitnya tingkat pengawasan terhadap penerapan syariat islam2. Platform pengawasan yang masih minim3. Kurangnya peran ulama dan masyarakat
3) Kurang pembinaan kader ulama	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya kaderisasi ulama2. Minimnya wadah aspirasi ulama3. Persebaran kader ulama yang belum merata4. Kualitas mental dan pola pikir ulama perlu lebih ditingkatkan
4) Masih kurangnya penerapan syariat islam dalam kurikulum sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya Angka Melek Alquran2. Kurikulum sekolah terkait syariat islam masih kurang3. Pembinaan syariat islam sejak usia sekolah masih kurang
5) Belum optimalnya fungsi lembaga keagamaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas lembaga keagamaan yang masih rendah2. SDM lembaga keagamaan yang masih minim baik secara kuantitas maupun kualitas3. Kurangnya pembinaan terhadap lembaga keagamaan



4.3. Isu Strategis Pembangunan

Identifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam tahun 2019-2024 dilakukan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang muncul diberbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2015-2019 yang mempengaruhi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode tersebut dan/atau diperkirakan akan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Subulussalam dimasa mendatang.



Tabel 4.6.

Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis

No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Aceh	Dinamika Kota Subussalam
1.	<p>SDGs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangkan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia; mengeliminasi ketimpangan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan 3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 7. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 8. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 9. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 10. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintahan selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Meningkatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik 2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan 3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan 4. Pemenuhan ketahanan pangan dan kemandirian 5. Pengembangan pertanian dan perikanan 6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM 7. Pengembangan pariwisata 8. Ketengakerjaan; ketersediaan tenaga kerja 9. Ketersediaan energi 10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi 11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah 12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan secara menyeluruh. 3. Peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 4. Peningkatan akses layanan kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas 5. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjemahnya Kesetaraan Gender 6. Peningkatan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas 7. Peningkatan Infrastruktur sosial yang berkualitas. 8. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup 9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 10. Penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan ketimpangan pendapatan





No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Aceh	Dinamika Kota Subulussalam
	11. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan; 12. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi; 13. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan; 15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah; 16. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan; 17. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.	7. 8. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 9. Melakukan revolusi karakter bangsa 10. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan 14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga 15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan 16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup	11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis kampung 12. Peningkatan pengembangan pariwisata dan budaya lokal 13. Peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan 14. Peningkatan Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat 15. Penggunaan Sistem Informasi dalam memberikan pelayanan publik 16. Mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Kota Subulussalam
	MEA 1. Memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; 2. Mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja;	UU 37 Tahun 2000 1. Kelengkapan prasarana kelas dunia, 2. Insentif yang menarik, 3. Manajemen yang profesional, 4. Lingkungan permukiman yang menyenangkan,	Keistimewaan Aceh 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama, 2. penyelenggaraan kehidupan adat, 3. penyelenggaraan pendidikan, dan 4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah	Keistimewaan Aceh 1. Penyelenggaraan kehidupan masyarakat kota subulussalam yang Islami dan berbudaya



No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Aceh	Dinamika Kota Subulussalam
	3. meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.	5. Peraturan dan prosedur yang jelas dan mudah, 6. Landasan hukum yang pasti, dan jaminan keamanan		
3.	Pemanasan global 1. Konsentrasi emisi GRK yang diperkirakan terus berlipat pada tahun 2030 akan meningkatkan efek GRK 2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menuangkan secara konsisten komitmen global mengenai penghapusan GHGs	Grand Design Pengelolaan Kawasan Perbatasan 1. Penanganan terhadap masalah yang dihadapi oleh perbatasan sampai saat ini masih dilakukan secara parsial, terkait dengan masalah wewenang pemerintah pusat dan daerah 2. Penegakan hukum di perbatasan belum optimal karena luasnya area yang harus diawasi yang berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana serta sumber daya 3. Minimnya alokasi anggaran pembangunan		

Isu Strategis Kota Subulussalam yang telah diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembangunan, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, dengan mengidentifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan lima tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:

4.3.1. Peningkatan kualitas, pelayanan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia;

Untuk mewujudkan Peningkatan kualitas, pelayanan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia, terdapat 3 aspek yang menjadi isu strategis Kota Subulussalam yaitu:

- a. Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- b. Perluasan Kesempatan Kerja; dan
- c. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemenuhan standar dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan sangat menentukan kualitas SDM suatu daerah. Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kualitas dari SDM sendiri harus terus ditingkatkan agar mampu menciptakan daya saing yang tinggi, yang dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar seluruh masyarakat Kota Subulussalam memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga mempunyai peluang yang besar menuju pada akses pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tantangan lainnya yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antarwilayah, dan antargender.

Terbatasnya lapangan kerja, keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat di Kota Subulussalam.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survey BPS yang telah dipublikasi per Agustus 2019, dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dikelompokkan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. TPT untuk kelompok penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain dan diikuti dengan TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan.

Pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Subulussalam untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Upaya lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kota Subulussalam, mengingat sangat terbatasnya kesempatan kerja di sector-sektor industri pengolahan maupun sector jasa lainnya. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta

sektor ekonomi kreatif untuk bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Subulussalam yang masih rendah juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi memicu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam. Produktivitas Tenaga Kerja yang rendah menjadi salah satu pemicu lemahnya daya serap tenaga kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

Perlindungan sosial terhadap pekerja informal juga harus ditingkatkan. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diperoleh kelompok penduduk tersebut masih kurang memenuhi standar hidup yang layak dan berkesinambungan. Diperlukan keterpaduan berbagai instansi sosial untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar penduduk yang kurang mampu memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.

4.3.2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk menurunkan disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan dasar dan rujukan. Selain itu, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyiapkan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Subulussalam pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan masih sangat rendah.

4.3.3. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur

wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam.

Dalam pemenuhan kebutuhan penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah ini, Pemerintah Kota Subulussalam akan bersinergi dengan Desa yang memiliki kewenangan dan keuangan yang salah satu tugasnya juga melaksanakan pembangunan. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan procedure perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan Kota Subulussalam, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kota.

- a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan Kota dan poros desa terutama jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Peningkatan Infrastruktur Dasar dalam Peningkatan Akses Air Akses Air Minum Layak, Peningkatan Status Kelembagaan Layanan dari UPTD menjadi PDAM.
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
- c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
- e. Penataan fasilitas sosial dan fasilitas umum meliputi jalan permukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
- f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;
- g. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah dan pengolahannya terutama sarana TPS dan TPA sekaligus pengembangan

manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan jamban;

- h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis dengan manajemen sumber daya air berbasis data hidrologis dan timbangan keragaan pengairan;
- i. Prasarana telekomunikasi dan informasi

Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

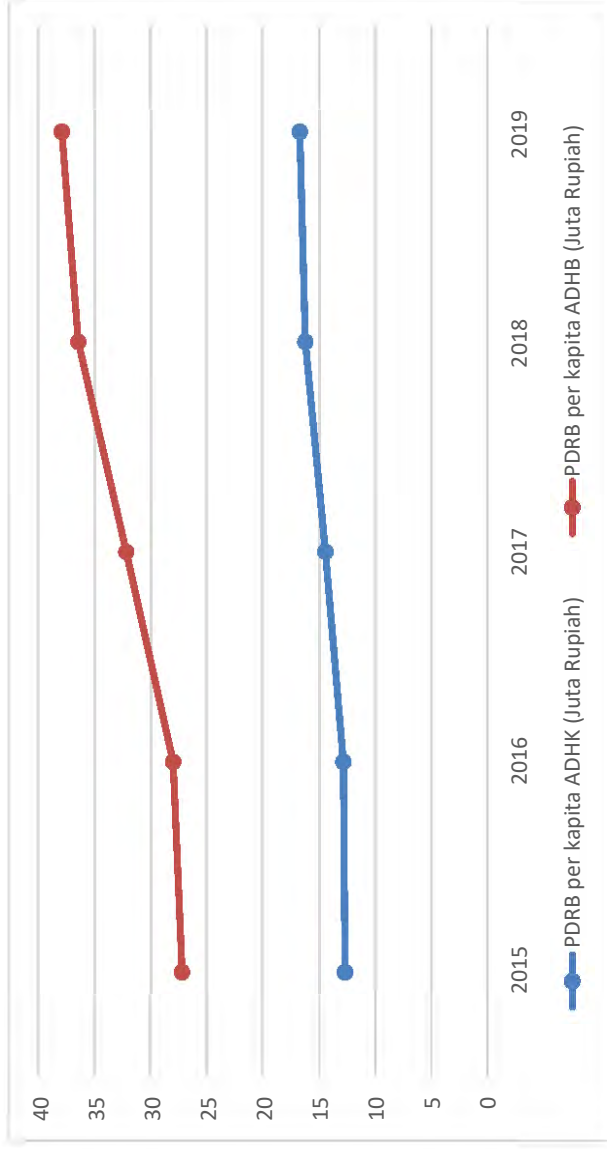
4.3.4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal;

Isu Strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local mempunyai 3 aspek yakni:

- a. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan social dan ekonomi (*Indeks Gini rasio*)
- b. Penurunan Angka Kemiskinan
- c. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sector ekonomi kreatif, Pertanian, industry dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2019 PDRB per kapita penduduk Kota Subulussalam adalah 16,69 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 2,81 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin meningkat.



Gambar 4.2. PDRB Per Kapita Kota Subulussalam ADHB dan ADHK dalam juta rupiah Tahun 2019 – 2019

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Subulussalam, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Subulussalam yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) masyarakat miskin dalam hal:

- 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);

- 2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
- 3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (inaccessability);
- 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
- 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin

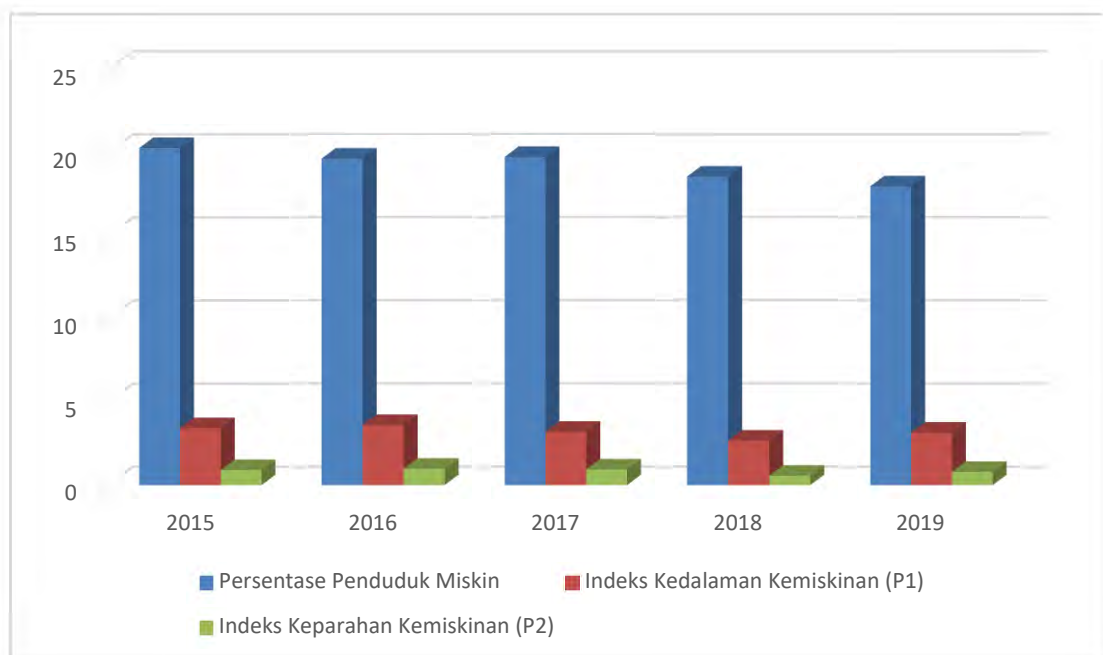
Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2019, berikut ini adalah gambaran indikator indikator kemiskinan yang ada di Kota Subulussalam dapat digambarkan dari grafik-grafik berikut ini.



Gambar 4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Subulussalam telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2019 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks yaitu di angka 3,15. Penurunan

nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Subulussalam cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan.

Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah:

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.

b. Inovasi

Tidak terhindarkan lagi bagi suatu daerah yang ingin maju dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing selalu bertumpu kepada iptek sebagai penggerak pembangunan, berarti kata “Inovasi” selalu menjadi tema utama dalam setiap pengambilan kebijakan disektor ekonomi. Inovasi menjadi semakin menentukan dalam pembangunan menuju kemandirian daerah yang berdaya saing tinggi, terutama ketika menghadapi era keterbukaan dan kebebasan perdagangan dalam kawasan tanpa batas. Pada

situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk itu usaha kecil harus mengenal jauh lebih dekat konsumennya sehingga mereka betul betul dapat mengetahui kebutuhan pasar dan dapat menyediakan kebutuhan tersebut melalui inovasi dan keratifitasnya.

c. Iklim Usaha yang Kondusif

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal lainnya adalah seringkali kebijakan perekonomian Pemerintah dinilai belum secara maksimal memihak kepentingan usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

d. Akses permodalan (*Access to Finance*)

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya.

Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable alias dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalannya. Akibat bank berlaku prudent atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Kemana lagi kalau bukan kepada para pelempar uang alias rentenir tetapi usaha kecil harus rela dengan biaya uang yang mencekik.

Ada anggapan keliru. Seolah olah, usaha kecil tidak mempermasalahkan biaya bunga yang tinggi dari rentenir. Adalah anggapan yang sangat keliru. Mereka terpaksa memakai uang rentenir karena terpaksa akibat sulit mengakses modal dari bank. Usaha kecil yang berhasil menembus kendala akses modal, pasar dan informasi. Kendala beralih pada yang lebih advance. Seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahankan kualitas produk dan kuantitas produksi.

e. Kemampuan penetrasi pasar

Selanjutnya Produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal kerja akan menjadi sia-sia bila produk yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar

yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Pemasaran (Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada empat komponen pemasaran yaitu:

1. Product (produk)
2. Price (harga)
3. Place (tempat, termasuk juga distribusi)
4. Promotion (promosi)

f. Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

g. sarana prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat

untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahal nya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya. Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Subulussalam, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu:

- a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
- b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
- c. Permasalahanlainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Bahan baku, infrastruktur dan teknologi.

Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi local di setiap wilayah harus

digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Dengan Profil Potensi Daerah yang telah memenuhi kriteria, maka diharapkan daerah dapat mempunyai prospek usaha dengan pasar yang jelas serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah. Disamping itu profil proyek investasi di daerah juga dapat digunakan sebagai materi utama dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi daerah.

Penguatan daya saing industry dan perdagangan

Sektor industri pengolahan di Kota Subulussalam memiliki kontribusi terbesar keempat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Subulussalam mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat

potensial untuk dikembangkan di Kota Subulussalam, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Penguatan daya saing pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Subulussalam. Perkembangan pariwisata Kota Subulussalam akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kota Subulussalam cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Subulussalam adalah dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kota Subulussalam.

Pengembangan pariwisata Kota Subulussalam ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Subulussalam. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (*tidak berbasis sumberdaya alam*) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Subulussalam. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Subulussalam perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata.

4.3.5. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

- 1) Mental Aparatur
- 2) Pengawasan
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kelembagaan
- 5) Tata Laksana
- 6) SDM Aparatur
- 7) Peraturan Perundangan
- 8) Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014-2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal Penetapan indikator kinerja daerah belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap.
- e. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif;

2. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

b. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum;

c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik;

d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi;

e. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;

- f. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif
- Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (*talent pool*) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (*remunerasi*) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.
- g. Inefisiensi penggunaan anggaran
- Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:
- 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif;
 - 2) sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan
 - 3) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;
- h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan
Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien

Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

- b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi

Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;

- c. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping

itu, masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Subulussalam dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Subulussalam memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Subulussalam telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

4.3.6. Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami;

Isu nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan keagamaan, lingkungan masyarakat, ketakwaan, hingga budaya dan adat istiadat masyarakat. Ada banyak tugas berat Pemerintah Kota subulussalam untuk menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan *human ware* yang dalam hal ini adalah manusianya serta *soft ware* yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Modal dasarnya adalah budaya dan agama yang tumbuh kuat di masyarakat selama ini, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam berperilaku di lingkungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan ibadah rutin masyarakat. Artinya, pendekatan yang dipilih dalam membangun diskursus pada isu ini harus dengan pendekatan spasial dan sektoral yaitu:

1. pendekatan spasial mengarah pada pemberdayaan komunitas dan berbasis wilayah, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di lokal, baik SDM, modal sosial, keuangan, infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang dimiliki.
2. pendekatan sektoral mengarah pada model pendekatan berbasis isu sektor, seperti kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.

Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

4.3.7. Peningkatan kesejahteraan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu isu strategis pembangunan. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada peraturan di atas, Pemerintah Kota Subulussalam terus menggalang kekuatan untuk menangani PMKS. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa, disabilitas, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

4.4. Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

Berikut ini digambarkan keterkaitan antara hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 sebagai berikut :



Gambar 4.4. Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB V

**VISI, MISI,
TUJUAN & SASARAN
KOTA SUBULUSSALAM**

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA SUBULUSSALAM

5.1. Visi Pembangunan Kota Subulussalam

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan transformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2015-2035, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Visi RPJPD Kota Subulussalam adalah ***"Kota Subulussalam Yang Damai, Mandiri, Sejahtera, Dan Islami"***, dan dokumen RPJMD Kota Subulussalam 2019-2024 merupakan tahapan kedua pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam 2015-2035.

Di samping itu, visi dalam RPJM Kota Subulussalam merupakan abstraksi yang mengakomodasi visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada DPR Kota Subulussalam pada saat pencalonannya, yaitu :

"KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang Sejahtera,

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Subulussalam akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatankesejahteraantersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia

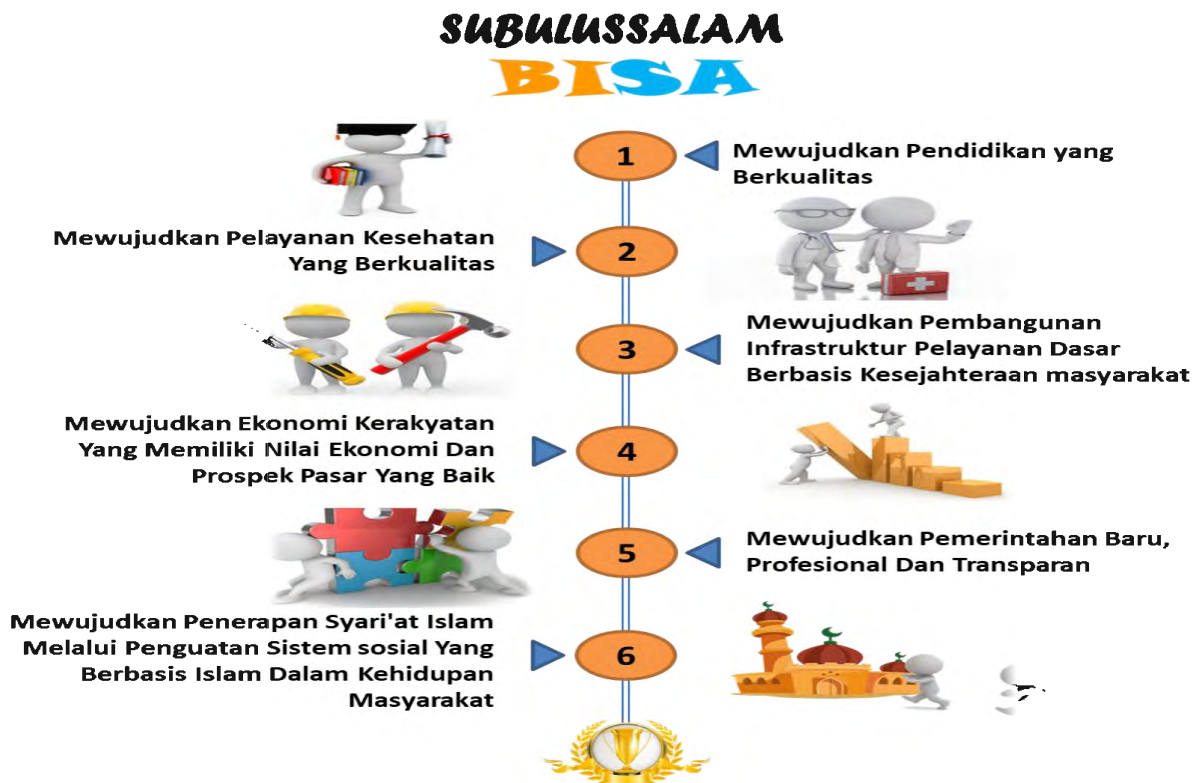
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

2. Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang Islami,

Dalam visi ini terkandung cita-cita dan keinginan mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang Islami dengan menjalankan syari'at Islam secara khaffah. Cita-cita tersebut antralain ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Syari'at Islam, peningkatan jumlah Hafiz, piningkatan angka melek Al-Qur'an, Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam. Untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keislaman baik farmal dan nan formal serta menumbuh kembangkan kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakalan yang bernuansa islam dalam kehidupan masyarakat.

5.2. Misi Pembangunan Kota Subulussalam

Dalam mewujudkan visi "**Kota Subulussalam Sejahtera Dan Islami**" dirumuskan dengan 6 (enam) Misi pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:



Gambar 5.1 Misi Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam

MISI 1: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Maksud dari misi ini adalah upaya yang akan dilakukan di bidang pendidikan yaitu berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Subulussalam. Untuk mencapai keinginan tersebut maka akan ditempuh dengan cara meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, baik peningkatan pembangunan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru serta memenuhi peralatan yang menunjang kegiatan belajar agar terwujudnya kenyamanan dalam proses belajar dan pengajar. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang profesional melalui kerjasama dengan universitas terkemuka untuk pemenuhan tenaga guru disetiap jenjang sekolah atau sederajat. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar serta memberikan beasiswa disemua jenjang pendidikan.

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Maksud dari misi ini" adalah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. Mewujudkan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di semua pusat pelayanan kesehatan mulai dari RSUD sampai dengan Posyandu yang indah dan nyaman. Penambahan tenaga dokter spesialis dengan cara melakukan kerjasama atau kontrak kerja serta merekrut CPNS khusus farmasi bagi dokter spesialis. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar memiliki kompetensi yang baik. Dalam memenuhi kekurangan tenaga medis akan dilakukan kerjasama dengan universitas terkemuka untuk menempatkan tenaga-tenaga dokter muda yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk memdharma baktikan tenaganya di Kota Subulussalam. Memberikan insentif/tambahan penghasilan khusus untuk para tenaga kesehatan yang berada di Desa-Desa terpencil.

MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat

Maksud dari Misi ini adalah upaya dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar bagi kepentingan masyarakat yang akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian daerah. Sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas dalam hal ini adalah sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta perdagangan. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), diprioritaskan untuk membuka akses-akses jaringan jalan yang menuju ke setiap Desa dan antar kecamatan. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, diprioritaskan pembangunan perumahan rakyat khususnya rumah-rumah kaum dhuafa dan masyarakat miskin dipadukan dengan pembuatan jalan-jalan lingkungan, drainase, kebutuhan air bersih, pengelolaan persampahan agar terwujudnya kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat didukung oleh pembangunan prasarana jalan-jalan produksi perkebunan masyarakat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur selain dari untuk kebermanfaatan bagi masyarakat juga ingin menjadikan Kota Subulussalam sebagai Pusat Perdagangan (*Centered Trade*) terutama di wilayah pantai barat selatan aceh, melalui pembangunan Pasar Induk dan distributor pergudangan, membangun pertokoan semi permanen disepanjang jalan barat selatan aceh menuju sumatera utara yang berfungsi sebagai tempat persinggahan mobil-mobil angkutan yang nantinya memiliki fungsi ganda sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat dalam bidang usaha perdagangan. Khusus dalam rangka pembangunan sarana kelistrikan akan mengupayakan masuknya investor pembangkit listrik yang berbasis PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) maupun PLTA.

MISI 4: Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik

Misi ke-4 ini adalah mengupayakan mensejahterakan masyarakat di wilayah Kota Subulussalam dengan memprioritaskan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis dan nilai pasar yang baik. Dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan masyarakat maka akan diprioritaskan pembangunan perkebunan rakyat bagi masyarakat yang tergolong kategori miskin (golongan ekonomi lemah) \pm 1Ha/Kepala keluarga dengan komoditi berupa kelapa sawit dan karet. Secara berkelanjutan pembangunan perkebunan rakyat terus dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada petani mulai dari penanaman sampai dengan berproduksi.

MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan.

Maksud Misi ke-5 adalah upaya dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dan desa di lingkungan Kota Subulussalam. Menjadikan pemerintahan desa dapat menjadi desa swasembada. Dalam lima tahun kedepan pemerintah Kota Subulussalam akan mengupayakan dan memfungsikan kantor desa yang ada di wilayah Kkota subulussalam. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi dilakukan dengan meningkolkon kopositos pemerintahan Kota Subulussala baik peningkatan kualitas aparatur, kemampuan pengelolaan keuangan daerah maupun penataan organisasi dan manajemen pemerintahan.

MISI 6: Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam Melalui Penguatan Kembali Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat

Maksud dari misi ini adalah upaya dalam meningkatkan penerapan syori'at islam secara khaffah di lingkungan Kota Subulussalam. Untuk dapat berjalan dengan baik dan tegaknya syari'at islam ini diperlukan keterlibatan ulama, da'i-da'i, organisasi-organisasi islam dan masyarakat secara umum. Pembinaan keislaman bagi masyarakat akan dilakukan dengan cara pendekatan syiar-syiar islam seperti wajib membaca al-qur'an selesai maghrib serta shalat subuh bagi aparatur sipil negara, membangun akhlakul karimah bagi generasi muda. Dalam

rangka menumbuhkembangkan kepedulian sosial di masyarakat maka akan dikembangkan baitul mal dengan membentuk cabang-cabang baitul mal di setiap kecamatan dan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran zakat, ifaq dan sadaqah.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Subulussalam dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dan islami, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan yang islami, pemerataan dan ketertiban harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai keislaman dalam masyarakat Subulussalam, yakni sada kata. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Bergerak Bersama Membangun Subulussalam”

Makna slogan **Bergerak Bersama Membangun Subulussalam** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Subulussalam. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter masyarakat Subulussalam yang islami.

Sebagaimana halnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berpedoman pada RPJPD Kota Subulussalam Tahun 2015-2035, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan visi dan misi, maka keberhasilan Kota Subulussalam menjadi Subulussalam yang islami dan semakin Sejahtera.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kota Subulussalam. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Subulussalam mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan rencana strategis (RENSTRA) perangkat kota.

Berangkat dari pada Visi dan Misi tersebut maka Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

5.3.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan, dengan **sasaran** pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan;
 - b. Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan;
 - c. Meningkatkan Pemberian Beasiswa Beprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam.
2. Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan, dengan **sasaran** pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk Mewujudkan SDM Generasi Muda Yang Berkualitas

SUBULUSSALAM CERDAS



1. Fasilitasi Pembangunan Perguruan Tinggi

2. Peningkatan SDM Generasi Muda (Satu Kampung Satu Sarjana)

MISI 1	MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS				
	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		
	T.1 Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan		T.2 Meningkatkan Kualitas SDM Generasi Muda Melalui Pembinaan Olahraga		
	Indeks Pendidikan (Indeks)		Persentase Organisasi Olahraga Yang Aktif (Persen)		
SASARAN	S.1 Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan		S.2 Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan		
	S.3 Meningkatkan Pemberian Beasiswa Beprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam		S.1 Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk Mewujudkan SDM Generasi Muda Yang Berkualitas		
INDIKATOR SASARAN	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	Persentase Sekolah yang terakreditasi ≥ B (Persen)		Persentase Pemberian Beasiswa Prestasi (Persen)		
INDIKATOR SASARAN	Persentase Organisasi Olah Raga yang melakukan pembinaan Atlit (Persen)				

Gambar 5.2 Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

5.3.2 Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan, dengan **Sasaran** Pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, dengan **Sasaran** Pembangunan :
 - a. Meningkatkan Derajat Kehidupan dan Peran Perempuan, Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan **Sasaran** pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan;
 - b. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup;
 - c. Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim.

SUBULUSSALAM SEHAT



1. **Menciptakan Masyarakat Sehat dan Lingkungan Sehat (Stunting, Kampung Iklim dan Sanitasi)**
2. **Menciptakan Kota Layak Anak**



Gambar 5.3 Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

5.3.3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Misi **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat**; maka akan dicapai dengan Tujuan Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, yang dapat diukur dari Peningkatan Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas. dengan **Sasaran** pembangunannya adalah :
 - a) Meningkatnya Insfrastruktur Jalan yang Baik dan Terintegrasi;
 - b) Meningkatnya Akses Air Minum Layak;
 - c) Meningkatnya Akses Sanitasi Layak;
 - d) Meningkatnya Layanan Sistem Irigasi;
 - e) Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni.
2. Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat, yang dapat diukur dari Rata-rata Persentase Infrastruktur pariwisata dan budaya yang dikembangkan, dengan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan;
- b) Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Daerah.

SUBULUSSALAM MEMBANGUN



Membangun Sarana dan Prasarana Dasar Mendukung Kawasan Ekowisata

MISI 2		MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN	T.1 Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas				T.2 Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat	
		Persentase Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas (Persen)				Rata-rata Persentase Infrastruktur pariwisata dan budaya yang dikembangkan	
INDIKATOR SASARAN	SASARAN	S.1 Meningkatkan infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi	S.2 Meningkatkan Akses Air Minum Layak	S.3 Meningkatkan Akses Sanitasi Layak	S.1 Meningkatkan Layanan Sistem Irigasi	S.1 Meningkatkan Akses Rumah Layak Huni	S.1 Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan
		S.1 Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah					
INDIKATOR SASARAN	SASARAN	Persentase Jalan Kondisi Baik (Persen)	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak (Persen)	Persentase Akses Sanitasi Layak (Persen)	Persentase Layanan Sistem Irigasi (Persen)	Persentase Layanan Sistem Irigasi (Persen)	Persentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persen)
							Persentase Benda/Situs Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan (persen)

Gambar 5.4 Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

5.3.4 Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik

Dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik; maka akan dicapai dengan **Tujuan** Pembangunan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Subulussalam, dengan **Sasaran** Pembangunan Meliputi :
 - a) Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;
 - b) Meningkatnya Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Daerah
 - c) Meningkatnya Produk-Produk UKM dan UMKM Unggulan Daerah
 - d) Meningkatkan Komoditas Pertanian Yang Mendukung Kesejahteraan Rakyat
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan **Sasaran** Pembangunan Daerah adalah :
 - a) Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan;
 - b) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Pangan;
 - c) Menurunnya Tingkat Pengangguran

SUBULUSSALAM KREATIF DAN SEJAHTERA



**1.Menciptakan Masyarakat Yang Kreatif dan Sejahtera
(Penanaman Dua Pohon Untuk Satu Rumah)**

**2.Membangun Ketahanan Pangan dan Produk Unggulan
(Jagung, Talas, Sawit)**



Gambar 5.5 Penjabaran Misi 4, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

5.3.5 Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan

Dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan, maka akan dicapai dengan Tujuan Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan public, dengan **Sasaran** Pembangunan Daerah adalah Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan public;
2. Meningkatkan Layanan Kinerja Lalulintas Angkutan Jalan, dengan **Sasaran** Pembangunan Daerah adalah Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan.
3. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, dengan **Sasaran** Pembangunan Daerah meliputi :
 - a) Meningkatnya Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana;

- b) Meningkatnya Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran.
4. Meningkatkan Akses Informasi dan Telekomunikasi Yang Cepat, Aman dan Transparan, dengan **Sasaran** pembangunan daerah adalah Meningkatnya Layanan Informasi dan Telekomunikasi.

SUBULUSSALAM MELAYANI



1. Walikota Menyapa (Berkantor di Kecamatan Minimal 3 Bulan Sekali)

2. Membangun Smart City Subulussalam

MISI 5		MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BARU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN							
INDIKATOR	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		
		T.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	S.1 Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah atau Inovasi Pelayanan Publik	Indeks E-Government/ Indeks SPBE	
		T.2 Meningkatkan Layanan Kinerja Lalulintas Angkutan Jalan	Persentase Layanan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan (Persen)	S.1 Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan	Persentase Rata-rata Nilai Keselamatan LLAJ	Persentase Penurunan Kasus Bencana Alam Dan Kebakaran	Persentase Ketahanan Dan Keselamatan Kebakaran	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	
		T. 3 Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana (Indeks)	S.1 Meningkatnya Sarana Prasarana Pencegahan & Penanggulangan Bencana	S.1 Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi				
		T.4 Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	S.2 Meningkatnya Ketahanan Dan Keselamatan Kebakaran					

Gambar 5.6 Penjabaran Misi 5, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

5.3.6 Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan.

Dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Pengaturan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan, maka akan dicapai dengan Tujuan Pembangunan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya Subulussalam Yang Sejalan Dengan Nilai-Nilai Keislaman, dengan sasaran pembangunan daerah adalah :
 - a) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Syariat Islam;
 - b) Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat.
2. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa, dengan sasaran pembangunan daerah melakukan Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat.

SUBULUSSALAM ISLAMI



1. Menciptakan Masyarakat Subulussalam yang Islami dan Berbudaya (Satu Hafiz Satu Kampung)



Gambar 5.7 Penjabaran Misi 6, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024



Tujuan Pembangunan Kota Subulussalam selama 2019-2024 ditetapkan berdasarkan 6 (enam) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya sasaran pembangunan Kota Subulussalam ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Secara rinci keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diuraikan pada **Tabel 5.1**.



Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 Misi 1

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 1 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS										
T.1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,94	11,18	11,34	11,51	11,76	11,92	11,92
S.1	Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,48	14,76	14,98	15,34	15,6	15,6
		Rata Lama Sekolah	Tahun	7,66	7,88	7,92	8,04	8,17	8,24	8,24
S.2	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi ≥ B	Persen	42,48	47,79	51,41	55,03	58,65	62,27	62,27
S.3	Sasaran 3: Meningkatkan Pemberian Beasiswa Beprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam	Persentase Pemberian Beasiswa Prestasi	Persen	5,88	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14
T.2	Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang aktif	Persen	37,5	43,75	50	56,25	62,5	71,88	71,88
S.1	Sasaran 1: Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk Mewujudkan SDM Generasi Muda Yang Berkualitas	Persentase Organisasi Olah Raga yang melakukan pembinaan Atlit	Persen	31,25	34,38	40,63	43,75	50	56,25	56,25



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 Misi 2

NO	VISI/MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 2 : MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS										
T.1	Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Indeks	63,69	63,80	64,13	64,42	64,65	64,71	63,69
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah ≥ C	Status	C	C	C	B	B	B	B
		Angka Kesakitan/Morbiditas/ Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	11,99	11,43	11,22	10,81	10,69	10,68	10,68
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,50	1,48	1,45	1,43	1,42	1,41	1,41
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi ≥ Madya	Persen	25,00	25,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00
T.2	Tujuan 2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,01	69,48	69,93	70,22	70,39	70,46	70,46
S.1	Sasaran 1: Meningkatkan Derajat Kehidupan dan Peran Perempuan, Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,05	85,06	85,07	85,08	85,09	86,00	86,00
		Predikat Kota layak Anak Subulussalam	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
T.3	Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	62,69	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20	76,20
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks > 70)	Indeks	62,69	65,82	67,25	69,50	71,25	72,90	72,90
S.2	Sasaran 2: Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan Yang Sudah Dinilai/Diperiksa (> 80%)	Persen	30	40	50	60	70	80	80
S.3	Sasaran 3: Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim /Proklam (> 30 Kampung)	Persen	10	15	20	25	30	35	35



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 Misi 3

NO	VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
T.1	Tujuan 1 : Meningkatnya Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas	Persentase Infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas	Persen	55,52	54,34	54,97	55,93	56,63	57,33	57,33
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	34,16	34,58	35,00	35,42	35,84	36,26	36,26
S.2	Sasaran 2: Meningkatnya akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	Persen	89,63	90,35	91,07	91,80	92,53	93,27	93,27
S.3	Sasaran 3: Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	54,59	46,65	47,75	50,39	51,82	53,23	53,23
S.4	Sasaran 4: Meningkatnya Layanan Sistem Irigasi	Persentase Layanan Sistem Irigasi	Persen	9,58	9,58	9,58	9,68	9,68	9,68	9,68
S.5	Sasaran 5: Meningkatnya akses rumah layak huni	Persentase Jumlah rumah layak huni	Persen	89,65	90,55	91,45	92,37	93,29	94,22	94,22
T.2	Tujuan 2 : Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat	Rata-rata Persentase Infrastruk pariwisata dan budaya yang dikembangkan	Persen	26,14	28,26	34,52	41,01	41,17	41,47	41,47
S.1	Sasaran 1: Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan	Persentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	2,28	2,36	2,37	2,85	3,17	3,77	3,77
S.2	Sasaran 2: Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase benda/situs cagar budaya daerah yang dilestarikan	Persen	50,00	54,17	66,67	79,17	79,17	79,17	79,17



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 Misi 4

NO	VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS DAN PROSPEK PASAR YANG BAIK										
T.1	Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	21,21	21,50	22,00	22,50	23,50	24,75	24,75
S.1	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	Proporsi PDRB sektor jasa perusahaan	Persen	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,35
S.2.	Sasaran 2: Meningkatkan Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Daerah	Proporsi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	19,26	19,26	19,30	19,42	19,62	20,13	20,13
S.3.	Sasaran 3: Meningkatkan Produk-Produk UKM dan UMKM Unggulan daerah	Proporsi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	13,99	14,45	14,65	15,23	15,75	16,15	16,15
S.4	Sasaran 4: Meningkatkan komoditas pertanian yang mendukung kesejahteraan rakyat	Proporsi PDRB sektor pertanian, perkebunan, perikanan	Persen	21,54	21,60	21,70	21,94	22,27	23,00	23,00
T.2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	17,95	17,50	17,10	16,70	16,30	15,90	15,90
S.1.	Sasaran 1: Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	angka	14.560	14.460	14.360	14.260	14.160	14.060	14.060
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	61,91	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20	76,20
S.2.	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Pola Pangan Harapan	angka	77,2	78,45	79,70	80,95	81,60	82,3	82,3
S.3.	Sasaran 3 : Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,25	7,23	7,16	6,96	6,81	6,76	6,76



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, Tahun 2019-2024 Misi 5

NO	VISI/MISI/TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BARU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN										
T.1	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi *)	Nilai	58,14	61,25	62,43	62,96	63,81	64,22	64,22
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	Nilai	37,64/C	C	CC	CC	B	BB	BB
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah atau Inovasi Pelayanan Publik	Angka dan Kategori	83,10	84,5	85,6	86,4	86,8	87,0	87,0
		Indeks E-Government/ Indeks SPBE	Indeks	2,10	2,21	2,26	2,28	2,31	2,45	2,45
T.2	Tujuan 2: Meningkatkan Layanan kinerja Lalulintas Angkutan Jalan	Persentase Layanan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	32,50	32,83	33,15	33,48	33,82	34,16	34,16
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	Persen	55	55,55	56,11	56,67	57,23	57,81	57,81
		Persentase Rata-rata Nilai Keselamatan LLAJ	Persen	10,00	10,10	10,20	10,30	10,41	10,51	10,51
T.3	Tujuan 3: Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,65	0,65
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kasus bencana alam dan kebakaran	Persen	20,00	25,00	26,25	27,56	28,94	30,39	30,39
S.2	Sasaran 2: Meningkatnya Ketahanan dan keselamatan kebakaran	Persentase Ketahanan dan keselamatan kebakaran	Persen	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00	90,00	90,00
T.4	Tujuan 4: Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	Indeks	52,00	51,50	52,02	52,54	53,06	53,59	53,59
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya Layanan informasi dan Telekomunikasi	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Indeks	52,00	51,50	52,02	52,54	53,06	53,59	53,59



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 Misi 6

NO	VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (Baseline) Tahun 2019	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
MISI 6 : MEWUJUDKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM MELALUI PENGATURAN SISTEM SOSIAL YANG BERBASIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN										
T.1	Tujuan 1 : Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	68,14	72,28	73,61	74,86	76,12	77,86	77,86
S.1	Sasaran 1: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Melek Al-Qur'an	Indeks	75,82	77,43	78,52	79,83	81,14	82,36	82,36
		Persentase Desa dengan warga Hafiz Al-Qur'an (30 Juz)	Persen	24,39	24,39	36,59	48,78	60,98	67,07	67,07
		Persentase Mesjid yang Aktif Shalat Jamaah 5 waktu	Persen	57,00	63,00	68,00	70,00	73,00	76,00	76,00
		Persentase Kasus Pelanggaran Syari'at islam yang ditangani	Persen	74,33	75,45	76,57	77,69	78,81	79,93	79,93
S.2	Sasaran 2: Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat	Persentase desa dengan lembaga adat aktif	Persen	30,49	36,59	42,68	48,78	54,88	60,98	60,98
T.2	Tujuan 2: Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa	Rasio Penyaluran ZIS	Rasio	93,84	94,63	95,96	96,72	97,88	98,63	98,63
S.1	Sasaran 1: Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat	Persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS	Persen	68,53	69,82	70,43	72,5	73,68	75,14	75,14



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB VI

**STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KOTA SUBULUSSALAM**

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Subulussalam 2019-2024, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antarpemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar Nasional, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

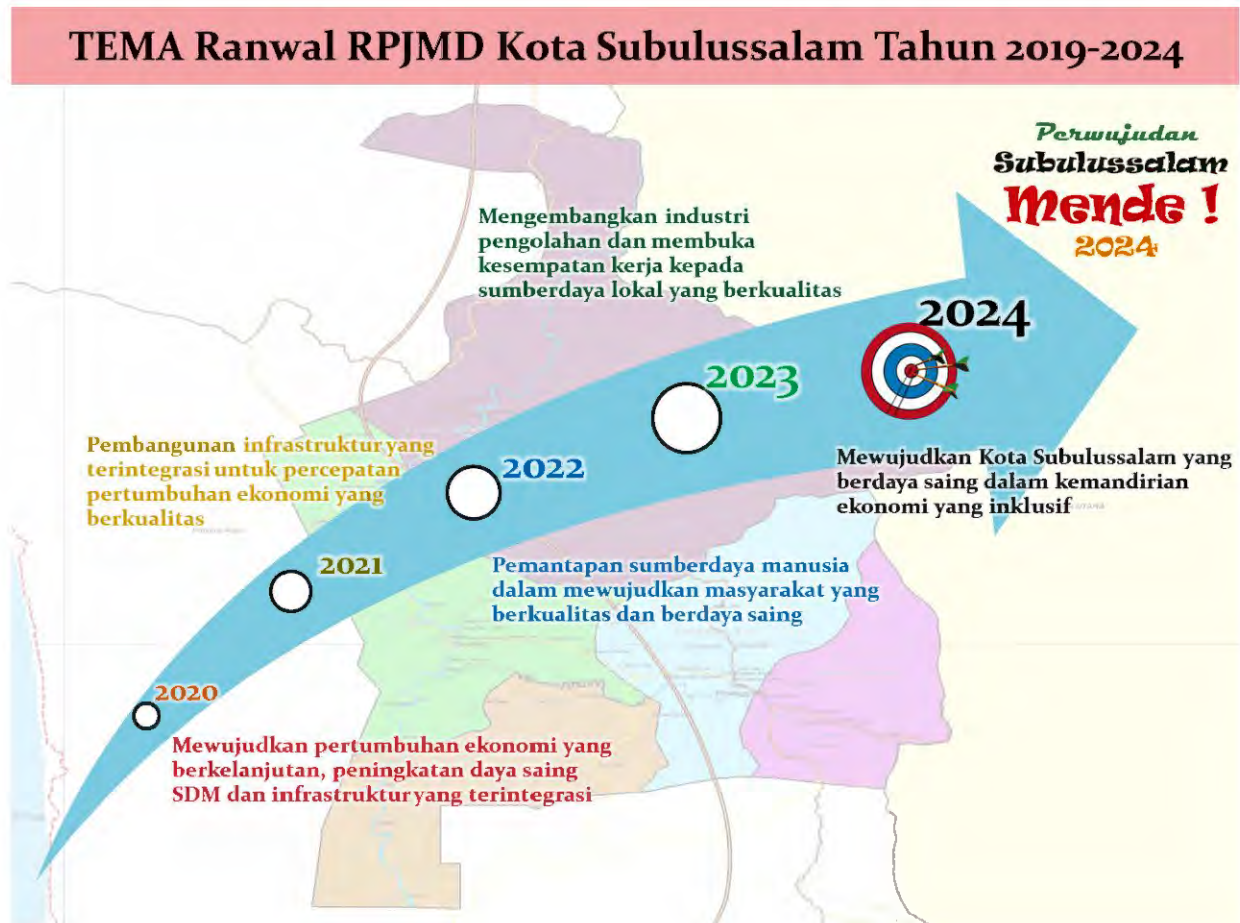
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Subulussalam melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.



Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD.



Gambar 6.1. Agenda/Tema RPJMD Kota Subulussalam 2019-2024

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Subulussalam, 2019 – 2024 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka selanjutnya disusun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan Acehdan RPJP Kota Subulussalam priode Tahun 2015-2035. Arah kebijakan pembangunan Kota Subulussalam disusun berdasarkan tema untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

1. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema ***“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi”***.

2. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021



Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”***

3. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Pemantapan sumberdaya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing”***.

4. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Mengembangkan industri pengolahan dan membuka kesempatan kerja kepada sumberdaya lokal yang berkualitas”***.

5. Tema Pembangunan Tahun 2024

Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan tema yaitu ***“Mewujudkan Kota Subulussalam yang berdaya saing dalam kemandirian ekonomi yang inklusif”***.

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 berdasarkan masing-masing sasaran serta tema pembangunan adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2019-2024

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
MISI I : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS							
1	Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu Dan Daya Saing Pendidikan	1	Meningkatkan Pemerataan Dan Aksesibilitas Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan	1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Penndidikan Usia Dini Dan Pendidikan Dasar	1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana PAUD Dan Pendidikan Dasar
				2		2	Peningkatan Fasilitas Akreditasi Sekolah PAUD Dan Pendidikan Dasar
				3		3	Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan
				4		4	Memberikan Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dan Mahasiswa Dengan Skema <i>Universal Coverage</i>
				5	Mewujudkan Mutu Dan Keunggulan Pendidikan	5	Penerapan Pengetahuan Keterampilan Pada Kurikulum Sekolah
				6	Meningkatkan Kualitas Dayah Dan SDM Dayah	6	Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Dayah Dan Regulasi Terkait Standarisasi Lembaga Pendidikan Di Kota Subulussalm
		2	Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Pendidikan	3	Meningkatkan Literasi, Dan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Untuk Pemenuhan Standar Perpustakaan	7	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dayah
						8	Mewujudkan Minat Baca Siswa Dan Masyarakat
						9	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Berbasis IT Serta Peningkatan Koleksi Bahan Perpustakaan
						10	Pengembangan <i>Smart People</i> Dalam Menunjang Pengembangan <i>Smart City</i>
3	Meningkatkan Kualitas Pemberian Beasiswa Beprestasi Untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam	4	Mendorong Peningkatan Kompetensi SDM Di Bidang Teknologi Informasi Sehingga Tercipta <i>Smart People</i> Dalam Rangka Pengembangan <i>Smart City</i> .	11	Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
				12	Memperbaiki Sistem Dan Tatakola Pendidikan Di Kota Subulussalam		
2	Meningkatkan Kualitas SDM Generasi Muda Melalui Pembinaan Olahraga	4	Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga Untuk Meujudkan SDM Generasi Muda Yang Berkualitas	8	Meningkatkan Pelatihan Dan Ketrampilan Bagi Pemuda	13	Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan
				9	Meningkatkan Pembinaan, Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Dan Kepemudaan	14	Peningkatan Diklat Dan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Dan Kepemudaan
				10	Meningkatkan Prestasi Olahraga Dengan Meningkatkan Kompetensi Pelatih Dan Pembinaan Atlet, Serta Membudayakan Olahraga Pada Masyarakat	15	Peningkatan Kompetensi Pelatih Dan Pembinaan Atlet Terutama Pada Cabang Olahraga Prestasi
				11	Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Olahraga	16	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
MISI II : MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS							
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan Upaya Kesehatan, Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	1	Peningkatan Promosi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
				2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Dengan Akreditasi Rumah Sakit Dan Puskesmas, Meningkatkan Kompetensi Petugas Kesehatan, Dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang Memadai Sesuai Dengan SPM Bidang Kesehatan	2	Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan
				3	Meningkatkan Cakupan Desa Siaga Aktif	3	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dan Puskesmas
						4	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Sehat Melalui Peningkatan Kapasitas Kader Siaga Serta Meningkatkan Fungsi Monev Terintegrasi
				4	Penguatan Informasi Kesehatan Terutama Terkait Penurunan Prevalensi Anak Pendek (Stunting)	5	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu, Bayi, Dan Anak
				5	Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular	6	Eliminasi Penyakit Menular Dan Tidak Menular
				6	Mengoptimalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar	7	Penyederhanaan Birokrasi Pelayanan Kesehatan Dasar
				7	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Paripurna Yang Prima Dengan Mengutamakan Keselamatan Pasien	8	Penetapan Regulasi Terkait Kunjungan Kesehatan Rutin Bagi Masyarakat Miskin Dan Lansia
						9	Peningkatan Pelayanan Sesuai Standar Prosedur
				8	Meningkatkan Standar Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10	Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Dan Pustu
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	2	Meningkatkan Derajat Kehidupan Dan Peran Perempuan, Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	9	Manajemen Pengelolaan Dan Pendistribusian Obat	11	Peningkatan Mutu Dan Akses Penyediaan Kefarmasiaan
						12	Peningkatan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Masyarakat
				10	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Ber-KB Dengan Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Optimalisasi Peran Petugas Lapangan Dan Kader KB	13	Peningkatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
						14	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Peduli Keluarga Berencana
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	2	Meningkatkan Derajat Kehidupan Dan Peran Perempuan, Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	11	Meningkatkan Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Dengan Mendorong Partisipasi Seluruh Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender Dan Anak	15	Peningkatan Koordinasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak
				12	Memperkuat Peran Dan Fungsi Pengarusutamaan Gender (PUG)	16	Penguatan Kelembagaan Dan Jaringan PUG Dan PUHA
				13	Meningkatkan Upaya Pencegahan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	17	Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak
						18	Pemberian Bantuan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Yang Terlibat Tindak Kekerasan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan	14	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pada Air, Lahan Dan Tanah, Udara, Dan Keanekaragaman Hayati	19	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
		4	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan Dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	15	Peningkatan Fasilitas, Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Upaya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20	Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Untuk Meningkatkan Ketaatan Pengelola Usaha Dan Industri Terhadap Ketentuan Peraturan Lingkungan Hidup
		5	Meningkatkan Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	16	Meningkatkan Jumlah Kampung Pro Iklim	21	Pengembangan, Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Pembinaan Kampung Proklim
MISI III : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Yang Baik Dan Terintegrasi	1	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Memastikan Interkonektivitasnya Secara Baik Dalam Rangka Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Setiap Wilayah	1	Pembangunan Ruas Jalan Konektifitas Jalan Antar Kampung, Kecamatan, Dan Pusat Kegiatan Ekonomi
		2	Meningkatnya Akses Air Minum Layak	2	Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum	2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumber Air, Dan Peningkatan Pengelolaan Serta Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Air Peningkatan Status Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Dari UPTD Menjadi PDAM
		3	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak	3	Penyediaan Infrastruktur Sistem Sanitasi	3	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Limbah, Drainase Lingkungan, Persampah Dan Peningkatan Pengelolaan Serta Pemeliharaan Infrastruktur Tersebut
		4	Meningkatnya Layanan Sistem Irigasi	4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi	4	Pembangunan Jaringan Sistem Irigasi
		5	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	5	Meningkatkan Akses Layak Huni	5	Pembangunan Rumah Layak Huni
2	Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatkan Promosi Dan Daya Tarik Wisatawan	6	Meningkatkan Promosi Dan Daya Tarik Wisatawan	6	Mengembangkan Destinasi Wisata Yang Memiliki Keunikan/Kekhasan Kota Subulussalam, Dan Mengembangkan Kerjasama Dengan Pelaku Jasa Wisata Profesional, Serta Memberdayakan Kelompok Sadar Wisata
						7	Pemasaran Pariwisata Dan Peningkatan Kemitraan Pariwisata
		2	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	7	Melestarikan Seni Dan Budaya Kota Subulussalam Dengan Memfasilitasi Aktualisasi Nilai Adat Dan Tradisi Masyarakat Yang Berbasis Islami, Serta Memfasilitasi Pementasan Seni Budaya Kota Subulussalam	8	Pengembangan Pusat Kebudayaan Kota Subulussalam
						9	Penyelenggaraan Event Seni Budaya Kota Subulussalam



TUJUAN	SASARAN		
MISI IV : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS DAN PROSPEK PASAR YANG BAIK			
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	1		Peningkatan Iklim Dan Pelayanan Penanaman Modal Serta Perizinan
			1 Meningkatkan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan
			2 Menerbitkan Izin Sesuai Dengan Prosedur
			3 Menyediakan Layanan Perijinan Yang Mudah, Dan Cepat Melalui Layanan Terintegrasi Secara Elektronik
			4 Meningkatkan Promosi Penanaman Modal
	2		Pengembangan Penanaman Modal
			5 Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penanaman Modal
			6 Menumbuhkan Wirausaha Baru
			7 Meningkatkan Fasilitas Kemitraan Dan Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
			8 Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi
			9 Meningkatkan Daya Saing Koperasi Melalui Peningkatan Kualitas Kelembagaan
			10 Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan, Keamanan, Dan Ketertiban Pasar
			11 Revitalisasi Pasar Tradisional
			12 Meningkatkan Pengawasan Tertib Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (UTTP)
			13 Meningkatkan Pengawasan Pengendalian Harga
	3		Pengoptimalan Pembinaan Perindustrian
			14 Mengembangkan Sentra Dan Klaster Industri, Kemitraan Dan Pemanfaatan Teknologi Industri Terutama Bagi Industri Kecil Dan Menengah
	4		Peningkatan Data Dan Informasi Perindustrian
			15 Meningkatkan Pameran Industri Kreatif
			16 Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Perindustrian
Menurunnya Tingkat Kemiskinan	5		Pengembangan Potensi Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan
			17 Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan
			18 Meningkatkan Penerapan Cara Budidaya Yang Baik Dan Benar Di Bidang Pertanian
			19 Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial
			20 Peningkatan Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan
			21 Meningkatkan PMKS Yang Tertangani Melalui Advokasi Dan Rehabilitasi Sosial
			22 Penyediaan Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin Dan Kelompok Rentan



TUJUAN						ARAH KEBIJAKAN	
					23	Peningkatan Sarana Dan Prasarana, Serta SDM Penanganan Bencana	
			11	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan Serta Kesetiakawanan Sosial	24	Peringatan Hari Pahawan 10 November Dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah	
			12	Peningkatan Ketahanan Pangan	25	Meningkatkan Pembinaan Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	
					26	Meningkatkan Pembinaan Pola Konsumsi Dan Kerawanan Pangan	
			13	Perluasan Kesempatan Kerja Yang Didukung Oleh Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.	27	Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Tenaga Kerja	
					14	Mengoptimalkan Pembinaan Dan Penempatan Transmigrasi	
					15	Meningkatkan Kerjasama Hubungan Industrial Dalam Rangka Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	
MISI V : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BARU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN							
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih, Professional Dan Transparan			1	Peningkatan Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	1	Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah Daerah	
					2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Pencatatan Sipil Dan Kualitas Kependudukan	
					3	Peningkatan Pengelolaan Kersipan Daerah Yang Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
					4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	
					5	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah	
					6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Yang Profesional (Kompetensi Birokrasi)	
			2	Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antara Daerah Dan Desa			
3	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Kampung						
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Kenyamanan						
Meningkatkan Layanan Kinerja Lalulintas Angkutan Jalan			5	Menyediakan Jaringan Angkutan Jalan Yang Berkualitas Dan Berkeselamatan Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	10	Peningkatan Kemantapan Angkutan Jalan Sampai Ke Pelosok	
					11	Peningkatan Keselamatan Layanan Penyelenggaraan LLAJ	



		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3	Meningkatnya Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	6	Menyediakan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
		4	Meningkatnya Ketahanan Dan Keselamatan Kebakaran	7	Meningkatkan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
				12	Peningkatan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
				13	Peningkatan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
				14	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran
				15	Peningkatan Ketepatan Waktu Dalam Penindakan
		5	Meningkatnya Layanan Informasi & Telekomunikasi	8	Meningkatkan Akses & Infrastruktur Teknologi Informasi Serta Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Syariat Islam	1	Memantapkan Kemampuan Baca Al-Qur'an Sesuai Kaidah Ilmu Tajwid
				2	Meningkatkan Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Norma Hukum Syariat Islam
				3	Meningkatkan Peran Ulama Dalam Memberikan Masukan Terhadap Penentuan Kebijakan Daerah
		2	Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat Yang Bernilai Syariat	4	Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Tentang Nilai-Nilai Adat Istiadat Yang Sesuai Dengan Syariat Islam
		3	Penguatan Tatahan Ekonomi Berbasis Syariat	5	Meningkatkan Fungsi Dan Pemberdayaan Zakat, Harta Waqaf Dan Harta Agama Lainnya Dalam Meningkatkan Kualitas Dan Kesejahteraan Masyarakat
				6	Meningkatkan Kompetensi Ustad/Ustadzah Di Semua Lembaga Pengajian
				7	Meningkatkan Sosialisasi Qanun Tentang Norma Hukum Syariat Islam
				8	Terbinanya Hubungan Yang Harmonis Antara Ulama Dengan Pemerintah
				9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Dan SDM Dalam Mengembangkan Dan Mengawasi Adat Istiadat Seesuai Syariat Islam
				10	Meningkatkan Kapasitas Kinerja Manajemen Kelembagaan Baitul Mal













Tabel 6.2
Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020 – 2024

Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Konektifitas jalan antar wilayah dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada potensi unggulan daerah, mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan hidup	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan penguasaan IPTEK	Memperkuat Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Islami dan Berbudaya









Tabel 6.2.a
10 Program Unggulan Subulussalam BISA

1		2		3		4		5	
MAYARAKAT ISLAMI (Satu Kampung Satu Hafiz)		KREATIF & SEJAHTERA (Penanaman 2 Pohon Satu Rumah)		KETAHANAN PANGAN PRODUK UNGGULAN (Jagung,Talas, Kelapa Sawit)		LINGKUNGAN SEHAT (Stunting,Kampung Iklim Dan Sanitasi)		KOTA LAYAK ANAK	
6		7		8		9		10	
PEMBANGUNAN PERGURUAN TINGGI		PEMBANGUNAN EKOWISATA		SMART CITY SUBULUSSALAM		WALIKOTA MENYAPA		SDM GENERASI MUDA (Satu Kampung Satu Sarjana)	



Tabel 6.2.b
Strategi Pencapaian 10 Unggulan Subulussalam Bisa

SUBULUSSALAM CERDAS	SUBULUSSALAM SEHAT	SUBULUSSALAM MEMBANGUN	SUBULUSSALAM KREATIF & SEJAHTERA	SUBULUSSALAM MELAYANI	SUBULUSSALAM ISLAMI
 <p>Facilitasi Pembangunan Perguruan Tinggi</p> <p>Peningkatan SDM Generasi Muda (Satu kampung satu sarjana)</p>	 <p>Mendukung kesehatan keluarga (Stunting, Kampong Sehat)</p> <p>Meningkatkan kesehatan dasar dan rujukan; dan pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin,</p> <p>Pengendalian penyakit menular dan penanganan Kasus Virus Corona (COVID-19);</p> <p>Peningkatan Penyehatan lingkungan,</p> <p>Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga</p> <p>Menciptakan Kota Layak Anak</p>	 <p>Membangun Sarana dan Prasarana Dasar Mendukung Kawasan Wisata</p> <p>Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan</p> <p>Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah</p> <p>Melestarikan seni dan budaya Kota Subulussalam dengan memfasilitasi aktualisasi nilai adat dan tradisi masyarakat yang berbasis Islami, serta memfasilitasi pementasan seni budaya Kota Subulussalam</p>	 <p>Menciptakan masyarakat yang kreatif dan sejahtera (Penanaman Pohon Dua Pohon untuk Satu Rumah)</p> <p>Pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa</p> <p>Membangun ketahanan pangan dan Produk Unggulan (Jagung, Talas, Sawit)</p> <p>Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan</p> <p>Peningkatan produksi pangan</p>	 <p>Walikota Menyapa Mengantar dikecamatan (Minimal 3 bulan sekali)</p> <p>Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelola keuangan daerah</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional</p> <p>Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Membangun Smart City Kota Subulussalam</p> <p>Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>	 <p>Memantapkan Kemampuan baca Al-Qur'an sesuai Kaidah Ilmu Tajwid</p> <p>Meningkatkan pelaksanaan tahapan penyelesaian norma hukum syariah Islam</p> <p>Meningkatkan peran Ulama dalam Pembangunan Kota Subulussalam</p> <p>Meningkatkan Persepsi tentang Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Duafa</p> <p>Menciptakan Masyarakat Subulussalam yang Islami dan Berbudaya (Satu Hafiz Satu Kampung)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pembangunan Perguruan Tinggi 2. Peningkatan Sdm Generasi Muda (Satu Kampung satu Sarjana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Masyarakat Sehat Dan Lingkungan Sehat (Stunting, Kampong Iklim & Sanitasi) <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dan pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin, b) Pengendalian penyakit menular dan penanganan Kasus Virus Corona (COVID-19); c) Peningkatan Penyehatan lingkungan, d) Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga 2. Menciptakan Kota Layak Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Sarana dan Prasarana Dasar Mendukung Kawasan Eko Wisata <ol style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan 2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah 3. Melestarikan seni dan budaya Kota Subulussalam dengan memfasilitasi aktualisasi nilai adat dan tradisi masyarakat yang berbasis Islami, serta memfasilitasi pementasan seni budaya Kota Subulussalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan sejahtera (Penanaman Pohon Dua Pohon untuk Satu Rumah) <ol style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan masyarakat miskin b) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa 2. Membangun ketahanan pangan dan Produk Unggulan (Jagung, Talas, Sawit) <ol style="list-style-type: none"> a) Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan b) Peningkatan produksi pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota Menyapa Mengantar dikecamatan (Minimal 3 bulan sekali) <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah b) Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelola keuangan daerah c) Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah d) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional e) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Membangun Smart City Kota Subulussalam <ol style="list-style-type: none"> a) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Masyarakat Subulussalam Yang Islami dan Berbudaya (Satu Hafiz satu Kampung) <ol style="list-style-type: none"> a) Memantapkan Kemampuan baca Al-Qur'an sesuai Kaidah Ilmu Tajwid b) Meningkatkan Pelaksanaan Tahapan Penyelesaian Norma Hukum Syariah Islam c) Meningkatkan Peran Ulama dalam Pembangunan Kota Subulussalam d) Menciptakan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin dan Kaum Duafa



Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2020

KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS										
				Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	10,94	11,18	101.092.865.464,46	
				Sasaran 1. Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas dalam rangka Pelayanan Pendidikan	Rata Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,48	97.177.706.101,27	
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	7,66	7,88		
1	1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	36	38	8.697.563.309,43	DISDIK
1	1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI Dan SMP/MTs	Persen	100	100	52.113.182.964,22	DISDIK
1	1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persen	60	65	1.246.643.706,45	DISDIK
1	1	1	29	Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase Realisasi Dana Bos Terhadap Jumlah Siswa	Persen	100	100	20.871.969.451,40	DISDIK
2	17	1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	75	79	59.871.159,53	ARPUS
4	1	10	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Dayah Yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	45	50	14.188.475.510,24	DSI
				Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi ≥ B	Persen	42,48	47,79	2.290.019.884,06	
1	1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	Persen	95	97,5	1.500.083.716,65	DISDIK
1	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)	Persen	75	79,6	789.936.167,41	DISDIK
				Sasaran 3. Meningkatkan Pemberian Beasiswa Prestasi	Persentase Pemberian Beasiswa Prestasi	Persen	5,88	2,8	1.625.139.479,14	
1	1	1	27	Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi untuk anak Daerah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi	Persen	85	90	832.503.106,74	DISDIK
4	1	12	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase penerapan Kurikulum Baku Pada Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat	Persen	98	100	687.755.574,36	Sekretariat MPD
4	1	12	24	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah	Rata-rata sarjana per Kampung	Persen	95	100	104.880.798,04	Sekretariat MPD
				Tujuan 2; Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga	Porsentase Organisasi Olahraga yang aktif	Persen	37,5	43,75	9.217.231.400,55	
				Sasaran 1. Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk mewujudkan SDM generasi muda yang berkualitas	Persentase Organisasi Olah Raga yang melakukan pembinaan Atlit	Persen	31,25	34,38	9.217.231.400,55	
2	13	1	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	orang	156	156	366.583.053,71	DISPORAPAR
2	13	1	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	70	75	131.849.758,24	DISPORAPAR
2	13	1	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olahraga	Angka	10	12	191.869.397,23	DISPORAPAR
2	13	1	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Porsentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang memenuhi standar	Persen	55	60	8.526.929.191,38	DISPORAPAR
MISI 2. MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS										
				Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,69	63,8	131.157.195.389,62	
				Sasaran 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	11,99	11,43	-	
					Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,5	1,48	-	
					Persentase Puskesmas yang terakreditasi ≥ Madya	Persen	25	25	-	
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah ≥ C	Status	C	C	131.157.195.389,62	
1	2	1	15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persen	80	80	5.273.662.826,41	DINKES
1	2	1	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persen	80	80	19.422.952.486,68	DINKES
1	2	1	19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promkes Yang Dijalankan	Persen	80	80	344.132.959,74	DINKES
1	2	1	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Pelayanan Kehatan Gizi Pada Anak Balita	Persen	80	80	1.272.681.064,11	DINKES
1	2	1	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persen	80	80	5.284.806.421,81	DINKES
1	2	1	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Dokumen Profil Dinkes	Persen	80	80	373.058.454,96	DINKES
1	2	1	25	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	70	80	9.305.946.703,83	DINKES
1	2	1	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Porsentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persen	78	80	15.272.172,77	DINKES
1	2	1	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Persentase Jumlah Ibu Melahirkan	Persen	80	80	1.470.459.095,29	DINKES



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	1	33	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Tenaga Kesehatan	Persen	80	80	839.969.502,31	DINKES
1	2	2	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular	Persen	100	100	4.004.916.892,15	RSUD
1	2	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Kesiediaan Sarana Dan Prasarana RSUD	Persen	73	76,6	19.214.650.618,45	RSUD
1	2	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	Persen	37	40,92	59.391.782.991,80	RSUD
2	2	1	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Ketersediaan Tenaga Pendukung KB	Persen	100	100	150.956.943,28	DP3AKB
2	2	1	25	Program Keluarga Sejahtera	Rasio Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif	Rasio	70,24	72,68	4.791.946.256,01	DP3AKB
				Tujuan 2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,01	69,48	557.534.763,04	
				Sasaran 2. Meningkatkan derajat kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,05	85,06	-	
					Predikat Kota layak Anak Subulussalam	Predikat	Pratama	Pratama	557.534.763,04	
2	2	1	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Persentase Gampong Menuju Layak Anak	Persen	95	100	21.890.114,30	DP3AKB
2	2	1	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Persen	100	100	219.298.558,90	DP3AKB
2	2	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Kali	1	1	23.332.486,18	DP3AKB
4	1	3	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Lembaga Dan Organisasi Perempuan Yang Aktif	Persen	7	10	270.487.148,83	SETDAKO
2	2	1	25	Program keluarga sejahtera	Terlaksananya HARGANAS	Kali	1	1	22.526.454,83	DP3AKB
				Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,69	62,69	704.757.191,41	
				Sasaran 1. Meningkatkan Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks > 70)	Indeks	62,69	62,69	461.489.085,00	
2	5	1	16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Industri (Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL)	Persen	62,69	62,69	313.042.359,50	DLHK
2	5	1	19	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Dan Perlindungan Hutan	Persentase Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	62,69	62,69	148.446.725,50	DLHK
				Sasaran 2. Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan Yang Sudah Dinilai/Diperiksa (> 80%)	Persen	30	40	127.268.106,41	
2	5	1	16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Persentase Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	20,49	20,49	127.268.106,41	DLHK
				Sasaran 3. Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim /Proklm (> 30 Kampung)	Kampung	10	15	116.000.000,00	
2	5	1	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kampung Iklim /Proklm Yang Dibina	Kampung	10	15	116.000.000,00	DLHK
MISI .3 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
				Tujuan 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persen	55,52	54,34	176.369.818.506,60	
				Sasaran 1. Meningkatkan infrastruktur jalan yang baik dan terintegrasi	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	34,16	34,58	115.493.748.943,06	
1	3	1	15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	34,16	35,21	114.990.936.732,06	PUPR
1	3	1	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Terbangun	Persen	34,16	35,21	417.812.211,00	PUPR
1	3	1	23	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase Panjang Jalan Yang Direhapi	Persen	34,16	35,21	85.000.000,00	PUPR
				Sasaran 2. Meningkatkan akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	Persen	89,63	90,35	9.029.648.483,08	
1	3	1	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Persen	89,63	90,35	9.029.648.483,08	PUPR
				Sasaran 3. Meningkatkan akses sanitasi layak	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	54,59	46,65	19.502.269.364,42	
1	3	1	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terpenuhinya Penambahan Jumlah Saluran dan Berfungsi dengan Baik	Persen	13,74	14,02	19.201.969.364,42	PUPR
1	3	1	33	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terpenuhinya Peningkatan Air Bersih dan Sanitasi Umum Masyarakat	Persen	75,14	76,64	300.300.000,00	PUPR
				Sasaran 4. Meningkatkan Layanan Sistem Irigasi	Persentase Layanan Sistem Irigasi	Persen	9,58	9,58	5.561.208.992,22	
1	3	1	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terpenuhinya Peningkatan Pengamanan Tebing dan Sungai	Persen	9,58	9,58	5.561.208.992,22	PUPR



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sasaran 5. Meningkatkan akses rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	89,65	90,55	32.043.851.716,04	
1	3	1	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Luas Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persen	54,00	54,38	24.009.227.460,95	PUPR
1	3	1	32	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	Persen	89,65	90,55	8.034.624.255,09	PUPR
				Tujuan 2. Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat	Rata-rata Persentase Infrastruktur pariwisata dan budaya yang dikembangkan	Persen	26,14	28,26	4.178.360.406,14	
				Sasaran 1. Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan	Persentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	2,28	2,36	3.031.589.921,98	
2	13	1	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Rata-Rata Lama Tinggal Wisman	Hari	2	2,1	62.337.615,43	DISPORAPAR
2	13	1	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Kota Yang Diintervensi Pengembangannya	Destinasi	6	8	2.969.252.306,55	DISPORAPAR
				Sasaran 2. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Benda/Situs Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Persen	50	54,17	1.146.770.484,17	
1	1	1	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Karya Budaya Daerah Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Angka		6	1.146.770.484,17	DISDIK
Misi 4 : MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS DAN PROSPEK PASAR YANG BAIK										
				Tujuan 1. Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	21,21	21,5	75.587.236.747,64	
				Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Proporsi PDRB sektor jasa perusahaan	Persen	0,32	0,32	177.074.055,63	
2	12	1	19	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Penanaman Modal Tingkat Nasional	Persen	55	60	13.744.955,49	DPMP2TSP
2	12	1	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Persen	63	68	28.423.210,43	DPMP2TSP
2	12	1	18	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan	Indeks	80	85	127.422.525,05	DPMP2TSP
2	12	1	18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penanaman Modal	Persen	70	75	7.483.364,66	DPMP2TSP
				Sasaran 2. Meningkatkan Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Daerah	Proporsi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Persen	19,26	19,26	4.107.231.201,56	
3	7	1	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya Jumlah UMKM	unit	2145	2257	1.240.125.882,49	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi	unit	70	80	42.422.702,14	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan Pengawasan Perdagangan	Persen	100	100	161.800.185,95	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Sarana Perdagangan	Persen	45	50	1.272.122.017,74	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	Persen	100	100	1.322.994.388,84	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	22	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	Persen	60	65	67.766.024,39	DISPERINDAGKOP DAN UKM
				Sasaran 3. Meningkatkan Produk-Produk UKM dan UMKM Unggulan daerah	Proporsi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	13,99	14,45	1.475.037.353,30	
3	7	1	16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah IKM	unit	900	950	1.475.037.353,30	DISPERINDAGKOP DAN UKM
				Sasaran 4. Meningkatkan komoditas pertanian yang mendukung kesejahteraan rakyat	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan	Persen	21,54	21,6	69.827.894.137,16	
3	3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Ton	125	128,6	2.749.566.350,32	DISTANBUNKAN
3	3	1	17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Ton	3700	40000	53.983.160.823,08	DISTANBUNKAN
3	3	1	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan	Ton/Ha	6	7	2.107.390.151,36	DISTANBUNKAN
3	3	1	21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Jumlah Penyakit Hewan Ternak Yang Ditangani	Persen	100	100	82.300.042,15	DISTANBUNKAN
3	3	1	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Ton	16230	16480	6.229.943.499,63	DISTANBUNKAN
3	3	1	24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatnya Populasi Peternakan	Ekor	146920	155810	4.675.533.270,63	DISTANBUNKAN
				Tujuan 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	17,95	17,5	17.296.822.941,54	
				Sasaran 1. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	angka	14.560	14.460	-	
					Persentase Pmks yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	61,91	62,69	6.679.947.827,50	
1	6	1	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS Yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial Melalui KUBEAtau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis	Persen	70	80	5.411.009.718,40	DINAS SOSIAL
1	6	1	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pmks Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	70	80	999.032.151,29	DINAS SOSIAL



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE		VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	TARGET	RP	(8)
1	6	1	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (Satu) Tahun	30	40	DINAS SOSIAL
1	6	1	21	Program Pemberdayaan Kelemagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	55	60	DINAS SOSIAL
				Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Pola Pangan Harapan	77,2	78,45	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Meningkatnya Produksi Pangan Utama Lokal	4500	5000	DINAS PANGAN
2	1	1	20	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Satuan Kawasan Pemukiman (SKP) Transmigrasi	6,5	6,7	DISNAKERTRANS
				Sasaran 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,25	78,45	
2	1	1	15	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Besar-besaran Pencari Kerja Terdafdar Yang Ditempatkan	134	134	DISNAKERTRANS
2	1	1	17	Program Perfindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang dapat ditangani	100	100	DISNAKERTRANS
MISI 5. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BARU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN								
				Tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi *)	Nilai	58,14	198.978.155.926,82
				Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	Nilai	37,64/C	-
					Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	-
					Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah dan Inovasi Pelayanan Publik	Angka	84,5	-
					Indeks E-Government/Indeks SPBE	Indeks	2,10	198.978.155.926,82
1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	DISDIK
1	1	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	DISDIK
1	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	DISDIK
1	1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	DISDIK
1	1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	DISDIK
4	1	3	27	Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Untuk Anak Daerah	Persentase Pemenuhan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi	Persen	60	SETDAKO
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	80	DINKES
1	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	80	DINKES
1	2	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	80	DINKES
1	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	DINKES
1	2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	RSUD
4	1	8	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	82,5	KECAMATAN SIMPANG KIRI
1	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	87,5	PUPR
1	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	87,5	PUPR
1	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	87,5	PUPR
1	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	87,5	PUPR
1	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	SATPOL PP
1	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	92	SATPOL PP
1	5	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	84,35	SATPOL PP
1	5	1	3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	11	SATPOL PP
1	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	90	SATPOL PP
1	5	1	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penyesuaian Kasus Pelanggaran Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	SATPOL PP
1	5	1	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase Tingkat Penyesuaian Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan	Persen	100	SATPOL PP



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	5	1	23	Program Pengawasan Syariat Islam	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Persen	100	100	19.242.089,24	SATPOL PP
1	5	1	24	Program Pengamanan Pengkakan Perda	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100	100	56.452.738,19	SATPOL PP
1	5	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	837.821.216,68	KESBANG POL
1	5	2	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	96	98	213.876.598,19	KESBANG POL
1	5	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	92	94	35.041.151,97	KESBANG POL
1	5	2	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	2.802.794.963,14	KESBANG POL
1	5	2	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	12,76	13,12	84.845.404,27	KESBANG POL
1	5	2	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	85,75	86,53	69.132.035,40	KESBANG POL
1	5	2	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekati)	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekati) Yang Di Tangani	Persen	100	100	503.086.582,37	KESBANG POL
1	5	2	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Pendidikan Politik	Persen	12,86	14,63	171.553.165,17	KESBANG POL
1	6	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	93,5	93,5	1.377.575.437,41	DINAS SOSIAL
1	6	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	267.772.095,89	DINAS SOSIAL
1	6	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	55.149.512,78	DINAS SOSIAL
1	6	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	62.327.433,98	DINAS SOSIAL
1	6	1	22	Program Evaluasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Porsentase Meningkatnya Kualitas Layanan Sosial	Dok	1	1	8.866.344,75	DINAS SOSIAL
1	6	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	80	85	792.267.637,67	BPBD
1	6	2	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	80	85	290.077.952,67	BPBD
1	6	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	80	85	25.453.621,28	BPBD
1	6	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	80	85	55.047.698,29	BPBD
2	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.123.433.869,41	DISNAKER TRANS
2	1	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	55.547.607,41	DISNAKER TRANS
2	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	50.907.242,56	DISNAKER TRANS
2	1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42.762.083,75	DISNAKER TRANS
1	6	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Porsentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	19.599.288,39	DINAS SOSIAL
2	1	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	7.636.086,38	DISNAKER TRANS
2	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	776.681.285,76	DP3AKB
2	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	217.788.310,70	DP3AKB
2	2	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	56.337.348,44	DP3AKB
2	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42.592.392,95	DP3AKB
2	2	1	20	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	15.357.018,17	DP3AKB
2	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	8.484.540,43	DINAS PANGAN
2	4	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	25	30	10.266.293,92	PERTANAHAN
2	5	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	50	50	3.775.620,49	DLHK
2	6	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	10.605.675,53	DISDUK CAPIL
2	10	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	30	30	31.392.799,58	DISKOMINFO
2	13	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	16.969.080,85	DISPORAPAR
3	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	8.484.540,43	DISTANBUN KAN



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	3	1	20	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	13.151.037,66	DISTANBUN KAN
4	1	3	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	80	85	598.075.254,73	SETDAKO
4	1	5	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		16	33.938.161,71	KEC. LONGKIB
4	1	6	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		100	40.810.639,46	KEC. PENANGGALAN
4	1	7	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	14	16	18.072.071,11	KEC.RUNDENG
4	1	8	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	14	16	22.059.805,11	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	9	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		16	67.876.323,42	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	10	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran (Tpa)/Balai Pengajian Yang Di Bantu Pemerintah	Persen	45,25	45,25	195.611.079,55	DSI
4	1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Penguatan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Di Kota Subulussalam	Persen	100	100	5.090.724,26	Sekretariat MPU
4	2	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	25,5	25,5	31.901.872,01	INSPEKTORAT
4	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	75	75	29.483.777,99	BAPPEDA
4	4	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	23	23	55.319.203,59	BPKD
4	5	1	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	7.213.556,27	BKPSDM
2	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	672.018.873,01	DINAS PANGAN
2	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	22.059.805,11	DINAS PANGAN
2	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	35.635.069,80	DINAS PANGAN
4	3	1	18	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	67	67	14.847.945,75	BAPPEDA
2	4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	70	75	833.475.944,14	PERTANAHAN
2	4	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	50	55	65.687.311,99	PERTANAHAN
2	4	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	50	55	50.567.860,95	PERTANAHAN
2	4	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	50	55	53.978.646,20	PERTANAHAN
2	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	75	75	924.935.193,61	DLHK
2	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	172.962.107,96	DLHK
2	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	50	55	31.299.469,64	DLHK
2	5	1	25	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	50	50	13.521.387,85	DLHK
2	6	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.056.931.927,85	DISDUKCAPIL
2	6	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	99.226.700,30	DISDUKCAPIL
2	6	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	36.016.874,11	DISDUKCAPIL
2	6	1	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Administrasi Kependudukan	Persen	90	95	1.122.791.476,01	DISDUKCAPIL
2	7	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.130.700.764,60	DPMK
2	7	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	374.202.171,01	DPMK
2	7	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	49.549.716,10	DPMK
2	7	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42.027.322,55	DPMK
2	7	1	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Bumdes Yang Aktif	Persen	75	82,6	79.754.680,02	DPMK
2	7	1	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Jumlah Lembaga Perempuan Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan	Persen	100	100	101.814.485,13	DPMK
2	7	1	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rasio Jumlah Aparatur Kampung Yang Mendapat Pelatihan	Rasio	30	40	54.087.248,32	DPMK



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	7	1	21	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Persentase Peringatan Hari Besar	Persen	100	100	3.393.816,17	DPMK
2	7	1	23	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Pemerintah Kampung Yang Lengkap	Persen	100	100	154.271.004,78	DPMK
2	7	1	24	Program Pembangunan Infrastruktur	Persentase Peningkatan Jumlah Kantor Pemerintahan Kampung	Persen	50	57,31	287.116.848,06	DPMK
2	9	1	20	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesejahteraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	78,5	80	24.605.167,24	DISHUB
4	1	4	21	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	70	70	14.275.239,27	SETWAN
2	9	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	78,5	80	1.443.422.682,99	DISHUB
2	9	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78,5	80	178.599.576,00	DISHUB
2	9	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	78,5	80	179.448.030,04	DISHUB
2	9	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	78,5	80	64.211.001,95	DISHUB
2	9	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	78,5	80	32.241.253,62	DISHUB
2	10	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	50	52	1.236.958.705,36	DISKOMINFO
2	10	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	50	53	702.215.674,80	DISKOMINFO
2	10	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	30	50	45.816.518,31	DISKOMINFO
2	10	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	30	56	91.633.036,62	DISKOMINFO
2	10	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	30	50	50.149.997,33	DISKOMINFO
4	1	3	19	Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Jaringan Internet	Persen	73	75	233.436.857,69	SETDAKO
4	2	1	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase Penggunaan Sarana Dan Prasarana Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persen	100	100	1.527.217,28	INSPEKTORAT
2	12	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	764.550.422,45	DPMP2TSP
2	12	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	53.939.052,24	DPMP2TSP
2	12	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	51.925.387,42	DPMP2TSP
2	12	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	100	7.636.086,38	DPMP2TSP
2	12	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	46.911.024,02	DPMP2TSP
4	1	3	15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase Jumlah Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Subulussalam	Persen			91.319.108,62	SETDAKO
2	13	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.877.846.000,82	DISPORAPAR
2	13	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	509.666.343,47	DISPORAPAR
2	13	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	27.998.983,41	DISPORAPAR
2	13	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	33.041.685,17	DISPORAPAR
2	17	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	846.979.360,04	ARPUS
2	17	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	338.702.853,86	ARPUS
2	17	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	64.058.280,23	ARPUS
2	17	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	12.726.810,64	ARPUS
2	17	1	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Pelayanan Informasi Berkualitas	Persen	100	100	80.942.515,68	ARPUS
2	3	1	16	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	190.308.241,79	DINAS PANGAN
3	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.953.071.463,47	DISTANBUN KAN
3	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	251.142.396,65	DISTANBUN KAN
3	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	99.269.123,00	DISTANBUN KAN
3	3	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	100	19.090.215,96	DISTANBUN KAN
3	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	83.742.414,02	DISTANBUN KAN
4	1	3	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sumberdaya Listrik	Persen	92	96	9.507.691.157,54	SETDAKO



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	3	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Tingkat Perbandingan Harga Bahan Pokok Antar Wilayah Kota Subulussalam	Rasio			192.574.886,76	SETDAKO
3	7	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.062.331.066,85	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	86.861.896,15	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	56.220.686,01	DISPERINDAGKOP DAN UKM
3	7	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	26.386.920,73	DISPERINDAGKOP DAN UKM
1	5	2	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	95	96	30.120.118,52	KESBANGPOL
1	6	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	45.612.889,34	DINAS SOSIAL
2	4	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	12.617.869.142,01	PERTANAHAN
2	9	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	78,5	80	45.214.115,94	DISHUB
2	10	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	30	30	41.234.866,48	DISKOMINFO
2	13	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	92,5	92,5	7.636.086,38	DISPORAPAR
2	17	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	2.545.362,13	ARPUS
4	1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	15.664.481.709,82	SETDAKO
4	1	3	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	16.962.735.222,90	SETDAKO
4	1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	77	77	296.380.269,30	SETDAKO
4	1	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	75	75	938.249.327,90	SETDAKO
4	1	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	701.620.586,10	SETDAKO
4	1	3	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	2.352.072.588,62	SETDAKO
4	1	3	17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintahan	Persen	96,83	96,83	455.136.202,15	SETDAKO
4	1	3	18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Realisasi Rencana Penerbitan Peraturan Perundang-Undangan	Persen			927.398.024,92	SETDAKO
4	1	3	19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Dalam Pemerintahan Kota Subulussalam	Satuan			124.808.794,49	SETDAKO
4	1	3	21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	100	100	1.774.900.102,22	SETDAKO
4	1	3	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	75,5	75,5	1.353.811.756,71	SETDAKO
4	1	3	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariat Islam	Indeks Pembangunan Syariat Islam Kota Subulussalam	Indeks			76.572.977,36	SETDAKO
4	1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	10.118.154.358,85	SETWAN
4	1	4	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	1.234.577.437,64	SETWAN
4	1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	77	77	405.561.032,43	SETWAN
4	1	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	75	75	618.733.413,76	SETWAN
4	1	4	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	67	67	52.943.532,27	SETWAN
4	1	4	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun Yang Disahkan	Persen	75	75	3.468.628.181,95	SETWAN
4	1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	502.751.443,03	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		98	203.459.279,45	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		94	16.969.080,85	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		96	6.787.632,34	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		84,13	36.271.410,33	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen		84,13	7.763.354,49	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariat Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syariat Islam	Persen		100	120.650.164,88	KECAMATAN LONGKIB
4	1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	487.436.847,55	KECAMATAN PENANGGALAN



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	6	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		100	185.938.703,47	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		100	29.695.891,50	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		100	47.852.808,01	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		100	181.738.855,95	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen		100	84.845.404,27	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	507.120.981,35	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	95	98	388.605.526,84	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	90	94	64.482.507,25	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	92	96	23.425.816,12	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	82	84,13	145.679.559,14	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84.845.404,27	KECAMATAN RUNDENG
4	1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	771.889.549,92	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	95	98	243.845.691,88	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	89	94	15.682.283,21	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	90	96	42.253.011,33	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	82,5	84,13	228.488.673,71	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84.845.404,27	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	28	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tingkat Penggunaan Data Statistik	Persen	100	100	16.969.080,85	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	513.908.613,69	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		98	154.248.944,97	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		94	63.634.053,21	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		84,13	226.138.456,01	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84.845.404,27	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.031.394.587,91	DSI
4	1	10	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	169.945.344,76	DSI
4	1	10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	15.272.172,77	DSI
4	1	10	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	12.726.810,64	DSI
4	1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	97	97	1.411.113.553,04	Sekretariat MPU
4	1	11	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	77.888.081,12	Sekretariat MPU
4	1	11	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	89.087.674,49	Sekretariat MPU
4	1	11	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	20.450.287,79	Sekretariat MPU
4	1	11	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	13.235.883,07	Sekretariat MPU
4	1	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	97,98	97,98	1.053.094.667,18	Sekretariat MPD
4	1	12	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	97,98	97,98	241.470.020,56	Sekretariat MPD
4	1	12	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	36.653.214,65	Sekretariat MPD
4	1	12	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	27.659.601,79	Sekretariat MPD
4	1	12	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	21.211.351,07	Sekretariat MPD
4	1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	996.954.923,68	Sekretariat MAA
4	1	13	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	126.419.652,37	Sekretariat MAA
4	1	13	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	45.816.518,31	Sekretariat MAA



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	13	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	43.271.156,18	Sekretariat MAA
4	1	14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.300.684.289,79	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	203.374.434,04	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	33.938.161,71	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	29.182.576,80	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	348.499.669,31	KORPRI
4	1	15	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	30.544.345,54	KORPRI
4	1	15	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	99	99	25.776.033,82	KORPRI
4	2	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen		74,5	10.605.675,53	INSPEKTORAT
4	4	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	67	67	9.332.994,47	BPKD
2	13	1	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	92,5	92,5	138.414.247,17	DISPORAPAR
4	1	3	22	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Tingkat Ketersediaan Dokumen- Dokumen Prosedur Dalam Pengawasan	Persen	85	85	499.705.493,01	SETDAKO
4	1	3	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Aksesibilitas Informasi Publik	Indeks	100	100	1.013.886.460,45	SETDAKO
4	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.211.779.032,92	INSPEKTORAT
4	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	98	98	334.715.119,86	INSPEKTORAT
4	2	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	159.169.978,42	INSPEKTORAT
4	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	98	98	161.206.268,12	INSPEKTORAT
4	2	1	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persen	73	74	3.775.111.417,77	INSPEKTORAT
4	2	1	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas Yang Terlatih	Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas Yang Terlatih	Persen		38,6	91.505.768,51	INSPEKTORAT
4	1	3	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	92	92	1.096.409.052,09	SETDAKO
4	1	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam	Persen			180.975.247,32	SETDAKO
4	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	2.309.826.195,23	BAPPEDA
4	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	255.384.666,86	BAPPEDA
4	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	77	77	210.689.521,42	BAPPEDA
4	3	1	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Data Statistik Perencanaan	Persen	75	75	960.407.553,68	BAPPEDA
4	3	1	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	65	67	867.832.733,08	BAPPEDA
4	3	1	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Konsistensi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Terhadap Dokumen Perencanaan	Persen	64,5	67	159.483.906,41	BAPPEDA
4	3	1	23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Persentase Konsistensi Program Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Terhadap Dokumen Perencanaan	Persen	64	67	375.313.645,81	BAPPEDA
4	3	1	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Program Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persen	64	67	251.341.783,35	BAPPEDA
4	3	1	29	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase Capaian Program Pemabangunan Pemerintahan	Persen	65	68	106.905.209,39	BAPPEDA
1	3	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	85,5	87,5	22.059.805,11	PUPR
2	2	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	6.796.116,88	DP3AKB
2	3	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	9.332.994,47	DINAS PANGAN



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	4	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	50	55	332.371.689,79	PERTANAHAN
2	7	1	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Pemerintahan Kampung Yang Aktif Dalam TTG	Persen	3,12	3,66	142.540.279,18	DPMK
2	13	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	11.878.356,60	DISPORAPAR
4	1	3	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	98,52	98,52	144.487.056,98	SETDAKO
4	4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	99	99	4.294.559.248,52	BPKD
4	4	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	492.069.406,63	BPKD
4	4	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	82,14	82,14	173.933.078,76	BPKD
4	4	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	81,68	81,68	146.154.693,40	BPKD
4	4	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan	Persen	95	98,83	1.194.000.526,91	BPKD
4	4	1	15	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan APBD	Persen	95	95,58	6.059.381.328,78	BPKD
4	4	1	17	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Kampung	Persen	80	95	180.890.401,91	BPKD
4	1	15	15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Berprestasi	Persen	98	98	89.070.705,41	KORPRI
4	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1.187.207.082,66	BKPSDM
4	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	98	98	143.412.489,94	BKPSDM
4	5	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	37.355.734,59	BKPSDM
4	5	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	98	98	700.313.966,88	BKPSDM
4	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	69.318.695,29	BKPSDM
4	5	1	15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Persen	88	98	1.730.997.865,93	BKPSDM
				Tujuan 2. Meningkatkan Layanan kinerja Lalulintas Angkutan Jalan	Persentase Layanan Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	32,5	32,825	1.020.850.571,23	
				Sasaran 1. Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	Persen	55	55,5	1.020.850.571,23	
2	9	1	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	Persen	55	55,55	1.020.850.571,23	DISHUB
				Tujuan 3. Meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Bencana	Persen	0,35	0,4	7.491.396.688,01	
				Sasaran 1. Meningkatkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kasus bencana alam dan kebakaran	Persen	20	25	4.242.270.213,70	
1	6	2	24	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana dan Kebakaran (> 90%)	Persen	75,5	76,8	4.242.270.213,70	BPBD
				Sasaran 2: Meningkatkan Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	Persentase Ketahanan dan keselamatan kebakaran	Persen	60	70	3.249.126.474,31	
1	6	2	26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Jumlah kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (>80%)	Persen	60	60	3.249.126.474,31	BPBD
				Tujuan 4. Meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi yang cepat, aman dan Transparan.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	Indeks	52	51,5	913.885.970,06	
				Sasaran 1. Meningkatkan Layanan informasi dan Telekomunikasi	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Indeks	52	51,5	913.885.970,06	
2	10	1	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Persen	50	51,5	913.885.970,06	DISKOMINFO
				Misi 6: MEWUJUDKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM MELALUI PENGATURAN SISTEM SOSIAL YANG BERBASIS ISLAMI DALAM KEHIDUPAN						
				Tujuan 1. Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	68,14	72,28	18.370.955.167,54	
				Sasaran 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Melek Al-Qur'an	Indeks	75,82	77,43	-	
					Persentase Desa dengan warga Hafiz Al-Qur'an (30 Juz)	Persen	24,39	24,39	-	
					Persentase Mesjid yang Aktif Shalat Jamaah 5 waktu	Persen	57	63	-	
					Persentase Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditangani	Persen	74,33	75,45	17.939.092.059,79	
4	1	10	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariat Islam	Penurunan Pelanggaran Qanun Syariat, Dan Gangguan Trantibum	Kasus	2	3	17.539.236.880,80	DSI



KODE				VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	11	26	Program Peningkatan Peran Dan Sumber Daya Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Ijtihad, Ijma, Qiyas, Dan Fatwa Yang Diterapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam	Persen	100	100	184.059.377,76	Sekretariat MPU
4	1	11	27	Program Silaturahmi Umara Dan Ulama	Persentase Pelaksanaan Silaturahmi Atau Kunjungan Muhibbah Antar Ulama	Persen	100	100	215.795.801,23	Sekretariat MPU
				Sasaran 2. Meningkatkan Pembinaan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat	Persentase Desa Dengan Lembaga Adat Aktif	Persen	30,49	36,59	431.863.107,75	
4	1	13	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	431.863.107,75	Sekretariat MAA
				Tujuan 1. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa	Rasio Penyaluran ZIS	Rasio	93,84	94,63	8.071.920.257,33	
				Sasaran 1. Penguatan Tataanan Ekonomi Berbasis Syariat	Persentase Penyaluran ZIS Terhadap Golongan Penerima ZIS	Persen	68,53	69,82	8.071.920.257,33	
4	1	14	25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Litbang dan Ekonomi Ummat	Porsentase tingkat penerimaan ZIS	Persen	75	75	8.071.920.257,33	Sekretariat BAITUL MAL
									751.008.987.392,00	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024
Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



Tabel 6.3.a
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2024

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
MISI 1. MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS														
	TUJUAN 1: Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	11,34	55.791.258.540	11,51	56.377.220.327	11,76	56.326.621.944	11,92	55.696.481.810	11,92	224.191.582.621	
	Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan dan Aksesibilitas Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,76	54.358.258.540	14,98	55.263.220.327	15,34	55.214.821.944	15,6	54.488.969.210	15,6	219.325.270.021	
		Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92		8,04		8,17		8,24		8,24		
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Prosentase pelestarian koleksi nasional	Persen	20	10.000.000	30	10.000.000	40	10.000.000	50	15.000.000	ARPUS
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan jangkauan kapasitas perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	100	138.422.875	100	142.575.561	100	146.852.828	100	151.258.413	ARPUS
1	01	07	Program Pendidikan Dayah	Jumlah guru dayah, Balai pengajian yang terakreditasi	Persen	56	7.370.300.000	59	7.408.067.496	61	7.172.614.528	64	6.484.495.571	DSI
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip pemerintah daerah yang dikelola dengan baik	Persen	100	65.609.000	100	92.577.270	100	95.354.588	100	98.215.226	ARPUS
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs	Persen	95	46.399.368.765	95	47.150.000.000	95	47.300.000.000	95	47.200.000.000	DISDIKBUD
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal	Persen	40	374.557.900	42	450.000.000	45	450.000.000	47	450.000.000	DISDIKBUD
2	24	04	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Prosentase arsip/dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan	Persen	0	-	100	10.000.000	100	40.000.000	100	90.000.000	ARPUS
	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan	Persentase Sekolah yang terakreditasi ≥ B	Persen	51,41	733.000.000	55,03	400.000.000	58,65	350.000.000	62,27	450.000.000	62,27	1.933.000.000	
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Kualifikasi Kependidikan	Persen	35	350.000.000	40	200.000.000	45	175.000.000	50	250.000.000	DISDIKBUD
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi B	Persen	95	383.000.000	95,2	200.000.000	95,4	175.000.000	95,55	200.000.000	DISDIKBUD
	Sasaran 3: Meningkatkan Pemberian Beasiswa Beprestasi untuk Peningkatan Kualitas SDM Subulussalam	Persentase Pemberian Beasiswa Prestasi	Persen	6	700.000.000	8	714.000.000	10	761.800.000	12	757.512.600	14	2.933.312.600	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	01	07	Program Pendidikan Dayah	Persentase Tenaga Pendidik dan Pendidikan Dayah Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	86,5	29.698.650	86,5	25.000.000	87,6	26.380.000	88,5	26.552.500	88,5	107.631.150	Sekretariat MPD
1	01	08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rata-Rata Sarjana per Kampung	Orang	6	670.301.350	12	689.000.000	16	735.420.000	18	730.960.100	18	2.825.681.450	Sekretariat MPD
			TUJUAN 2: Meningkatkan Kualitas SDM generasi muda melalui Pembinaan Olahraga	Porsentase Organisasi Olahraga yang aktif	Persen	50	6.592.340.736	56,25	7.267.232.116	62,5	7.118.342.966	71,88	7.456.521.923	71,88	28.434.437.741	
			Sasaran 1. Meningkatkan Pembinaan Organisasi Olahraga untuk Mewujudkan SDM Generasi Muda Yang Berkualitas	Persentase Organisasi Olah Raga yang melakukan pembinaan Atlet	Persen	40,63	6.592.340.736	43,75	7.267.232.116	50	7.118.342.966	56,25	7.456.521.923	56,25	28.434.437.741	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	42	5.292.333.306	47	6.036.706.116	52	5.426.573.016	59	5.626.540.771	59	22.382.153.209	DISPORAPAR
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	Persen	55,5	1.300.007.430	61	1.035.126.000	66,5	1.102.969.950	72	1.138.421.152	72	4.576.524.532	DISPORAPAR
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah Pembinaan Kepramukaan	Persen	49,5	-	54,5	195.400.000	59,5	588.800.000	64,5	691.560.000	64,5	1.475.760.000	DISPORAPAR
MISI 2. MEWUJUDKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS																
			Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	64,13	40.883.454.246	64,42	40.844.055.532	64,65	43.787.323.465	64,71	47.009.670.284	64,71	172.524.503.527	
			Sasaran 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah ≥ C	Status	C		B		B		B		B	-	
				Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	11,22		10,81		10,69		10,68		10,68		
				Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,45		1,43		1,42		1,41		1,41		
				Persentase Puskesmas yang terakreditasi ≥ Madya	Persen	50	40.883.454.246	50	40.844.055.532	75	43.787.323.465	75	47.009.670.284	75	172.524.503.527	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan UKBM	Persen	80,25	182.452.000	80,5	200.697.200	80,75	220.766.920	90	242.843.612	90	846.759.732	DINKES



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	14,89	3.311.423.000	15,12	2.429.195.350	15,46	2.343.748.950	15,8	2.403.590.956	15,8	10.487.958.256	DP3AKB
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terlaksana	Persen	80	26.694.137.284	80	29.297.130.152	80	32.226.843.168	80	35.449.527.484	80	123.667.638.088	DINKES
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan ketersediaan obat	Persen	77,1	10.034.784.662	82,66	8.065.000.000	89,39	8.065.000.000	92,56	7.875.932.199	92,56	34.040.716.861	RSUD
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Rasio	0	-	74,12	125.309.800	74,86	129.069.094	75,5	132.941.167	75,5	387.320.061	DP3AKB
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Persen	80	263.639.300	80	290.003.230	80	319.003.553	80	350.903.908	80	1.223.549.991	DINKES
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Cakupan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit	Persen	59,28	250.000.000	63,93	275.000.000	69,13	305.000.000	70,39	358.250.000	70,39	1.188.250.000	RSUD
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	Persen	80	147.018.000	80	161.719.800	80	177.891.780	80	195.680.958	80	682.310.538	DINKES
			Tujuan 2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,93	638.247.600	70,22	517.685.878	70,39	658.991.691	70,46	651.580.259	70,46	2.466.505.428	
			Sasaran 1. Meningkatkan Derajat Kehidupan dan Peran Perempuan, Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	85,07	638.247.600	85,08	517.685.878	85,09	658.991.691	86	651.580.259	86	2.466.505.428	
				Predikat Kota layak Anak Subulussalam	Predikat	Pratama		Pratama		Madya		Madya		Madya		
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase capaian peningkatan keluarga sejahtera	Persen	100	56.215.300	100	63.217.000	100	135.490.586	100	112.374.120	100	367.297.006	DP3AKB
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase gampong menuju layak anak	Persen	25	222.344.200	50	64.160.000	75	76.384.800	100	78.676.344	100	441.565.344	DP3AKB
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Persen	10	56.078.750	11	61.800.000	13	63.654.000	15	65.563.620	15	247.096.370	DP3AKB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya data gender dan anak	Persen	100	87.230.900	100	33.568.378	100	59.673.590	100	62.063.798	100	242.536.666	DP3AKB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	80.466.250	100	80.255.000	100	82.062.650	100	83.924.530	100	326.708.430	DP3AKB
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Capaian penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persen	0	-	100	42.075.500	100	43.337.765	100	44.637.898	100	130.051.163	DP3AKB
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Capaian penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	135.912.200	100	172.610.000	100	198.388.300	100	204.339.949	100	711.250.449	DP3AKB



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/ TUJUAN/ SASA RAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,83	546.645.383	69,12	823.548.862	72,57	960.688.711	76,2	1.098.360.013	76,2	3.429.242.969	
			Sasaran 1. Meningkatnya Pemantauan Terhadap Kualitas Lingkungan	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks > 70)	Indeks	67,25	414.145.383	69,5	574.548.862	71,25	651.788.711	72,9	728.570.013	72,9	2.369.052.969	
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Prosentase cakupan Pengelolaan Kawasan Tahura	Persen	37,12	220.000.000	37,12	300.000.000	38,23	350.000.000	39,34	400.000.000	39,34	1.270.000.000	DLHK
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	0,35	105.000.000	0,4	175.000.000	0,7	200.000.000	100	225.000.000	100	705.000.000	DLHK
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks > 70)	Indeks	65,82	89.145.383	67,25	99.548.862	69,5	101.788.711	71,25	103.570.013	71,25	394.052.969	DLHK
			Sasaran 2. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan Yang Sudah Dinilai/Diperiksa (> 80%)	Persen	50	82.500.000	60	99.000.000	70	108.900.000	80	119.790.000	80	410.190.000	
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persen	40	82.500.000	60	99.000.000	70	108.900.000	80	119.790.000	80	410.190.000	DLHK
			Sasaran 3.Meningkatkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim /Proklim (> 30 Kampung)	Kampung	20	50.000.000	25	150.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	35	650.000.000	
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim /Proklim (> 30 Kampung)	Kampung	15	50.000.000	25	150.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	35	650.000.000	DLHK
			MISI .3 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR BERBASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
			Tujuan 1. Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persen	54,97	107.848.904.558	55,93	105.918.149.005	56,63	108.727.906.156	57,33	111.721.284.371	57,33	434.216.244.091	
			Sasaran 1. Meningkatnya Insfrastruktur Jalan yang Baik dan Terintegrasi	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	35	41.582.284.784	35,42	42.021.406.939	35,84	42.732.333.390	36,26	43.270.240.033	36,26	169.606.265.147	
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	35	41.582. 284.784	35,42	42.021.406.939	35,84	42.732.333.390	36,26	43.270.240.033	36,26	169.606.265.147	DPUPR



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sasaran 2. Meningkatkan Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	Persen	91,07	8.021.424.474	91,8	7.734.554.926	92,53	7.988.614.846	93,27	8.285.844.127	93,27	32.030.438.373	
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Persentase Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	Persen	91,07	8.021.424.474	91,8	7.734.554.926	92,53	7.988.614.846	93,27	8.285.844.127	93,27	32.030.438.373	DPUPR
			Sasaran 3. Meningkatkan Akses Sanitasi Layak	Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	47,75	21.579.702.094	50,39	20.807.948.972	51,82	21.491.435.729	53,23	22.291.059.207	53,23	86.170.146.002	
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	78,18	7.710.717.816	79,74	7.434.960.044	81,33	7.679.179.056	82,96	7.964.895.280	82,96	30.789.752.196	DPUPR
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	14,3	10.656.746.534	14,58	10.213.113.158	14,87	10.511.726.195	15,17	10.869.574.872	15,17	42.251.160.759	DPUPR
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	50,78	2.862.237.744	56,85	2.759.875.770	59,25	2.850.530.478	61,57	2.956.589.055	61,57	11.429.233.047	DLHK
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	50,78	350.000.000	56,85	400.000.000	59,25	450.000.000	61,57	500.000.000	61,57	1.700.000.000	DPUPR
			Sasaran 4. Meningkatkan Layanan Sistem Irigasi	Persentase Layanan Sistem Irigasi	Persen	9,58	8.029.949.426	9,68	7.742.775.000	9,68	7.997.104.929	9,68	8.294.650.097	9,68	32.064.479.452	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Persentase Layanan Sistem Irigasi	Persen	9,58	8.029.949.426	9,68	7.742.775.000	9,78	7.997.104.929	9,88	8.294.650.097	9,88	32.064.479.452	DPUPR
			Sasaran 5. Meningkatkan Akses Rumah Layak Huni	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	91,45	28.635.543.780	92,37	27.611.463.168	93,29	28.518.417.262	94,22	29.579.490.907	94,22	114.344.915.117	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	92,65	8.777.651.125	93,26	8.336.924.516	93,94	8.486.484.099	94,75	8.891.722.300	94,75	34.492.782.040	DPUPR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	79,55	9.382.857.812	80,12	8.836.570.559	81,26	9.343.252.508	83,41	9.502.045.248	83,41	37.064.726.127	DPUPR
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatkan dan pembinaan SDM di Bidang Jasa Konstruksi	Persen	55	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	70	400.000.000	DPUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	96,42	9.425.034.843	97,86	9.087.968.093	98,65	9.488.680.655	99,05	9.735.723.359	99,05	37.737.406.950	DPUPR
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	97,16	750.000.000	98,22	850.000.000	99,32	900.000.000	99,65	950.000.000	99,65	3.450.000.000	DPUPR
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Dokumen	1	200.000.000	1	400.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	4	1.200.000.000	DPUPR
			Tujuan 2. Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Rata-rata Persentase Infrastruk Pariwisata dan Budaya Yang Dikembangkan	Persen	34,52	2.112.109.655	41,01	1.042.632.950	41,17	1.039.056.312	41,47	1.058.637.156	41,47	5.252.436.073	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			Sasaran 1. Meningkatkan Promosi dan Daya Tarik Wisatawan	Persentase Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	2,37	1.191.991.051	2,85	542.632.950	3,17	639.056.312	3,77	658.637.156	3,77	3.032.317.469	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,3	91.491.050	2,3	115.491.050	2,3	156.197.280	2,3	171.817.258	2,3	534.996.638	DISPORAPAR
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah	Produk	0	-	1	42.000.000	2	46.640.000	3	51.304.000	3	139.944.000	DISPORAPAR
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat	Persen	0	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	150.000.000	DISPORAPAR
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Kota Yang di Intervensi Pengembangannya	Destinasi	5	1.100.500.001	5	335.141.900	5	386.219.032	5	385.515.898	20	2.207.376.831	DISPORAPAR
			Sasaran 2. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Benda/Situs Cagar Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Persen	66,67	920.118.604	79,17	500.000.000	79,17	400.000.000	79,17	400.000.000	79,17	2.220.118.604	
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang dikembangkan dan Dikelola	Angka	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000	6	200.000.000	DISDIKBUD
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya Daerah Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Angka	8	820.118.604	9	400.000.000	10	300.000.000	11	300.000.000	11	1.820.118.604	DISDIKBUD
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	Angka	7	50.000.000	8	50.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	DISDIKBUD
			MISI.4 MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG MEMILIKI NILAI EKONOMIS DAN PROSPEK PASAR YANG BAIK													
			Tujuan 1. Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kota Subulussalam	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	22	63.279.044.386	22,5	46.230.510.471	23,5	48.023.945.502	24,75	49.882.400.668	24,75	207.415.901.027	
			Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Proporsi PDRB sektor jasa perusahaan	Persen	0,33	996.479.200	0,33	150.000.000	0,34	173.500.000	0,35	190.500.000	0,35	1.510.479.200	
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Indeks	78	456.944.850	80	70.000.000	85	82.000.000	87	87.000.000	87	695.944.850	DPMP2TSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Penanaman Modal Tingkat Nasional	Persen	70	34.916.300	80	21.000.000	80	24.000.000	85	27.500.000	85	107.416.300	DPMP2TSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	Persen	68,5	91.532.250	69	26.000.000	69,5	30.500.000	70	33.000.000	70	181.032.250	DPMP2TSP

VI-31 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VI-31 BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan Yang Menyusun dan Menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persen	50	370.982.000	55	23.000.000	60	25.000.000	65	27.500.000	65	446.482.000	DPMP2TSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Persentase Jumlah Investor	Persen	10	42.103.800	20	10.000.000	25	12.000.000	30	15.500.000	30	79.603.800	DPMP2TSP
			Sasaran 2. Meningkatkan Peran Perdagangan Dalam Stabilitas Perekonomian Daerah	Proporsi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	19,3	4.539.228.125	19,42	1.950.000.000	19,63	2.095.860.000	20.13	2.252.630.328	20.13	10.837.718.453	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya persentase jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	Persen	40	78.386.900	45	200.000.000	47	214.960.000	50	231.039.008	50	724.385.908	DISPERINDAGKOP & UKM
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkeroperasian	Meningkatnya persentase koperasi aktif	Persen	0	-	0	200.000.000	0	214.960.000	0	231.039.008	0	645.999.008	DISPERINDAGKOP & UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM	Unit	2500	3.914.649.125	2600	1.000.000.000	2700	1.074.800.000	2.850	1.155.195.040	2850	7.144.644.165	DISPERINDAGKOP & UKM
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana perdagangan	Persen	54	405.905.750	58	350.000.000	60	376.180.000	64	404.318.264	64	1.536.404.014	DISPERINDAGKOP & UKM
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan pengawasan perdagangan	Persen	100	140.286.350	100	200.000.000	100	214.960.000	100	231.039.008	100	786.285.358	DISPERINDAGKOP & UKM
			Sasaran 3. Meningkatkan Produk-Produk UKM dan UMKM Unggulan Daerah	Proporsi PDRB sektor industri pengolahan	Persen	14,65	196.146.550	15,23	575.000.000	15,75	618.010.000	16,15		16,15	2.053.393.698	
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Perindustrian Tingkat Nasional	Persen	100	49.999.850	100	75.000.000	100	80.610.000	100	86.639.628	100	292.249.478	DISPERINDAGKOP & UKM
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya jumlah IKM	Unit	1000	146.146.700	1100	500.000.000	1200	537.400.000	1.300	577.597.520	1.300	1.761.144.220	DISPERINDAGKOP & UKM
			Sasaran 4. Meningkatkan Komoditas Pertanian Yang Mendukung Kesejahteraan Rakyat	Proporsi PDRB sektor pertanian, perkebunan, perikanan	Persen	21,7	57.547.190.511	21,94	43.555.510.471	22,27	45.136.575.502	23	46.775.033.192	23	193.014.309.676	
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Produksi Perikanan	Persen	25	199.499.750	25	230.000.000	26	250.000.000	26	275.000.000	26	954.499.750	DISTANBUNKAN
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	35	362.042.280	38	381.042.200	45	581.042.200	45	581.042.200	45	1.905.168.880	DISTANBUNKAN
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135	231.600.000	37	242.600.000	137	242.600.000	142	282.600.000	142	999.400.000	DISTANBUNKAN
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah penyakit hewan ternak yang ditangani	Persen	100	49.999.180	100	49.999.180	100	49.999.180	100	51.000.000	100	200.997.540	DISTANBUNKAN



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Ton	50.000	46.004.141.331	42.000	33.683.494.091	45.000	34.744.559.122	46.000	35.617.015.992	46.000	150.049.210.536	DISTANBUNKAN
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Populasi Peternakan	Ekor	159.080	2.966.199.120	165.000	3.108.000.000	170.000	3.308.000.000	175.000	3.508.000.000	175.000	12.890.199.120	DISTANBUNKAN
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	cakupan desa yang mendapatkan akses tenaga penyuluh	Persen	100	1.299.997.450	100	1.310.150.000	100	1.310.150.000	100	1.410.150.000	100	5.330.447.450	DISTANBUNKAN
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Produksi Peternakan	Ton	15.899	6.433.711.400	15.960	4.550.225.000	16.020	4.650.225.000	16.230	5.050.225.000	16.230	20.684.386.400	DISTANBUNKAN
			Tujuan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	17,10	4.054.799.923	16,70	3.201.116.446	16,30	3.329.898.454	15,90	3.194.207.585	15,90	13.780.022.408	
			Sasaran 1. Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	14.360	1.348.562.450	14.260	1.685.566.964	14.160	1.715.403.400	14.060	1.474.903.812	14.060	6.224.436.626	
				Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	65,83		69,12		72,57		76,20		76,20		
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	Persen	100	63.204.850	100	75.845.820	100	91.014.984	100	109.217.981	100	339.283.635	DINSOS
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Lokasi	1	13.966.000	1	100.594.928	1	100.000.000	1		1	314.560.928	DINSOS
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	62.455.200	100	69.600.000	100	83.520.000	100	100.224.000	100	315.799.200	DINSOS
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlanter, serta gelandangan dan pengemis diluar panti	Persen	100	1.208.936.400	100	1.439.526.216	100	1.440.868.416	100	1.165.461.831	100	5.254.792.863	DINSOS
			Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ketersediaan Pangan	Pola Pangan Harapan	Angka	79,7	1.609.879.187	80,95	396.167.674	81,6	471.606.227	82,3	552.414.281	82,3	3.030.067.369	
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Indeks Pemanfaatan Pangan	Indeks	33	19.880.000	40	20.307.420	47	20.744.030	52	21.190.026	52	82.121.476	DINAS PANGAN
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	75	12.320.000	80	12.584.880	85	12.855.455	90	13.131.847	90	50.892.182	DINAS PANGAN
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Produksi Pangan Utama Lokal	Ton	7000	350.000.000	3500	50.000.000	4000	51.075.000	4.500	52.173.113	4.500	503.248.113	DINAS PANGAN



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Orang/ Kg /Hari	85	1.227.679.187	70	313.275.374	75	386.931.742	80	465.919.295	80	2.393.805.598	DINAS PANGAN
			Sasaran 3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,16	1.096.358.286	6,96	1.119.381.808	6,81	1.142.888.827	6,76	1.166.889.492	6,76	4.525.518.413	
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Dapat Ditangani	Persen	100	79.575.850	100	81.246.942	100	82.953.128	100	84.695.144	100	328.471.064	DISNAKERTRANS
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Besarannya Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Orang	176	979.999.936	185	1.000.579.934	185	1.021.592.113	190	1.043.045.547	190	4.045.217.530	DISNAKERTRANS
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Mandiri dan Memiliki Keterampilan Kerja	Persen	10	36.782.500	15	37.554.932	20	38.343.586	25	39.148.801	25	151.829.819	DISNAKERTRANS
MISI 5. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BARU, PROFESIONAL DAN TRANSPARAN																
			TUJUAN 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kota Yang Baik, Bersih, Profesional dan Transparan	Indeks Reformasi Birokrasi *)		62,43	396.851.897.497	62,96	411.091.637.824	63,81	417.328.205.481	64,22	426.610.369.453		1.651.882.110.254	
			Sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks E-Government/Indeks SPBE	Indeks	2,26	396.851.897.497	2,28	411.091.637.824	2,31	417.328.205.481	2,45	426.610.369.453	2, 45	1.651.882.110.254	
				Nilai AKIP	Nilai	CC		CC		B		BB		BB		
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah /Inovasi Pelayanan Publik	Angka & Katagori	85,6		86,4		86,8		87,0		87,0		
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pemerintah Kampung yang Lengkap	Persen	100	462.635.850	100	314.143.340	100	387.813.597	100	425.267.869	100	1.589.860.656	DPMK
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Qanun Yang Disahkan	Persen	75	2.542.102.700	80	1.729.723.633	85	1.826.588.156	90	2.078.886.053	90	8.177.300.542	SEKWAN
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase data PNS Pemerintah Kota Subulussalam terupdate dalam database	Persen	97	515.883.650	98	400.500.250	98	401.590.000	98	675.450.250	98	1.993.424.150	BKPSDM
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase SKPK yang memiliki unit organisasi KORPRI aktif (Sekretariat KORPRI)	Persen	25	136.256.400	30	115.623.412	35	118.086.191	40	120.601.427	40	490.567.430	Sekretariat KORPRI
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Penganggaran Daerah	Persen	75	803.121.621	77	850.000.000	80	1.180.000.000	80	1.500.000.000	80	4.333.121.621	BAPPEDA
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	92,13	81.041.750	93,5	102.061.881	94,5	105.986.852	94,5	106.940.803	94,5	396.031.286	5 Kecamatan



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang di bina	Persen	66,82	239.000.100	68,14	267.680.100	70,83	299.801.700	72,41	335.777.000	72,41	1.142.258.900	KESBANGPOL
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampong Aktif	Persen	100	279.913.450	100	220.697.450	100	222.904.425	100	225.133.469	100	948.648.794	DPMK
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Penanggalan)	Persen	93,5	150.421.750	95,5	195.924.037	97,5	201.703.173	98,5	205.014.166	98,5	753.063.126	5 Kecamatan
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	60	1.394.681.475	60	1.095.417.770	60	1.103.824.266	60	1.410.009.589	60	5.003.933.100	DINSOS
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kampong yang menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong (LPPK)	Persen	100	130.359.300	100	162.750.377	100	165.142.628	100	166.536.056	100	624.788.361	5 Kecamatan
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan Ipoleksosbudhankam	Persen	3,62	440.210.400	3,71	493.035.000	3,86	456.296.000	3,94	506.296.600	3,94	1.895.838.000	KESBANGPOL
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual	Dokumen	15	2.671.192.880	10	2.689.891.230	25	2.708.720.469	30	2.727.681.512	30	10.797.486.091	SETDAKO
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Mendapat Penataan	Persen	0	-	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	DPMK
2	13	04	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	100	53.927.500	100	159.000.000	100	172.000.000	100	180.000.000	100	564.927.500	DISDUKCAPIL
2	14	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Kepemilikan Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	1.173.402.300	100	205.000.000	100	328.300.000	100	388.300.000	100	2.095.002.300	DISDUKCAPIL
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	0	-	75	330.078.513	80	620.000.000	85	560.000.000	85	1.510.078.513	BAPPEDA
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi keterwakilan perempuan dalam Pembangunan	Persen	10	849.998.990	12	300.000.000	14	755.876.422		600.481.766	17	2.506.357.178	SETDAKO



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	99,5	846.824.870	100	852.752.644	100	858.721.913	100	864.732.966	100	3.423.032.393	BPKD
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) Yang Dapat Diakses Pada Sistem Informasi Kependudukan	Persen	100	59.341.150	100	136.000.000	100	99.700.000	100	125.250.000	100	420.291.150	DISDUKCAPIL
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Membuka/ Menggarap Tanah	Persen	92	34.590.000	93	35.814.485	94	37.082.318	95	38.395.032	95	145.881.835	DINAS PERTANAHAN
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan APBD	Persen	96,3	108.134.473.737	97,8	112.206.000.219	98,4	112.403.151.838	99,1	112.216.304.467	99,1	444.959.930.261	BPKD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	2,15	499.693.360	2,34	503.191.214	2,52	506.713.552	2,86	510.260.547	2,86	2.019.858.673	BPKD
2	10	16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persen	95	35.000.000	96	36.238.999	97	37.521.860	98	38.850.134	98	147.610.993	DINAS PERTANAHAN
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Persen	100	2.235.261.250	100	887.721.746	98	899.302.265	98	1.276.040.793	98	5.298.326.054	BKPSDM
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/ sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	16,83	68.275.500	16,96	76.468.500	17,34	85.644.700	17,52	95.922.000	17,52	326.310.700	KESBANGPOL
2	10	12	Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Persentase Aset/ Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikasi	Persen	100	35.000.000	100	36.238.999	100	37.521.860	100	38.850.134	100	147.610.993	DINAS PERTANAHAN
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	8,14	684.537.195	8,00	553.444.753	7,5	565.067.093	7	576.933.502	7	2.379.982.543	SATPOL PP & WH
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Persen	100	135.030.000	10	192.032.300	100	242.031.000	100	215.000.000	100	784.093.300	KESBANGPOL
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik	Persen	14,63	94.529.250	14,63	105.872.700	14,63	106.660.000	14,63	119.459.200	14,63	426.521.150	KESBANGPOL
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80	262.369.285.819		275.749.819.111		279.398.565.572		286.711.590.208	0	1.104.229.260.709	SEMUA SKPK
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	75	193.099.300	80	262.043.181		267.896.335		272.848. 816	0	995.887.632	5 Kecamatan



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	75	1.692.773.695	76	1.747.002.225	77	1.867.578.275	78	2.867.567.925	78	8.174.922.120	INSPEKTORAT
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	83	90.001.050	85	95.000.000	87	95.000.000	90	100.000.000	90	380.001.050	BAPPEDA
7	01	02	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		95	199.879.700	96	255.839.219	97	265.803.597	98	271.772.859	98	993.295.375	5 KECAMATAN
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persen	90	25.000.000	96	25.885.000	100	26.801.328	100	27.750.096	100	105.436.424	DINAS PERTANAHAN
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persen	3,12	6.324.797.800	3,45	6.375.396.182	3,86	6.426.399.352	4,2	6.477.810.547	4,2	25.604.403.881	SETDAKO
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	68	803.128.350	70	850.000.000	73	1.560.000.000	75	980.000.000	75	4.193.128.350	BAPPEDA
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persen	75	307.225.355	76	315.225.355	77	322.085.555	78	406.053.437	78	1.350.589.702	INSPEKTORAT
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persen	95	60.000.000	96	62.123.999	98	64.323.189	100	66.600.230	100	253.047.418	DINAS PERTANAHAN
			Tujuan 2. Meningkatkan Layanan Kinerja Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	33,15	901.987.219	33,45	1.042.103.923	33,82	1.230.824.239	34,16	1.423.389.632	34,16	4.598.305.013	
			Sasaran 1. Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Layanan Angkutan Jalan	Persen	56,11		56,67		57,23		57,81		57,81	-	
				Persen	10,2	901.987.219	10,3	1.042.103.923	10,41	1.230.824.239	10,51	1.423.389.632	10,51	4.598.305.013	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	56,11	676.987.219	56,67	772.103.923	57,23	893.324.239	57,81	1.018.389.632	57,81	3.360.805.013	DISHUB
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	10,2	225.000.000	10,3	270.000.000	10,41	337.500.000	10,51	405.000.000	10,51	1.237.500.000	DISHUB
			Tujuan 3. Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,5	5.193.545.475	0,55	5.996.514.203	0,6	6.886.561.181	0,65	7.841.263.223	0,65	25.917.884.082	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sasaran 1. Meningkatkan Sarana Prasarana Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Kasus Bencana Alam Dan Kebakaran	Persen	26,25	125.000.000	27,56	150.000.000	28,94	174.600.000	30,39	199.218.600	30,39	648.818.600	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Kasus Bencana Alam	Persen	12,25	125.000.000	22,25	150.000.000	28,65	174.600.000	32,75	199.218.600	32,75	648.818.600	BPBD
			Sasaran 2. Meningkatkan Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	Persentase Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	Persen	75	5.068.545.475	80	5.846.514.203	80	6.711.961.181	90	7.642.044.623	90	25.269.065.482	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (> 90%)	Persen	80,65	1.240.035.225	85,5	1.424.180.455	88,75	1.612.884.366	90,2	1.797.559.626	90,2	6.074.659.672	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (>80%)	Persen	65,5	953.510.250	72,55	1.116.083.748	78,75	1.296.889.315	82,25	1.471.969.372	82,25	4.838.452.685	BPBD
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Tersedia (100%)	Persen	85	2.875.000.000	90	3.306.250.000	95,5	3.802.187.500	100	4.372.515.625	100	14.355.953.125	BPBD
			Tujuan 4. Meningkatkan Akses Informasi dan Telekomunikasi Yang Cepat, Aman dan Transparan.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)	Indeks	52,02	543.945.095	52,54	549.384.546	53,06	554.878.392	53,59	560.427.176	53,59	2.208.635.209	
			Sasaran 1. Meningkatnya Layanan Informasi dan Telekomunikasi	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Indeks	52,02	543.945.095	52,54	549.384.546	53,06	554.878.392	53,59	560.427.176	53,59	2.208.635.209	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Pengolaan Aplikasi Informatika	Indeks	52,02	27.197.255	52,54	27.469.227	53,06	27.743.920	53,59	28.021.359	53,59	110.431.761	DISKOMINFO
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Indeks	52,02	516.747.840	52,54	521.915.319	53,06	527.134.472	53,59	532.405.817	53,59	2.098.203.448	DISKOMINFO
			MISI 6: MEWUJUDKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM MELALUI PENGATURAN SISTEM SOSIAL YANG BERBASIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN													
			Tujuan 1. Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya Subulussalam Yang Sejalan Dengan Nilai-Nilai Keislaman	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	73,61	10.708. 178.290	74,86	10.551.941.973	76,12	11.006.514.702	77,86	11.827.026.940	77,86	44.093.661.904	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sasaran 1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Syariat Islam	Indeks Melek Al-Qur'an	Indeks	78,52		79,83		81,14		82,36		82,36		
				Persentase Desa Dengan Warga Hafiz Al-Qur'an (30 Juz)	Indeks	36,59		48,78		60,98		67,07		67,07		
				Persentase Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Yang Ditangani	Indeks	76,57	10.050.488.840	77,69	10.243.008.162	78,81	10.697.580.891	79,93	11.443.132.821	79,93	42.434.210.713	
				Persentase Mesjid yang Aktif Shalat Jamaah 5 waktu	Indeks	68,00		70,00		73,00		76,00		76,00		
9	01	03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Ijtihat, Ijma, Qiyas, dan Fatwa yang Diterapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam	Persen	93,5	700.000.000	93,5	200.000.000	93,5	300.000.000	93,5	300.000.000	93,5	1.500.000.000	Sekretariat MPU
9	01	02	Program Syariat Islam Aceh	Penurunan pelanggaran qanun syariat dan gangguan tranribun	Kasus	3	9.350.488.840	10	10.043.008.162	10	10.397.580.891	8	11.143.132.821	8	40.934.210.713	DSI
			Sasaran 2. Meningkatnya Pembinaan Adat Istiadat yang Bernilai Syariat	Persentase Kampong Dengan Lembaga Adat Aktif		42,68	657.689.450	48,78	308.933.811	54,88	308.933.811	60,98	383.894.119	60,98	1.659.451.191	
2	22	07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase Perangkat Adat Aktif Menerapkan Hukum Adat Yang Bersendikan Islam	Persen	100	657.689.450	100	308.933.811	100	308.933.811	100	383.894.119	100	1.659.451.191	Sekretariat MAA
			[TUtujuan 2. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim, Fakir Miskin, Kaum Dhuafa	Rasio Penyaluran ZIS	Rasio	95,96	5.299.729.800	96,72	3.331.435.958	97,88	3.328.055.851	98,63	3.311.390.186	98,63	15.270.611.795	
			Sasaran 1. Penguatan Tataanan Ekonomi Berbasis Syariat	Persentase Penyaluran ZIS Terhadap Golongan Penerima ZIS	Persen	70,43	5.299.729.800	72,5	3.331.435.958	73,68	3.328.055.851	75,14	3.311.390.186	75,14	15.270.611.795	
9	01	04	Program Baitul Mal	Persentase Tingkat Penerimaan ZIS	Persen	75	5.299.729.800	75	3.331.435.958	75	3.328.055.851	75	3.311.390.186	75	15.270.611.795	Sekretariat BAITUL MAL
						701.246.088.402		694.785.170.014		710.307.815.047		729.343.010.679		2.835.682.084.142		



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB VII

**KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN & PROGRAM
PERANGKAT
KOTA SUBULUSSALAM**



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM

Indikasi rencana program prioritas RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPK dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Khusus tahun 2020, indikasi program dan pagu indikatif yang termuat merupakan indikasi program dan pagu indikatif pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semarang (PPAS) Tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021 yang termuat pada bab ini merupakan target kinerja dan anggaran pada APBK TA 2021. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah termasuk dalam penjabarannya dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBK Kota Subulussalam, maupun sumber-sumber lain sebagai mana disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana tabel 7.1



Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2019-2024

NO	URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2		3	4	5	6	7
I	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46
	I.a	Pendapatan	728.509.321.002,00	672.102.174.459,00	690.952.623.531,37	706.252.980.868,41	725.052.996.118,58
	I.b	Penerimaan Pembiayaan	3.423.860.766,06	29.133.923.943,00	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
II	BELANJA DAERAH		731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46
	II.a Total Belanja Prioritas I		647.238.798.265,28	606.655.820.311,65	601.814.989.463,54	616.972.905.408,97	634.636.157.650,99
	II.a.1	Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	456.490.837.360,06	466.314.558.020,49	473.425.111.083,23	483.962.093.198,29	501.129.604.302,69
	II.a.2	Belanja Prioritas I	190.747.960.905,22	138.341.262.291,16	127.389.878.380,31	132.010.812.210,67	132.506.553.348,30
		- Belanja Urusan Pendidikan 20%	55.088.468.881,60	46.984.308.076,30	44.272.011.786,14	45.269.144.369,73	45.642.681.275,35
		- Belanja Urusan Kesehatan 10%	27.544.234.440,80	23.492.154.038,15	22.136.005.893,07	22.634.572.184,87	22.821.340.637,68
		- Belanja Program Prioritas Pencapaian Visi Misi	108.115.257.582,82	67.864.800.176,71	60.981.860.701,11	64.107.095.656,08	64.042.531.435,27
	II.a.3	Pengeluaran Pembiayaan	0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		- Penyertaan Modal Daerah	0	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	II.b Total Belanja Prioritas II		70.547.583.502,78	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35
	II.b.1	Belanja Program Prioritas SKPK (Urusan Pelayanan)	70.547.583.502,78	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35
	II.c Total Belanja Prioritas III		14.146.800.000,00	22.269.005.000,00	20.658.907.460,02	21.023.636.547,63	22.395.579.938,12
	II.c.1	belanja subsidi	0	0	0	0	0
	II.c.2	belanja hibah	8.750.300.000,00	10.155.500.000,00	9.263.034.353,39	9.371.707.364,38	10.481.531.089,95
	II.c.3	belanja bantuan sosial	3.396.500.000,00	9.068.505.000,00	9.249.474.606,62	9.434.055.613,20	9.622.320.088,24
	II.c.4	belanja bagi hasil (Diluar bagihasil Wajib Ke Pemerintah Desa)	0	0	0	0	0
	II.c.5	belanja bantuan Keuangan (diluar bantuan keuangan wajib ke pemerintah desa)	0	0	0	0	0
	II.c.6	belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	3.045.000.000,00	2.146.398.500,00	2.217.873.570,05	2.291.728.759,93
III	TOTAL BELANJA PRIORITAS (Prioritas I+II+III)		731.933.181.768,06	701.236.098.402,00	694.785.170.013,91	710.307.815.046,94	729.343.010.679,46



Selanjutnya Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Subulussalam tahun 2019-2024 maupun untuk pemenuhan layanan SKPK yang disajikan berdasarkan misi pembangunan adalah sebagaimana tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020

KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	TARGET	RP	(8)
1				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					459,763,384,743.63	
1	1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan					95,261,931,659.38	
1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	5,912,277,215.30	DISDIK
1	1	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	1,855,790,437.98	DISDIK
1	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	101,814,485.13	DISDIK
1	1	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	100	19,344,752.17	DISDIK
1	1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	174,051,862.33	DISDIK
1	1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	36	38	8,697,563,309.43	DISDIK
1	1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI Dan SMP/MTs	Persen	100	100	52,113,182,964.22	DISDIK
1	1	1	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Karya Budaya Daerah Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Angka		6	1,146,770,484.17	DISDIK
1	1	1	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Melek Huruf	Persen	95	97.5	1,500,083,716.65	DISDIK
1	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)	Persen	75	79.6	789,936,167.41	DISDIK
1	1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persen	60	65	1,246,643,706.45	DISDIK
1	1	1	27	Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi untuk anak Daerah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi	Persen	85	90	832,503,106.74	DISDIK
1	1	1	29	Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase Realisasi Dana Bos Terhadap Jumlah Siswa	Persen	100	100	20,871,969,451.40	DISDIK
1	2			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan					152,224,947,308.29	
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	80	80	3,293,657,868.12	DINKES
1	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	80	80	210,925,675.03	DINKES
1	2	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	80	80	62,456,398.99	DINKES
1	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	80,942,515.68	DINKES
1	2	1	15	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persen	80	80	5,273,662,826.41	DINKES



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	1	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persen	80	80	19,422,952,486.68	DINKES
1	2	1	19	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Promkes Yang Dijalankan	Persen	80	80	344,132,959.74	DINKES
1	2	1	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Pelayanan Kehatan Gizi Pada Anak Balita	Persen	80	80	1,272,681,064.11	DINKES
1	2	1	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persen	80	80	5,284,806,421.81	DINKES
1	2	1	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Dokumen Profil Dinkes	Persen	80	80	373,058,454.96	DINKES
1	2	1	25	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar	Persen	70	80	9,305,946,703.83	DINKES
1	2	1	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persen	78	80	15,272,172.77	DINKES
1	2	1	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Persentase Jumlah Ibu Melahirkan	Persen	80	80	1,470,459,095.29	DINKES
1	2	1	33	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Tenaga Kesehatan	Persen	80	80	839,969,502.31	DINKES
1	2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm. Perkantoran	Persen	100	100	22,362,672,660.15	RSUD
1	2	2	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Pencegahan Penyakit Menular	Persen	100	100	4,004,916,892.15	RSUD
1	2	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan Kesiadaan Sarana Dan Prasarana RSUD	Persen	73	76.6	19,214,650,618.45	RSUD
1	2	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	Persen	37	40.92	59,391,782,991.80	RSUD
1	3			Urutan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					185,225,438,568.16	
1	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm. Perkantoran	Persen	85.5	87.5	3,153,533,986.06	PUPR
1	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	85.5	87.5	215,233,771.70	PUPR
1	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	85.5	87.5	124,722,744.28	PUPR
1	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	85.5	87.5	79,160,762.19	PUPR
1	3	1	15	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	34.16	35.21	114,990,936,732.06	PUPR
1	3	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	85.5	87.5	22,059,805.11	PUPR
1	3	1	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Terpenuhinya Penambahan Jumlah Saluran dan Berfungsi dengan Baik	Persen	13.74	14.02	19,201,969,364.42	PUPR



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3	1	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terpenuhinya Peningkatan Pengamanan Tebing dan Sungai	Persen	9.58	9.58	5,561,208,992.22	PUPR
1	3	1	18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Terbangun	Persen	34.16	35.21	417,812,211.00	PUPR
1	3	1	23	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinarmagaan	Persentase Panjang Jalan Yang Direhap	Persen	34.16	35.21	85,000,000.00	PUPR
1	3	1	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku	Persen	89.63	90.35	9,029,648,483.08	PUPR
1	3	1	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Luas Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persen	54.00	54.38	24,009,227,460.95	PUPR
1	3	1	32	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni	Persen	89.65	90.55	8,034,624,255.09	PUPR
1	3	1	33	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terpenuhinya Peningkatan Air Bersih dan Sanitasi Umum Masyarakat	Persen	75.14	76.64	300,300,000.00	PUPR
1	5			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					9,879,972,779.86	
1	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	4,625,670,826.25	SATPOL PP
1	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	92	98	66,871,753.83	SATPOL PP
1	5	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	82.5	84.35	37,671,359.50	SATPOL PP
1	5	1	3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Pembangunan	Persen	11	13	7,636,086.38	SATPOL PP
1	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	90	95	87,136,230.19	SATPOL PP
1	5	1	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Percentage Penyelesaian Kasus Pelanggaran Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	100	100	71,344,803.55	SATPOL PP
1	5	1	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan	Persen	100	100	159,675,657.03	SATPOL PP
1	5	1	23	Program Pengawasan Syariat Islam	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Persen	100	100	19,242,089.24	SATPOL PP
1	5	1	24	Program Pengamanan Penegakan Perda	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100	100	56,452,738.19	SATPOL PP
1	5	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	837,821,216.68	KESBANGPOL
1	5	2	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	96	98	213,876,598.19	KESBANGPOL
1	5	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	92	94	35,041,151.97	KESBANGPOL
1	5	2	15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	2,802,794,963.14	KESBANGPOL
1	5	2	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	12.76	13.12	84,845,404.27	KESBANGPOL



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	5	2	18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen	85,75	86,53	69,132,035.40	KESBANGPOL
1	5	2	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat (Pekat) Yang Di Tangani	Persen	100	100	503,086,582.37	KESBANGPOL
1	5	2	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Pendidikan Politik	Persen	12,86	14,63	171,553,165.17	KESBANGPOL
1	5	2	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	95	96	30,120,118.52	KESBANGPOL
1	6			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial					17,171,094,427.95	
1	6	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	93.5	93.5	1,377,575,437.41	DINAS SOSIAL
1	6	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	267,772,095.89	DINAS SOSIAL
1	6	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	55,149,512.78	DINAS SOSIAL
1	6	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	62,327,433.98	DINAS SOSIAL
1	6	1	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan PMKS Yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial Melalui KUBEAtau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis	Persen	70	80	5,411,009,718.40	DINAS SOSIAL
1	6	1	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pmks Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persen	70	80	999,032,151.29	DINAS SOSIAL
1	6	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Porsentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembagunan Pembangunan	Persen	100	100	19,599,288.39	DINAS SOSIAL
1	6	1	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lansia Tidak Potensial Yang Menerima Jaminan Sosial Dalam 1 (Satu) Tahun	Persen	30	40	26,196,018.57	DINAS SOSIAL
1	6	1	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	55	60	243,709,939.24	DINAS SOSIAL
1	6	1	22	Program Evaluasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Porsentase Meningkatnya Kualitas Layanan Sosial	Dok	1	1	8,866,344.75	DINAS SOSIAL
1	6	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	80	85	792,267,637.67	BPBD
1	6	2	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	80	85	290,077,952.67	BPBD
1	6	2	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	80	85	25,453,621.28	BPBD
1	6	2	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	80	85	55,047,698.29	BPBD
1	6	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	45,612,889.34	DINAS SOSIAL
1	6	2	24	Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana dan Kebakaran (> 90%)	Persen	75.5	76.8	4,242,270,213.70	BPBD



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	6	2	26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Jumlah kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (>80%)	Persen	60	60	3,249,126,474.31	BPBD
2				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					61,915,940,150.70	
2	1			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja					10,137,654,412.05	
2	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,123,433,869.41	DISNAKERTRANS
2	1	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	55,547,607.41	DISNAKERTRANS
2	1	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	50,907,242.56	DISNAKERTRANS
2	1	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42,762,083.75	DISNAKERTRANS
2	1	1	15	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	orang	134	134	509,726,018.64	DISNAKERTRANS
2	1	1	17	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang dapat ditangani	Persen	100	100	143,812,960.24	DISNAKERTRANS
2	1	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	7,636,086.38	DISNAKERTRANS
2	1	1	20	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Satuan Kawasan Permukiman (SKP) Transmigrasi	Persen	6.5	6.7	8,203,828,543.63	DISNAKERTRANS
2	2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6,345,503,286.42	
2	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	776,681,285.76	DP3AKB
2	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	217,788,310.70	DP3AKB
2	2	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	56,337,348.44	DP3AKB
2	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42,592,392.95	DP3AKB
2	2	1	15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Persentase Gampong Menuju Layak Anak	Persen	95	100	21,890,114.30	DP3AKB
2	2	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	6,796,116.88	DP3AKB
2	2	1	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Persen	100	100	219,298,558.90	DP3AKB
2	2	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Kali	1	1	23,332,486.18	DP3AKB
2	2	1	18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Ketersediaan Tenaga Pendukung KB	Persen	100	100	150,956,943.28	DP3AKB



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	2	1	20	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	15,357,018.17	DP3AKB
2	2	1	25	Program Keluarga Sejahtera	Rasio Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif	Rasio	70,24	72.68	4,791,946,256.01	DP3AKB
2	2	1	25	Program keluarga sejahtera	Terlaksananya HARGANAS	Kali	1	1	22,526,454.83	DP3AKB
2	3			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan					1,390,269,158.35	
2	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	672,018,873.01	DINAS PANGAN
2	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	190,308,241.79	DINAS PANGAN
2	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	22,059,805.11	DINAS PANGAN
2	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	35,635,069.80	DINAS PANGAN
2	3	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	9,332,994.47	DINAS PANGAN
2	3	1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Produksi Pangan Utama Lokal	Ton	4500	5000	452,429,633.75	DINAS PANGAN
2	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	8,484,540.43	DINAS PANGAN
2	4			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian					13,964,216,889.00	
2	4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	70	75	833,475,944.14	PERTANAHAN
2	4	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	50	55	65,687,311.99	PERTANAHAN
2	4	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	50	55	50,567,860.95	PERTANAHAN
2	4	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	50	55	53,978,646.20	PERTANAHAN
2	4	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	50	55	332,371,689.79	PERTANAHAN
2	4	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	25	30	10,266,293.92	PERTANAHAN
2	4	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	12,617,869,142.01	PERTANAHAN
2	5			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					1,851,250,970.96	
2	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	75	75	924,935,193.61	DLHK
2	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	172,962,107.96	DLHK
2	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	50	55	31,299,469.64	DLHK



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline Tahun 2019)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	5	1	16	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Industri (Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL)	Persen	62.69	62.69	313,042,359.50	DLHK
2	5	1	16	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Persentase Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	20.49	20.49	127,268,106.41	DLHK
2	5	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Pembangunan	Persen	50	50	3,775,620.49	DLHK
2	5	1	19	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Dan Perlindungan Hutan	Persentase Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	62.69	62.69	148,446,725.50	DLHK
2	5	1	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kampung Iklim / Proklamasi Yang Dibina	Kampung	10	15	116,000,000.00	DLHK
2	5	1	25	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	50	50	13,521,387.85	DLHK
2	6			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil					2,325,572,653.81	
2	6	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm. Perkantoran	Persen	100	100	1,056,931,927.85	DISDUKCAPIL
2	6	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	99,226,700.30	DISDUKCAPIL
2	6	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	36,016,874.11	DISDUKCAPIL
2	6	1	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Administrasi Kependudukan	Persen	90	95	1,122,791,476.01	DISDUKCAPIL
2	6	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	10,605,675.53	DISDUKCAPIL
2	7			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa					2,419,458,335.91	
2	7	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm. Perkantoran	Persen	100	100	1,130,700,764.60	DPMK
2	7	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	374,202,171.01	DPMK
2	7	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	49,549,716.10	DPMK
2	7	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	42,027,322.55	DPMK
2	7	1	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Pemerintahan Kampung Yang Aktif Dalam TTG	Persen	3.12	3.66	142,540,279.18	DPMK
2	7	1	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Bumdes Yang Aktif	Persen	75	82.6	79,754,680.02	DPMK
2	7	1	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Jumlah Lembaga Perempuan Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan	Persen	100	100	101,814,485.13	DPMK
2	7	1	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rasio Jumlah Aparatur Kampung Yang Mendapat Pelatihan	Rasio	30	40	54,087,248.32	DPMK

KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	7	1	21	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Persentase Peringatan Hari Besar	Persen	100	100	3,393,816.17	DPMK
2	7	1	23	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Laporan Pemerintah Kampung Yang Lengkap	Persen	100	100	154,271,004.78	DPMK
2	7	1	24	Program Pembangunan Infrastruktur	Persentase Peningkatan Jumlah Kantor Pemerintahan Kampung	Persen	50	57.31	287,116,848.06	DPMK
2	9			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan					2,988,592,399.01	
2	9	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	78.5	80	1,443,422,682.99	DISHUB
2	9	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78.5	80	178,599,576.00	DISHUB
2	9	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	78.5	80	179,448,030.04	DISHUB
2	9	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	78.5	80	64,211,001.95	DISHUB
2	9	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	78.5	80	32,241,253.62	DISHUB
2	9	1	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	Persen	55	55.55	1,020,850,571.23	DISHUB
2	9	1	20	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesejahteraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	78.5	80	24,605,167.24	DISHUB
2	9	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	78.5	80	45,214,115.94	DISHUB
2	10			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika					3,113,287,568.54	
2	10	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	50	52	1,236,958,705.36	DISKOMINFO
2	10	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	50	53	702,215,674.80	DISKOMINFO
2	10	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	30	50	45,816,518.31	DISKOMINFO
2	10	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	30	56	91,633,036.62	DISKOMINFO
2	10	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	30	50	50,149,997.33	DISKOMINFO
2	10	1	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Akses dan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Persen	50	51.5	913,885,970.06	DISKOMINFO
2	10	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	30	30	31,392,799.58	DISKOMINFO
2	10	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	30	30	41,234,866.48	DISKOMINFO
2	12			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal					1,102,036,028.15	
2	12	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	764,550,422.45	DPMP2TSP



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	12	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	53,939,052.24	DPMP2TSP
2	12	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	51,925,387.42	DPMP2TSP
2	12	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	100	7,636,086.38	DPMP2TSP
2	12	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	46,911,024.02	DPMP2TSP
2	12	1	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	Persen	63	68	28,423,210.43	DPMP2TSP
2	12	1	18	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan	Indeks	80	85	127,422,525.05	DPMP2TSP
2	12	1	18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Realisasi Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Penanaman Modal	Persen	70	75	7,483,364.66	DPMP2TSP
2	12	1	19	Program Pengembangan Data/Informasi	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Penanaman Modal Tingkat Nasional	Persen	55	60	13,744,955.49	DPMP2TSP
2	13			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga					14,872,272,106.40	
2	13	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,877,846,000.82	DISPORAPAR
2	13	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	509,666,343.47	DISPORAPAR
2	13	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	27,998,983.41	DISPORAPAR
2	13	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	33,041,685.17	DISPORAPAR
2	13	1	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Rata-Rata Lama Tinggal Wisman	Hari	2	2.1	62,337,615.43	DISPORAPAR
2	13	1	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	11,878,356.60	DISPORAPAR
2	13	1	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	orang	156	156	366,583,053.71	DISPORAPAR
2	13	1	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Unggulan Kota Yang Diintervensi Peningkatannya	Destinasi	6	8	2,969,252,306.55	DISPORAPAR
2	13	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	16,969,080.85	DISPORAPAR
2	13	1	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	70	75	131,849,758.24	DISPORAPAR
2	13	1	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olahraga	Angka	10	12	191,869,397.23	DISPORAPAR
2	13	1	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	92.5	92.5	138,414,247.17	DISPORAPAR
2	13	1	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Porsentase Sarana dan Prasarana Olah Raga yang memenuhi standar	Persen	55	60	8,526,929,191.38	DISPORAPAR

KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	TARGET	RP	(8)
2	13	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	92.5	92.5	7,636,086.38	DISPORAPAR
2	17			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan					1,405,826,342.10	
2	17	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	846,979,360.04	ARPUS
2	17	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	338,702,853.86	ARPUS
2	17	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	64,058,280.23	ARPUS
2	17	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	12,726,810.64	ARPUS
2	17	1	18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Pelayanan Informasi Berkualitas	Persen	100	100	80,942,515.68	ARPUS
2	17	1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Porsentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persen	75	79	59,871,159.53	ARPUS
2	17	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	2,545,362.13	ARPUS
3				URUSAN PILIHAN					79,069,914,452.94	
3	3			Urusan Pilihan Pertanian					72,255,845,328.34	
3	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,953,071,463.47	DISTANBUNKAN
3	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	251,142,396.65	DISTANBUNKAN
3	3	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	99,269,123.00	DISTANBUNKAN
3	3	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	100	100	19,090,215.96	DISTANBUNKAN
3	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	83,742,414.02	DISTANBUNKAN
3	3	1	17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	Ton	3700	40000	53,983,160,823.08	DISTANBUNKAN
3	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	8,484,540.43	DISTANBUNKAN
3	3	1	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Dan Perkebunan	Ton/Ha	6	7	2,107,390,151.36	DISTANBUNKAN
3	3	1	20	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	13,151,037.66	DISTANBUNKAN
3	3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Ton	125	128.6	2,749,566,350.32	DISTANBUNKAN
3	3	1	21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Jumlah Penyakit Hewan Ternak Yang Ditangani	Persen	100	100	82,300,042.15	DISTANBUNKAN
3	3	1	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Ton	16230	16480	6,229,943,499.63	DISTANBUNKAN
3	3	1	24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Meningkatnya Populasi Peternakan	Ekor	146920	155810	4,675,533,270.63	DISTANBUNKAN



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	MONDORI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	7			Urusan Pilihan Perindustrian					6,814,069,124.60	
3	7	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,062,331,066.85	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	86,861,896.15	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	56,220,686.01	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	26,386,920.73	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya Jumlah UMKM	unit	2145	2257	1,240,125,882.49	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan Pengawasan Perdagangan	Persen	100	100	161,800,185.95	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah IKM	unit	900	950	1,475,037,353.30	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Jumlah Koperasi	unit	70	80	42,422,702.14	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Sarana Perdagangan	Persen	45	50	1,272,122,017.74	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal	Persen	100	100	1,322,994,388.84	DISPERINDAGKO P DAN UKM
3	7	1	22	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Persentase Koperasi Aktif	Persen	60	65	67,766,024.39	DISPERINDAGKO P DAN UKM
4				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG					154,213,579,079.17	
4	1			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan					126,413,079,515.28	
4	1	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	15,664,481,709.82	SETDAKO
4	1	3	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	16,962,735,222.90	SETDAKO
4	1	3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	77	77	296,380,269.30	SETDAKO
4	1	3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	75	75	938,249,327.90	SETDAKO
4	1	3	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	701,620,586.10	SETDAKO
4	1	3	15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase Jumlah Pertumbuhan Penanaman Modal Kota Subulussalam	Persen			91,319,108.62	SETDAKO
4	1	3	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Tingkat Perbandingan Harga Bahan Pokok Antar Wilayah Kota Subulussalam	Rasio			192,574,886.76	SETDAKO
4	1	3	15	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penyusunan Perencanaan Dan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Persen	98.52	98.52	144,487,056.98	SETDAKO



KODE				VISI/MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	3	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Lembaga Dan Organisasi Perempuan Yang Aktif	Persen	7	10	270,487,148.83	SETDAKO
4	1	3	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	2,352,072,588.62	SETDAKO
4	1	3	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Sumberdaya Listrik	Persen	92	96	9,507,691,157.54	SETDAKO
4	1	3	17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintahan	Persen	96.83	96.83	455,136,202.15	SETDAKO
4	1	3	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	80	85	598,075,254.73	SETDAKO
4	1	3	18	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Realisasi Rencana Penerbitan Peraturan Perundang-Undangan	Persen			927,398,024.92	SETDAKO
4	1	3	19	Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Rumah Tangga Yang Mengakses Jaringan Internet	Persen	73	75	233,436,857.69	SETDAKO
4	1	3	19	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Dalam Pemerintahan Kota Subulussalam	Satuan			124,808,794.49	SETDAKO
4	1	3	21	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	100	100	1,774,900,102.22	SETDAKO
4	1	3	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	92	92	1,096,409,052.09	SETDAKO
4	1	3	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	75.5	75.5	1,353,811,756.71	SETDAKO
4	1	3	22	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Tingkat Ketersediaan Dokumen-Dokumen Prosedur Dalam Pengawasan	Persen	85	85	499,705,493.01	SETDAKO
4	1	3	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam	Persen			180,975,247.32	SETDAKO
4	1	3	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Indeks Pembangunan Syariah Islam Kota Subulussalam	Indeks			76,572,977.36	SETDAKO
4	1	3	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Aksesibilitas Informasi Publik	Indeks	100	100	1,013,886,460.45	SETDAKO
4	1	3	27	Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi Untuk Anak Daerah	Persentase Penerima Beasiswa Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi	Persen	60	65	160,103,277.87	SETDAKO
4	1	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	10,118,154,358.85	SETWAN
4	1	4	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	1,234,577,437.64	SETWAN
4	1	4	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	77	77	405,561,032.43	SETWAN
4	1	4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	75	75	618,733,413.76	SETWAN
4	1	4	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	67	67	52,943,532.27	SETWAN



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	4	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Qanun Yang Disahkan	Persen	75	75	3,468,628,181.95	SETWAN
4	1	4	21	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	70	70	14,275,239.27	SETWAN
4	1	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	502,751,443.03	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		98	203,459,279.45	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		94	16,969,080.85	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		96	6,787,632.34	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		16	33,938,161.71	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		84.13	36,271,410.33	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen		84.13	7,763,354.49	KECAMATAN LONGKIB
4	1	5	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen		100	120,650,164.88	KECAMATAN LONGKIB
4	1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	487,436,847.55	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		100	185,938,703.47	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		100	29,695,891.50	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen		100	47,852,808.01	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		100	40,810,639.46	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		100	181,738,855.95	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	6	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen		100	84,845,404.27	KECAMATAN PENANGGALAN
4	1	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	507,120,981.35	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	95	98	388,605,526.84	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	90	94	64,482,507.25	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	92	96	23,425,816.12	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	14	16	18,072,071.11	KECAMATAN RUNDENG



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	7	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	82	84.13	145,679,559.14	KECAMATAN RUNDENG
4	1	7	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84,845,404.27	KECAMATAN RUNDENG
4	1	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	771,889,549.92	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	95	98	243,845,691.88	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	89	94	15,682,283.21	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	90	96	42,253,011.33	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	14	16	22,059,805.11	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	82.5	84.13	228,488,673.71	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	22	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penurunan Penyakit Menular	Persen	82.5	84.13	7,636,086.38	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84,845,404.27	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	8	28	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tingkat Penggunaan Data Statistik	Persen	100	100	16,969,080.85	KECAMATAN SIMPANG KIRI
4	1	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen		100	513,908,613.69	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen		98	154,248,944.97	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen		94	63,634,053.21	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen		16	67,876,323.42	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	20	Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen		84.13	226,138,456.01	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	9	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Partisipasi Masyarakat Dalam Syiar Islam	Persen	100	100	84,845,404.27	KECAMATAN SULTAN DAULAT
4	1	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,031,394,587.91	DSI
4	1	10	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	169,945,344.76	DSI
4	1	10	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	15,272,172.77	DSI
4	1	10	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	12,726,810.64	DSI
4	1	10	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Lembaga Taman Pendidikan Al-Quran (Tpai)/Balai Pengajian Yang Di Bantu Pemerintah	Persen	45.25	45.25	195,611,079.55	DSI
4	1	10	18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Dayah Yang Memenuhi Standarisasi Dayah	Persen	45	50	14,188,475,510.24	DSI



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	10	23	Program Peningkatan Pembinaan Syariah Islam	Penurunan Pelanggaran Qanun Syariah, Dan Gangguan Trantibum	Kasus	2	3	17,539,236,880.80	DSI
4	1	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	97	97	1,411,113,553.04	Sekretariat MPU
4	1	11	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	77,888,081.12	Sekretariat MPU
4	1	11	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	89,087,674.49	Sekretariat MPU
4	1	11	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	20,450,287.79	Sekretariat MPU
4	1	11	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Penguatan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Di Kota Subulussalam	Persen	100	100	5,090,724.26	Sekretariat MPU
4	1	11	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	13,235,883.07	Sekretariat MPU
4	1	11	26	Program Peningkatan Peran Dan Sumber Daya Ulama Dalam Pembangunan	Persentase Ijtihat, Ijma, Qiyas, Dan Fatwa Yang Diterapkan Sesuai Ketentuan Syariah Islam	Persen	100	100	184,059,377.76	Sekretariat MPU
4	1	11	27	Program Silaturahmi Umara Dan Ulama	Persentase Pelaksanaan Silaturahmi Atau Kunjungan Muhibbah Antar Ulama	Persen	100	100	215,795,801.23	Sekretariat MPU
4	1	12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	97.98	97.98	1,053,094,667.18	Sekretariat MPD
4	1	12	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	97.98	97.98	241,470,020.56	Sekretariat MPD
4	1	12	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	36,653,214.65	Sekretariat MPD
4	1	12	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	27,659,601.79	Sekretariat MPD
4	1	12	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase penerapan Kurikulum Baku Pada Jenjang Pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat	Persen	98	100	687,755,574.36	Sekretariat MPD
4	1	12	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	21,211,351.07	Sekretariat MPD
4	1	12	24	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah	Rata-rata sarjana per Kampung	Persen	95	100	104,880,798.04	Sekretariat MPD
4	1	13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	996,954,923.68	Sekretariat MAA
4	1	13	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	126,419,652.37	Sekretariat MAA
4	1	13	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	45,816,518.31	Sekretariat MAA
4	1	13	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	43,271,156.18	Sekretariat MAA
4	1	13	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	100	100	431,863,107.75	Sekretariat MAA
4	1	14	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,300,684,289.79	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	203,374,434.04	Sekretariat BAITUL MAL

KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	1	14	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	100	100	33,938,161.71	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	29,182,576.80	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	14	25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Litbang dan Ekonomi Ummat	Porsentase tingkat penerimaan ZIS	Persen	75	75	8,071,920,257.33	Sekretariat BAITUL MAL
4	1	15	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	348,499,669.31	KORPRI
4	1	15	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	30,544,345.54	KORPRI
4	1	15	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	99	99	25,776,033.82	KORPRI
4	1	15	15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Aparatur Yang Berprestasi	Persen	98	98	89,070,705.41	KORPRI
4	2			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan					5,777,522,350.42	
4	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,211,779,032.92	INSPEKTORAT
4	2	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	98	98	334,715,119.86	INSPEKTORAT
4	2	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	159,169,978.42	INSPEKTORAT
4	2	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	98	98	161,206,268.12	INSPEKTORAT
4	2	1	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase Penggunaan Sarana Dan Prasarana Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persen	100	100	1,527,217.28	INSPEKTORAT
4	2	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	25.5	25.5	31,901,872.01	INSPEKTORAT
4	2	1	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persen	73	74	3,775,111,417.77	INSPEKTORAT
4	2	1	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas Yang Terlatih	Persen		38.6	91,505,768.51	INSPEKTORAT
4	2	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen		74.5	10,605,675.53	INSPEKTORAT
4	3			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan					5,541,516,938.96	
4	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	77	77	2,309,826,195.23	BAPPEDA
4	3	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	78	78	255,384,666.86	BAPPEDA
4	3	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	77	77	210,689,521.42	BAPPEDA
4	3	1	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Data Statistik Perencanaan	Persen	75	75	960,407,553.68	BAPPEDA



KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	3	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	75	75	29,483,777.99	BAPPEDA
4	3	1	18	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	67	67	14,847,945.75	BAPPEDA
4	3	1	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persen	65	67	867,832,733.08	BAPPEDA
4	3	1	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Konsistensi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Terhadap Dokumen Perencanaan	Persen	64.5	67	159,483,906.41	BAPPEDA
4	3	1	23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Persentase Konsistensi Program Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Terhadap Dokumen Perencanaan	Persen	64	67	375,313,645.81	BAPPEDA
4	3	1	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Program Bidang Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persen	64	67	251,341,783.35	BAPPEDA
4	3	1	29	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase Capaian Program Pembangunan Pemerintahan	Persen	65	68	106,905,209.39	BAPPEDA
4	4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan					12,605,640,882.97	
4	4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	99	99	4,294,559,248.52	BPKD
4	4	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	492,069,406.63	BPKD
4	4	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	82.14	82.14	173,933,078.76	BPKD
4	4	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	81.68	81.68	146,154,693.40	BPKD
4	4	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan	Persen	95	98.83	1,194,000,526.91	BPKD
4	4	1	15	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyerapan APBD	Persen	95	95.58	6,059,381,328.78	BPKD
4	4	1	17	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Kampung	Persen	80	95	180,890,401.91	BPKD
4	4	1	18	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	23	23	55,319,203.59	BPKD
4	4	1	22	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintah	Persen	67	67	9,332,994.47	BPKD
4	5			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian					3,875,819,391.56	
4	5	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adm.Perkantoran	Persen	100	100	1,187,207,082.66	BKPSDM
4	5	1	2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persen	98	98	143,412,489.94	BKPSDM
4	5	1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur Yang Disiplin	Persen	97	97	37,355,734.59	BKPSDM
4	5	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur Yang Baik	Persen	98	98	700,313,966.88	BKPSDM

KODE				VISI/MISI/ TUJUAN / SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	STANDAR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD (Baseline) Tahun 2019	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020		SKPK PENANGGUNG JAWAB
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	TARGET	RP	(8)
4	5	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Perencanaan Dan Laporan Capaian Kineja Dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Persen	100	100	69,318,695.29	BKPSDM
4	5	1	15	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Persen	88	98	1,730,997,865.93	BKPSDM
4	5	1	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	100	100	7,213,556.27	BKPSDM
				TOTAL					751,008,987,392	



Tabel 7.2. a
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2020-2024

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				369.630.726.657,03		381.072.423.908,98		388.863.462.284,51		399.201.624.140,35		1.538.768.236.990,87	
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			133.902.547.764,31		137.702.768.767,71		136.997.501.157,42		135.424.746.520,91		544.027.564.210,35	
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	80	76.971.940.293	85	80.494.627.302	90	79.848.146.882	95	78.889.633.721	95	316.204.348.197,22	DISDIKBUD
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	91,5	1.353.380.807	93,5	1.086.073.970	94,5	1.114.939.747	96,5	1.193.104.629	96,5	4.747.499.153,14	Sekretariat MPD
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM)jenjang pendidikan TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs	Persen	95	46.399.368.765,00	95	47.150.000.000,00	95	47.300.000.000,00	95	47.200.000.000,00	95	188.049.368.765,00	DISDIKBUD
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal	Persen	40	374.557.900,00	42	450.000.000,00	45	450.000.000,00	47	450.000.000,00	47	1.724.557.900,00	DISDIKBUD
1	01	04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Kualifikasi Kependidikan	Persen	35	350.000.000,00	40	200.000.000,00	45	175.000.000,00	50	250.000.000,00	50	975.000.000,00	DISDIKBUD
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi B	Persen	95	383.000.000,00	95,2	200.000.000,00	95,4	175.000.000,00	95.55	200.000.000,00	95.55	958.000.000,00	DISDIKBUD
1	01	07	Program Pendidikan Dayah	Jumlah guru dayah, Balai pengajian yang terakreditasi	Persen	56	7.370.300.000,00	59	7.408.067.496,00	61	7.172.614.528,00	64	6.484.495.571,00	64	28.435.477.595,00	DSI
1	01	07	Program Pendidikan Dayah	Persentase Tenaga Pendidik dan Pendidikan Dayah Yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	86,5	29.698.650,00	86,5	25.000.000,00	87,6	26.380.000,00	88,5	26.552.500,00	88,5	107.631.150,00	Sekretariat MPD
1	01	08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Rata-Rata Sarjana per Kampung	Orang	6	670.301.350,00	12	689.000.000,00	16	735.420.000,00	18	730.960.100,00	18	2.825.681.450,00	Sekretariat MPD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				109.268.601.324,19		117.603.557.676,94		122.265.553.598,31		130.154.218.426,25		479.291.931.025,69	
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	80	20.030.926.759	85	24.042.821.492	90	26.112.355.212	95	28.157.595.536	95	98.343.698.998,28	DINKES
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	82.84	51.665.643.320	83.29n	55.271.185.803	84.33	54.838.692.966	85.38	57.523.484.729	85.38	219.299.006.817,41	RSUD



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terlaksana	Persen	80	26.694.137.284,00	80	29.297.130.152,00	80	32.226.843.168,00	80	35.449.527.484,00	80	123.667.638.088,00	DINKES
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan ketersediaan obat	Persen	77,1	10.034.784.662,00	82,66	8.065.000.000,00	89,39	8.065.000.000,00	92,56	7.875.932.199,00	92,56	34.040.716.861,00	RSUD
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Persen	80	263.639.300,00	80	290.003.230,00	80	319.003.553,00	80	350.903.908,00	80	1.223.549.991,00	DINKES
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Cakupan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit	Persen	59,28	250.000.000,00	63,93	275.000.000,00	69,13	305.000.000,00	70,39	358.250.000,00	70,39	1.188.250.000,00	RSUD
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	Persen	80	147.018.000,00	80	161.719.800,00	80	177.891.780,00	80	195.680.958,00	80	682.310.538,00	DINKES
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan UKBM	Persen	80,25	182.452.000,00	80,5	200.697.200,00	80,75	220.766.920,00	90	242.843.612,00	90	846.759.732,00	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100.047.517.274,58		98.395.752.098,39		101.060.625.049,17		103.662.730.779,46		403.166.625.201,60	
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DPUPR)	Persen	100	4.588.501.586	100	4.424.403.379	100	4.569.733.470	100	4.739.757.763	100	18.322.396.198,00	DPUPR
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan Persentase Layanan Sistem Irigasi	Persen	9,58	8.029.949.426,00	9,68	7.742.775.000,00	9,78	7.997.104.929,00	9,88	8.294.650.097,00	9,88	32.064.479.452,00	DPUPR
1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Persentase Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	Persen	91,07	8.021.424.474,00	91,8	7.734.554.926,00	92,53	7.988.614.846,00	93,27	8.285.844.127,00	93,27	32.030.438.373,00	DPUPR
1	03	04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	50,78	350.000.000,00	56,85	400.000.000,00	59,25	450.000.000,00	61,57	500.000.000,00	61,57	1.700.000.000,00	DPUPR
1	03	05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	78,18	7.710.717.816,00	79,74	7.434.960.044,00	81,33	7.679.179.056,00	82,96	7.964.895.280,00	82,96	30.789.752.196,00	DPUPR
1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	14,3	10.656.746.534,00	14,58	10.213.113.158,00	14,87	10.511.726.195,00	15,17	10.869.574.872,00	15,17	42.251.160.759,00	DPUPR
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	96,42	9.425.034.843,00	97,86	9.087.968.093,00	98,65	9.488.680.655,00	99,05	9.735.723.359,00	99,05	37.737.406.950,00	DPUPR
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	79,55	9.382.857.812,00	80,12	8.836.570.559,00	81,26	9.343.252.508,00	83,41	9.502.045.248,00	83,41	37.064.726.127,00	DPUPR



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB						
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP							
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)		(15)
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	35	41.582.284.783,58		35,42	42.021.406.939,39		35,84	42.732.333.390,16		36,26	43.270.240.033,46		36,26	169.606.265.146,60		DPUPR	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatkan dan pembinaan SDM di Bidang Jasa Konstruksi	Persen	55	100.000.000,00		60	100.000.000,00		65	100.000.000,00		70	100.000.000,00		70	400.000.000,00		DPUPR	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Dokumen	1	200.000.000,00		1	400.000.000,00		1	200.000.000,00		1	400.000.000,00		4	1.200.000.000,00		DPUPR	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				9.527.651.125,00			9.186.924.516,00			9.386.484.099,00			9.841.722.300,00			37.942.782.040,00			
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	97,16	750.000.000,00		98,22	850.000.000,00		99,32	900.000.000,00		99,65	950.000.000,00		99,65	3.450.000.000,00		DPUPR	
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin	Persen	92,65	8.777.651.125,00		93,26	8.336.924.516,00		93,94	8.486.484.099,00		94,75	8.891.722.300,00		94,75	34.492.782.040,00		DPUPR	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.781.670.042,75			12.878.918.051,21			13.813.288.203,47			14.759.082.306,27			53.232.958.603,69			
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (BPBD)	Persen	85	1.991.240.376		86,5	2.275.319.302		87,5	2.318.063.419		89	2.321.701.980		89	8.906.325.077,13		BPBD	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (SATPOL PP)	Persen	96	3.912.346.996		98	4.053.639.793		98	4.043.596.511		99	4.019.183.601		99	16.028.766.901,57		SATPOL PP & WH	
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	8,14	684.537.195,00		8,00	553.444.753,00		7,5	565.067.093,00		7	576.933.502,00		7	2.379.982.543,00		SATPOL PP & WH	
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Kasus Bencana Alam	Persen	12,25	125.000.000,00		22,25	150.000.000,00		28,65	174.600.000,00		32,75	199.218.600,00		32,75	648.818.600,00		BPBD	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (> 90%)	Persen	80,65	1.240.035.225,00		85,5	1.424.180.455,00		88,75	1.612.884.366,00		90,2	1.797.559.626,00		90,2	6.074.659.672,00		BPBD	
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit (>80%)	Persen	65,5	953.510.250,00		72,55	1.116.083.748,00		78,75	1.296.889.315,00		82,25	1.471.969.372,00		82,25	4.838.452.685,00		BPBD	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Tersedia (100%)	Persen	85	2.875.000.000,00	90	3.306.250.000,00	95,5	3.802.187.500,00	100	4.372.515.625,00	100	14.355.953.125,00	BPBD
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				5.102.739.126,20		5.304.502.798,73		5.340.010.177,15		5.359.123.807,46		21.106.375.909,53	
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DINSOS)	Persen	93,5	2.359.495.201	94,5	2.523.518.065	95,5	2.520.782.511	96,5	2.474.210.406	96,5	9.878.006.183,53	DINSOS
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	60	1.394.681.475,00	60	1.095.417.770,00	60	1.103.824.266,00	60	1.410.009.589,00	60	5.003.933.100,00	DINSOS
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti	Persen	100	1.208.936.400,00	100	1.439.526.216,00	100	1.440.868.416,00	100	1.165.461.831,00	100	5.254.792.863,00	DINSOS
1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	62.455.200,00	100	69.600.000,00	100	83.520.000,00	100	100.224.000,00	100	315.799.200,00	DINSOS
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	Persen	100	63.204.850,00	100	75.845.820,00	100	91.014.984,00	100	109.217.981,00	100	339.283.635,00	DINSOS
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah lokasi taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Lokasi	1	13.966.000,00	1	100.594.928,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	314.560.928,00	DINSOS
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				57.070.358.705,50		52.556.463.831,40		54.866.700.425,90		57.025.174.758,97		221.518.697.721,77	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.927.048.498,86		4.118.009.806,27		4.180.574.173,65		4.230.836.410,15		16.456.468.888,93	
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DISNAKERTRANS)	Persen	93,5	2.867.472.713	94,8	3.036.182.930	95,2	3.076.028.933	96,63	3.103.095.719	96,63	12.082.780.294,93	DISNAKERTRANS
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	Orang	176	979.999.936,00	185	1.000.579.934,00	185	1.021.592.113,00	190	1.043.045.547,00	190	4.045.217.530,00	DISNAKERTRANS
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Hubungan Industrial Yang Dapat Ditangani	Persen	100	79.575.850,00	100	81.246.942,00	100	82.953.128,00	100	84.695.144,00	100	328.471.064,00	DISNAKERTRANS
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.570.125.284,40		3.011.394.867,90		3.568.527.204,56		3.448.899.831,91		13.598.947.188,76	



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DP3AKB)	Persen	93,5	2.138.093.994	94,5	2.256.925.990	95,5	2.289.149.678	96,5	2.309.211.927	96,5	8.993.381.588,76	DP3AKB
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Persen	10	56.078.750,00	11	61.800.000,00	13	63.654.000,00	15	65.563.620,00	15	247.096.370,00	DP3AKB
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi keterwakilan perempuan dalam Pembangunan	Persen	10	849.998.990,00	12	300.000.000,00	14	755.876.422,00	17	600.481.766,00	17	2.506.357.178,00	SETDAKO
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Capaian penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	135.912.200,00	100	172.610.000,00	100	198.388.300,00	100	204.339.949,00	100	711.250.449,00	DP3AKB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kualitas keluarga	Persen	100	80.466.250,00	100	80.255.000,00	100	82.062.650,00	100	83.924.530,00	100	326.708.430,00	DP3AKB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya data gender dan anak	Persen	100	87.230.900,00	100	33.568.378,00	100	59.673.590,00	100	62.063.798,00	100	242.536.666,00	DP3AKB
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase gampong menuju layak anak	Persen	25	222.344.200,00	50	64.160.000,00	75	76.384.800,00	100	78.676.344,00	100	441.565.344,00	DP3AKB
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Capaian penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persen	0	-	100	42.075.500,00	100	43.337.765,00	100	44.637.898,00	100	130.051.163,00	DP3AKB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.995.920.944,38		1.911.939.707,79		2.007.628.612,54		2.101.584.534,29		9.017.073.799,00	
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DINAS PANGAN)	Persen	93,5	1.386.041.757	100	1.515.772.034	100	1.536.022.386	100	1.549.170.253	100	5.987.006.430,00	DINAS PANGAN
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Produksi Pangan Utama Lokal	Ton	7000	350.000.000,00	3500	50.000.000,00	4000	51.075.000,00	4.500	52.173.113,00	4.500	503.248.113,00	DINAS PANGAN
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Lokal	Orang/ Kg/Hari	85	1.227.679.187,00	70	313.275.374,00	75	386.931.742,00	80	465.919.295,00	80	2.393.805.598,00	DINAS PANGAN
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Indeks Pemanfaatan Pangan	Indeks	33	19.880.000,00	40	20.307.420,00	47	20.744.030,00	52	21.190.026,00	52	82.121.476,00	DINAS PANGAN
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	75	12.320.000,00	80	12.584.880,00	85	12.855.455,00	90	13.131.847,00	90	50.892.182,00	DINAS PANGAN
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.844.428.316,84		2.107.635.526,80		2.158.628.966,55		2.204.016.260,78		8.314.709.070,97	
2	10	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen	100	1.654.838.317	100	1.911.334.045	100	1.955.378.412	100	1.993.570.635	100	7.515.121.407,97	DINAS PERTANAHAN
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian/ Mediasi Sengketa Tanah Garapan	Persen	90	25.000.000,00	96	25.885.000,00	100	26.801.328,00	100	27.750.096,00	100	105.436.424,00	DINAS PERTANAHAN



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, Serta Ganti Rugi Kelebihan Maksimum	Persen	95	60.000.000,00	96	62.123.999,00	98	64.323.189,00	100	66.600.230,00	100	253.047.418,00	DINAS PERTANAHAN
2	10	09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Membuka / Menggarap Tanah	Persen	92	34.590.000,00	93	35.814.485,00	94	37.082.318,00	95	38.395.032,00	95	145.881.835,00	DINAS PERTANAHAN
2	10	12	Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Persentase Aset/ Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikasi	Persen	100	35.000.000,00	100	36.238.999,00	100	37.521.860,00	100	38.850.134,00	100	147.610.993,00	DINAS PERTANAHAN
2	10	16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persen	95	35.000.000,00	96	36.238.999,00	97	37.521.860,00	98	38.850.134,00	98	147.610.993,00	DINAS PERTANAHAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				5.792.733.712,47		6.227.621.126,81		6.675.386.142,01		7.149.338.730,02		25.845.079.711,31	
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DLHK)	Persen	85	2.603.850.585	90	2.944.196.495	95	3.214.166.953	100	3.494.389.662	100	12.256.603.695,31	DLHK
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks > 70)	Indeks	65,82	89.145.383,00	67,25	99.548.862,00	69,5	101.788.711,00	71,25	103.570.013,00	71,25	394.052.969,00	DLHK
2	11	04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	0,35	105.000.000,00	0,4	175.000.000,00	0,7	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	705.000.000,00	DLHK
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Kenaikan Jumlah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang Sudah Dinilai/ Diperiksa (> 80%)	Persen	40	82.500.000,00	60	99.000.000,00	70	108.900.000,00	80	119.790.000,00	80	410.190.000,00	DLHK
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Kampung Iklim /Proklam (> 30 Kampung)	Kampo ng	15	50.000.000,00	25	150.000.000,00	30	200.000.000,00	35	250.000.000,00	35	650.000.000,00	DLHK
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	Persen	50,78	2.862.237.744,00	56,85	2.759.875.770,00	59,25	2.850.530.478,00	61,57	2.956.589.055,00	61,57	11.429.233.047,00	DLHK
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.129.389.786,51		2.308.428.807,32		2.265.486.761,38		2.285.250.390,10		8.988.555.745,32	
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DUKCAPIL)	Persen	95,3	2.070.048.637	95,41	2.172.428.807	95,56	2.165.786.761	95,63	2.160.000.390	95,63	8.568.264.595,32	DISDUKCAPIL
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK, KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian) Yang Dapat Diakses Pada Sistem Informasi	Persen	100	59.341.150,00	100	136.000.000,00	100	99.700.000,00	100	125.250.000,00	100	420.291.150,00	DISDUKCAPIL



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB				
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Kependudukan																
							2.824.850.375,39		2.781.777.970,28		2.897.355.014,83		3.003.182.430,82		11.507.165.791,33					
				2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DPMK)	Persen	93,5	2.028.373.575	94,5	1.987.937.180	95,5	2.014.636.993	96,5	2.072.781.093	96,5	8.103.728.841,33	DPMK
				2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase Desa Yang Mendapat Penataan	Persen	0	-	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	300.000.000,00	DPMK
2	13	04	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen	100	53.927.500,00	100	159.000.000,00	100	172.000.000,00	100	180.000.000,00	100	564.927.500,00	DISDUKCAPIL				
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pemerintah Kampung yang Lengkap	Persen	100	462.635.850,00	100	314.143.340,00	100	387.813.597,00	100	425.267.869,00	100	1.589.860.656,00	DPMK				
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung Aktif	Persen	100	279.913.450,00	100	220.697.450,00	100	222.904.425,00	100	225.133.469,00	100	948.648.794,00	DPMK				
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.541.040.600,00		2.822.722.150,00		2.936.608.630,00		3.037.206.243,00		13.337.577.623,00					
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Rasio Akseptor KB	Rasio	0	-	74,12	125.309.800,00	74,86	129.069.094,00	75,5	132.941.167,00	75,5	387.320.061,00	DP3AKB				
2	14	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Kepemilikan Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	1.173.402.300,00	100	205.000.000,00	100	328.300.000,00	100	388.300.000,00	100	2.095.002.300,00	DISDUKCAPIL				
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	14,89	3.311.423.000,00	15,12	2.429.195.350,00	15,46	2.343.748.950,00	15,8	2.403.590.956,00	15,8	10.487.958.256,00	DP3AKB				
2	14	04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase capaian peningkatan keluarga sejahtera	Persen	100	56.215.300,00	100	63.217.000,00	100	135.490.586,00	100	112.374.120,00	100	367.297.006,00	DP3AKB				
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3.603.748.657,68		3.838.466.139,59		4.085.662.329,39		4.322.783.871,52		15.850.660.998,18					
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DISHUB)	Persen	100	2.701.761.439	100	2.796.362.217	100	2.854.838.090	100	2.899.394.240	100	11.252.355.985,18	DISHUB				
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Konektivitas Layanan Angkutan	Persen	56,11	676.987.219,00	56,67	772.103.923,00	57,23	893.324.239,00	57,81	1.018.389.632,00	57,81	3.360.805.013,00	DISHUB				



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	10,2	225.000.000,00	10,3	270.000.000,00	10,41	337.500.000,00	10,51	405.000.000,00	10,51	1.237.500.000,00	DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.495.309.990,92		2.519.296.024,65		2.585.999.998,72		2.974.989.947,64		10.575.595.961,92	
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.951.364.896	100	1.969.911.479	100	2.031.121.607	100	2.414.562.772	100	8.366.960.752,92	DISKOMINFO
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks	52,02	516.747.840,00	52,54	521.915.319,00	53,06	527.134.472,00	53,59	532.405.817,00	53,59	2.098.203.448,00	DISKOMINFO
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks	52,02	27.197.255,00	52,54	27.469.227,00	53,06	27.743.920,00	53,59	28.021.359,00	53,59	110.431.761,00	DISKOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.251.233.934,52		4.463.534.201,00		4.763.551.854,62		5.063.935.097,85		20.542.255.088,00	
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	94	2.258.197.910	100	3.063.534.201	100	3.258.831.855	100	3.446.662.042	100	12.027.226.007,00	DISPERINDAGKOP & UKM
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persen	0	-	0	200.000.000,00	0	214.960.000,00	0	231.039.008,00	0	645.999.008,00	DISPERINDAGKOP & UKM
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	40	78.386.900,00	45	200.000.000,00	47	214.960.000,00	50	231.039.008,00	50	724.385.908,00	DISPERINDAGKOP & UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Unit	2500	3.914.649.125,00	2600	1.000.000.000,00	2700	1.074.800.000,00	2.850	1.155.195.040,00	2850	7.144.644.165,00	DISPERINDAGKOP & UKM
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.891.526.096,21		1.911.939.707,79		2.007.628.611,56		2.101.584.534,29		8.912.678.949,85	
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	1.895.046.896	100	1.761.939.708	95,2	1.834.128.612	96,63	1.911.084.534	96,63	7.402.199.749,85	DPMP2TSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	68,5	91.532.250,00	69	26.000.000,00	69,5	30.500.000,00	70	33.000.000,00	70	181.032.250,00	DPMP2TSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persen	10	42.103.800,00	20	10.000.000,00	25	12.000.000,00	30	15.500.000,00	30	79.603.800,00	DPMP2TSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks	78	456.944.850,00	80	70.000.000,00	85	82.000.000,00	87	87.000.000,00	87	695.944.850,00	DPMP2TSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	50	370.982.000,00	55	23.000.000,00	60	25.000.000,00	65	27.500.000,00	65	446.482.000,00	DPMP2TSP



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Penanaman Modal Tingkat Nasional	Persen	70	34.916.300,00	80	21.000.000,00	80	24.000.000,00	85	27.500.000,00	85	107.416.300,00	DPMP2TSP
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.767.210.739,77		9.585.004.636,79		9.759.799.057,46		9.985.665.820,92		38.097.680.254,94	
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah (DiSPORAPAR)	Persen	93,5	2.174.870.004	94,5	2.317.772.521	95,5	2.641.456.091	96,5	2.529.143.898	96,5	9.663.242.514,00	DISPORAPAR
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	42	5.292.333.305,77	47	6.036.706.115,79	52	5.426.573.016,46	59	5.626.540.770,92	59	22.382.153.208,94	DISPORAPAR
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	Persen	55,5	1.300.007.430,00	61	1.035.126.000,00	66,5	1.102.969.950,00	72	1.138.421.152,00	72	4.576.524.532,00	DISPORAPAR
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Jumlah Pembinaan Kepramukaan	Persen	49,5	-	54,5	195.400.000,00	59,5	588.800.000,00	64,5	691.560.000,00	64,5	1.475.760.000,00	DISPORAPAR
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				90.001.050,00		95.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		380.001.050,00	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Data Statistik Perencanaan	Persen	83	90.001.050,00	85	95.000.000,00	87	95.000.000,00	90	100.000.000,00	90	380.001.050,00	BAPPEDA
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.616.796.805,43		1.933.697.218,81		1.859.403.594,78		1.880.974.852,51		8.290.872.471,54	
2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (MAA)	Persen	92	1.038.988.751	93,5	1.124.763.408	95	1.150.469.784	96,5	1.097.080.734	96,5	4.411.302.676,54	Sekretariat MAA
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Karya Budaya Daerah Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Angka	8	820.118.604,00	9	400.000.000,00	10	300.000.000,00	11	300.000.000,00	11	1.820.118.604,00	DISDIKBUD
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	Angka	7	50.000.000,00	8	50.000.000,00	9	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	200.000.000,00	DISDIKBUD
2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang dikembangkan dan Dikelola	Angka	3	50.000.000,00	4	50.000.000,00	5	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	200.000.000,00	DISDIKBUD
2	22	07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase Perangkat Adat Aktif Menerapkan Hukum Adat Yang Bersendikan Islam	Persen	100	657.689.450,00	100	308.933.811,00	100	308.933.811,00	100	383.894.119,00	100	1.659.451.191,00	Sekretariat MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				148.422.875,00		152.575.561,00		156.852.828,00		166.258.413,00		624.109.677,00	
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase peningkatan jangkauan kapasitas perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	100	138.422.875,00	100	142.575.561,00	100	146.852.828,00	100	151.258.413,00	100	579.109.677,00	ARPUS



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB						
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP							
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)		(15)
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Prosentase pelestarian koleksi nasional	Persen	20	10.000.000,00		30	10.000.000,00		40	10.000.000,00		50	15.000.000,00		50	45.000.000,00		ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					2.580.571.037,13			2.767.420.378,61			2.862.606.645,84			2.968.667.390,15			11.179.265.451,73		
2	24	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (ARPUS)	Persen	91,5	2.514.962.037		92,5	2.664.843.109		93,5	2.727.252.058		94,5	2.780.452.164		94,5	10.687.509.367,73		ARPUS
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip		Persentase arsip pemerintah daerah yang dikelola dengan baik	Persen	100	65.609.000,00		100	92.577.270,00		100	95.354.588,00		100	98.215.226,00		100	351.756.084,00		ARPUS
2	24	.04	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip		Prosentase arsip/dokumen yang dilestarikan dan diselamatkan	Persen	0	-		100	10.000.000,00		100	40.000.000,00		100	90.000.000,00		100	140.000.000,00		ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					63.363.630.556,90			51.247.505.570,62			52.978.744.806,79			54.523.370.378,85			222.113.251.313,16		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					793.142.030,00			853.642.200,00			1.073.642.200,00			1.138.642.200,00			3.859.068.630,00		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135	231.600.000,00		37	242.600.000,00		137	242.600.000,00		142	282.600.000,00		142	999.400.000,00		DISTANBUNKAN
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Persentase Produksi Perikanan	Persen	25	199.499.750,00		25	230.000.000,00		26	250.000.000,00		26	275.000.000,00		26	954.499.750,00		DISTANBUNKAN
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	35	362.042.280,00		38	381.042.200,00		45	581.042.200,00		45	581.042.200,00		45	1.905.168.880,00		DISTANBUNKAN
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					1.191.991.051,00			542.632.950,00			639.056.312,00			658.637.156,00			3.032.317.469,00		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Jumlah Destinasi Unggulan Kota Yang di Intervensi Pengembangannya	Destinasi	5	1.100.500.001,00		5	335.141.900,00		5	386.219.032,00		5	385.515.898,00		20	2.207.376.831,00		DISPORAPAR
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata		Peningkatan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,3	91.491.050,00		2,3	115.491.050,00		2,3	156.197.280,00		2,3	171.817.258,00		2,3	534.996.638,00		DISPORAPAR
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah	Produk	0	-		1	42.000.000,00		2	46.640.000,00		3	51.304.000,00		3	139.944.000,00		DISPORAPAR
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Peningkatan jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat	Persen	0	-		50	50.000.000,00		50	50.000.000,00		50	50.000.000,00		50	150.000.000,00		DISPORAPAR



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB							
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP								
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)	(14)		(15)
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						60.379.376.325,90			48.388.675.488,62			49.668.552.708,79			50.987.347.801,85			209.423.952.325,16		
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DISTANBUNKAN)	Persen	93,5	3.625.327.845		100	5.686.807.218		100	5.605.619.407		100	5.350.956.810		100	20.268.711.279,16		DISTANBUNKAN		
3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Populasi Peternakan	Ekor	159.080	2.966.199.120,00		165.000	3.108.000.000,00		170.000	3.308.000.000,00		175.000	3.508.000.000,00		175.000	12.890.199.120,00		DISTANBUNKAN		
3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	Ton	50.000	46.004.141.331,00		42.000	33.683.494.091,00		45.000	34.744.559.122,00		46.000	35.617.015.992,00		46.000	150.049.210.536,00		DISTANBUNKAN		
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase jumlah penyakit hewan ternak yang ditangani	Persen	100	49.999.180,00		100	49.999.180,00		100	49.999.180,00		100	51.000.000,00		100	200.997.540,00		DISTANBUNKAN		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Produksi Peternakan	Ton	15.899	6.433.711.400,00		15.960	4.550.225.000,00		16.020	4.650.225.000,00		16.230	5.050.225.000,00		16.230	20.684.386.400,00		DISTANBUNKAN		
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	cakupan desa yang mendapatkan akses tenaga penyuluh	Persen	100	1.299.997.450,00		100	1.310.150.000,00		100	1.310.150.000,00		100	1.410.150.000,00		100	5.330.447.450,00		DISTANBUNKAN		
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						220.000.000,00			300.000.000,00			350.000.000,00			400.000.000,00			1.270.000.000,00		
3	28	04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Prosentase cakupan Pengelolaan Kawasan Tahura	Persen	37,12	220.000.000,00		37,12	300.000.000,00		38,23	350.000.000,00		39,34	400.000.000,00		39,34	1.270.000.000,00		DLHK		
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						546.192.100,00			550.000.000,00			591.140.000,00			635.357.272,00			2.322.689.372,00		
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana perdagangan	Persen	54	405.905.750,00		58	350.000.000,00		60	376.180.000,00		64	404.318.264,00		64	1.536.404.014,00		DISPERINDAGKOP & UKM		
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan pengawasan perdagangan	Persen	100	140.286.350,00		100	200.000.000,00		100	214.960.000,00		100	231.039.008,00		100	786.285.358,00		DISPERINDAGKOP & UKM		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						196.146.550,00			575.000.000,00			618.010.000,00			664.237.148,00			2.053.393.698,00		
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya jumlah IKM	Unit	1000	146.146.700,00		1100	500.000.000,00		1200	537.400.000,00		1.300	577.597.520,00		1.300	1.761.144.220,00		DISPERINDAGKOP & UKM		
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Perindustrian Tingkat Nasional	Persen	100	49.999.850,00		100	75.000.000,00		100	80.610.000,00		100	86.639.628,00		100	292.249.478,00		DISPERINDAGKOP & UKM		
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						36.782.500,00			37.554.932,00			38.343.586,00			39.148.801,00			151.829.819,00		
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Mandiri dan Memiliki Keterampilan Kerja	Persen	10	36.782.500,00		15	37.554.932,00		20	38.343.586,00		25	39.148.801,00		25	151.829.819,00		DISNAKERTRANS		



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					44.106.173.860,12		39.813.167.696,13		39.891.631.027,32		41.454.089.859,09		165.265.062.442,65	
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				27.838.782.364,65		28.447.610.644,28		27.957.249.712,34		27.989.611.669,24		112.233.254.390,51	
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	18.842.791.685	85	19.382.323.232	90	18.822.129.891	95	18.784.119.610	95	75.831.364.418,51	SETDAKO
4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	15	2.671.192.880,00	10	2.689.891.230,00	25	2.708.720.469,00	30	2.727.681.512,00	30	10.797.486.091,00	SETDAKO
4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persen	3,12	6.324.797.800,00	3,45	6.375.396.182,00	3,86	6.426.399.352,00	4,2	6.477.810.547,00	4,2	25.604.403.881,00	SETDAKO
4	02	SEKRETARIAT DPRK				16.267.391.495,47		11.365.557.051,85		11.934.381.314,99		13.464.478.189,84		53.031.808.052,14	
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	95,21	13.725.288.795	95,34	9.635.833.419	95,68	10.107.793.159	96,14	11.385.592.137	96,14	44.854.507.510,14	SEKWAN
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persen	75	2.542.102.700,00	80	1.729.723.633,00	85	1.826.588.156,00	90	2.078.886.053,00	90	8.177.300.542,00	SEKWAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					129.393.546.510,20		132.606.242.378,35		135.442.812.749,59		136.804.770.000,83		532.737.293.125,97	
5	01	PERENCANAAN				5.060.043.583,36		5.316.522.236,66		7.375.838.819,19		7.928.717.259,12		25.681.121.898,33	
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	3.453.793.612	83	3.616.522.237	85	4.635.838.819	90	5.448.717.259	90	17.154.871.927,33	BAPPEDA
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	68	803.128.350,00	70	850.000.000,00	73	1.560.000.000,00	75	980.000.000,00	75	4.193.128.350,00	BAPPEDA
5	01	03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	75	803.121.621,00	77	850.000.000,00	80	1.180.000.000,00	80	1.500.000.000,00	80	4.333.121.621,00	BAPPEDA
5	02	KEUANGAN				118.675.560.273,29		122.861.944.077,05		123.268.587.302,80		123.291.297.980,29		488.097.389.633,43	
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	80	9.194.568.306	83	9.300.000.000	85	9.500.000.000	90	9.700.000.000	90	37.694.568.306,00	BPKD
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	96,3	108.134.473.737,29	97,8	112.206.000.219,05	98,4	112.403.151.837,80	99,1	112.216.304.467,29	99,1	444.959.930.261,43	BPKD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	99,5	846.824.870,00	100	852.752.644,00	100	858.721.913,00	100	864.732.966,00	100	3.423.032.393,00	BPKD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	2,15	499.693.360,00	2,34	503.191.214,00	2,52	506.713.552,00	2,86	510.260.547,00	2,86	2.019.858.673,00	BPKD
5	03	KEPEGAWAIAN				3.422.681.403,54		3.209.975.805,64		3.279.084.362,60		3.748.713.968,42		13.660.455.540,21	
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	96	2.207.295.890	98	2.199.985.075	98	2.258.530.172	99	2.446.623.268	99	9.112.434.403,89	BKPSDM
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	95	563.245.464	97	493.867.069	97	500.878.000	98	506.039.024	98	2.064.029.556,32	Sekretariat KORPRI



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase data PNS Pemerintah Kota Subulussalam terupdate dalam database	Persen	97	515.883.650,00	98	400.500.250,00	98	401.590.000,00	98	675.450.250,00	98	1.993.424.150,00	BKPSDM
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase SKPK yang memiliki unit organisasi KORPRI aktif (Sekretariat KORPRI)	Persen	25	136.256.400,00	30	115.623.412,00	35	118.086.191,00	40	120.601.427,00	40	490.567.430,00	Sekretariat KORPRI
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.235.261.250,00		887.721.746,00		899.302.265,00		1.276.040.793,00		5.298.326.054,00	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Persen	100	2.235.261.250,00	100	887.721.746,00	98	899.302.265,00	98	1.276.040.793,00	98	5.298.326.054,00	BKPSDM
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		330.078.513,00		620.000.000,00		560.000.000,00		-	
5	05	02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persen	0	-	75	330.078.513,00	80	620.000.000,00	85	560.000.000,00	85	1.510.078.513,00	BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				5.071.652.236,11		5.207.612.331,86		5.403.300.938,76		6.560.572.550,29		22.243.138.057,01	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				5.071.652.236,11		5.207.612.331,86		5.403.300.938,76		6.560.572.550,29		22.243.138.057,01	
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (INSPEKTORAT)	Persen	75	3.071.653.186	76	3.145.384.752	77	3.213.637.109	78	3.286.951.188	78	12.717.626.235,01	INSPEKTORAT
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	75	1.692.773.695,00	76	1.747.002.225,00	77	1.867.578.275,00	78	2.867.567.925,00	78	8.174.922.120,00	INSPEKTORAT
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Persen	75	307.225.355,00	76	315.225.355,00	77	322.085.555,00	78	406.053.437,00	78	1.350.589.702,00	INSPEKTORAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN				10.305.838.186,65		10.916.691.527,95		10.929.149.852,47		10.907.930.605,36		43.059.610.172,44	
7	01		KECAMATAN				10.305.838.186,65		10.916.691.527,95		10.929.149.852,47		10.907.930.605,36		43.059.610.172,44	
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Longkib)	Persen	85,5	1.688.478.062	86	1.714.232.830	87	1.710.766.744	88	1.701.429.987	88	6.814.907.624,06	KEC. LONKIB
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Penanggalan)	Persen	85	1.581.565.830	86	1.775.439.405	87	1.772.489.890	88	1.774.773.101	88	6.904.268.226,10	KEC. PENANGGALAN



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Rundeng)	Persen	85	2.162.712.610	86	2.209.173.122	87	2.205.847.119	88	2.195.141.402	88	8.772.874.252,71	KEC. RUNDENG
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Simpang Kiri)	Persen	85,5	2.297.010.028	86	2.375.326.095	87	2.372.709.049	88	2.362.184.393	88	9.407.229.565,74	KEC. SIMPANG KIRI
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Kec. Sultan Daulat)	Persen	85,5	1.821.269.857	86	1.863.901.381	87	1.860.804.465	88	1.851.289.022	88	7.397.264.723,83	KEC.S.DAULAT
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	75	193.099.300,00	80	262.043.181,00	90	267.896.335,00	100	272.848.816,00	100	995.887.632,00	5 Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Penanggalan)	Persen	93,5	150.421.750,00	95,5	195.924.037,00	97,5	201.703.173,00	98,5	205.014.166,00	98,5	753.063.126,00	5 Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	92,13	81.041.750,00	93,5	102.061.881,00	94,5	105.986.852,00	94,5	106.940.803,00	94,5	396.031.286,00	5 Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah		95	199.879.700,00	96	255.839.219,00	97	265.803.597,00	98	271.772.859,00	98	993.295.375,00	5 KECAMATAN
7	01	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kampung yang menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK)	Persen	100	130.359.300,00	100	162.750.377,00	100	165.142.628,00	100	166.536.056,00	100	624.788.361,00	5 Kecamatan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				2.234.741.314,50		2.610.221.182,80		2.661.435.148,60		2.705.258.500,50		10.211.656.146,40	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				2.234.741.314,50		2.610.221.182,80		2.661.435.148,60		2.705.258.500,50		10.211.656.146,40	
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (KESBANGPOL)	Persen	96	1.257.696.065	98	1.475.132.583	98	1.471.001.749	99	1.432.803.700	99	5.636.634.096,40	KESBANGPOL
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisas i ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	16,83	68.275.500,00	16,96	76.468.500,00	17,34	85.644.700,00	17,52	95.922.000,00	17,52	326.310.700,00	KESBANGPOL
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai politik yang melaksanakan pendidikan politik	Persen	14,63	94.529.250,00	14,63	105.872.700,00	14,63	106.660.000,00	14,63	119.459.200,00	14,63	426.521.150,00	KESBANGPOL
8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang di bina	Persen	66,82	239.000.100,00	68,14	267.680.100,00	70,83	299.801.700,00	72,41	335.777.000,00	72,41	1.142.258.900,00	KESBANGPOL



Pemerintah Kota Subulussalam
RPJM Kota Subulussalam 2019-2024



KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN KINERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD		SKPK PENANGGUNGJAW AB
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan Ipoleksosbudhankam	Persen	3,62	440.210.400,00	3,71	493.035.000,00	3,86	456.296.000,00	3,94	506.296.600,00	3,94	1.895.838.000,00	KESBANGPOL
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan potensi konflik sosial	Persen	100	135.030.000,00	10	192.032.300,00	100	242.031.000,00	100	215.000.000,00	100	784.093.300,00	KESBANGPOL
9			UNSUR KEKHUSUSAN				20.069.420.375,00		18.754.841.585,92		19.270.577.813,05		20.160.219.884,77		78.255.059.658,74	
9	01		KEKHUSUSAN ACEH*****				20.069.420.375,00		18.754.841.585,92		19.270.577.813,05		20.160.219.884,77		78.255.059.658,74	
9	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (BAITUL MALL)	Persen	91,32	1.217.801.644	93,5	1.678.870.891	94,63	1.726.251.424	96,12	1.771.529.664	96,12	6.394.453.621,66	Sekretariat BAITUL MAL
9	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (MPU)	Persen	93,5	1.495.463.098	95,50n	1.435.411.471	96,5	1.390.591.091	98,5	1.442.225.700	98,5	5.763.691.359,76	Sektariat MPU
9	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (DSI)	Persen	93,5	2.005.936.994	94,5	2.066.115.104	95,5	2.128.098.557	96,5	2.191.941.514	96,5	8.392.092.169,00	DSI
9	01	02	Program Syariat Islam Aceh	Penurunan pelanggaran qanun syariat dan gangguan trantibun	Kasus	3	9.350.488.839,85	10	10.043.008.161,83	10	10.397.580.890,59	8	11.143.132.821,05	8	40.934.210.713,32	DSI
9	01	03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Ijtihat, Ijma, Qiyas, dan Fatwa yang Diterapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam	Persen	93,5	700.000.000,00	93,5	200.000.000,00	93,5	300.000.000,00	93,5	300.000.000,00	93,5	1.500.000.000,00	Sektariat MPU
9	01	04	Program Baitul Mal	Persentase Tingkat Penerimaan ZIS	Persen	75	5.299.729.800,00	75	3.331.435.958,00	75	3.328.055.851,00	75	3.311.390.186,00	75	15.270.611.795,00	Sekretariat BAITUL MAL
JUMLAH TOTAL							701.246.088.402,00		694.785.170.014,00		710.307.815.047,00		729.343.010.679,00		2.834.172.005.629,00	



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan IKU ditujukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPK. Penetapan IKU ditujukan untuk : 1) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, penetapan IKU dan IKD dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.



Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7
2	Jumlah Mustahiq Zakat	Orang	1.520	1.520	1.520	1.566	1.613
3	Jumlah Dayah Dan Balai Pengajian Yang Di Bantu Pemerintah	Unit	50	50	50	50	50
4	Jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang di bantu pemerintah	Unit	82	82	82	82	82
5	Jumlah Hafiz Al-Qur'an	Orang	0	20	20	20	20
6	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	Persen	1,48	2,16	3,25	4,33	5,42
7	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Persen	100	100	100	100	100
8	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	100	100	100	100
9	Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	4
10	Persentase Kesesuaian Target Perencanaan Dan Realisasi Capaian Pembangunan	Persen	86,24	88,63	90,36	92,48	93,50
11	Ketersediaan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Resntra SKPD)	Ada/Tidak	tidak	ada	ada	ada	ada
12	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	tidak	ada	ada	ada	ada
13	Opini audit BPK Atas Laporan Keuangan	TW/TMP/WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	T	T	T	ST	ST
15	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	7,25	7,5	7,8	8	8,5
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,14	74,68	78,83	80,53	82,36
17	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	Persen	68,53	69,82	70,43	72,5	73,68
18	Indek Pembangunan Kependudukan	Persen	0,411	0,418	0,421	0,426	0,430
19	Jumlah Angka Kriminalitas	Kasus	7	6	5	4	3
20	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan	Persen	96,28	97,13	97,84	98,22	98,5
21	Rata-Rata Pendapatan Perkapita Pertahun	Juta Rupiah	21,21	21,86	22,34	23,14	23,92
22	Persentase Penegakan Qanun dan Perbup	Persen	96,28	97,13	97,84	98,22	98,50
23	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	62,91	64,91	67,41	69,91	72,91
24	Persentase Fakir Miskin Dan Anak Yatim Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	2,5	5	7,5	10	12,5
25	Persentase Desa Terlayani PAUD	Persen	100	100	100	100	100
26	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	96	98	100	100	100
27	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	Persen	98	100	100	100	100
28	Angka Melek Huruf	Persen	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86
29	Persentase Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan	Persen	95	96	98	98	100
30	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,88	8,12	8,54	8,92	9,24
31	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0	0	0	0	0



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0	0	0	0	0
33	APM SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
34	APM SMP/MTs	Persen	93,50	95,00	96,00	97,00	98,00
35	APK SD/MI	Persen	105,00	100	100	100	100
36	APK SMP/MTs	Persen	101,00	100	100	100	100
37	Persentase Dayah Yang Menerapkan Standar Manajemen Dayah	Unit	12	14	16	18	20
38	Cakupan Balita Stunting	Persen	80	80	85	85	90
39	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,66	65	65,1	65,22	65,5
40	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Minimal B	Persen	69,12	70,46	71,12	71,98	72,58
41	Produktivitas Padi Atau Bahan Utama Lainnya	Ton/Ha	3,88	3,90	3,92	3,94	3,96
42	Produksi Komoditi Unggulan (Padi)	Ton	3,200	3.500	3.800	4.000	4.500
43	Produksi Perikanan	Ton	188,50	190,00	192,00	195,00	200,00
44	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan Dan Perikanan	Industri	0	0	0	0	1
45	Cakupan Bina Kelompok Petani Dan Nelayan	Persen	14,7	20	20	20	20
46	Persentase Aparatur Kampung Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100
47	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	75	80	80	85	85
48	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,60	5,95	5,30	4,65	4,00
49	Jumlah Destinasi Wisata Islami yang dikembangkan	Lokasi	1	1	1	1	1



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,42	4,43	4,46	4,47	4,47	4,48	4,48
2	Pengendalian Laju inflasi	Persen	2,51	3	3	3	3	3	3
3	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	20,71	21,21	21,86	22,34	23,14	23,92	23,92
4	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
5	Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	Persen	17,95	17,5	17,1	16,7	16,3	15,9	15,9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,96	72,42	73,76	74,54	75,14	75,96	75,96
7	Angka Melek Huruf	Persen	96,78	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86	98,86
8	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Indeks	83,10	84,5	85,6	86,4	86,8	87	87
9	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	T	T	T	T	ST	ST	ST
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,61	7,88	8,12	8,54	8,92	9,24	9,24
11	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,84	63,86	63,9	63,93	63,95	64	64



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Cakupan Balita Stunting	Persen	80	80	80	85	85	90	90
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,25	64,63	64,9	65,23	65,25	65,5	65,5
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,25	6,83	6,27	5,7	5,12	4,52	4,52
15	Jumlah Pengangguran	Orang	2.289	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700
16	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	64,25	64,63	64,9	65,23	65,25	65,5	65,5
17	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	7,91	8,5	9,63	10,72	11,43	12,52	12,52
18	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP/WTP/ Disklaimer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Daerah	Persen	15,4	22	28,6	35,2	41,8	46,2	46,2
20	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	21,54	20,89	20,27	19,66	19,07	18,5	18,5
21	Produksi Komoditi Unggulan (Padi)	Ton	3.109,50	3,2	3.500	3.800	4.000	4.500	4.500
22	Produksi Sektor Perkebunan (Kakao)	Ton	21,54	24	24,5	25	25,5	26	26
23	Produksi Sektor Perkebunan (Sawit)	Ton	11.878	13.692	15.838	17.620	19.241	20.693	20.693
26	Produksi Daging Pertahun	Ton	55,48	57	58,6	60,2	61,8	63	63



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Populasi Ternak Ruminansia Besar (Sapi Potong Dan Kerbau)	ekor	1.472	1.578	1.691	1.782	1.963	2.126	2.126
28	Populasi Ternak Ruminansia Kecil (Kambing dan domba)	ekor	7.208	7.566	8.121	8.635	8.912	9.521	9.521
29	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	19,26	19,45	19,58	19,64	19,83	20,53	20,53
30	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	13,99	14,5	15	15,5	16	16,5	16,5
31	Pertumbuhan Industri	Persen	3,59	3,59	5,26	10	9,09	8,33	8,33
32	Nilai AKIP	Nilai	37,64/C	C	C	CC	CC	B	B
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rupiah	906.431	933.624	961.633	990.482	1.020.196	1.050.802	1.050.802
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	Persen	45,92	46,62	47,6	48,21	48,73	49,52	49,52
3	Rata-Rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Persen	54,08	53,38	52,4	51,79	51,27	50,48	50,48
4	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	58,14	61,25	62,43	62,96	63,81	64,22	64,22



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	ASPEK PELAYANAN UMUM								
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar								
3.1.1	Pendidikan								
1	APK PAUD	Persen	36,2	38,32	40,67	43,28	44,82	46,5	46,5
2	Persentase Desa terlayani PAUD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	86,23	89,13	92,7	94,68	98,14	100	100
6	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	93,42	96,84	99,21	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	APK SD/MI	Persen	110,7	105	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	APM SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0	0	0	0	0	0	0
13	APK SMP/MTs	Persen	102,34	101	100	100	100	100	100
14	APM SMP/MTs	Persen	92,49	93,5	95	96	97	98	98
15	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0	0	0	0	0	0	0
17	Angka Melek Huruf	Persen	96,78	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86	98,86
18	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SD yang memenuhi Standar Kompetensi	Persen	70	75	80	82	85	90	90
19	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMP yang memenuhi Standar Kompetensi	Persen	80	85	87	89	95	96	96
20	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan dasar	Rasio	01:25	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20
21	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio	01:20	01:25	01:25	01:25	01:25	01:25	01:25



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	Persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Sekolah yang menjalankan MBS	Persen	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	Persen	80	85	87	90	95	98	98
25	Persentase Asrama Mahasiswa yang memenuhi Sarana dan Prasarana	Persen	80	82	84	87	90	92	92
3.1.2	Kesehatan								
1	Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan yang sesuai standard	Unit	6	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan Manajemen Puskesmas (MP)	Unit	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase Prevalensi Gizi Buruk	Persen	0	80	80	85	90	95	95
4	Penanganan Stunting pada Balita	Persen	80	80	80	85	85	90	90
5	Cakupan Balita Stunting	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kenyamanan Lingkungan Rumah Sakit	Nyaman/ Tidak Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	94	100	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Persen	21,53	20	19	18	17	16	16
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	/1000 Penduduk	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
11	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Persen	68,96	70	73	75	78	80	80
12	Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1.000 Kelahiran Hidup	11,39	10	8	7	6	5	5
14	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	1,97	1,5	0,68	0,36	0,08	0,04	0,04
15	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	5	0	0	0	0	0	0
16	Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	63,86	0	0	0	0	0	0



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (> 50%)	Persen	34,16	34,58	35,00	35,42	35,84	36,26	36,26
2	Proporsi Jumlah Jembatan Kota Dalam Kondisi Baik	Unit	30	35	40	45	50	55	55
3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	14,30	12,20	14,30	14,58	14,87	15,17	15,17
4	Proporsi Panjang Jalan Kota Yang Direhab	Km	10,63	10,63	12,42	13,98	15,66	16,31	16,31
5	Persentase Embung Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	89,63	90,35	91,07	91,80	92,53	93,27	93,27
7	Persentase IPLT Terpelihara Dan Berfungsi Dengan Baik	Persen	2	2	20	30	40	60	60
8	Persentase Penanganan Kawasan Bencana Banjir	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	78,5	80,07	84,07	88,28	92,69	97,33	97,33
10	Persentase Areal Wilayah Kumuh	Persen	0,18	0,14	0,11	0,09	0,04	0	0



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25
3.1.6	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Di Bina	Persen	64,13	65,16	66,82	68,14	70,83	72,41	72,41
3	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Ipoleksosbudhankam	Persen	3,50	3,60	3,62	3,71	3,86	3,94	3,94
4	Persentase Tingkat Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persen	8,18	8,16	8,14	8,00	7,50	7,00	7,00
5	Persentase Jumlah Masyarakat Yang Memperoleh Pendidikan /Pembinaan/Sosialisasi Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persen	13	13,12	16,83	16,96	17,34	17,52	17,52
6	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Pendidikan Politik	Persen	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63
7	Resiko Pengurangan Bencana Daerah	Rendah/ Sedang/ Tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pemulihan Kawasan Terdampak Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1.7	Sosial								
1	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Persen	32	35	38	41	44	47	47
2	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	61,91	62,69	65,83	69,12	72,57	76,2	76,2
3	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Persen	6,3	7	8	9	10	11	11
4	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Alat Bantu	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Lembaga/Gampong Yang Memperoleh Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kampung/ Lembaga	82	82	82	82	82	82	82



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
3.2.1	Tenaga Kerja								
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	1,74	3,48	5,22	6,09	7,83	8,7	8,7
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	1,09	2,18	3,26	4,35	5,44	6,53	6,53
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	10,88	15,23	39,16	56,57	69,63	84,64	84,64
4	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,75	93,57	94,06	94,49	94,91	95,38	95,38
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	63,56	68,56	73,56	78,56	83,56	90,56	90,56
6	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	1,74	3,48	5,22	6,09	7,83	8,7	8,7
3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	Persen	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	Persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	22,28	24,83	25,76	26,39	27,14	28,36	28,36



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	41,49	42,18	43,76	45,2	46,91	48,62	48,62
8	Tingkat Ketersediaan Data Gender Dan Anak	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Kecamatan Menuju Layak Anak	kecamatan	5	5	5	5	5	5	5
3.2.3	Pangan								
1	Ketersediaan Pangan Utama	persen	14	20	26	32	38	42	42
2	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya	Ton/Ha	3.85	3,88	3,9	3,92	3,94	3,96	3,96
3	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	persen	64	70	75	75	80	85	85



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.4	Pertanahan								
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	21,78	22,43	23,1	23,79	24,51	25,24	25,24
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Lingkungan Hidup								
1	Persentase sampah yang terkelola	persen	24,96	24,96	46,25	50,5	60,75	82,5	82,5
2	Cakupan penanganan Limbah Rumah Tangga dan instansi	persen	12,2	12,2	15,3	20,5	30,5	40,2	40,2
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,69	62,69	65,82	67,25	69,5	71,25	71,25
4	Tersedianya dokumen RPPLH kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen SLHD kota	Ada/ tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	18,26	18,26	19,18	20,14	21,14	22,2	22,2



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	rasio	0,83	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,95
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	rasio	0,17	0,25	0,38	0,42	0,48	0,55	0,55
3	Ketersediaan Database Kependudukan	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Jumlah Kawasan Potensi Gampong yang dikembangkan	Kawasan	0	1	1	1	1	1	5
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	82	82	82	82	82	82	82
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	75	75	80	80	85	85	85



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Persentase Aparatur Kampung Yang Dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kelompok PKK yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kelompok PKK yang dibina	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Laju Pertumbuhan penduduk	persen	1,89	1,83	1,76	1,68	1,62	1,59	1,59
2	Rata rata Jumlah Anak Per Keluarga	orang	1,52	1,56	1,63	1,8	2	2	2
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR)	/1000	0	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	0,39	0,23	0,19	0	0	0	0
5	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Rata rata Usia Kawin Pertama Wanita	usia	21	21	21	22	22	22	22
7	Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular (IMS)	persen	0	0	0	0	0	0	0
8	Rasio Akseptor KB	Rasio	72	72,68	73,34	74,12	74,86	75,5	75,5
9	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	persen	72	72,68	73,34	74,12	74,86	75,5	75,5
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	14	14,35	14,89	15,12	15,46	15,8	15,8
11	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	persen	55,6	56	57	58	59	60	60
3.2.9	Perhubungan								
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	44.862	44.000	45.000	46.500	48.600	51.000	51.000
2	Rasio Ijin Trayek	Rasio	0	0	0	100	125	200	200
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	476	482	589	642	670	800	800



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3	3	3
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	25	25	28	30	40	50	50
6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	persen	90	92	95	97	100	100	100
7	Pemasangan Rambu	persen	20	34	60	88	88	90	90
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,00025	0,00031	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042
9	Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Org/Kg	58.943	87.654	176.549	180.932	255.720	257.720	257.720
10	Jumlah Orang/ Barang Melalui Terminal Tahunan	Org/Kg	44.862	44.000	45.000	46.500	48.600	51.000	51.000
3.2.10	Komunikasi dan Informatika								
1	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	persen	70	72	75	77	80	85	85
2	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang	100	101	106	110	115	120	120
3	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	berita	150	200	220	240	260	300	300



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1	Persentase UMKM Aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan UMKM Naik Kelas	UMKM	0	0	100	200	300	400	500
3	Persentase Koperasi Aktif	persen	61	61	61	70	75	80	80
3.2.12	Penanaman Modal								
1	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	Persen	74,86	73,23	80	85	90	100	100
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	90,53	95,06	99,81	104,8	110,04	115,54	525,25
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	28	30	33	36	39	42	180
3.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	persen	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44
2	Persentase Wirausaha Muda	persen	10	10	10	10	10	15	15
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	persen	15	20	25	30	35	40	40



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Jumlah Atlet Berprestasi	Atlet	5	15	30	45	60	75	75
5	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	3	5	9	12	15	18	18
6	Rasio Jumlah Lapangan Olahraga Terhadap Jumlah Penduduk	/1.000 Penduduk	1,54	1,54	1,57	1,59	1,61	1,63	1,63
3.2.14	Statistik								
1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kota Subulussalam Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.16	Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Festival	2	2	3	3	3	4	4
2	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Buah	1	1	2	2	3	3	3
3	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Buah	19	19	20	20	20	21	21
4	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi	Buah	1	2	3	3	4	4	4
3.2.17	Perpustakaan								



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	7.264	9.443	12.276	15.959	20.747	26.971	26.971
2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	eksemplar	21.380	21.380	25.656	30.787	36.945	44.334	44.334
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	/1.000 Penduduk	2	2	4	5	6	7	7
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	eksemplar	13.555	13.555	16.266	19.519	23.423	28.108	28.108
5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Orang	4	4	6	8	10	12	12
3.2.18	Kearsipan								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	0	3	5	8	12	12
3.3	Layanan Urusan Pilihan								
3.3.1	Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	186,9	188,5	190	192	195	200	200
2	Konsumsi Ikan	persen	11,87	13,69	15,83	17,62	19,24	20,69	20,69
3	Persentase Ketersediaan Data/Informasi Perikanan	persen	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	94,44	94,44



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.2	Pariwisata								
1	PAD Pariwisata	persen	0	10	30	40	50	60	60
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	persen	10	15	20	25	40	50	60
3	Kunjungan Wisata	Wisman	45.026	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
3.3.3	Pertanian								
10	Jumlah wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) yang mendapat pembinaan	WKPP	5	5	5	5	5	5	5
14	Persentase hewan ternak terserang penyakit	persen	11,278	0	2,82	2,82	2,82	2,82	0
15	Persentase hewan ternak terserang bakteri	persen	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase hewan ternak terserang Parasit	persen	0	0	0	0	0	0	0
17	Persentase hewan ternak terserang Virus	persen	0	0	0	0	0	0	0
18	Produksi Daging Ruminansia	Ton	22,8	23,5	24,3	25,1	25,9	26,5	26,5
19	Produksi Daging Non Ruminansia	Ton	32,68	33,5	34,3	35,1	35,9	36,5	36,5
21	Tingkat penerapan teknologi untuk peningkatan produksi hasil Peternakan	persen	58,14	59,5	61	63	64	65	65



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	persen	142,31	145,64	148,85	151,95	154,93	154,93	154,93
2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	rasio	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07
3.3.5	Perdagangan								
1	Tingkat Pengawasan Terhadap Perlindungan Konsumen	persen	82	84	86	88	90	92	92
2	Jumlah Kawasan Perdagangan Yang Memiliki Sarana Dan Prasarana Yang Baik	pasar	10	12	12	13	13	14	14
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	persen	3,1	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5
3.3.6	Perindustrian								
1	Cakupan Bina Kelompok Industri Berbasis Teknologi	persen	0	0	2	5	8	11	11
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,12
3	Jumlah Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	sentra industri	0	0	1	1	2	2	2
3.3.7	Transmigrasi								
1	Persentase Transmigrasi Swakarsa	persen	0	0	0	0	0	0	0



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4	PENUNJANG URUSAN								
3.4.1	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam	persen	3,05	3,10	3,12	3,45	3,86	4,20	4,20
3	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual	dokumen	10	13	15	10	25	30	30
4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Angka	80,00	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
3.4.2	SEKRETARIAT DPRD								
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRK	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Fungsi anggaran dalam dokumen RPJMK maupun dokumen RPKP	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Persentase Qanun Yang Disahkan	Persen	74	75	75	80	85	90	90



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.3	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	persen	73	74	75	76	77	78	78
2	Persentase Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien Dan Bebas KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi	persen	73	74	75	76	77	78	78
3	Jumlah Temuan BPK	kasus	211	180	120	90	60	30	0
4	Jumlah Auditor Yang Dilatih	orang	17	19	21	21	21	21	21
5	Tingkat Penanganan Pengaduan Oleh Masyarakat	persen	48	55	60	60	70	75	85
3.4.4	Perencanaan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/ tidak	tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Capaian kinerja Program RKPK	persen	0	0	68,00	70,00	73,00	75,00	75,00



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	persen	0	0	87,68	91,26	95,88	98,17	98,17
6	Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Penganggaran	persen	0	0	75,00	77,00	80,00	80,00	80,00
7	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dengan Pelaksanaan Pembangunan	persen	96,83	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Keistimewaan, Kependudukan Dan SDM Dengan Pelaksanaan Pembangunan	persen	97,52	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Sarpras Dengan Pelaksanaan Pembangunan	persen	96,14	100	100	100	100	100	100
10	Ketersediaan Masterplan Kawasan Rawan Bencana	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.4.5	Keuangan								
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP/TW /TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Penyerapan APBK	persen	0	0	96,30	97,80	98,40	99,10	99,10
3	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	persen	0	0	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Penetapan APBK	Tepat waktu /Tidak Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	persen	2,08	0	2,15	2,34	2,52	2,86	2,86
6	Jumlah SKPK yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan baik	SKPK	43	43	43	43	43	43	43
7	Persentase Aset daerah dalam kondisi baik dan tidak bermasalah	persen	98,25	100	100	100	100	100	100
3.4.6	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan								
1	Persentase data PNS Pemerintah Kota Subulussalam Terupdate Dalam Database	Persen	0	0	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2	Persentase Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Eselon	Persen	0	0	100,00	100,00	4,33	5,42	5,42
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada instansi Pemerintah yang di lelang	Jabatan	0	6	6	6	7	7	32
3.4.7	Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.	Persen	93,62	94	95	96	97	98	98
2	Presentase Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Digunakan Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	0	0	0	75,00	80,00	85,00	85,00



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.8	Kecamatan								
1	Persentase Kampung Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Baik Dan Tepat Waktu	persen	94,3	95	96	97	98	100	100
3.5	Keistimewaan dan Kekhususan Aceh								
3.5.1	Pendidikan Islam								
1	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	persen	66	67	70	75	80	85	85
2	Persentase Dayah Yang Menerapkan Standar Manajemen Dayah	persen	65	68	73	78	83	88	88
3	Jumlah sarana dan prasarana Dayah/BP Yang Dibantu Pemeritah	Dayah/BP	60	65	70	75	80	85	85
3.5.2	Keagamaan								
1	Jumlah Sarana Dan Prasarana Ibadah Yang Dibantu Pemeritah	Mesjid/Meunasah	65	68	71	74	77	80	80
2	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Syariat Islam	Indek Pembangunan Syariat	57	59	61	63	65	67	67
3	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah	Rp (Milyar)	2,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7



NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Jumlah Mustahiq Zakat	orang	2.000	1.520	1.520	1.520	1.566	1.613	1.613
4	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syari'at Islam Yang Diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persent Jumlah Rata-rata Mesjid yang Melaksanakan Jamaah lima Waktu	Persent	57	63	68	70	73	76	76
3.5.3	Kebudayaan								
1	Jumlah Adat Dan Budaya Daerah Yang Dilestarikan	Jumlah	9	1	2	2	2	2	18



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM



BAB XI

P E N U T U P

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Subulussalam Tahun 2019–2024 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum, isu-isu strategis, Visi dan Misi pembangunan. Di samping itu, RPJMK Subulussalam Tahun 2019-2024 juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJM ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Keberhasilan Pemerintahan Kota Subulussalam periode 2019-2024 dalam mewujudkan Visi **“KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI”** perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam khususnya dan Aceh pada umumnya.

9.1 Pedoman Transisi

Pada masa berakhirnya periode Pemerintahan Kota Subulussalam (2019-2024) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya, maka RPJMK ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya

dokumen RPJM Kota Subulussalam periode berikutnya. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusun dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.


9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam agar melaksanakan program-program dalam RPJMK Tahun 2019-2024 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam masing-masing, yang berpedoman pada RPJMK Tahun 2019-2024, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Bagian (Renja-SKPK) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Dokumen RPJMK Tahun 2019-2024 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) mulai tahun 2020 hingga 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMK Tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMK Tahun 2019-2024 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK).



5. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJM Kampong, maka Bappeda Kota Subulussalam berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintahan Kampong.

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN